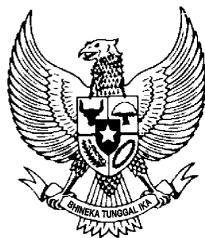




**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(R P J M D)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Pemerintah Daerah.....

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah.
13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

18. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP RPJM DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, lintas PD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
 - b. Bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
 - c. Pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

PD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra PD.

BAB III SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Lampiran Perda ini, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS.....

BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidaksesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi

- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
- a. Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat.
 - b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat
- (2) Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
- (3) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya.
- (4) RPJMD Kabupaten/Kota wajib mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Januari 2017



**PI SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

SYAHRIN DAULAY

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :
(1/10/2017).**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan, yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

RPJM Daerah Provinsi digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021; bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2016-2021 adalah untuk:

- a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah;
- c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

Perda tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 terdiri dari 6 BAB dan 10 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR 88**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TANGGAL 18 JANUARI 2017**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(R P J M D)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016-2021**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
1.3. Hubungan Antar-Dokumen	I – 7
1.4. Sistematika Penulisan	I – 8
1.5. Maksud dan Tujuan	I – 9
BAB II	
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II – 3
2.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 – 2015	II – 59
BAB III	
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1 Kinerja Masa Lalu	III – 3
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III – 3
3.1.2. Neraca Daerah	III - 7
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III – 16
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 15
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III - 15
3.3 Kerangka Pendanaan	III – 17
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III – 17
3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu	III – 20
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III - 26
BAB IV	
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV – 1
4.2 Isu Strategis	IV – 34
BAB V	
ARAHAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1 Visi	V – 1
5.2 Misi	V – 5
5.3 Tujuan dan Sasaran	V – 16



BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
6.1	Strategi	VI – 1
6.2	Arah Kebijakan	VI – 11
6.3	Pembangunan Kewilayahan	VI – 24
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
7.1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021	VII – 1
7.2	Program Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	VII - 17
7.2.1	Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah	VII - 17
7.2.2	Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah	VII - 36
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	
8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah	VIII-2
8.2	Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah	VIII-28
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	
10.1	Pedoman Transisi	X-1
10.2	Kaidah Pelaksanaan	X-2



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I – 7
Gambar 2.1	Peta kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Per Kabupaten Kota	II – 10
Gambar 2.2	Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Jiwa)	II - 12
Gambar 2.3	Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (%)	II – 13
Gambar 2.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016*	II – 16
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2016*	II – 17
Gambar 2.6	Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II – 19
Gambar 2.7	Laju Inflasi Tahunan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2016*	II – 21
Gambar 2.8	PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2015	II – 22
Gambar 2.9	Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II – 23
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II – 24
Gambar 2.11	Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015 (Tahun)	II – 26
Gambar 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016*	II – 30
Gambar 2.13	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2016* (%)	II – 31
Gambar 2.14	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2014	II – 33
Gambar 2.15	IPG dan IDG Provinsi Kalimantan Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2014	II – 39
Gambar 2.16	Jumlah Kapal yang melalui Pelabuhan Laut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II – 39
Gambar 2.17	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2009-2015	II – 41
Gambar 2.18	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2016	II – 43
Gambar 2.19	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II – 45
Gambar 2.20	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2011-2015 (Rp.)	II – 53



Gambar 2.21	Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015	II – 57
Gambar 2.22	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015	II – 58
Gambar 2.23	Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II – 59
Gambar 4.1	Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	IV – 3
Gambar 4.2	Share Ekonomi Kalimantan Tengah terhadap Ekonomi Regional Kalimantan tahun 2016*)	IV – 4
Gambar 4.3	Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan Triwulan II- 2016	IV – 5
Gambar 4.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016	IV – 5
Gambar 4.5	Inflasi Tahunan Kalteng dan Nasional Tahun 2010-2016	IV – 7
Gambar 4.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (%)	IV – 9
Gambar 4.7	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016 (%)	IV - 10
Gambar 4.8	Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015 (Tahun)	IV – 23
Gambar 4.9	Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Pulau Kalimantan	IV - 59
Gambar 4.10	Peta Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	IV – 80
Gambar 4.11	Peta Perubahan Tutupan Lahan Prov. Kalimantan Tengah Tahun 1990-2015	IV – 81
Gambar 4.12	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2016	IV – 83
Gambar 5.1	Hubungan Antar-Element Visi	V – 2
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahunan, RKPD Tahun 2016-2021	VI - 12
Gambar 6.2	Pembagian Wilayah ke dalam 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 27
Gambar 6.3	Pengembangan Potensi pada Zona 1 (Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur)	VI – 28
Gambar 6.4	Pengembangan Potensi pada Zona 2 (Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas)	VI – 29
Gambar 6.5	Pengembangan Potensi pada Zona 3 (Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur)	VI – 30
Gambar 6.6	Pengembangan Potensi Komoditas Keunggulan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 46



Gambar 6.7	Prioritas Pengembangan Infrastruktur Jalan di Provinsi Kalimantan Tengah	VI - 50
Gambar 6.8	Prioritas Pengembangan Pelabuhan Laut di Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 51
Gambar 6.9	Prioritas Pengembangan Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 52
Gambar 6.10	Prioritas Rencana Jalur Kereta Api di Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 53
Gambar 6.11	Prioritas Pengembangan Sistem Jaringan Energi di Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 54
Gambar 6.12	Prioritas Pengembangan Kawasan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 55



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Integrasi KLHS terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	I-2
Tabel 2.1	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II - 4
Tabel 2.2	Nama-nama sungai menurut panjang, kedalaman dan lebar di Provinsi Kalimantan Tengah	II - 6
Tabel 2.3	Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015	II - 7
Tabel 2.4	Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015	II - 8
Tabel 2.5	Potensi Ancaman Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	II - 10
Tabel 2.6	Statistik Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015	II - 11
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II - 12
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II - 14
Tabel 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2014-2016*)	II - 17
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015	II - 18
Tabel 2.11	Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013-2015 (Milyar Rupiah)	II - 19
Tabel 2.12	Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2016 *)	II - 21
Tabel 2.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2011-2015	II - 25
Tabel 2.14	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015	II - 25
Tabel 2.15	Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015 (Tahun)	II - 27
Tabel 2.16	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	II - 28
Tabel 2.17	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	II - 28
Tabel 2.18	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	II - 28
Tabel 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (%)	II - 30



Tabel 2.20	Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2014 (Kondisi September)	II - 32
Tabel 2.21	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2014	II - 32
Tabel 2.22	Statistik Seni, Budaya, dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	II - 34
Tabel 2.23	Banyaknya sekolah, murid dan guru menurut jenis dan status sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015/2016	II - 36
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II - 36
Tabel 2.25	Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II - 37
Tabel 2.26	Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2012-2015	II - 38
Tabel 2.27	Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015	II - 41
Tabel 2.28	Jumlah Penerbangan dan Penumpang yang melalui Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2009-2015	II - 44
Tabel 2.29	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015	II - 46
Tabel 2.30	Perkembangan Jumlah Kantor Bank Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2011-2015	II - 47
Tabel 2.31	Posisi Penghimpunan Dana Perbankan menurut Jenisnya (Juta Rupiah) Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	II - 48
Tabel 2.32	Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Subsektor Perkebunan Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II - 48
Tabel 2.33	Produksi Budidaya Perikanan (Ton) Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015	II - 48
Tabel 2.34	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II - 49
Tabel 2.35	Populasi dan Produksi Hasil Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II - 49
Tabel 2.36	Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2011-2015	II - 50
Tabel 2.37	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2011-2015	II - 51
Tabel 2.38	Jumlah Izin Usaha Pertambangan dan Luas Wilayah (Eksplorasi dan Produksi) Menurut Jenis Pertambangan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II - 52
Tabel 2.39	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2012-2015 (Rp)	II - 53



Tabel 2.40	Nilai Tukar Petani per Subsektor Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, Desember 2015	II – 54
Tabel 2.41	Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan Tengah	II – 55
Tabel 2.42	Target dan Realisasi Kinerja Daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2016	II – 56
Tabel 2.43	Pencapaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	II – 64
Tabel 2.44	Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015	II – 70
Tabel 3.1	Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)	III – 3
Tabel 3.2	Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (Juta rupiah)	III – 4
Tabel 3.3	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (dalam Jutaan rupiah)	III – 5
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (dalam Juta rupiah)	III – 6
Tabel 3.5	Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)	III – 7
Tabel 3.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2011-2015 (dalam Juta Rupiah)	III – 10
Tabel 3.7	Rasio Lancar Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III – 11
Tabel 3.8	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III – 12
Tabel 3.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III – 12
Tabel 3.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III – 13
Tabel 3.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III – 14
Tabel 3.12	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015	III – 15
Tabel 3.13	SILPA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III – 16
Tabel 3.14	Persentase SILPA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III – 16
Tabel 3.15	Rasio Kemandirian Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	III – 17
Tabel 3.16	Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021(dalam Rupiah)	III – 18



Tabel 3.17	Proyeksi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021(dalam Rupiah)	III – 21
Tabel 3.18	Proyeksi Kapasitas Riil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021(dalam Rupiah)	III – 24
Tabel 3.19	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2016-2021(dalam Rupiah)	III – 25
Tabel 3.20	Alokasi Prioritas III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2016-2021	III – 26
Tabel 3.21	Proyeksi Kerangka Pendanaan Pada APBD Provinsi Kalteng Tahun 2016-2021 (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah)	III - 27
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Regional Kalimantan dan Nasional, Tahun 2012-2016	IV - 6
Tabel 4.2	Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2015 (%)	IV - 8
Tabel 4.3	Upah Minimum Provinsi Regional Kalimantan, Tahun 2014-2015	IV – 10
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan “Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah”	IV – 11
Tabel 4.5	Gini Rasio Regional Kalimantan dan Nasional, Tahun 2011-2016	IV – 13
Tabel 4.6	Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015	IV – 14
Tabel 4.7	Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Persen)	IV – 15
Tabel 4.8	Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan Tengah	IV - 15
Tabel 4.9	Rumusan Permasalahan “Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai”	IV - 16
Tabel 4.10	Penindakan Kasus Korupsi Regional Kalimantan, Tahun 2013-2014	IV - 18
Tabel 4.11	Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”	IV - 19
Tabel 4.12	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional, Tahun 2011-2015	IV - 21
Tabel 4.13	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2015	IV – 21
Tabel 4.14	Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	IV - 22
Tabel 4.15	Perbandingan Angka Harapan Hidup Regional Kalimantan, Tahun 2011-2015	IV - 24
Tabel 4.16	Tingkat Penghunian Kamar Hotel (Persen) Provinsi Regional Kalimantan, Tahun 2011-2014	IV - 24
Tabel 4.17	Rumusan Permasalahan “Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia”	IV - 25
Tabel 4.18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Regional Kalimantan, Tahun 2011-2014	IV - 26
Tabel 4.19	Kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	IV - 30



Tabel 4.20	Rumusan Permasalahan “Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup”	IV - 31
Tabel 4.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	IV - 32
Tabel 4.22	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2014	IV - 32
Tabel 4.23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	IV - 33
Tabel 4.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015	IV - 33
Tabel 4.25	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019	IV - 45
Tabel 4.26	Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019	IV - 45
Tabel 4.27	Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019	IV - 45
Tabel 4.28	Lokasi Prioritas Kota Sedang Yang Berfokus Pada Upaya Pemerataan Wilayah Di Kalimantan	IV - 54
Tabel 4.29	Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan Di Kalimantan	IV - 54
Tabel 4.30	Profil Kerawanan Dan Risiko PKN, PKW Dan PKSN Di Wilayah Pulau Kalimantan	IV - 56
Tabel 4.31	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Di Provinsi Kalimantan Tengah Sesuai RPJMN 2015-2019	IV - 57
Tabel 5.1	Keterkaitan/Konsistensi Muatan RPJMD Dengan RPJPD Dan Prinsip Manfaat Pembangunan	V – 5
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	V – 25
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalteng (Tahun 2016-2021)	VI - 2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalteng Tahun 2016-2021	VI – 13
Tabel 6.3	Strategi, Arah dan Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 17
Tabel 6.4	Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah	VI – 25
Tabel 6.5	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis komoditi sapi pedaging kota Palangka Raya	VI - 31
Tabel 6.6	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Barat	VI – 32
Tabel 6.7	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Padi Sawah Kabupaten Kotawaringin Timur	VI – 33
Tabel 6.8	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Padi Sawah Kabupaten Kapuas	VI – 35



Tabel 6.9	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Padi Sawah Kabupaten Barito Selatan	VI – 36
Tabel 6.10	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Karet Kabupaten Barito Utara	VI – 37
Tabel 6.10	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Sukamara	VI – 38
Tabel 6.11	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Lamandau	VI – 39
Tabel 6.12	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Seruyan	VI – 40
Tabel 6.13	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Katingan	VI – 42
Tabel 6.14	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Padi Sawah Kabupaten Pulang Pisau	VI – 43
Tabel 6.15	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Karet Kabupaten Gunung Mas	VI – 44
Tabel 6.16	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Perdagangan Karet Kabupaten Barito Timur	VI – 45
Tabel 6.17	Peluang-tantangan serta titik kekuatan-titik kritis Komoditi Karet Kabupaten Murung Raya	VI – 45
Tabel 6.18	Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	VI – 47
Tabel 7.1	Arah Kebijakan dari strategi pertama: Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	VII – 2
Tabel 7.2	Kebijakan dari strategi kedua: Pemerataan infrastruktur wilayah	VII – 3
Tabel 7.3	Kebijakan dari strategi ketiga: Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	VII – 4
Tabel 7.4	Kebijakan dari strategi keempat: Stabilitas Ekonomi Daerah	VII - 6
Tabel 7.5	Kebijakan dari strategi kelima: Peningkatan pendapatan masyarakat	VII - 9
Tabel 7.6	Kebijakan dari strategi ketujuh: Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	VII – 11
Tabel 7.7	Kebijakan dari strategi ketujuh: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	VII – 13
Tabel 7.8	Kebijakan dari Strategi Kedelapan: Pengelolaan industri pariwisata	VII – 15
Tabel 7.9	Kebijakan dari strategi kesembilan : Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	VII – 15
Tabel 7.10	Kebijakan dari strategi kesepuluh: Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	VII – 17
Tabel 7.11	Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah	VII – 18



Tabel 7.12	Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam Rangka Pencapaian Visi, Misi dan Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah	VII - 36
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Untuk Mencapai Visi dan Misi	VIII - 3
Tabel 8.2	Indikasi Rencana Program Prioritas beserta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 untuk Pencapaian Visi, Misi dan Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	VIII - 28
Tabel 9.1	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	IX - 2



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap Daerah berkewajiban untuk **menyusun rencana pembangunan** sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). **RPJMD** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. RPJMD juga memuat kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** yang disusun dengan **berpedoman pada RPJPD dan RPJMN**. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya harus dipedomani oleh kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk periode berkenaan.

Untuk menghasilkan kebijakan yang selaras dengan aspek tata ruang, penyusunan RPJMD telah diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, maka perumusan RPJMD telah terintegrasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**. Dengan telah diintegrasikannya instrumen KLHS dalam perumusan kebijakan RPJMD ini diharapkan kebijakan strategis dalam jangka menengah benar-benar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama lebih terjaminnya keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, integrasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD terlihat terlihat pada tabel berikut.



Tabel 1.1
Integrasi KLHS terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

BAB	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
BAB I	<ul style="list-style-type: none">• Penajaman latar belakang terkait KLHS;
BAB IV	<ul style="list-style-type: none">• Menyesuaikan isu strategis KLHS terhadap dokumen;
BAB V	<ul style="list-style-type: none">• Penjabaran singkat mengenai KLHS dalam visi kepala daerah;
BAB VI	<ul style="list-style-type: none">• Menyesuaikan arah kebijakan dokumen RPJMD dengan arah kebijakan di dokumen KLHS.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dilakukan secara simultan bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), baik berupa rancangan teknokratik sebelum pelantikan kepala daerah maupun sesudahnya. Setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 25 Mei 2016 di Istana Negara, Jakarta, telah diterjemahkan visi dan misi serta program gubernur dan wakil gubernur ke dalam RPJMD pada saat pemilihan kepala daerah, melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program PD dan lintas PD dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan indikatif.

2. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan melalui verifikasi dan integrasi seluruh Renstra PD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

3. Pelaksanaan musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen para



pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.

4. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala PD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

5. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 memiliki beberapa landasan hukum berbentuk Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat



- Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



b. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Presiden

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,



- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115).

c. Peraturan Daerah

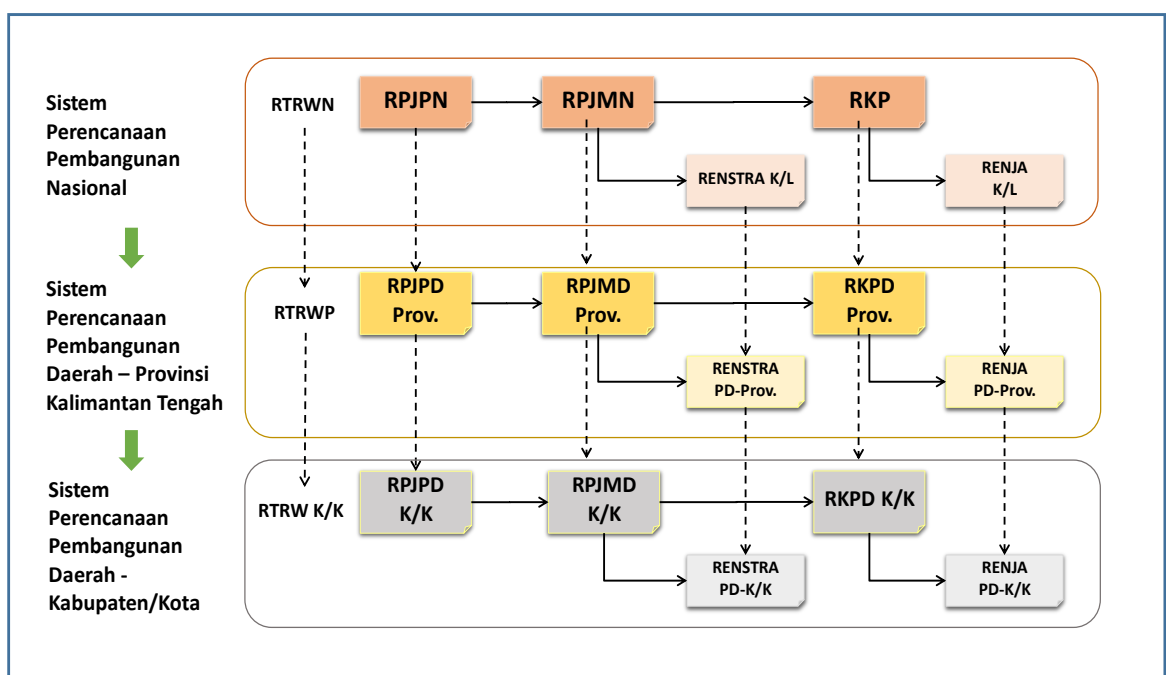
Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPJMD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan maupun penganggaran terutama RPJPD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

1. **RPJMD** Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 pada RPJMD tahap ketiga.
2. **RPJMD dan Renstra PD** merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.
3. **RKPD** merupakan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan RPJMD dari tahun ke tahun. Sasaran dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD.



Program Pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. PD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD.

4. Penyusunan RPJMD didasarkan pada **RTRWP** Kalimantan Tengah. RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dengan memerhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
5. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada **RPJMN** dengan memerhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah



BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.2. Neraca Daerah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan ANggaran

3.2.2. Analisis Pembiayaan

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

10.2. Kaidah Pelaksanaan



1.5 Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 disusun dengan **maksud** untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan.

Adapun **tujuan** penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan;
5. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang.
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021.
7. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan beraneka ragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan-tropis (124.118,49 km²). Hutan menyediakan berbagai jenis pohon antara lain terkenal dengan kayu besi (*eusideroxylon zwageri*), lanan (*shorea leprosula*), meranti (*shorea spp.*), ramin (*gonystyllus bancanus sp.*), dan agathis. Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, merupakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang dibentuk sebagai respon terhadap suara yang menghendaki dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang muncul dari kalangan Rakyat Dayak dalam 3 Kabupaten yakni Kabupaten Kapuas, Barito dan Kabupaten Kotawaringin, yang mana pada saat itu ketiga kabupaten tersebut masih merupakan bagian dari Provinsi Administratif Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Keinginan, hasrat dan pernyataan Rakyat Dayak tersebut telah disampaikan dan disalurkan baik melalui organisasi massa (ormas) maupun melalui saluran partai politik (parpol) semenjak tahun 1952, baik berupa pernyataan, mosi, resolusi dan lain-lain dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan atau ormas yang mendukung dan mendesak dengan pokok tuntutan adalah menuntut terbentuknya Provinsi Otonomi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Keputusan pada tanggal 28 Desember 1956 Nomor U.P.34/41/24 antara lain menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1957 membentuk Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin. Sebelumnya, Mendagri dengan Surat Keputusan Nomor Des.52/19/10/50 tanggal 12 Desember 1956 tentang Ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956, mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957.

Untuk pelaksanaan Surat Keputusan Mendagri tersebut, pada tanggal 9 Januari 1957 dilakukan serah terima kekuasaan pemerintah antara Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono dengan para acting / pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di Banjarmasin di hadapan Menteri Dalam Negeri, dan



pada hari itu pula Menteri Dalam Negeri meresmikan Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur R.T.A. Milono selanjutnya ditugaskan pada Kementerian Dalam Negeri, kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara Tjilik Riwut, Bupati Kepala Daerah Kotawaringin diangkat/naik pangkat menjadi Residen pada Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan membantu Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan George Obos, Bupati Kepala Daerah Kapuas kemudian ditempatkan pada kantor Gubernur Kalimantan di Banjarmasin, dan diangkat/ diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah di Banjarmasin, dan sebagai Sekretaris Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuk Drs.F.A.D. Patianom.

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1957 diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957, dan Tambahan Lembaran Negara No. 1284 Tahun 1957). Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622), sehingga berdasarkan hal tersebut maka sampai saat ini, tanggal 23 Mei di peringati sebagai HUT Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejak berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, tahapan demi tahapan pelaksanaan pembangunan daerah telah direncanakan, dicanangkan, dan direalisasikan hingga periode saat ini sebagai upaya pencapaian target pembangunan daerah (khususnya) maupun pembangunan nasional pada umumnya. Namun, setiap pelaksanaan pembangunan daerah selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan, hambatan, maupun tantangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan meminimalisir setiap



efek negatif dari permasalahan yang timbul, diperlukan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang matang.

Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk lebih meningkatkan hasil pembangunan, evaluasi kebijakan maupun capaian kinerja pemerintah daerah harus dilaksanakan seoptimal mungkin sebagai syarat mutlak penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan yang telah disusun utamanya pada pelaksanaan perencanaan pembangunan ke depannya. Evaluasi pembangunan daerah harus memiliki integrasi antar dokumen perencanaan sebagai poin penting dalam menyempurnakan setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode ke depannya.

Pada perkembangannya, perlu dilakukan pula analisis singkat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, hingga permasalahan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja aparatur kelembagaan pemerintahan yang akan datang sebagai masukan dalam merumuskan setiap detail sasaran hingga program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan dimana dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki karakteristik Pulau Kalimantan pada umumnya, yakni wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut yang luas. Selain itu juga masih banyak sungai-sungai yang melewati berbagai wilayah di daratan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sungai Barito sebagai sungai yang terpanjang (mencapai 900 km).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibukota provinsi di Kota Palangka Raya yang berada di tengah wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibukota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat. Simultannya pembangunan daerah yang terjadi di setiap kabupaten/kota ini dimungkinkan karena



letak pusat pemerintahan yang strategis sehingga membuka peluang tumbuhnya wilayah-wilayah yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, geologi dan tanah, hidrologi, dan klimatologi.

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas-batas wilayah dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan yakni sebagai berikut:

- Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Batas selatan : Laut Jawa; serta
- Batas barat : Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564,5 km². Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kotawaringin Barat	10.759	6	94
2	Kotawaringin Timur	16.796	17	185
3	Kapuas	14.999	17	231
4	Barito Selatan	8.830	6	93
5	Barito Utara	8.300	9	103
6	Katingan	17.500	13	161
7	Seruyan	16.404	10	100
8	Sukamara	3.827	5	32
9	Lamandau	6.414	8	88
10	Gunung Mas	10.805	12	127
11	Pulang Pisau	8.997	8	99
12	Murung Raya	23.700	10	125
13	Barito Timur	3.834	10	104
14	Kota Palangka Raya	2.399,5	5	30
Kalimantan Tengah		153.564,5	138	1.434

Sumber: Permendagri No 56 tahun 2015 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan



Kabupaten/kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Murung Raya yang memiliki wilayah seluas 23.700 km² atau 15,43 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kota Palangka Raya yang hanya memiliki luas 1,56 persen dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam dan bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.

3. Geologi dan Tanah

Dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawanan fisik berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Terkait dengan potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas IV, V, dan III dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

Terkait dengan sumber daya mineral, bumi Kalimantan Tengah mengandung:

- 1) Mineral logam, berupa: emas primer, emas sekunder dan bijih besi. Ditinjau dari kelayakan ekonomisnya, mineral logam yang layak ditambang adalah emas. Selanjutnya, mengingat adanya peningkatan kebutuhan terhadap baja di pasar dunia, maka nilai kelayakan ekonomis cadangan bijih besi di Kalimantan Tengah juga mengalami kenaikan.
- 2) Mineral non logam, berupa: pasir kuarsa, bentonit, kaolin, mika dan batu gamping. Mineral logam yang memiliki prospek dan cukup luas penyebarannya adalah pasir kuarsa dan kaolin.



- 3) Batu permata, berupa intan dan kecubung. Batu permata jenis intan terdapat di aluvium pada aliran sungai Barito yang terletak di Puruk Cahu, sedangkan jenis kecubung banyak dijumpai di bagian utara Pangkalan Bun.
- 4) Mineral energi, berupa batubara. Cadangan batubara terdapat di sektor timur laut, menerus ke selatan dan ke barat.

4. Hidrologi

Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar berdasarkan panjang dan lebarnya yaitu sungai Barito, Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut (khususnya pada musim kemarau) relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

Tabel 2.2
Nama-nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman dan lebar di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat dilayari (km)	Kedalaman (m)	Lebar (m)
1.	Sungai Jelai	200	150	8	150
2.	Sungai Arut	250	190	4	100
3.	Sungai Lamandau	300	250	6	150
4.	Sungai Kumai	175	100	6-9	250
5.	Sungai Seruyan	350	300	5	250
6.	Sungai Mentaya	400	270	6	350
7.	Sungai Katingan	650	520	3-6	250
8.	Sungai Sebangau	200	150	5	100
9.	Sungai Kahayan	600	500	7	450
10.	Sungai Kapuas	600	420	6	450
11.	Sungai Barito	950	700	6-14	350-500

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016

5. Klimatologi

Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu seperti yang tertera pada tabel 2.2. Berdasarkan pengamatan klimatologi, suhu udara maksimum mencapai 35,90 derajat celsius yang berada di Pangkalan Bun, namun rata-rata suhu udara tertinggi berada di Kota Palangka Raya



dan Muara Teweh yakni mencapai 27,37. Selain itu, kelembaban udara dan persentase penyinaran matahari tertinggi berada di Pangkalan Bun, namun curah hujan bulanan tertinggi berada di Palangka Raya.

Tabel 2.3
Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Indikator	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka Raya
1	Suhu Udara					
	- Maksimum	35,90	35,70	35,60	35,20	35,80
	- Minimum	19,80	18,90	20,60	19,90	19,60
	- Rata-rata	26,62	26,92	26,99	27,29	27,37
2	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	87,85	82,69	85,51	83,13	82,09
3	Tekanan Udara (mbs)	1.010,93	1.011,90	1.013,94	1.013,43	1.014,13
4	Kecepatan Angin (knot)	2,56	2,32	3,06	4,36	4,41
5	Curah Hujan Bulanan (m3)	2.302,10	2.333,80	2.349,00	2.492,90	2.749,70
6	Penyinaran Matahari (%)	59,14	50,29	48,12	52,00	54,45

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan pola lahan areal hutan dan pola penggunaan lahan areal non hutan

a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah secara alamiah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori bio-region hutan. Selain itu, pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga masih menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, wilayah hutan mendominasi di semua kabupaten/kota (termasuk di wilayah Kota Palangka Raya) kecuali di Kabupaten Barito Timur dominasi wilayah hutan kurang dominan.

b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar dan areal pemukiman berkembang sepanjang sungai-sungai besar yang melintasi daratan. Meskipun demikian, areal-areal perkebunan besar memulai pola perkembangan berbeda dimana cenderung tidak mengikuti sungai besar karena disesuaikan dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti aksesibilitas wilayah hingga tipologi jenis tanah.

7. Kawasan Rawan Bencana

Secara umum Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari potensi-potensi bencana alam, baik yang dipicu oleh faktor geografis dan kondisi wilayahnya, maupun



yang disebabkan oleh ulah manusia. Secara lengkap Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana			
	Kebakaran hutan dan lahan	Kebakaran gedung dan pemukiman	Banjir	Total
2013	3	29	22	54
2014	14	10	12	36
2015	56	4	14	74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, secara umum terjadi kenaikan jumlah kejadian untuk tiga jenis bencana yang potensial terjadi di Kalimantan Tengah. Dari 54 kejadian di tahun 2013 naik menjadi 74 kejadian pada tahun 2015 dengan peningkatan yang menonjol terjadi pada bencana kebakaran hutan dan lahan dari 3 menjadi 56 kejadian pada periode tahun 2013-2015. Sebaliknya, telah terjadi penurunan angka kejadian untuk bencana kebakaran gedung dan pemukiman serta bencana banjir.

Bila di lakukan pemetaan terhadap potensi bencana alam, maka daerah-daerah rawan bencana alam di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 adalah sebagai berikut:

a. Kawasan rawan tanah longsor

Mencakup daerah yang membentang dari Barat-Timur wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Utara;

b. Kawasan rawan gelombang pasang

Meliputi kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas;

c. Kawasan rawan banjir

Terpusat pada daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, Sungai Arut, dan Sungai Jelai.

Pada tahun 2015 menurut data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 14 kejadian banjir, yaitu di Kabupaten Murung Raya sebanyak 4 kejadian, Kabupaten Katingan 3 kejadian, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka



Raya masing-masing 2 kejadian, Kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Gunung Mas 1 kejadian.

d. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebaran lahan gambut yang besar dengan luas mencapai 2.743.158 ha, dengan kedalaman 0-2 m seluas 1.157.163 ha dan kedalaman di atas 2 m seluas 1.585.995 ha (hasil analisa Peta Sebaran Lahan Gambut BBDSLPL tahun 2011). Lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan area yang rawan terbakar.

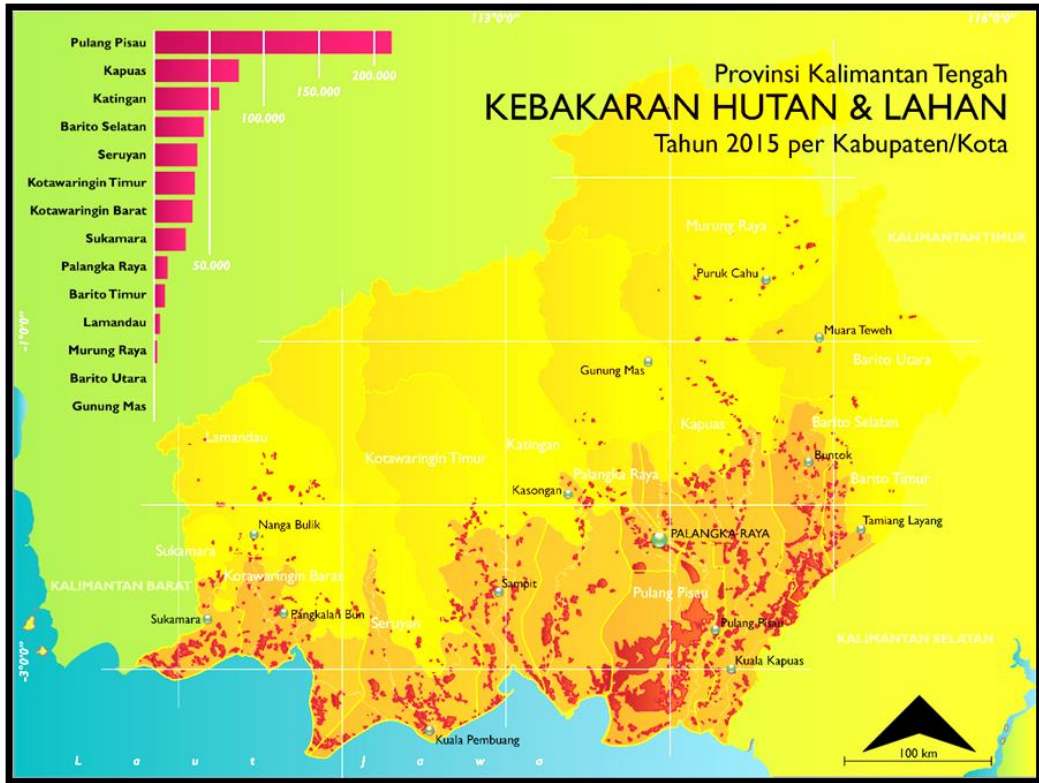
Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, dilaporkan bahwa pada tahun 2015 tercatat bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 56 kali. Bencana yang paling sering terjadi dengan jumlah kejadian terbanyak terdapat di Kota Palangka Raya sebanyak 12 kali dan Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 11 kali.

Terkait musibah kebakaran hutan, baik di Kalimantan Tengah maupun di regional Kalimantan yang terjadi pada tahun 2015 memberikan dampak negatif dalam bidang perekonomian maupun pembangunan daerah secara umum. Hal ini dikarenakan asap yang merupakan hasil ikutan dari proses pembakaran telah menyebar dan cukup pekat sehingga sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan masyarakat. Dengan demikian musibah kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan gambut ini harus diantisipasi dikemudian hari dengan menelaah faktor-faktor penyebab kebakaran apa saja yang mendominasi terjadinya bencana ini.

Pada Gambar 2.1 di bawah ini, terlihat wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan:



Gambar 2.1
Peta kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
per Kabupaten Kota



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID Lestari Kalteng (2016)

Sesuai Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020, potensi ancaman bencana kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana gambar 2.5 berikut.



Tabel 2.5
Potensi Ancaman Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Kajian Resiko Bencana Prov. Kalteng Tahun 2016-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	BANJIR		GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI		KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN		KEKERINGAN		EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT		CUACA EKTRIM		TANAH LONGSOR		GEMPA BUMI		BANJIR BANDANG		KET
		TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	TOTAL (Ha)	KELAS BAHAYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	KOTAWARINGIN BARAT	738.74	TINGGI	3.419	SEDANG	685.85	TINGGI	839.97	SEDANG	647	RENDAH	778.758	SEDANG	27.186	SEDANG	839.97	RENDAH	1.242	TINGGI	
2	KOTAWARINGIN TIMUR	1.209.160	TINGGI	1.587	SEDANG	1.279.752	TINGGI	1.571.936	TINGGI	8.339	TINGGI	1.310.622	SEDANG	104.177	SEDANG	1.571.934	RENDAH	-	-	
3	KAPUAS	1.395.851	TINGGI	854	SEDANG	1.377.533	TINGGI	1.499.900	TINGGI	11.088	RENDAH	1.157.222	SEDANG	53.347	TINGGI	1.499.900	RENDAH	4.461	TINGGI	
4	BARITO SELATAN	551.456	TINGGI	-	-	505.82	TINGGI	641.011	TINGGI	2.982	SEDANG	554.202	SEDANG	9.854	TINGGI	641.011	RENDAH	663	TINGGI	
5	BARITO UTARA	519.52	SEDANG	-	-	830	SEDANG	830	TINGGI	450	RENDAH	407.732	TINGGI	60.633	TINGGI	830	RENDAH	4.538	TINGGI	
6	SUKAMARA	298.802	TINGGI	1.712	SEDANG	226.854	TINGGI	329.154	RENDAH	49	RENDAH	320.642	SEDANG	3.868	SEDANG	329.148	RENDAH	-	-	
7	LAMANDAU	283.078	RENDAH	-	-	555.333	SEDANG	641.4	SEDANG	4.168	RENDAH	334.045	SEDANG	208.085	TINGGI	641.4	RENDAH	6.502	TINGGI	
8	SERUYAN	1.112.574	TINGGI	2.946	SEDANG	1.478.625	TINGGI	1.640.400	TINGGI	662	RENDAH	1.174.240	SEDANG	204.6	TINGGI	1.640.400	RENDAH	8.067	TINGGI	
9	KATINGAN	1.296.379	TINGGI	2.265	SEDANG	1.740.190	TINGGI	1.750.000	TINGGI	2	RENDAH	1.232.261	SEDANG	-	-	1.750.000	RENDAH	8.323	TINGGI	
10	PULANG PISAU	967.931	TINGGI	2.462	SEDANG	796.293	TINGGI	899.7	TINGGI	647	RENDAH	899.7	SEDANG	246.896	TINGGI	899.7	RENDAH	-	-	
11	GUNUNG MAS	415.089	SEDANG	-	-	930.471	SEDANG	1.010.732	TINGGI	8.339	TINGGI	473.021	SEDANG	191.623	TINGGI	1.010.732	RENDAH	9.928	TINGGI	
12	BARITO TIMUR	237.002	SEDANG	-	-	166.238	TINGGI	300.868	SEDANG	11.088	RENDAH	280.632	SEDANG	9.707	SEDANG	300.868	RENDAH	91	TINGGI	
13	MURUNG RAYA	335.676	SEDANG	-	-	2.171.978	SEDANG	2.370.000	TINGGI	2.982	SEDANG	322.555	SEDANG	942.51	TINGGI	2.370.000	RENDAH	44.692	TINGGI	
14	PALANGKA RAYA	256.856	TINGGI	-	-	207.6	TINGGI	239.95	TINGGI	450	RENDAH	239.95	SEDANG	170	SEDANG	239.95	RENDAH	-	-	
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		9.618.114	TINGGI	15.245	SEDANG	12.952.537	TINGGI	14.565.021	TINGGI	28.387	TINGGI	9.485.582	TINGGI	2.062.656	TINGGI	14.565.013	RENDAH	88.507	TINGGI	



8. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting adanya melihat pertumbuhan demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

a. Gambaran Umum Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Pada Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 2,26 persen sehingga menyebabkan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 meningkat menjadi 2.495.030 jiwa yang terdiri atas 1.302.796 laki-laki dan 1.192.234 perempuan (data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016). Berdasarkan data dari Permendagri nomor 56 tahun 2015, penyebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa kabupaten induk. Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya adalah tiga kabupaten dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dengan masing-masing kabupaten dihuni penduduk berjumlah 405.719 jiwa, 403.684 jiwa, dan 249.434 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang minoritas berada di Kabupaten Sukamara dan Lamandau dengan penduduk yang berjumlah 50.651 jiwa dan 70.052 jiwa.

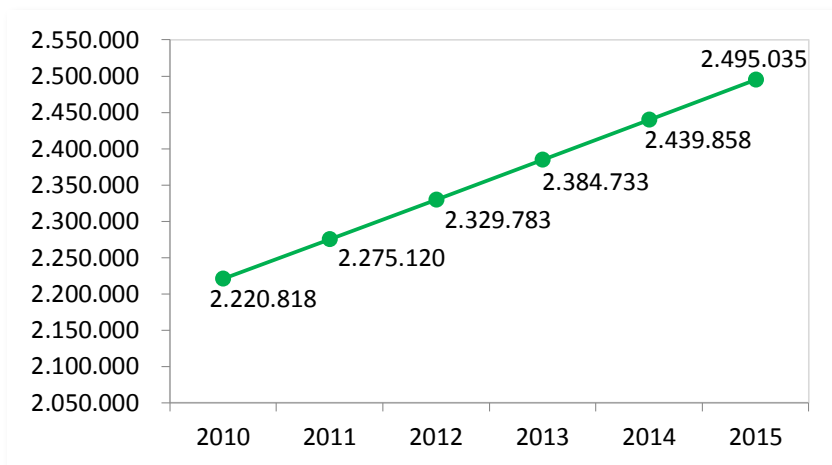
Tabel 2.6
Statistik Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Kotawaringin Barat	241.059	23
2	Kotawaringin Timur	403.684	24
3	Kapuas	405.719	27
4	Barito Selatan	121.455	14
5	Barito Utara	150.227	18
6	Katingan	144.302	8
7	Seruyan	141.344	9
8	Sukamara	50.651	13
9	Lamandau	70.052	11
10	Gunung Mas	136.060	13
11	Pulang Pisau	122.219	14
12	Murung Raya	103.158	5
13	Barito Timur	108.064	28
14	Kota Palangka Raya	249.434	104
Kalimantan Tengah		2.447.428	16

Sumber: Permendagri 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan



Gambar 2.2
Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2015 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh hampir seluruh anak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 16 orang per kilometer per segi. Meskipun sudah banyak kebudayaan multi etnis dan multi budaya yang hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, namun etnis awal yaitu suku Dayak masih eksis berkembang di beberapa wilayah. Hal inilah yang menjadikan kebudayaan masyarakat masih melekat dengan karakteristik budaya yang khas.

b. Sex Ratio Penduduk Kalimantan Tengah

Data Sex Ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Sex ratio penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sebesar 109, yang memiliki arti bahwa disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Besarnya angka sex ratio ini tidak bergerak dari angka 109 selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kotawaringin Barat	147.292	130.849	278.141	113
2	Kotawaringin Timur	225 087	201 089	426 176	112
3	Kapuas	177 648	170401	348 049	104
4	Barito Selatan	67 358	64 629	131 987	104
5	Barito Utara	66 211	61 268	127 479	108



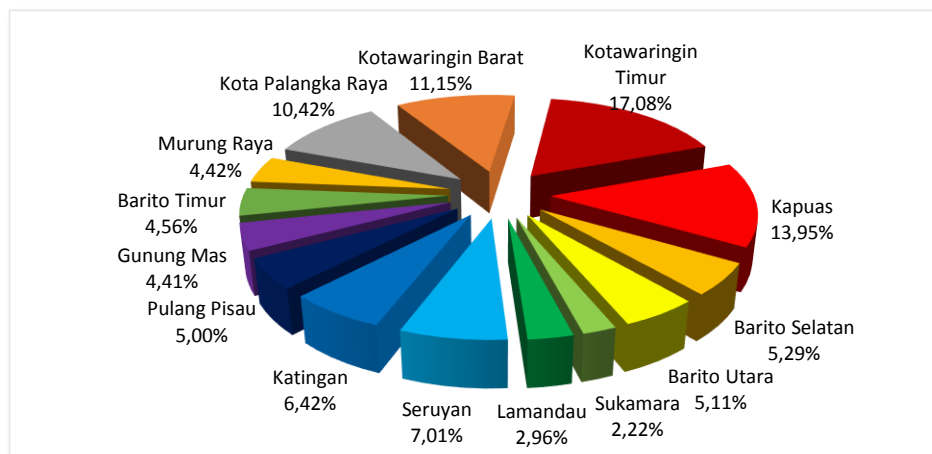
No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
6	Sukamara	29 404	25 917	55 321	113
7	Lamandau	39 480	34 495	73 975	114
8	Seruyan	94 068	80791	174 859	116
9	Katingan	83 964	76 341	160 305	110
10	Pulang Pisau	64 939	59906	124 845	108
11	Gunung Mas	58444	51503	109 947	113
12	Barito Timur	58539	55157	113 696	106
13	Murung Raya	57382	53008	110 390	108
14	Kota Palangka Raya	132980	126885	259 865	105
Kalimantan Tengah		1 302 796	1 192 239	2 495 035	109

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

c. Distribusi Penduduk Kalimantan Tengah

Secara umum, penyebaran penduduk di Kalimantan Tengah cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kotawaringin Timur (17,08%), Kapuas (13,95%), dan Kotawaringin Barat (11,15%). Sedangkan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat ke empat populasi penduduk dengan persentase penduduk 10,42 persen. Selain itu, penduduk dengan persentase hunian terkecil adalah Kabupaten Sukamara sebesar 2,22 persen dan Kabupaten Lamandau sebesar 2,96 persen.

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016



Komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok umur digambarkan pada tabel 2.7, bahwa kelompok umur usia non produktif yaitu umur kurang dari 15 tahun (< 15 tahun) dan umur 65 tahun ke atas adalah sebesar 31,61 persen, sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,39%. Memperhatikan komposisi tersebut bahwa dari jumlah penduduk usia produktif tersebut merupakan bonus demografi dimana struktur penduduk sangat menguntungkan masyarakat dari sisi pembangunan karena usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif itu artinya beban ketergantungan akan berkurang. Akan tetapi jumlah penduduk dengan umur produktif tersebut masih perlu didukung dengan lapangan pekerjaan karena berdasarkan data BPS untuk tahun 2015 bahwa dari jumlah penduduk usia produktif tersebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah sebesar 71,11%. Artinya bahwa penduduk usia produktif yang tidak bekerja yang menyebabkan tingkat kebergantungan penduduk kepada penduduk yang produktif menjadi tinggi. Dalam proses bonus demografi, penduduk usia sekolah dapat sudah mempersiapkan diri dengan banyak bekal ilmu-ilmu yang mampu membangkitkan semangat produktifitas dalam diri mereka dan menjadi agent dalam menopang kesuksesan bonus demografi di masa yang akan datang.

Tabel 2.8.

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	0 – 4	250 685	10,05
2	5 – 9	235 056	9,42
3	10 – 14	227 268	9,11
4	15 - 19	220 281	8,83
5	20 - 24	223 214	8,95
6	25 - 29	228 209	9,15
7	30 - 34	227 570	9,12
8	35 - 39	218 071	8,74
9	40 - 44	188 226	7,54
10	45 - 49	150 057	6,01
11	50 - 54	114 446	4,59
12	55 - 59	82 319	3,30
13	60 - 64	54 043	2,17
14	65 +	75 590	3,03
Jumlah Total		2 495 035	100



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus pembangunan daerah yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Penjabaran pada masing-masing fokus aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada analisa di bawah ini:

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan baik migas maupun non migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi dan indeks gini (*gini ratio*). Pada intinya, fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi memperlihatkan kondisi perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, baik secara makro tanpa memperhatikan fenomena mikro perekonomian masyarakat.

a. Pertumbuhan PDRB Regional

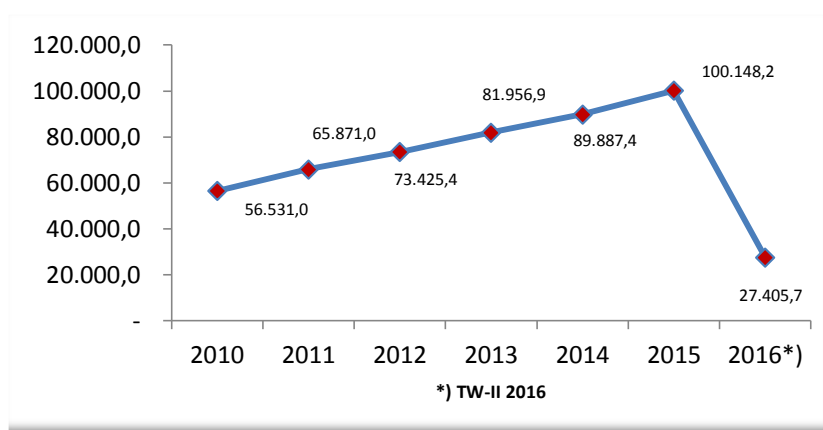
Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda penggerak ekonomi wilayah meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan sektor andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.



Secara definisi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun secara konsisten dimana pada tahun 2015, angka PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 100.148,2 miliar rupiah. Sedangkan pada triwulan II tahun 2016 baru mencapai 27.405,7 miliar rupiah.

Gambar 2.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016*) (Milyar Rupiah)

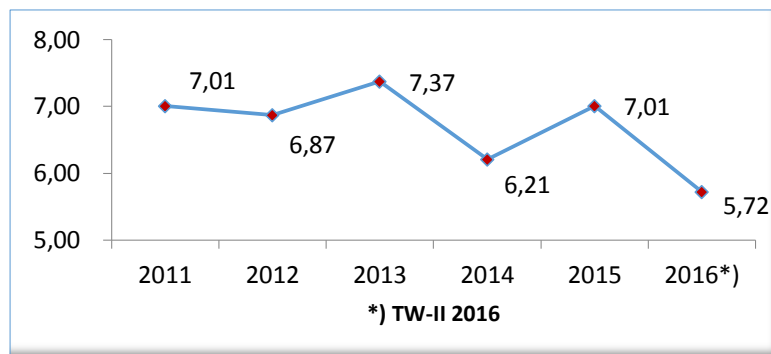


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil dengan kisaran 6 persen hingga 7 persen. Pada tahun 2015, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh 7,01 persen, mengalami percepatan perekonomian jika dibanding tahun 2014 sebesar 6,21 persen. Sedangkan pada triwulan II tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 5,7 persen (*year on year*), meningkat dibanding capaian triwulan I tahun 2016 yang tumbuh 5,17 persen.



Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2016*) (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016
(Tahun dasar 2010)

Tabel 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2016*) (%)

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,75	5,32	(0,18)
2	Pertambangan dan Penggalian	(2,78)	2,04	11,89
3	Industri Pengolahan	12,31	6,41	4,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,31	25,54	7,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	4,47	3,32	4,03
6	Konstruksi	9,51	9,62	8,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,74	8,28	5,99
8	Transportasi dan Pergudangan	2,17	13,57	10,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,21	8,28	7,04
10	Informasi dan Komunikasi	12,08	5,23	5,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,22	2,21	8,96
12	Real estate	7,11	8,56	7,16
13	Jasa Perusahaan	4,54	7,84	6,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	15,34	3,30
15	Jasa Pendidikan	9,67	10,47	6,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,86	9,73	5,46
17	Jasa Lainnya	8,86	7,56	7,75
Provinsi Kalimantan Tengah		6,21	7,01	5,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016
) TW-II 2016

Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2015 dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 25,54 persen, diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,34 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 13,57 persen. Sedangkan pada triwulan II tahun 2016 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar



11,89 persen, diikuti sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,47 persen dan jasa keuangan sebesar 8,96 persen.

Pada sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 15,97 persen terjadi penurunan cukup besar yang mana pada tahun 2014 terdapat pertumbuhan negatif sebesar 2,87 persen, hal ini salah satunya disebabkan karena adanya pemberlakuan Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengatur larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah yang mulai berlaku 12 Januari 2014, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya Undang-undang ini, pengusaha dilarang mengekspor enam jenis bahan mentah yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batu bara sebelum diolah. Namun pada tahun 2015, sektor pertambangan dan penggalian mulai tumbuh kembali dengan besaran mencapai 2,04 persen dan pada triwulan II tahun 2016 meningkat hingga mencapai 11,89 persen (Y on Y).

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	7,56	6,70	6,99	6,91	7,30
2	Kotawaringin Timur	7,11	7,01	7,79	7,37	7,62
3	Kapuas	5,85	6,48	6,81	7,00	7,26
4	Barito Selatan	7,06	5,32	5,24	5,32	5,59
5	Barito Utara	7,93	6,23	7,04	4,24	5,20
6	Sukamara	5,92	6,28	6,44	6,05	6,02
7	Lamandau	6,17	6,97	7,00	6,96	6,74
8	Seruyan	4,82	5,16	6,28	5,31	5,12
9	Katingan	6,14	6,23	6,33	6,54	6,52
10	Pulang Pisau	5,53	6,46	6,79	7,59	7,80
11	Gunung Mas	6,57	6,29	6,87	6,37	6,96
12	Barito Timur	6,98	6,04	6,73	5,26	5,15
13	Murung Raya	7,70	6,82	6,49	5,88	6,85
14	Kota Palangkaraya	7,27	7,29	7,53	6,97	7,18
Kalimantan Tengah		7,01	6,87	7,37	6,21	7,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

b. Struktur Perekonomian

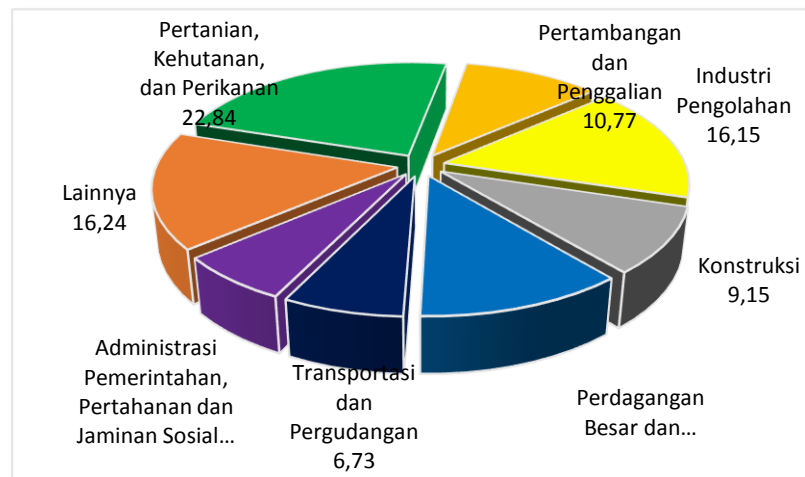
Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,84%), Industri Pengolahan (16,15%) serta Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,64%),



sedangkan pada triwulan II tahun 2016 (Y on Y) masih didominasi oleh tiga lapangan usaha tersebut.

Selain itu, terdapat juga kontribusi yang cukup besar pada sektor-sektor lain seperti pertambangan dan penggalian, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Gambar 2.6
Struktur Perekonomian
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)

c. Nilai PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perkembangan ekonomi tahun 2015 sangat fluktuatif pada hampir semua komponen pengeluaran wilayah. Kontribusi paling tinggi pada kelompok pengeluaran adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yakni mencapai 45.674,2 milyar rupiah, diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 42.418,3 milyar rupiah. Sedangkan Net ekspor antar daerah memiliki nilai minus hampir 21 trilyun rupiah. Pada triwulan II tahun 2016 nilai PDRB menurut pengeluaran kontribusi masih didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang sudah mencapai 12.461,9 milyar rupiah.



Tabel 2.11
Nilai PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015 (Milyar Rupiah)

No.	Komponen	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	34.618,9	38.044,8	42.418,3
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.039,2	1.183,7	1.341,3
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.907,6	13.512,6	15.765,0
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	37.036,3	41.295,2	45.674,2
5	Perubahan Inventori	700,4	1.398,6	1.572,5
6	Ekspor Luar Negeri	17.283,7	16.159,8	15.015,9
7	Impor Luar Negeri	607,3	1.135,1	810,9
8	Net Ekspor Antar Daerah	-20.021,7	-20.572,1	-20.828,1
Provinsi Kalimantan Tengah		81.956,9	89.887,4	100.148,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

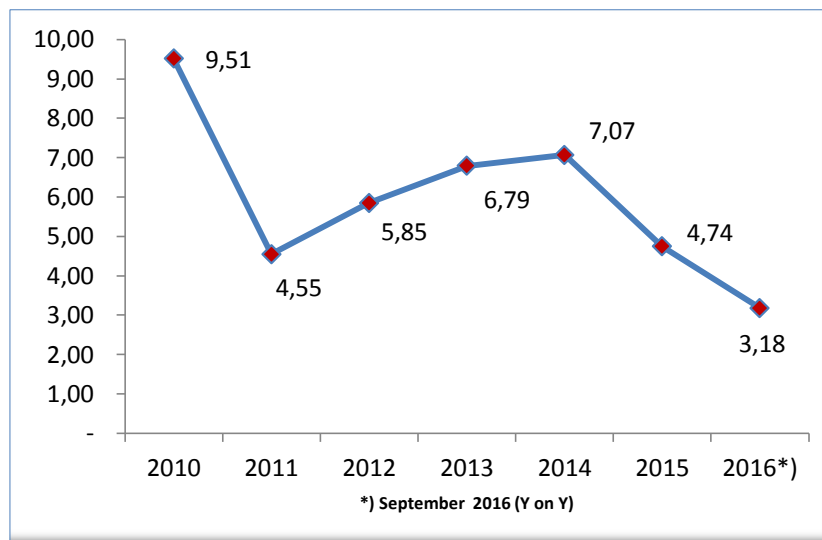
d. Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara *series* dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, dan/atau menurunnya produksi, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sedang menuju suatu kestabilan harga dimana laju inflasi berada pada tingkatan normal di kisaran ± 6 persen. Laju inflasi pada tahun 2014 mencapai 7,07 persen dan tahun sebelumnya 6,79 persen. Namun pada tahun 2015, laju inflasi menurun hingga 4,74 persen dan 3,18 persen pada September 2016 (Y on Y). Inflasi yang rendah dapat juga menjadi indikasi turunnya daya beli masyarakat, meskipun di sisi lain angka ini mengasumsikan rendahnya kenaikan harga. Diharapkan, capaian positif ini akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.



Gambar 2.7
Laju Inflasi Tahunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016*) (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

Tabel 2.12
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2016 *) (%)

Keterangan (Inflasi-yoy)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*)
Inflasi Tahunan Palangka Raya	1,39	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	4,20	3,09
Inflasi Tahunan Sampit	2,85	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	5,72	3,34
Inflasi Kalimantan Tengah	2,02	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74	3,18
Inflasi Nasional	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,07

*) September 2016 (Y on Y)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

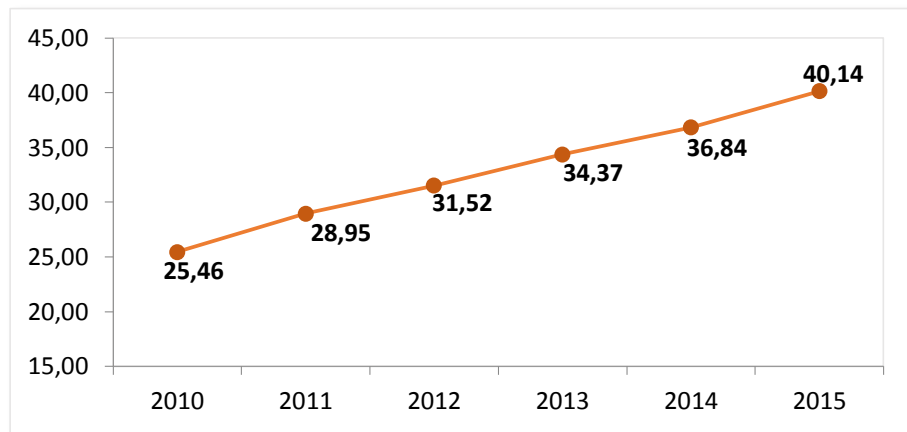
Stabilnya laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 4,20 persen dan Sampit sebesar 5,72 persen pada tahun 2015 dan semakin menurun pada inflasi tahunan bulan September tahun 2016 menjadi sebesar 3,09 persen di Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 3,34 persen. Kedua kota tersebut merupakan Kota Indeks Harga Konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penghitungan laju inflasi. Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.



e. PDRB per Kapita

Perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti dengan penambahan jumlah penduduk akan berdampak pada perubahan angka PDRB per kapita. Sedangkan PDRB per kapita dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan suatu daerah meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata mengingat PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan dan pendapatan per kapita secara mendalam.

Gambar 2.8
PDRB per Kapita
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2015 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)

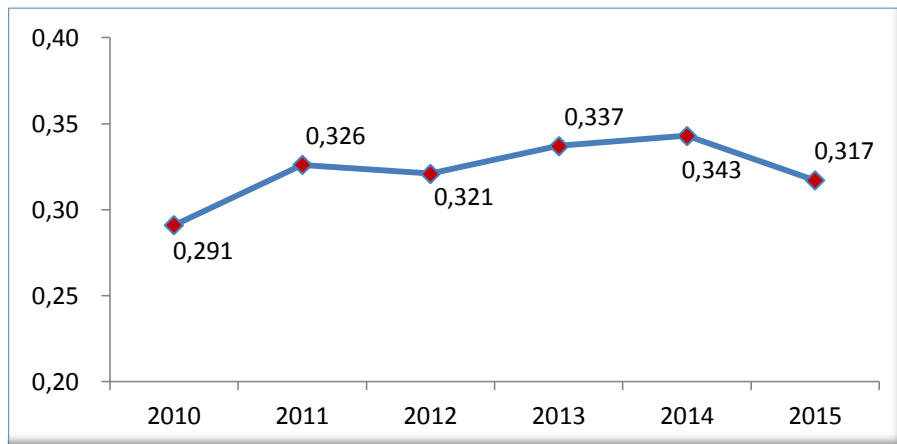
PDRB perkapita penduduk Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar Rp.25,46 juta per tahun dan nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp.40,14 juta per kapita/tahun pada tahun 2015.

f. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor

yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Gambar 2.9
Indeks Gini
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Melihat angka indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 sebagaimana gambar 2.9 di atas, terindikasi bahwa terjadi penambahan ketimpangan pendapatan antar penduduk secara berkala hingga tahun 2014. Namun pada tahun 2015, ketimpangan tersebut mulai menurun, dimana indeks gini pada tahun 2015 sebesar 0,317 dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,343. Secara umum peningkatan indeks gini memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin “tidak merata” dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

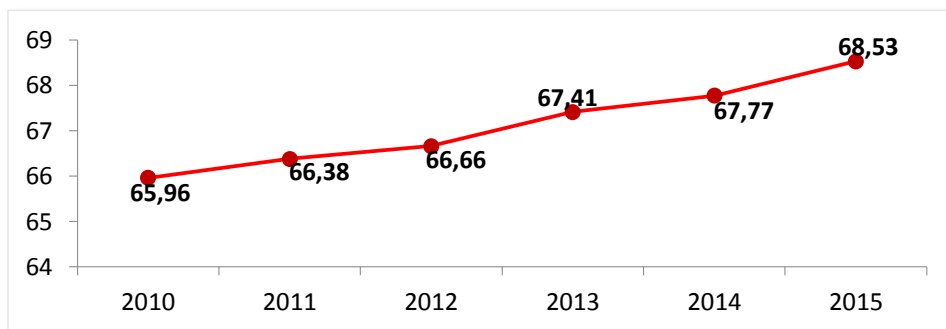


anak serta seni budaya dan olahraga. Dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2010, IPM Provinsi Kalimantan Tengah sudah termasuk kategori sedang, yakni mencapai angka 65,96 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai angka 68,53. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan



peningkatan komponen-komponen pembentuknya, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian.

Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	68,53	68,63	69,51	70,14	70,60
2	Kotawaringin Timur	65,60	66,61	67,95	68,45	68,61
3	Kapuas	64,01	64,38	64,82	65,29	66,07
4	Barito Selatan	65,10	65,76	66,20	66,61	68,27
5	Barito Utara	64,36	64,72	65,12	66,30	67,38
6	Sukamara	62,86	63,52	63,92	64,44	65,80
7	Lamandau	65,99	66,49	67,23	67,53	68,30
8	Seruyan	62,16	62,39	62,81	63,49	64,77
9	Katingan	64,54	64,87	65,29	65,79	66,81
10	Pulang Pisau	64,06	64,28	64,76	65,00	65,76
11	Gunung Mas	66,85	67,30	67,75	68,13	69,24
12	Barito Timur	67,31	67,97	68,82	69,12	69,71
13	Murung Raya	64,39	64,85	65,62	66,10	66,46
14	Kota Palangka Raya	76,98	77,40	78,02	78,50	78,62
Kalimantan Tengah		66,38	66,66	67,41	67,77	68,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPM sebesar 78,62. Sedangkan kabupaten/kota yang Indeks Pembangunan Manusianya terendah adalah Kabupaten Seruyan dengan indeks sebesar 64,77. Berikut data komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dari aspek kesehatan dan pendidikan menurut kabupaten/kota.

Tabel 2.14
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
1	Kotawaringin Barat	70,07	12,13	8,01
2	Kotawaringin Timur	69,51	12,05	7,70
3	Kapuas	68,40	11,64	6,94
4	Barito Selatan	66,48	11,99	8,59
5	Barito Utara	71,01	11,50	8,33
6	Sukamara	71,24	11,55	7,81
7	Lamandau	69,12	12,43	7,68
8	Seruyan	68,88	11,56	7,45
9	Katingan	65,28	12,03	8,62
10	Pulang Pisau	67,64	12,16	7,59



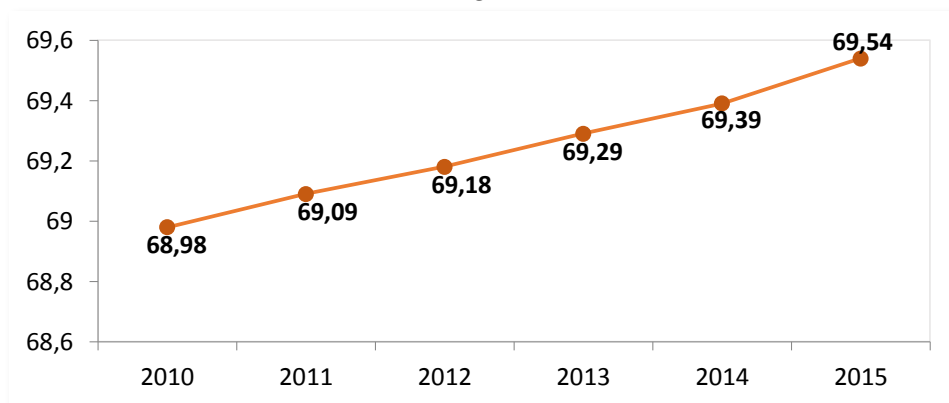
No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
11	Gunung Mas	69,89	11,44	8,93
12	Barito Timur	67,71	12,31	9,02
13	Murung Raya	69,21	11,69	7,36
14	Kota Palangka Raya	72,97	14,90	10,74
Kalimantan Tengah		69,54	12,22	8,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

b. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2015. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 yang mencapai 69,54 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2014 akan memiliki peluang hidup hingga berumur 69-70 tahun dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya (69,39 tahun).

Gambar 2.11
Angka Harapan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



Tabel 2.15
Angka Harapan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2015 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	69,41	69,51	69,60	69,68	69,77	70,07
2	Kotawaringin Timur	69,05	69,15	69,24	69,32	69,41	69,51
3	Kapuas	67,94	68,04	68,13	68,21	68,30	68,40
4	Barito Selatan	65,74	65,83	65,92	65,99	66,08	66,48
5	Barito Utara	70,54	70,64	70,73	70,81	70,91	71,01
6	Sukamara	70,82	70,92	71,02	71,10	71,19	71,24
7	Lamandau	68,71	68,81	68,90	68,98	69,07	69,12
8	Seruyan	68,23	68,32	68,41	68,49	68,58	68,88
9	Katingan	64,64	64,73	64,82	64,89	64,98	65,28
10	Pulang Pisau	67,09	67,19	67,27	67,35	67,44	67,64
11	Gunung Mas	69,23	69,33	69,42	69,50	69,59	69,89
12	Barito Timur	67,06	67,16	67,24	67,32	67,41	67,71
13	Murung Raya	68,75	68,85	68,94	69,02	69,11	69,21
14	Kota Palangka Raya	72,57	72,68	72,77	72,85	72,95	72,97
Kalimantan Tengah		68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

c. Pendidikan

Secara umum, bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat. Pada tahun 2015, angka harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 12,22 tahun yang berarti bahwa penduduk saat ini memiliki harapan untuk mengikuti jenjang pendidikan hingga 12,22 tahun lamanya atau sama dengan jenjang Perguruan Tinggi semester 1.

Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah selama 7,62 tahun dan setelah enam tahun berselang angka tersebut beranjak naik hingga 8,03 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sebesar 8,03 tahun memiliki analisa awal bahwa masyarakat usia 15 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hingga jenjang pendidikan SMP kelas 3 semester pertama.



Tabel 2.16
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
1	2010	11,09	7,62
2	2011	11,15	7,68
3	2012	11,22	7,73
4	2013	11,71	7,79
5	2014	11,93	7,82
6	2015	12,22	8,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Tabel 2.17
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	7,48	7,48	7,49	7,58	7,82	8,01
2	Kotawaringin Timur	7,29	7,39	7,48	7,59	7,69	7,70
3	Kapuas	6,75	6,79	6,82	6,84	6,94	6,94
4	Barito Selatan	7,71	7,80	8,01	8,16	8,27	8,59
5	Barito Utara	7,43	7,55	7,74	7,97	8,00	8,33
6	Sukamara	6,62	6,67	7,04	7,21	7,30	7,81
7	Lamandau	6,92	7,21	7,38	7,55	7,67	7,68
8	Seruyan	6,66	6,76	6,76	6,90	7,03	7,45
9	Katingan	7,66	8,13	8,15	8,17	8,23	8,62
10	Pulang Pisau	7,18	7,20	7,29	7,55	7,58	7,59
11	Gunung Mas	8,57	8,57	8,65	8,73	8,74	8,93
12	Barito Timur	8,31	8,43	8,75	8,98	9,01	9,02
13	Murung Raya	7,06	7,09	7,12	7,15	7,18	7,36
14	Kota Palangka Raya	10,13	10,27	10,48	10,69	10,73	10,74
Kalimantan Tengah		7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Tabel 2.18
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	11,27	11,28	11,29	11,90	12,12	12,13
2	Kotawaringin Timur	10,47	10,47	10,89	11,82	12,04	12,05
3	Kapuas	10,40	10,58	10,76	10,95	11,14	11,64
4	Barito Selatan	10,61	10,79	10,96	11,01	11,14	11,99
5	Barito Utara	10,97	10,99	11,00	11,01	11,15	11,50
6	Sukamara	10,56	10,59	10,69	10,79	11,09	11,55
7	Lamandau	10,99	11,17	11,34	11,75	11,80	12,43
8	Seruyan	10,32	10,44	10,57	10,70	11,08	11,56
9	Katingan	10,58	10,98	11,14	11,40	11,69	12,03



No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
10	Pulang Pisau	11,37	11,41	11,44	11,48	11,63	12,16
11	Gunung Mas	10,57	10,60	10,62	10,65	10,82	11,44
12	Barito Timur	10,88	11,08	11,27	11,77	11,98	12,31
13	Murung Raya	9,64	10,42	10,73	11,33	11,68	11,69
14	Kota Palangka Raya	14,19	14,25	14,31	14,58	14,89	14,90
Kalimantan Tengah		11,09	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22

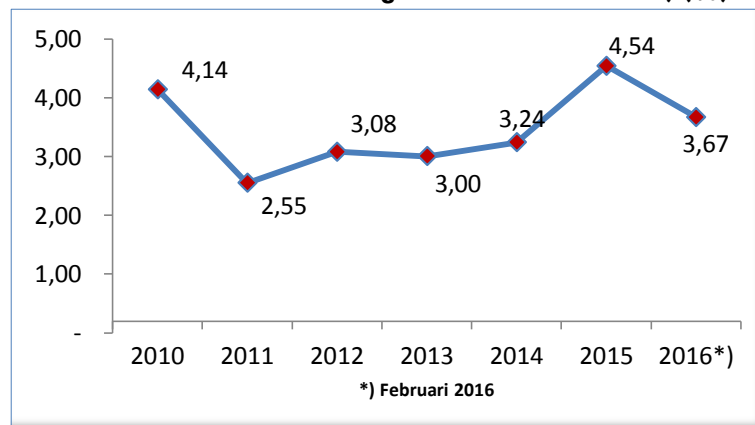
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

d. Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2014 mencapai 1.193.171 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,56 persen. Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang bekerja sebanyak 1.154.489 orang dengan tingkat kesempatan kerja mencapai 96,76 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 mencapai 4,54 persen dimana angka ini mengalami peningkatan secara landai dari tahun 2011 hingga tahun 2015 tetapi pada periode Februari 2016 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 3,67 persen. Jika dilihat secara umum, tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah tergolong rendah jika dibandingkan angka nasional, namun trend kenaikan angka pengangguran selama empat tahun terakhir perlu mendapat perhatian khusus oleh *stakeholders* ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran.

Gambar 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016*) (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



Tabel 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (%)

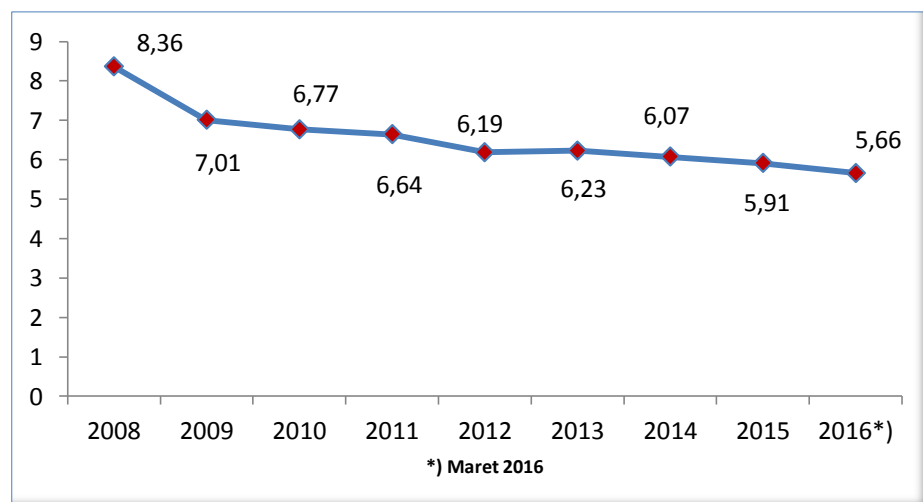
No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	4,46	2,82	2,30	3,65	2,66	3,25
2	Kotawaringin Timur	4,16	3,64	4,51	2,37	4,11	3,53
3	Kapuas	4,17	3,53	3,00	1,49	2,50	4,07
4	Barito Selatan	5,51	3,12	1,72	2,10	3,77	9,99
5	Barito Utara	2,3	0,72	1,65	2,93	3,34	4,78
6	Sukamara	5,32	1,17	0,31	1,83	1,67	4,68
7	Lamandau	2,95	3,33	0,92	1,64	2,61	5,00
8	Seruyan	4,46	1,97	3,99	4,52	4,40	4,64
9	Katingan	3,34	4,92	3,35	5,56	5,23	5,97
10	Pulang Pisau	2,11	5,05	2,52	2,30	4,28	3,29
11	Gunung Mas	4,45	2,00	4,31	2,88	1,20	2,70
12	Barito Timur	1,35	1,46	0,93	1,65	2,46	2,14
13	Murung Raya	1,03	0,63	1,49	3,45	1,13	6,33
14	Kota Palangka Raya	8,48	9,01	6,40	5,03	3,36	6,30
Kalimantan Tengah		4,14	3,54	3,14	3,00	3,24	4,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

e. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gambar 2.13
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2016*) (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

*) data Maret 2016



Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Pada tahun 2008, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 8,36 persen yang pada tahun berikutnya langsung menurun drastis hingga mencapai angka 7,01 persen. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kemiskinan secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada tahun 2014 mencapai 6,07 persen dan menurun kembali pada tahun berikutnya hingga mencapai angka 5,91 persen dan pada bulan Maret 2016 menjadi 5,66 persen.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2014 (kondisi September), angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Barito Timur dengan persentase kemiskinan sebesar 8,55 persen dan Kabupaten Seruyan sebesar 8,39 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 27.940 jiwa.

Tabel 2.20
Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Kondisi September)

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (000)
1	Kotawaringin Barat	279.080	5,27	14,33
2	Kotawaringin Timur	312.363	6,67	27,94
3	Kapuas	246.679	6,12	21,18
4	Barito Selatan	322.062	6,13	8,03
5	Barito Utara	385.348	5,88	7,45
6	Sukamara	362.337	4,29	2,30
7	Lamandau	328.293	4,66	3,37
8	Seruyan	338.969	8,39	14,21
9	Katingan	341.896	6,42	10,16
10	Pulang Pisau	308.323	5,35	6,65
11	Gunung Mas	341.141	6,70	7,24
12	Barito Timur	401.513	8,55	9,52
13	Murung Raya	364.994	6,24	6,76
14	Kota Palangka Raya	299.328	3,81	9,68
Kalimantan Tengah		330.869	6,07	148,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



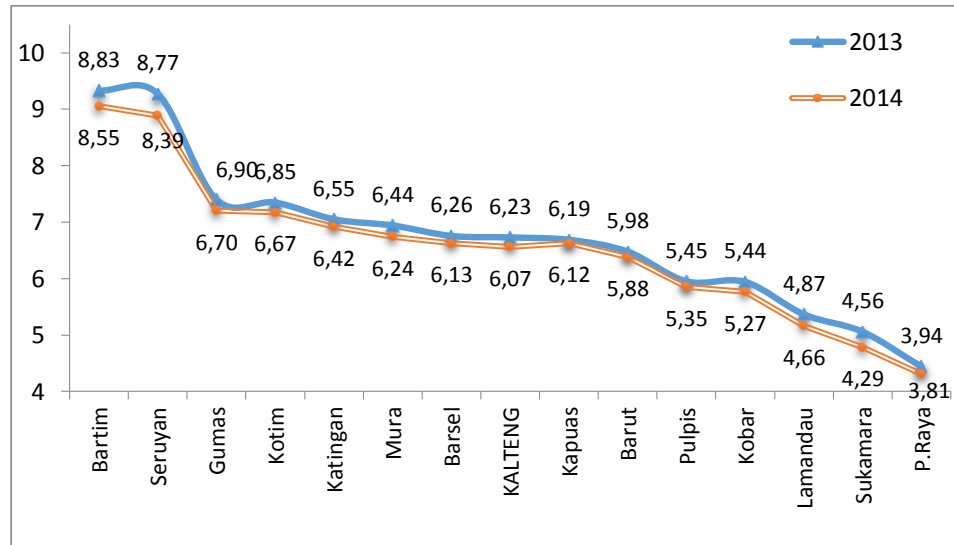
Tabel 2.21
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kotawaringin Barat	6,27	6,19	5,63	5,44	5,27
2	Kotawaringin Timur	8,36	7,43	6,91	6,85	6,67
3	Kapuas	5,82	6,28	6,10	6,19	6,12
4	Barito Selatan	7,07	7,56	7,25	6,26	6,13
5	Barito Utara	6,34	6,33	6,10	5,98	5,88
6	Sukamara	6,61	5,90	5,36	4,56	4,29
7	Lamandau	5,35	5,18	4,66	4,87	4,66
8	Seruyan	9,98	8,82	7,92	8,77	8,39
9	Katingan	6,65	6,47	6,10	6,55	6,42
10	Pulang Pisau	5,22	5,45	5,24	5,45	5,35
11	Gunung Mas	8,06	7,12	6,56	6,90	6,70
12	Barito Timur	10,50	9,27	8,53	8,83	8,55
13	Murung Raya	6,55	6,30	5,78	6,44	6,24
14	Kota Palangka Raya	5,24	4,69	4,24	3,94	3,81
Kalimantan Tengah		6,77	6,64	6,19	6,23	6,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



Gambar 2.14
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2013-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

f. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan tersier. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial, budaya, dan keagamaan yaitu:

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; serta
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sedangkan pembangunan dan kemajuan di bidang olahraga, selain mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, juga meningkatkan martabat dan nama baik negara/daerah dalam pergaulan nasional dan daerah.

Pada tahun 2015, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 343 grup kesenian/sanggar seni dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya sekali dalam tahun tersebut. Selain itu, terdapat pula 490 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.



Tabel 2.22
Statistik Seni, Budaya, dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah)	168	343	343	343	343	336
2	Jumlah gedung (unit)	10	19	19	19	19	19
3	Jumlah klub olahraga (buah)	50	-	-	26	46	46
4	Jumlah gedung olahraga (unit)	15	15	15	15	16	16
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	2	1	2	1
6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490	487	487	487	490	490
7	Jumlah organisasi pemuda	62	66	66	66	66	66
8	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	43	42
9	Jumlah kegiatan kepemudaan	50	67	60	60	40	35
10	Jumlah kegiatan olahraga	27	31	35	45	76	60
11	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	33	33	34	37	37	37
12	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	207	210	289	289	289	289

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016;
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalteng, 2016

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda akan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam partisipasi membangun daerah. Jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 66 organisasi dengan 35 kegiatan kepemudaan pada tahun 2015. Selain itu, kegiatan kepemudaan juga difasilitasi 37 gelanggang/balai remaja.

Sedangkan banyaknya jumlah organisasi olahraga (yang berada dibawah naungan KONI kabupaten/kota) menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga di Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini, jumlah organisasi olahraga yang berada di bawah binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 42 organisasi olahraga dengan 60 kali kegiatan olahraga pada tahun 2015. Selain itu, kegiatan keolahragaan juga difasilitasi 16 gedung olahraga dan 289 lapangan olahraga.



2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata, jasa dan perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, dan sebagainya yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

a. Pendidikan

Gambaran umum keadaan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain tercermin dari angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 pada tahun 2010 mencapai 98,70 persen dan meningkat menjadi 99,25 persen pada tahun 2014 dan 99,26 persen pada tahun 2015. Sedangkan partisipasi sekolah pada penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari sebesar 86,83 persen pada tahun 2010 menjadi 85,10 persen pada tahun 2014 dan 85,61 persen tahun 2015. Sama halnya untuk penduduk usia 16-18 tahun, angka partisipasi sekolahnya meningkat dimana pada tahun 2010 memiliki angka partisipasi sekolah sebesar 54,50 persen dan meningkat menjadi 77,50 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015 tetap sebesar 77,50 persen.

Peningkatan angka partisipasi sekolah paling tinggi dialami oleh penduduk yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sederajat. Hal ini dikarenakan, penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan hingga level SMA sederajat tidak sebanyak penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan SD maupun SMP sederajat. Faktor penyebabnya sebagian besar selain aksesibilitas pendidikan yang kurang juga permasalahan biaya pendidikan dan lebih condong untuk bekerja mencari nafkah membantu keluarga.



Tabel 2.23
Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru menurut Jenis Dan Status Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015/2016

NO	Jenis Sekolah	Sekolah		Murid		Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	79	1.290	10.311	44.212	407	3.887
2.	Sekolah dasar (SD)	2.570	421	290.814	84.239	23.200	4.097
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	700	270	112.638	44.515	7.479	2.690
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	168	132	53.100	13.108	3.688	1.442
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	85	41	20.035	4.243	1.837	342

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Rasio guru terhadap murid untuk setiap jenjang pendidikan dapat dikatakan seimbang sesuai dengan kebutuhannya dimana pada tahun 2013/2014, rasio guru SD/MI terhadap murid mencapai 1:25, sama halnya dengan tingkat SMP/MTS yang mencapai angka 1:22. Sedangkan rasio guru terhadap murid untuk tingkat SMA mencapai 1:20 pada tahun 2013/2014. Tahun 2014/2015 rasio guru terhadap murid, baik untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih sama dengan tahun sebelumnya. Rasio guru terhadap murid baru sebatas berbicara tentang kuantitas guru yang mengajar di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu adanya pengembangan kualitas guru serta pemerataan guru di setiap wilayah.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)*	98,70	98,84	99,20	99,22	99,25	99,26
1.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:13	1:15	1:17	1:19	1:25	1:25
2	SMP/MTs						
2.1.	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun)*	86,83	84,59	85,05	85,05	85,10	85,61
2.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:15	1:16	1:17	1:18	1:22	1:22
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)*	54,50	55,75	55,06	64,74	77,50	77,50



NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:14	1:16	1:17	1:18	1: 20	1:20

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

b. Kesehatan

Sarana prasarana kesehatan yang menunjang untuk optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat sangat menentukan dalam kebijakan pembangunan bidang kesehatan. Hal ini karena segala fasilitas dan infrastruktur kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, perhatian pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan menjadi perlu dan penting untuk ditindaklanjuti.

Pelayanan wajib di bidang kesehatan menggambarkan sarana dan prasana serta tenaga kesehatan, tenaga medis, dan paramedis sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2012-2015

No	Fasilitas Kesehatan	2012	2013	2014	2015
1	Rumah Sakit	18	18	19	20
2	Kapasitas tempat tidur RS	1.254	1.441	1.441	1.850
3	Puskesmas Induk	192	196	197	195
4	Puskesmas Pembantu	1.022	1.041	1.041	1.063
5	Polindes/ Poskesdes/ Rumah Bersalin	524	486	548	640
6	Dokter Gigi	113	146	113	101
7	Dokter Umum	533	564	565	466
8	Dokter Spesialis	106	118	197	175
9	Bidan	1.985	1.885	2.305	2.500
10	Perawat	4.863	3.928	4.745	4.637
11	Apoteker/Ass Apoteker	385	322	458	371

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalteng, 2016

Sarana prasarana kesehatan untuk masyarakat yaitu rumah sakit, pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebanyak 20 buah, yang terdiri dari 1 rumah sakit jiwa, 1 rumah sakit TNI, 1 rumah sakit POLRI, 16 rumah sakit daerah, dan 1 rumah sakit swasta. Sedangkan untuk Puskesmas induk mengalami penurunan, dari 197 menjadi 195.



Pada tahun 2015, jumlah dokter di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 742 orang, terdiri dari 101 dokter gigi, 466 dokter umum, dan 175 dokter spesialis. Angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 875 dokter. Selain itu, untuk tenaga kesehatan lainnya seperti bidan berjumlah 2.500 orang, perawat 4.637 orang, dan tenaga kefarmasian mencapai 371 orang.

Tabel 2.26
Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2015

No	Rasio	2012	2013	2014	2015
1	Tempat tidur rumah sakit per jumlah penduduk	0,66	0,66	0,69	0,76
2	Dokter per jumlah penduduk	26,45	19,42	19,63	18,68
3	Tenaga Medis Per Jumlah Jumlah Penduduk	0,34	0,29	0,37	0,30
4	Puskesmas per jumlah penduduk	2,54	2,45	2,40	2,34
5	Bidan per jumlah penduduk	89,68	83,62	101,56	99,20

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalteng, 2015

Rasio sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana tabel 2.22 di atas menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) berdasarkan jumlah penduduk. Demikian halnya dengan rasio dokter dan tenaga medis menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Semakin besar rasio menandakan semakin baiknya ketersediaan dan layanan sarana dan prasarana kesehatan yang ada.

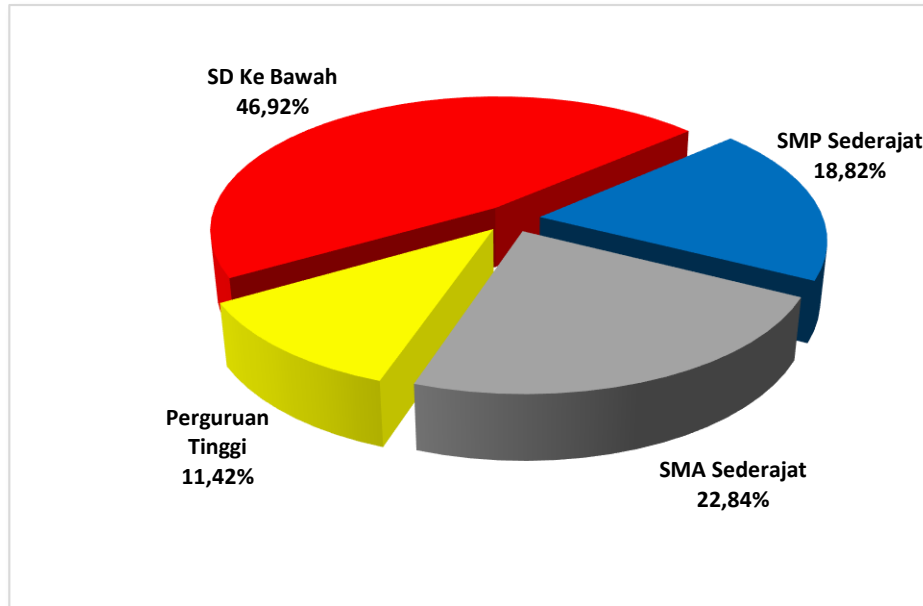
2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

a. Ketenagakerjaan

Hasil rilis ketenagakerjaan terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2016 sebesar 1.238.677 orang. Jika dilihat dari struktur umurnya, sebagian besar penduduk yang bekerja berada pada usia 25 hingga 44 tahun yang merupakan masa produktif penduduk. Selain itu, berdasarkan jenjang pendidikannya, sebagian besar penduduk yang bekerja hanya memiliki pendidikan hingga jenjang SD sederajat yakni sebanyak 581.200 jiwa (46,92%) dan kemudian baru penduduk berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 282.906 jiwa (22,84%).

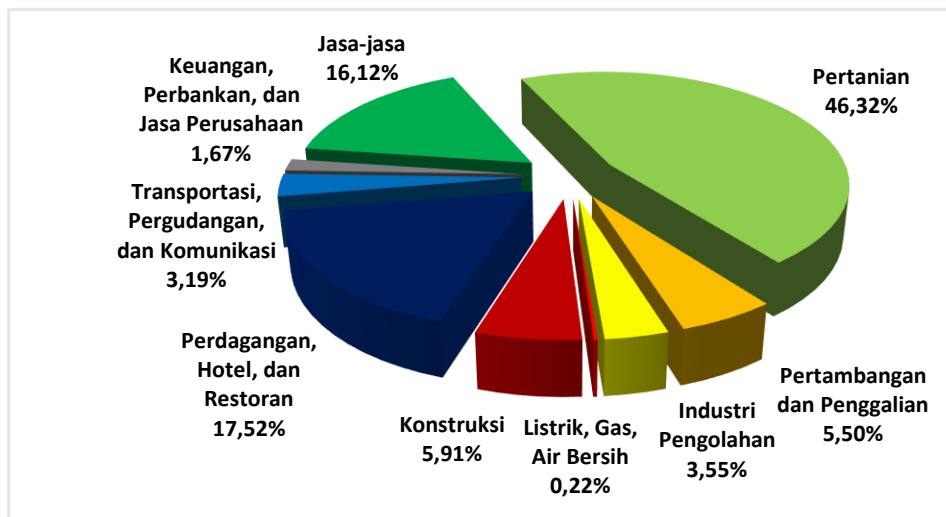


Gambar 2.15
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016 (Kondisi Februari 2016)

Gambar 2.16
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016



Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas) yang mencapai 562.671 orang (46,32%) dimana angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Sektor lapangan usaha lain yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yakni sektor perdagangan sebanyak 212.803 orang (17,52%) dan sektor jasa sebanyak 195.835 orang (16,12%).

b. Pemberdayaan Perempuan

Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan pada saat ini adalah sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan peran dan kesetaraan gender dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan. Indikator utamanya adalah melalui pengukuran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender).

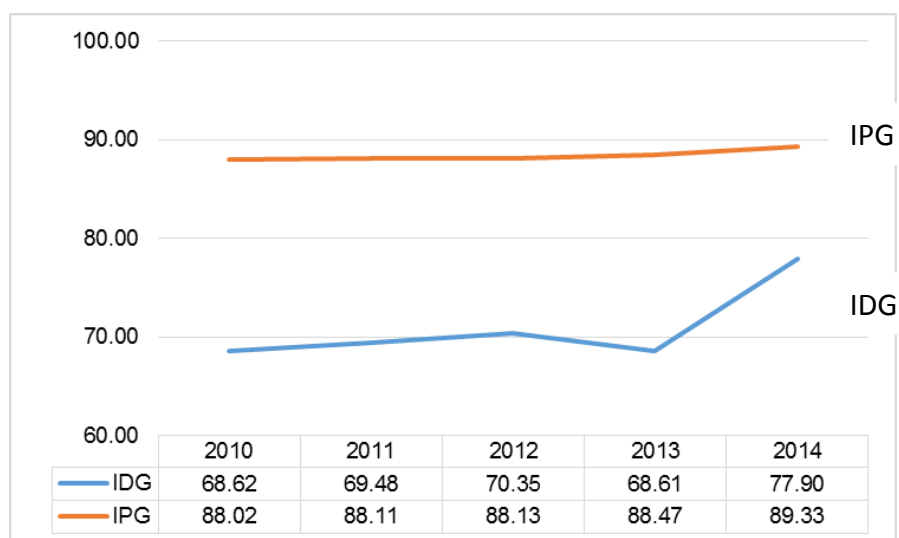
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, juga merupakan ukuran pembangunan manusia, meliputi komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG adalah rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) perempuan dengan laki-laki dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM yaitu : Angka harapan hidup (kesehatan), Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), Sumbangan pendapatan (ekonomi), yang disajikan menurut jenis kelamin.

Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki.

Kondisi capaian IPG dan IDG Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2010-2014 tersaji dalam gambar 2.15 berikut.



Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014



Sumber : BPPPAKB Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

c. Perhubungan

1) Jalan dan Angkutan Darat

Dari total panjang jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.102,08 km, kondisi permukaan jalan baik mengalami penurunan dari 1.694,71 km di tahun 2012 menjadi 1.635,51 km pada tahun 2015; kondisi sedang rusak mengalami kenaikan dari 662,89 km di tahun 2012 menjadi 1.133,64 km pada tahun 2015; kondisi rusak mengalami penurunan dari 312,69 km di tahun 2012 menjadi 246,14 km pada tahun 2015; dan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 144,54 km di tahun 2012 menjadi 86,79 km di tahun 2015, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi
Tahun 2011-2015

No	Jalan (Nasional dan Provinsi)	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik	1.431,92	1.694,71	1.647,08	1.595,76	1.635,51
2.	Kondisi Sedang Rusak	1.063,91	662,89	817,52	933,09	1.133,64
3.	Kondisi Rusak	459,46	312,69	250,61	217,95	246,14
4.	Kondisi Rusak Berat	383,29	144,54	99,62	68,03	86,79
	Jalan secara keseluruhan (nasional dan provinsi)	3.338,5	2.814,8	2.814,8	2.814,8	3.102,08

Sumber: Kalteng Dalam Angka, 2016



2) Pelabuhan laut

Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pelabuhan laut sebagai sarana jasa perdagangan serta angkutan penumpang dan barang (ekspor dan impor maupun lokal) yang terdiri dari:

- a. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan utama** yaitu Pelabuhan Sampit;
- b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpul**:
 - 1) Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 2) Pelabuhan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 3) Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara;
 - 4) Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan;
 - 5) Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas;
 - 6) Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan
 - 7) Pelabuhan Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas.
- b. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpan regional**:
 - 1) Pelabuhan Kelanis di Kabupaten Barito Selatan;
 - 2) Pelabuhan Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan;
 - 3) Pelabuhan Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan;
 - 4) Pelabuhan Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 5) Pelabuhan Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya;
 - 6) Pelabuhan Teluk Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau;
 - 7) Pelabuhan Bukit Pinang di Kota Palangka Raya; dan
 - 8) Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.
- c. Pelabuhan yang ditetapkan sebagai **pelabuhan pengumpan lokal**:
 - 1) Pelabuhan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
 - 2) Pelabuhan Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 3) Pelabuhan Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;

Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan **sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI)** adalah:

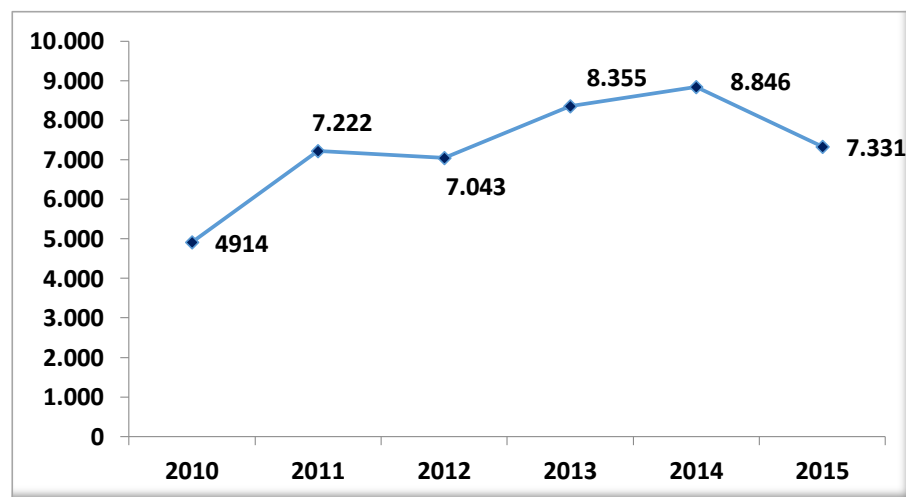
- 1) PPI Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
- 2) PPI Batanjung di Kabupaten Kapuas;
- 3) PPI Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;
- 4) PPI Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan;



- 5) PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 6) PPI Selat Jeruju Pagatan di Kabupaten Katingan;
- 7) PPI Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur

Jumlah kapal laut yang bersandar/menyinggahi pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 kapal laut yang menyinggahi pelabuhan laut sebanyak 7.331 kapal, menurun 17,13 persen dari tahun sebelumnya (8.846 unit kapal).

Gambar 2.18
Jumlah Kapal yang melalui Pelabuhan Laut
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Alur pelayaran nasional yang ada di Kalimantan Tengah meliputi:

- a. **Alur pelayaran Internasional** : Sampit – Luar Negeri;
- b. **Alur pelayaran Nasional** : Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit – Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun – Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya, Sukamara - Jakarta; Teluk Segitung – Semarang; Teluk Segitung – Surabaya; Teluk Segitung – Jakarta; Batanjung – Semarang, Batanjung– Surabaya; Batanjung - Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; Pulang Pisau – Jakarta



3) Bandar udara

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa bandar udara, meliputi:

- a. **Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier** yaitu: Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya dan Iskandar di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. **Bandara pengumpan**, meliputi : Haji Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Dirung di Kabupaten Murung Raya, Beringin di Kabupaten Barito Utara dan Sanggu di Kabupaten Barito Selatan.

Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan antar kabupaten/kota maupun antar provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, Trigana Air/Kalstar, Susi Air, dan Aviastar. Disamping itu, untuk melayani kota-kota kecil ada juga pesawat dari MAF (*Mission Aviation Fellowship*) yang terbang untuk melayani kepentingan sosial. Selain untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang, sejak tahun 2013 Maskapai Lion Air membuka sekolah penerbangan (*flying school*) di bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Penerbangan udara berangkat dan datang ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan berkembangnya wilayah Kalimantan Tengah karena semakin terbukanya aksesibilitas wilayah regional Kalimantan Tengah. Tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penerbangan dibandingkan tahun 2014, karena terjadinya bencana kabut asap yang menyebabkan 7 dari 9 bandara yang ada di Kalimantan Tengah selama \pm 3 bulan lumpuh dan tidak ada penerbangan yang kemudian bertahap kembali normal pada akhir tahun 2015.

Tabel 2.28
Jumlah Penerbangan dan Penumpang yang melalui Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2015

No	Tahun	Penerbangan (arus pesawat)		Penumpang (orang)	
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
1	2009	6.556	6.577	270.573	264.385
2	2010	6.828	6.825	348.627	341.669
3	2011	8.954	8.949	501.879	499.663
4	2012	10.422	10.418	594.214	610.421
5	2013	12.496	12.507	629.568	664.567
6	2014	10.133	10.137	700.419	701.446
7	2015	9.510	9.513	675.719	650.896

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

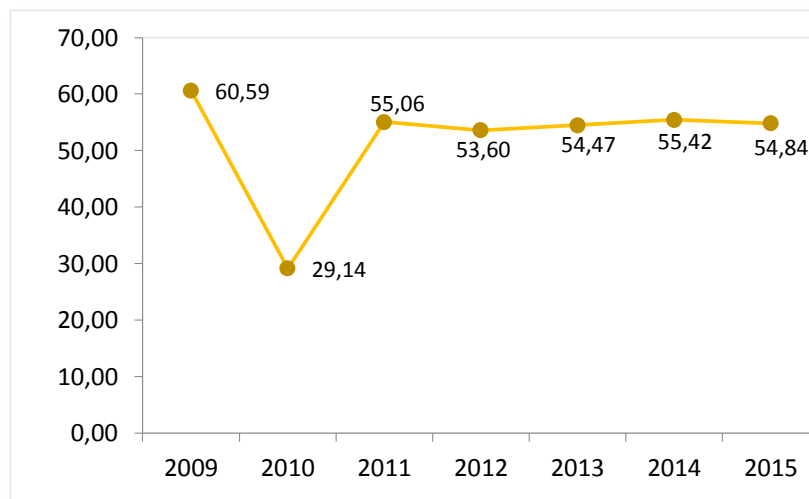


4) Pos, Telekomunikasi, dan Akomodasi

Pada tahun 2015, Kantor Pos di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 60 Kantor Pos Pembantu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari keseluruhan kantor pos tersebut, jenis surat pos yang dikirim berupa surat biasa, tercatat, kilat biasa, kilat khusus, dan kilat tercatat pada tahun 2015 mengalami peningkatan cukup signifikan dari sisi kuantitas, yakni dari 173.761 lembar pada tahun 2014 menjadi 302.335 lembar pada tahun 2015. Sementara pengiriman paket pos juga mengalami kenaikan, yaitu dari 61.214 kg pada tahun 2014 menjadi 310.545 kg pada tahun 2015. Sedangkan untuk pengiriman wesel pos juga mengalami kenaikan dari 169.031 lembar pada tahun 2014 menjadi 360.263 lembar pada tahun 2015.

Jumlah pelanggan telepon di tahun 2015 menurun cukup drastis dimana pada tahun 2014 sebanyak 53.127 SST dan menjadi hanya 32.284 SST saja pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk sambungan internet *speedy* maupun *hotspot* cukup tinggi pada tahun 2015 yang mencapai 23.134 jumlah sambungan internet *speedy* dan 228 sambungan *hotspot*.

Gambar 2.19
Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2009-2015



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

Terkait fasilitas akomodasi di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 377 unit hotel baik berbintang maupun non bintang pada tahun 2015 dengan kapasitas 7.372 kamar dan 10.677 tempat tidur. Dari sejumlah hotel tersebut, tingkat hunian hotel berbintang mencapai 55,42 persen pada tahun 2015 dimana angka



tersebut menurun dari tahun sebelumnya (55,42%). Sedangkan untuk tingkat hunian hotel non bintang jauh di bawah tingkat hunian hotel berbintang yakni hanya sebesar 28,81 persen saja.

d. Penanaman Modal

Investasi merupakan modal dasar pembangunan perekonomian suatu wilayah dimana semakin kondusif suatu wilayah dalam berinvestasi maka akan semakin optimal pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, setiap wilayah administrasi berlomba-lomba dalam menarik investor baik dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya sebagai bagian dari pergerakan ekonomi wilayah.

Tabel 2.29
Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

Sektor Ekonomi	Dalam Negeri (Juta Rupiah)	Asing	
		Ribu US\$	Juta Rp
Pertanian	32.224.142,52	81.425,59	26.356.770,01
Pertambangan	83.456,01	991.401,06	626.114,31
Industri	436.428,14	9.222,15	425.455,40
Konstruksi	-	-	-
Perhotelan	-	-	-
Pengangkutan	-	-	-
Perumahan&Kantor	-	-	-
Jasa-jasa	384.126,74	6.500,00	584.308,19
Jumlah	33.128.153,41	1.088.548,80	27.992.647,91

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 memiliki investor yang menanamkan modalnya pada tahun 2015 sebanyak 300 penanaman modal asing dan 172 penanaman modal dalam negeri. Secara umum, realisasi penanaman modal mengalami penurunan pada tahun 2015 dimana pada penanaman modal dalam negeri memiliki realisasi hampir mencapai 33,13 triliun rupiah serta penanaman modal asing sebesar 1,088 miliar US \$ dan 27,99 triliun rupiah.

e. Perbankan

Peran perbankan dalam mendukung aktivitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan positif sejalan dengan kontribusinya yang terus meningkat sesuai arah ekspansi ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Hal ini terlihat nyata pada peningkatan jumlah unit bank yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana Bank Rakyat Indonesia (BRI)



memiliki dominasi dalam unit pelayanan perbankan. Berikut jumlah kantor bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.30
Perkembangan Jumlah Kantor Bank
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

Tahun	BI	BNI	BRI	BPD	BDI	Mandiri	BTN	Muamalat	Mega	BCA	BPR	BSM	BTPN
2011	1	10	60	32	13	11	22	2	5	2	2	4	2
2012	1	16	62	35	13	11	4	6	5	3	4	5	5
2013	1	12	58	24	10	8	2	5	5	3	4	5	10
2014	1	16	77	43	13	20	39	6	5	3	5	5	10
2015	1	20	115	37	12	33	43	7	5	4	10	7	8

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

Jika dilihat dari penghimpunan dana perbankan yang berada di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, maka sebagian besar dana yang ada merupakan dana tabungan masyarakat yang mencapai 10,26 triliun rupiah atau mencapai 57,48 persen dari penghimpunan dana secara total. Penghimpunan dana ini secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun terakhir yakni 2015 hampir mencapai 17,86 triliun rupiah.

Tabel 2.31
Posisi Penghimpunan Dana Perbankan menurut Jenisnya (Juta Rupiah)
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

Tahun	Giro	Tabungan	Simpanan Berjangka	Jumlah
2010	1.836.966	5.094.426	1.636.077	8.567.469
2011	2.934.802	6.501.731	2.352.580	11.789.113
2012	3.856.164	7.837.804	2.528.452	14.222.420
2013	3.515.873	8.967.536	3.594.340	16.077.749
2014	3.850.123	9.232.797	3.721.200	16.804.120
2015	3.656.664	10.261.087	3.937.844	17.855.595

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

3. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Melihat wilayah geografis dan sejarah sektor lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah selama ini, sektor yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian. Sektor tersebut menjadi sektor andalan mengingat ketersediaan lahan potensial masih cukup besar. Di sektor pertanian ini, sub sektor yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan adalah sub sektor perkebunan dimana kontribusi tahunannya dalam pembentukan PDRB (mencapai



14,53% pada tahun 2014). Dalam merealisasikan hal tersebut, saat ini sudah masuk permohonan investasi untuk mengembangkan pertanian di sub sektor perkebunan komoditas kelapa sawit, karet, dan singkong dalam skala cukup luas. Bahkan pada tahun 2014, jumlah lahan yang berproduksi aktif mencapai 635.486,23 ha untuk perkebunan rakyat dan mencapai 2.857.051,60 ha untuk perkebunan non rakyat.

Produktivitas terbesar pada komoditas subsektor perkebunan unggulan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah komoditas kelapa sawit yang mencapai 4,06 ton/ha. Tingginya produktivitas ini juga sejalan dengan tingginya produksi kelapa sawit dan luas tanamnya. Komoditas karet juga memiliki produksi yang cukup tinggi mencapai 140.967,68 ton pada tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 0,32 ton/ha.

Tabel 2.32
Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Subsektor Perkebunan Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Thn)
1	Karet	446.932,87	140.967,68	0,32
2	Kelapa Kopra	30.448,10	13.598,65	0,45
3	Kopi	1.463,18	322,80	0,22
4	Lada	651,30	253,73	0,39
5	Kakao	1.317,66	147,74	0,11
6	Kelapa Sawit	1.339.832,43	5.436.462,21	4,06

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

Pada sub sektor perikanan juga memiliki prospek cerah karena Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kawasan perairan danau yang dapat dikembangkan menjadi usaha perikanan air tawar. Pada subsektor ini, sebagian besar produksi dihasilkan dari budidaya perikanan kolam (28.510,30 ton) dan keramba (27.967,79 ton).

Tabel 2.33
Produksi Budidaya Perikanan (Ton) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Jenis Budidaya	Jumlah Produksi (Ton)
1	Tambak	11.533,01
2	Kolam	28.510,30
3	Keramba	27.967,79
4	Jaring Apung	318,23
5	Budidaya Laut	364,43
6	Sawah	0,00

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016



Produktivitas padi (sawah maupun ladang) di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun sebelumnya hingga pada tahun 2015 mencapai produktivitas sebesar 3,51 ton/ha dengan total produksi 893.202 ton.

Tabel 2.34
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Tahun	Luas Panen		Produksi (ton)		Total luas panen	Total Produksi	Produktivitas Padi (ton/ha)
		Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang			
1	2010	146.964	100.082	451.762	197.075	247.046	698.808	2,83
2	2011	148.068	66.093	468.168	142.068	214.161	682.329	3,19
3	2012	168.733	83.054	569.818	185.689	251.787	821.605	3,26
4	2013	171.467	78.257	614.884	178.732	249.724	864.608	3,46
5	2014	190.755	55.330	725.704	127.325	246.085	853.029	3,47
6	2015	183.416	71.254	725.755	167.447	254.670	893.202	3,51

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2016 & Kalteng Dalam Angka, 2016

Pada subsektor peternakan jenis ternak, populasi terbesar pada ternak besar adalah ternak babi yang mencapai 190.016 ekor, diikuti oleh ternak sapi (68.531 ekor) dan ternak kambing (43.293 ekor), sedangkan populasi ternak kecil (unggas) didominasi oleh ternak ayam ras broiler yang mencapai 7.902.412 ekor diikuti ternak ayam buras (2.512.553 ekor) dan ternak itik (255.056 ekor).

Jika dilihat dari produksi dagingnya, paling banyak produksi daging adalah ayam ras broiler yang mencapai 11.487.446 kg, diikuti daging sapi potong sebanyak 4.061.071 kg, dan daging babi sebanyak 2.074.232 kg.

Tabel 2.35
Populasi dan Produksi Hasil Ternak Menurut Jenis Ternak
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
A.	Ternak			
1	Sapi Potong	68.531	4.061.071	-
2	Kerbau	11.417	67.146	-
3	Kambing	43.293	343.992	-
4	Domba	1.219	8.832	-
5	Babi	190.016	2.074.232	-
6	Kuda	31	-	-
7	Kelinci	1.469	-	-
B.	Unggas			
1	Ayam Buras/ Kampung	2.512.553		2.135.670
2	Ayam Ras/Petelur	111.776	34.582	1.402.789
3	Ayam Ras (Broiler)	7.902.412	11.487.446	-
4	Itik	255.056	139.689	1.499.602
5	Itik Manila	44.042	6.419	13.213



No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
6	Burung Puyuh	133.398	2.788	80.439
7	Merpati	6.723	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2016

b. Industri

Secara umum industri yang berkembang di provinsi Kalimantan Tengah meliputi industri pengolahan yang merupakan jenis usaha kecil, industri rumah tangga, dan industri menengah yang meliputi industri pangan, sandang, kerajinan, dan perkayuan. Dari beberapa jenis usaha kecil dan industri rumah tangga tersebut sudah dapat menampung tenaga kerja yang cukup besar sehingga sektor industri terutama mikro yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah berkembang dengan cukup baik.

Dalam sektor industri, peningkatan unit usaha terjadi pada industri besar dan sedang, dimana pada jumlah industri besar dan sedang mencapai 81 unit perusahaan dengan kapasitas tenaga kerja sebanyak 23.333 pekerja. Sejalan dengan industri besar dan sedang, pada industri kecil dan menengah mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai 5.164 unit padahal tahun sebelumnya hanya sebanyak 4.678 unit.

Tabel 2.36
Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Industri					
	Besar dan Sedang	59	73	66	80	81
	Kecil Menengah	4.461	4.401	4.807	4.678	5.164
2	Jumlah Tenaga Kerja					
	Besar dan Sedang	19.571	15.485	14.761	25.542	23.333
	Kecil Menengah	15.205	15.103	16.814	16.180	16.655

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

c. Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan



terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara umum, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Potensi pariwisata yang ada dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Destinasi pariwisata di Kalimantan Tengah tersebar di 14 kabupaten/kota, salah satu destinasi wisata yang terkenal sampai ke manca negara adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang terdapat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, merupakan kawasan tempat perlindungan *flora* dan *fauna*, khususnya orang utan. Selain itu beberapa destinasi wisata seperti Pantai Ujung Pandaran, Arboretum Reintroduksi Orang Utan, Taman Wisata Tangkiling dan termasuk wisata budaya seperti Rumah Betang dan Museum mulai berbenah untuk dikelola secara lebih baik. Untuk menunjang pariwisata ini juga setiap tahun digelar acara expo/pameran, sebagai media promosi bagi kabupaten/kota memperkenalkan daerahnya dan potensi yang ada.

Tabel 2.37
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

Wisatawan	2011	2012	2013	2014	2015
Wisatawan Mancanegara	1.213	2.052	12.557	14.014	15.017
Wisatawan Nusantara	197.964	194.721	205.688	238.887	358.593
Jumlah Wisatawan	199.177	196.773	218.245	252.901	373.610

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

d. Pertambangan

Dari segi luas wilayah, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut serta letak geografis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, maka secara fisik kawasan ini memiliki beberapa hasil tambang yang cukup potensial. Bahan penggalan yang saat ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi



berkembang dengan pesat seperti batubara, emas (dan mineral pengikat seperti perak), bijih besi, pasir zircon (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Dari keseluruhan jenis pertambangan tersebut, tambang batubara masih mendominasi baik terkait eksplorasi (1.831.009 ha) maupun produksinya (792.596 ha).

Tabel 2.38
Jumlah Izin Usaha Pertambangan dan Luas Wilayah (Eksplorasi dan Produksi) Menurut Jenis Pertambangan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Jenis Pertambangan	Eksplorasi		Produksi	
		Jumlah IUP	Luas (Ha)	Jumlah IUP	Luas (Ha)
1	Batubara	381	1.831.009	219	792.596
2	Zircon	43	206.717	73	113.395
3	Bijih Besi	38	203.449	22	51.245
4	Emas	32	212.016	4	10.490
5	Tembaga	2	17.176	-	-
6	Bauksit	7	31.615	9	11.816
7	Galena	10	33.738	4	5.792
8	Pasir	16	6.754	24	1.258
9	Pasir Kuarsa	4	16.703	-	-
10	Intan	1	10.000	-	-
11	Mineral Logam	3	66.300	-	-

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

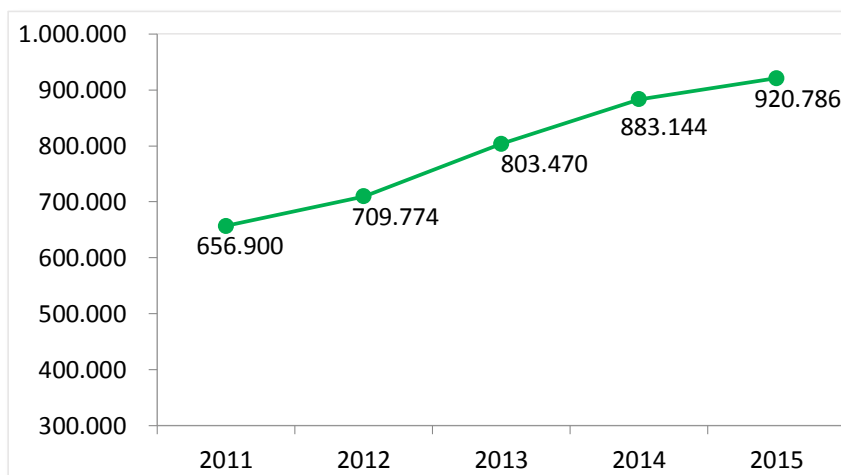
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi baik komoditas makanan maupun



non makanan selama sebulan. Di Provinsi Kalimantan Tengah, rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama lima tahun terakhir hingga pada tahun 2015 mencapai angka Rp. 920.786,-.

Gambar 2.20
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Rp.)



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita (53,74%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan (46,26%). Meskipun begitu, selama beberapa tahun terakhir persentase tersebut mulai bergeser yang mengindikasikan semakin sejahteranya penduduk Provinsi Kalimantan Tengah karena pengeluaran untuk kebutuhan primer bergeser ke pengeluaran kebutuhan sekunder bahkan tersier.

Tabel 2.39
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2012-2015 (Rp)

No.	Tahun	Makanan	Non Makanan	Total	% Makanan	% Non Makanan
1	2012	396.135	313.639	709.774	55,81	44,19
2	2013	443.484	359.986	803.470	55,20	44,80
3	2014	483.879	399.265	883.144	54,79	45,21
4	2015	494.858	425.928	920.786	53,74	46,26

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016



b. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya.

NTP pada bulan Desember tahun 2015 menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan petani (secara umum) dimana angka Nilai Tukar Petani kurang dari 100 yakni sebesar 97,74. Hal ini berarti hasil yang didapatkan petani masih lebih rendah dari pengeluaran petani baik untuk produksi maupun kesehariannya.

Jika dilihat dari subsektornya, petani yang memiliki NTP lebih dari 100 persen adalah petani subsektor hortikultura (103,52) dan perikanan (103,99). Khusus untuk petani tanaman pangan, NTP sebesar 100 sehingga apa yang dikeluarkan sama dengan apa yang didapatkannya. Sedangkan untuk subsektor perkebunan rakyat dan peternakan masih berada di bawah angka 100.

Tabel 2.40
Nilai Tukar Petani per Subsektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Tengah, Desember 2015

No.	Subsektor	NTP
1	Tanaman Pangan	100,00
2	Hortikultura	103,52
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	91,65
4	Peternakan	98,69
5	Perikanan	103,99
Nilai Tukar Petani Gabungan		97,74

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas Wilayah (RTRW Provinsi)

Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki integrasi dan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai wilayah yang sebagian besar masih tergolong hutan bioregion, Kalimantan Tengah memiliki RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berfokus pada pengelolaan hutan. Dalam pengelolaannya, RTRW membagi wilayah menjadi dua kawasan yakni kawasan hutan lindung (3.630.142 ha) dan kawasan budidaya (12.120.330 ha).



Tabel 2.41
Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Kalimantan Tengah

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Luas Wilayah (Ha)
A	Kawasan Hutan Lindung	
1	Hutan Lindung (HL)	1.391.604
2	Hutan Adat (HA)	600.000
3	Suaka Margasatwa (SM)	57.389
4	Cagar Alam (CA)	198.597
5	Taman Nasional (TN)	1.168.284
6	Taman Wisata Alam (TWA)	2.954
7	Taman Hutan Raya (Tahura)	35.627
8	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada Areal Ex. PLG	154.002
9	Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam (KEAH)	17.626
10	Kawasan Reservaat	23
11	Kawasan Lindung Lainnya	4.036
Total Kawasan Hutan Lindung		3.630.142
B	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.335.571
2	Hutan Produksi (HP)	3.896.706
3	Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi (HPK)	2.258.274
4	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.629.779
Total Kawasan Budidaya		12.120.330
Total Kawasan Hutan Lindung+Budidaya		15.750.472

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

b. Kelistrikan

Kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah sampai tahun 2015 mempunyai daya terpasang sebesar 253,929 MW mengalami peningkatan sebesar 21,858 MW atau 9,42% dibandingkan kondisi tahun 2011. Demikian juga Daya mampu, beban puncak, SUTR, SUTM dan Jumlah pelanggan mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kelistrikan Kalimantan Tengah saat ini telah mengalami perbaikan..

Kondisi **Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah** berdasarkan data tahun 2015 sebesar **69,8%** dan **Rasio Desa berlistrik 74,8%** dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.569 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 629.218 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari sumber energi baru terbarukan sebanyak 1.173 desa atau sebanyak 439.049 rumah tangga.



Tabel 2.42
Tabel Kondisi Kelistrikan Kalimantan Tengah Secara Umum

Jenis Jaringan	2011	2012	2013	2014	2015
Daya Terpasang (MW)	232,071	258,36	262,959	261,412	253,929
Daya Mampu (MW)	151,811	156,045	174,037	187,178	196,613
Beban Puncak (Mw)	125,941	163,393	156,750	189,342	171,640
SUTR (Kms)	3.145,16	3.197,84	3.365,85	3.417,148	4.434,73
SUTM (Kms)	3.838,93	4.309,02	4.351,81	4.777,50	5.288,69
Jumlah Pelanggan (RT)	318.246	362.458	408.335	451.256	471.124

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

3. Fokus Iklim Berinvestasi

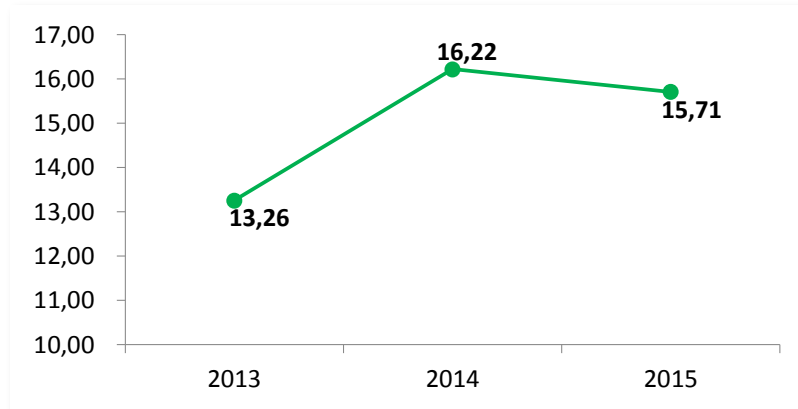
Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, keberlangsungan dan kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi.

a. Kriminalitas

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah cukup fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus dalam beberapa kasus terutama yang terkait SARA mengingat pernah terjadi kejadian luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah.

Angka kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mencapai 15,71 yang berarti terdapat 15-16 tindak kriminalitas diantara 10.000 penduduk.

Gambar 2.21
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016 (diolah)

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Sebagai pondasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi penentu dalam setiap pergerakan pembangunan melalui partisipasinya terhadap program kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itulah, kuantitas disertai kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu fokus tujuan awal pembangunan untuk memperkuat pondasi dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian suatu wilayah dimana memiliki andil dalam meningkatkan kualitas sistem pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja di suatu wilayah, maka diasumsikan semakin tinggi pula kualitas perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun begitu, tingginya kualitas tenaga kerja dalam hal ini tidak dipisahkan antara tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah maupun luar wilayah selama mereka bekerja untuk peningkatan perekonomian daerah tersebut.

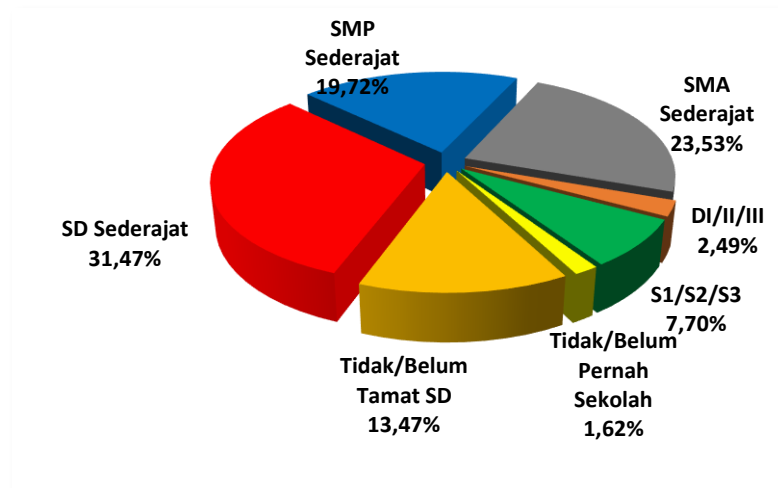
Sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah hanya pernah mengenyam pendidikan hingga SD sederajat yakni sebesar 31,47 persen, bahkan sebesar 15,09 persen tidak pernah mengenyam pendidikan atau belum tamat SD. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki pendidikan hingga SLTA sederajat juga cukup tinggi yakni mencapai 23,53 persen. Sedangkan tenaga kerja yang



sekolah hingga perguruan tinggi hanya sebesar 10,19 persen, baik sarjana maupun diploma.

Cukup rendahnya kualitas tenaga kerja dari segi pendidikan ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi persaingan nasional maupun global.

Gambar 2.22
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

b. Rasio Ketergantungan

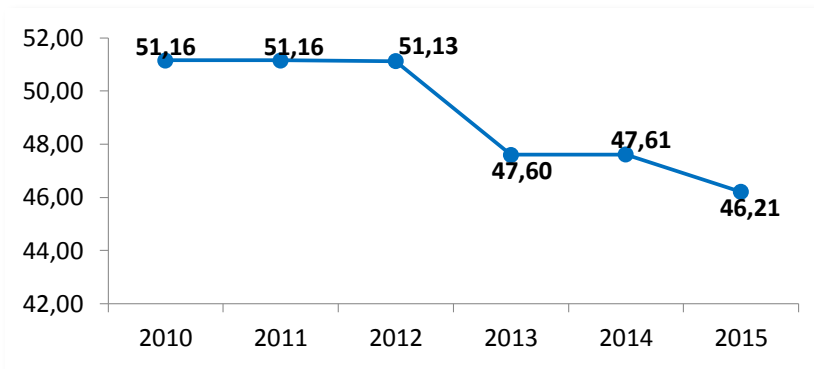
Salah satu analisis dalam melihat produktivitas penduduk suatu wilayah adalah dengan melihat sebaran kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki trend menurun yang berarti sebaran penduduk usia non produktif mulai berkurang jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Hal ini mengindikasikan ketergantungan penduduk usia non produktif semakin berkurang yang disebabkan beberapa kemungkinan seperti pergeseran usia remaja ataupun mortalitas penduduk usia tua.



Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 memiliki angka rasio ketergantungan sebesar 46,21 yang memiliki analisa umum yakni setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 46-47 penduduk usia non produktif (usia muda dan usia lanjut). Angka ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 angka ketergantungan mencapai 51,16.

Gambar 2.23
Rasio Ketergantungan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (diolah)

2.2. Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali setiap hal yang pernah dilaksanakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program dan kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu melalui evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan



baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Dengan demikian maka fokus dari evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan bagi perbaikan-perbaikan strategi, kebijakan dan program/kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, agar ke depan kinerja perencanaan pembangunan lebih berdayaguna dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap RPJMD secara umum adalah melihat pencapaian target kinerja indikator makro yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan terutama bidang yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Indikator makro yang menjadi target RPJMD periode sebelumnya (2010-2015), antara lain pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah, realisasi indikator hingga tahun 2015 menunjukkan trend peningkatan. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 mencapai 7,01 persen dimana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai 6,21 persen. Meskipun mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai target tahun 2015 (7,5 persen). Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi cukup stabil dan memiliki potensi positif dalam pergerakan perekonomian baik secara regional maupun global.

Sementara itu, beberapa target pembangunan daerah lain juga belum tercapai sesuai harapan RPJMD seperti capaian inflasi sebesar 4,74 persen (target sebesar 3 persen), angka kemiskinan sebesar 5,91 persen (target sebesar 2 persen), tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,54 persen kondisi agustus 2015 (target sebesar 2,5 persen), dan lain sebagainya.

Pada bahasan di atas cukup terlihat bahwa pencapaian target RPJMD periode sebelumnya masih belum memenuhi harapan para pemangku kebijakan di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, pada perumusan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perlu benar-benar diperhatikan, baik dalam menentukan “besaran” target indikator maupun tools untuk mencapai target kinerja tersebut sehingga tidak terjadi over estimate, over confidence terhadap target kinerja tanpa didukung dengan



sumberdaya yang optimal dari segi infrastruktur, organisasi, birokrasi maupun dukungan finansial daerah.

Perlu digarisbawahi, perencanaan yang optimal bukan semata dinilai berdasarkan pada target pembangunan daerah terhadap masing-masing indikator yang dipaksakan serendah-rendahnya atau setinggi-tingginya. Namun, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mengoptimalkan segala potensi sumber daya daerah sebagai modal dasar pencapaian pembangunan dan memiliki visi realistis secara maksimal dalam mencapai suatu target kinerja. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 perlu dilakukan penajaman, penyempurnaan, revisi, hingga penggantian strategi, kebijakan, sampai pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumnya untuk lebih mendorong kinerja pembangunan daerah yang tepat sasaran guna mewujudkan **Visi Kalteng BERKAH**.

Salah satu hal yang cukup mendasar terkait dengan ketidaktercapaian target kinerja tersebut adalah lemahnya pengendalian dan evaluasi, baik dari sisi institusi, mekanisme maupun sumber daya manusia. Sebenarnya tim pengawalan pencapaian target indikator kinerja telah banyak dibentuk, antara lain Tim Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi, Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tim Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlhut), dan sebagainya. Namun tim-tim tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Guna efektifitas pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2016-2021, akan dilakukan perbaikan dalam pengendalian dan evaluasi, sebagaimana tertuang dalam kaidah pelaksanaan RPJMD pada Bab X.



Tabel 2.43
Target dan Realisasi Kinerja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)											
		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	6,77	6,9	6,69	7,1	7,38	7,3	6,21	7,5	7,01	6,2-6,5	5,72*)
2.	Laju Inflasi (%)	6	4,55	5	5,85	4	6,79	3,0	7,07	2,5	4,74	4,5-4,6	3,18**)
3.	Angka Kemiskinan (%)	4,5	6,64	3,5	6,19	3	6,23	2,5	6,07	2	5,91	5,8	5,66***)
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5	2,55	3	3,08	2,75	3,00	2,5	3,24	2	4,54	4,5	3,67****)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016

Keterangan: *) : pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 (year on year)
**) : laju inflasi bulan September 2016 (year on year)
***) : angka kemiskinan bulan Maret 2016
****) : tingkat pengangguran terbuka bulan Februari 2016



Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni *pro poor*, *pro growth*, *pro job*, dan *pro environment*, perlu terus dilanjutkan pada perencanaan pembangunan menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Berdasarkan data capaian di atas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2015 belum melebihi target, harapan kondisi perekonomian saat ini secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Selain itu, secara umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai. Namun perlu ditekankan kembali, dari segi kualitas harus terus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain strategi prioritas nasional, fokus utama dalam evaluasi pembangunan adalah pencapaian indikator sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.44
Pencapaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2015)	Realisasi	Keterangan
1	Revitalisasi dan terciptanya klaster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota	1.1 Teridentifikasinya klaster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	PDRB	7,5 %	7,01 %	
		1.2 Tumbuhnya klaster ekonomi unggulan daerah yang belum berkembang.	Jumlah cluster ekonomi/Industri kecil & menengah	4.500 unit usaha	4.678 unit usaha	
2	Terselenggaranya penataan ruang yang memerhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah.	2.1 Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengarusutamakan lingkungan.	Perda RTRWP ditetapkan tidak bertentangan dengan RPJMD	1	1	Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
			Data kualitas udara dan air	UDARA = 81 AIR = 52	?	
		2.2 Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.	Dokumen KLHS, RPP LH, SLHD, NSDA telah terselesaikan	?	?	
			Rekomendasi Komda REDD dan Dewan Daerah Perubahan Iklim	?	?	
3	Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau	3.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	SD: 75,16 % SMP: 89,46 % SMA: 92,84 %	SD: 75,16 % SMP: 82,15 % SMA: 92,53 %	Data yang tersedia bukan jumlah guru (orang), tetapi persentase
			Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	?	?	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2015)	Realisasi	Keterangan
			Rupiah per-pendidik	?	?	
			Rupiah per-tenaga kependidikan	?	?	
		3.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (%)	SD: 119,50 SMP: 96,82 SMA: 70,09	SD: 114,76 SMP: 95,94 SMA: 70,70	
			Angka Partisipasi Murni (%)	SD: 99,04 SMP: 84,71 SMA: 67,24	SD: 98,54 SMP: 75,76 SMA: 52,36	
			Rasio murid terhadap guru (%)	?	SD: 46,00 SMP: 15,00 SMA: 11,00	
			Angka putus sekolah	?	7-12 thn: 0,16 13-15 thn: 6,50 16-18 thn: 33,28	
			Angka melek huruf (%)	99,80	98,90	
4	Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.	4.1 Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah rumah dinas tenaga pendidik (SMA)	?	?	
			Jumlah sekolah dengan akses jalan Roda 4	?	?	
		4.2 Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan.	Jarak sekolah SD/SMP/SMA dari permukiman	?	?	
5	Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.	5.1 Tersedianya standar pelayanan kesehatan.	Tersedianya Regulasi standar pelayanan kesehatan	?	?	
			Rasio dokter per satuan penduduk	40:100.000	23,8:100.000	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2015)	Realisasi	Keterangan
		5.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	40:100.000	36,8:100.000	
			Jumlah dokter yang memiliki ijin praktek	?	?	
6	Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.	6.1 Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita	10,87	10,13	
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,55	0,50	
			Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,08	0,075	
		6.2 Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.)	?	?	
			Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization	80%	68,13%	
7	Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.	7.1 Terwujudnya sistem transportasi, informasi dan komunikasi wilayah	Dokumen TATRAWIL	1 dokumen	1 dokumen	
		7.2 Terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasi dan Informatika	Sarana penunjang jaringan transportasi, komunikasi dan informatika	60%	80%	
		7.3 Terwujudnya peningkatan kelas bandara Tjilik Riwut dan Bandara penunjang di Kalimantan Tengah	Ditetapkannya bandara Tjilik Riwut sebagai bandara embarkasi haji antara	Tahun 2012	Tahun 2012	
8	Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.	8.1 Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.	Luas pengairan/irigasi	109.288 Ha	408.452 Ha	
			Luas pencetakan sawah	198.324 Ha	?	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2015)	Realisasi	Keterangan
9	Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.	9.1 Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi	Perda/Perkada tentang kelistrikan dan energi	1 perda	1 perda	Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi
		9.2 Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.	Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan	1.000 unit	264 unit	
		9.3 Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan.	Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH	90 %	86,25 %	
			Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik (unit)	359.574	628.061	
			Rasio Ketersediaan Daya Listrik	150 %	300 %	
			Rasio desa berlistrik	79,5	74,8	
10	Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu	10.1 Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.	Perda/Perkada bidang ekonomi	?	?	
		10.2 Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat	Persentase koperasi aktif	85%	73,03%	
			Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	42.500	298.979	
			Jumlah BPR/LKM	100	243	
		10.3 Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan	Jumlah pelatihan	?	?	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2015)	Realisasi	Keterangan
		10.4 Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan PDRB	7,5%	7,01%	
11	Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat	14.1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambun Bungai	Angka kriminalitas	2,079	15,71	
			Jumlah unjuk rasa	?	?	
			Sikap toleransi	?	?	
		14.2 Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.	Jumlah grup kesenian	188	195	
			Jumlah gedung kesenian	17	19	



Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan suatu bentuk capaian pembangunan daerah. Dengan melihat capaian pembangunan maka dapat terlihat secara nyata kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga capaian pembangunan dapat menjadi suatu dasar data dan informasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, melihat permasalahan daerah, kemudian permasalahan tersebut dipecahkan dengan tepat melalui kebijakan daerah. Dengan melihat pentingnya capaian pembangunan tersebut maka disajikan data capaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 – 2015 pada tabel 2.40 sebagai berikut:



Tabel 2.45
Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aspek Kesejahteraan							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Indikator Makro Pembangunan						
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	6,47	6,77	6,69	7,37	6,21	7,01
1.2	Laju inflasi provinsi (%)	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74
1.3	PDRB per kapita (Juta Rp.)	16,5	21,81	23,75	26,63	36,83	40,14
1.4	Angka Kemiskinan (%)	6,77	6,64	6,19	6,23	6,07	5,91
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	2,55	3,08	3,0	3,24	4,54
1.6	IPM	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53
1.7	Indeks Gini	0,291	0,326	0,321	0,337	0,343	0,317
II.	Kesejahteraan Sosial						
1	Pendidikan						
1.1	Angka Melek Huruf (%)	97,78	97,84	97,88	97,99	98,90	tad
1.2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03
1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	11,09	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	970	861	737	858	tad?	tad?
2.2	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	16,8	16,77	16,5	14,4	tad?	19,6
3	Ketenagakerjaan						
3.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	96,12	97,45	96,83	98,18	96,76	95,46



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
III.	Seni Budaya dan Olahraga						
1.	Kebudayaan						
1.1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah)	168	343	343	343	343	336
1.2	Jumlah gedung (unit)	10	19	19	19	19	19
2	Pemuda dan Olahraga						
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	50	0	0	26	46	46
2.2	Jumlah gedung olahraga (unit)	15	15	15	15	16	16
Aspek Pelayanan Umum							
I.	Pelayanan Urusan Wajib						
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan dasar:						
	SD/MI						
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	98,70	98,84	99,20	99,22	99,25	99,26
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	89,04	98,87	99,60	99,18	94,12	94,12
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	1:13	1:15	1:17	1:19	1:25	1:25
1.1.4	Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	35,45	45,65	55,95	65,79	75,16	75,16 ***
1.1.5	Angka partisipasi murni dan paket A	96,63	92,15	96,03	97,41	98,13	98,54
1.1.6	Angka partisipasi kasar	117,70	104,47	109,19	110,83	112,01	114,76
	SMP/MTs						
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	84,46	84,59	85,05	85,05	85,10	85,61
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	45,18	69,63	67,18	67,35	68,64	58,64
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	1:15	1:16	1:17	1:18	1:22	1:22



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.4	Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	55,00	59,16	68,8	79,53	82,15	82,15
1.1.5	Angka partisipasi kasar dan paket B	74,60	90,19	79,20	80,85	84,89	95,94
1.1.6	Angka partisipasi murni	61,30	66,62	65,11	68,15	75,40	75,76
1.2	Pendidikan menengah						
1.2.	Angka partisipasi sekolah	54,50	55,75	55,06	64,74	77,50	77,50
1.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	45,18	69,63	67,18	67,35	58,64	58,64
1.2.3	Rasio guru terhadap murid	1:14	1:16	1:17	1:18	1:20	1:20
1.2.4	Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	65,23	74,58	80,14	85,46	92,53	92,53
1.2.5	Prosentase sekolah SMA/SMALB/ SMK melaksanakan e-pembelajaran (e-learning) - (%)	5	8	12	14	16	16
1.2.6	Prosentase APK PLB setara SMALB (%)	53,33	55,89	57,14	58,23	59,43	59,58
1.2.7	Angka partisipasi kasar	57,61	58,32	60,65	58,85	67,74	70,70
1.2.8	Angka partisipasi murni	39,62	44,99	43,55	45,43	51,75	52,36
2	Kesehatan						
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	10,3	10	10,59	9,22	10,13	?
2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	2,42	2,42	2,53	2,45	2,39	2,34
2.3.	Rasio pustu per satuan penduduk			0,44	0,44	0,43	0,38
2.4	Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk	0,65	0,64	0,77	0,75	0,78	0,76
2.5.	Rasio dokter per satuan penduduk	tad	tad	0,32	0,35	0,36	0,3
2.6.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100.000 pddk)	28,47	28,45	33,54	29,31	31,51	30,01
2.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	56,73***	58,5	55,3	51	40,38	42,06



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.8	Umur Harapan Hidup (UHH) – (Tahun)	68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54
2.9	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	30	39	49	49	49	25
2.10	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	228	228	359	359	359	183
2.11	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)	16,70	16,77	16,5	14,4	tad	19,6
2.12	AKABA per 1000 Balita	34	23	56	56	56	56
3	Pekerjaan Umum						
3.1	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1.084,35	1.431,92	1.694,71	1.647,08	1.595,76	1.635,51
3.2	Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha)	224,02	33,02	34,1	34,75	34,80	34,80
3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,18	0,95	0,25	0,26	0,27	0,27
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	24,01	24,01	tad	44,05	44,05	35,38
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
3.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1:1,7	1:1,9	1:1,6	0,78	0,79	0,79
3.7	Rasio rumah layak huni	1 : 4,14	1 : 4,33	1 : 4,11	1 : 4,10	1 : 4,10	1 : 3,9
3.8	Rasio permukiman layak huni (%)	95,00	76,00	76,50	77,00	77,10	70,45
3.9	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	1.642,96	1.643,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ~ (Km)	11,057	11.445,63	12.366,00	11.869,48	11.869,48	11.869,48
3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (Km)	6.000,00	4.449,00	4.119,00	4.202,00	4.230,00	4.230,00
3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Km)	100,00	64,00	33,00	33,00	33,00	33,00
3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)	5,00	4,98	4,80	4,78	4,60	4,60
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar****	tad	tad	tad	tad	tad	tad



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.15	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)	35,81	14,45	5,04	2,70	2,75	2,75
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
3.17	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	35.503,00	68.538,00	68.300,00	90.700,00	91.500,00	91.500,00
3.18	Lingkungan Pemukiman (Ha)	1.607.113	1.421.150	1.501.204	1.581.258	1.581.258	1.581.258
4	Perumahan						
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	128.487	598.134	695.169	695.169	695.169	609.695
4.2	Rumah tangga pengguna listrik (Unit)	284.310	430.295	591.385	591.385	600.212	600.212
4.3	Rumah tangga bersanitasi (%)	24,01	82,61	85,10	87,59	88,1	88,1
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	5	13,2	11,5	9,9	9,7	10
4.5	Rumah layak huni (Unit)	544,231	519,191	556,473	566,139	570,154	570,154
5	Penataan Ruang						
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	7	7	4,99	4,99	5	5
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
6	Perencanaan Pembangunan						
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	-	-	-	-	-
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	-	1	-	-	-	-



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPД yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	2	2	2
6.4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPД (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
7	Perhubungan						
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	119.511.749	157.647.630	157.822.630	157.922.630	160.281.946	162.779.225
7.2	Load Factor Angkutan Jalan (%)	50	60	60	60	60	70
7.3	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	21.867	23.080	24.537	25.337	28.660	30.278
7.4	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (Unit)	191	210	213	215	218	221
7.5	Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada)	11	15	22	28	32	34
7.6	Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)	200	244	113	113	113	113
7.7	Jumlah Angkutan Sungai (Unit)	4781	60	75	75	83	50
7.8	Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah)	9	9	9	9	9	9
7.9	Jumlah Bandara (Buah)	9	9	9	9	9	9
7.10	Jumlah Dermaga Sungai (Buah)	118	118	146	149	232	234
7.11	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	10	13	13	19	19	19
7.12	Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit)	21.867	23.080	24.537	25.337	28.660	30.278
7.13	Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari)	2	2	2	2	2	2
7.14	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp. Ribu)	60	60	75	75	75	85
7.15	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	673	773	1.023	1.863	2.313	2.948
7.16	Pemasangan Rambu Sungai (Unit)	542	1.000	1.050	1.250	1.385	1.395
7.17	Pemasangan Rambu SBNP (Unit)	70	70	90	90	90	102



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
8	Lingkungan Hidup						
8.1.	Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	22	26	19	8	8	8 ***
8.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *	50,38	50	49	69,53	70,37	70,37 ***
8.3	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Kabupaten/Kota)	14	14	14	14	14	14
8.4	Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH	7	8	9	11	14	14
8.5	Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)	6	2	2	2	0	6
8.6	Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup (%)	50	21	9	19	18	25
8.7	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kabupaten/kota)	1	1	2	14	14	14
8.8	Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)*	-	-	-	-	-	12
9	Pertanahan						
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	6,23	tad	tad	tad	tad	tad
9.2	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Ha)*	tad	tad	tad	6,7	28,08	37,60
9.3	Penyelesaian kasus tanah Negara (jumlah kasus)	71	tad	tad	tad	tad	tad
9.4	Penyelesaian Izin lokasi ****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	54	60	66	67	68	80



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	45	46	47	48	50	54
10.3	Rasio pasangan berakte nikah	-	45	47	47,5	48	57
10.4	Kepemilikan KTP (orang)	968.345	1.162.568	1.265.238	1.315.178	1.341.630	1.349.663
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	-	31	43	50	55	57
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Manual	Digital Online	Digital Online	Digital Online	Digital Online	Digital Online ***
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	12 Kab/Kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,04	7,19	8,31	9,14	8,49	8,00
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	9,22	11,04	9,71	12,59	16,78	15,18
11.3	Rasio KDRT	0,0052	0,0054	0,0106	0,0066	0,0210	0,0306
11.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,57	0,56	0,58	11,23	0,53	0,53
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	52,01	56,16	51,28	49,41	49,97	35,66
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	139	106	189	123	135
11.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	68,62	69,48	70,35	68,61	77,90	-
11.8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)*	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	-
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,79	1,06	1,00	1,00	0,80	1,1
12.2	Rasio akseptor KB	22,73	79,28	74,69	77,15	76,47	77,91
12.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	298,91	394,46	355,421	384,547	353,322	376,606
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	191,474	209,279	194,108	188,555	188,730	183,937



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
13	Sosial						
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	100	4	4	4	4	4
13.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (Orang)	1.275	953	973	550	614	1078
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)	120	105	140	175	120	174
14	Ketenagakerjaan						
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	534	tad	tad	tad	tad	tad
14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	140	3	20	4	57	172
14.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,86	72,89	69,90	72,63	68,56	71,11
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	3,142	2,164	1,400	406	1,738	1,570
14.5.	Keselamatan dan perlindungan	174,975	145,259	200,653	216,634	215,069	27,491
14.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus)	tad	0	0	0	tad	tad
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
15.1	Persentase koperasi aktif (%)	74,34	71,15	72,80	78,23	73,03	73,03
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	41,613	213	216	460	298.979	299.979
15.3	Jumlah BPR/LKM (Unit)	63	12	17	17	243	243
15.4	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	274,788	298,979	298,979	298,979	298.979	298.979
16	Penanaman Modal						
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	372	380	420	442	468	473
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta rupiah)	17.791.499,66	22.341.369,59	36.433.566,48	39.673.132,18	46.360.379,83	33.138.153,41
	- PMDN (juta rupiah)	8.109.436,82	9.191.372,19	24.076.123,88	25.679.488,08	25.880.318,24	27.992.647,91
	- PMA (US \$ Ribu)	17.959.019,879	17.959.519,87	2.177.886,32	1.948.949,47	3.278.674,07	1.088.548,80



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
16.3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	25,6	26	29	31	39	32
16.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4,08	25,57	63,08	8,79	16,96	28,52
17	Kebudayaan						
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	1	2	1	2	2
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	2
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490	487	487	487	490	490
18	Kepemudaan dan Olahraga						
18.1	Jumlah organisasi pemuda	62	62	62	65	66	66
18.2	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	43	42
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	50	67	65	63	40	35
18.4	Jumlah kegiatan olahraga	27	30	35	45	76	60
18.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	33	33	34	37	37	37
18.6	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	207	210	289	289	289	289
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM)	tad	4	5	4	8	6
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol)	tad	1	2	1	4	6
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	50	50	55	60	68	133



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	30	35	59	60	65	65
20.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	10	12	12	12	12	12
20.4.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
20.5	Penegakan Perda (buah)	2	3	5	5	5	3
20.6	Cakupan patroli petugas Satpol PP	14	14	30	30	30	48
20.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	0	0	0	3	5	5*
20.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang)	11.621	0?	13.050	13.186	15.827	15.827***
20.9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
20.1 0	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
20.1 1	Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui kegiatan Percetakan Brosur dan Penggandaan Peraturan Penanggulangan Bencana (Paket Kegiatan)*	0	0	0	1	1	1
20.1 2	Pengadaan Paket Logistik (Paket Kegiatan)*	0	0	0	1	1	1
20.1 3	Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (Paket Kegiatan, Posko Siaga Bencana) *	0	1	1	1	1	1
20.1 4	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (paket)	210	tad	tad	tad	tad	tad
20.1 5	Sistem Informasi Manajemen Pemda****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
20.1 6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	-	70,19	77,23



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
20.1 7	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) *	71,10	76,28	65,78	64,15	79,00	73,46
20.1 8	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) *	D	C	C	CC	B	B
20.1 9	Nilai Inovasi Pelayanan Publik *	-	-	-	-	-	A
20.2 0	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *	-	-	-	-	31,46	47,52
20.2 1	Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) *	397	444	593	457	484	506
20.2 2	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah *	9	9	9	9	9	9
21	Ketahanan Pangan						
21.1	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	2	1	2	3	1	1
21.2	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	93.330	66.083	142.805	169.891	174.185	213.614
21.3	Penguatan Cadangan Pangan (%) *	-	27,20	28,02	36,80	32,65	34,65
21.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) *	-	35,96	21,92	16,17	21,31	33,33
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	2,7	3	4	5	6	6
22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,8	1,99	2,30	2,35	2,37	2,37
22.3	Jumlah LSM (buah)	150	150	150	150	150	150
22.4	LPM Berprestasi (%)	6,73	3,6	4,8	6,0	tad	6,0 **
22.5	PKK aktif (Unit)	1470	1480	1492	1565	1428	1.428
22.6	Posyandu aktif (Unit)	110	2141	2200	2236	2210	2210
22.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Paket)	562	562	562	562	562	562
22.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Paket)	260	260	260	260	260	260



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
23	Statistik						
23.1	Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka"	1	1	1	1	1	1
23.2	Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	2	2	2	2	2	2
24	Kearsipan						
24.1	Pengelolaan arsip secara baku (lembar)	4.650	5.430	6.210	6.990	7.760	7.760
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	72	83	94	105	116	127
25	Komunikasi dan Informatika						
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
25.2	Desa dering/Telepon Pedesaan (Unit)	1131	1131	1131	1131	1131	1131
25.3	Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)	132	132	132	132	132	132
25.4	Warung masyarakat Informasi	1	0	0	0	0	0
25.5	Pusat Komunitas Kreatif (buah)	0	1	1	1	1	1
25.6	M-CAP (Mobile Capacity Acces Point)	1	1	1	1	1	1
25.7	M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit)	0	98	98	98	98	98
25.8	Data Center (buah)	1	1	1	1	1	1
25.9	Media Center (buah)	1	1	1	1	1	1
25.1 0	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,0000653	0,0001621	0,0002311	0,0003011	0,0001011	0,0001011
25.1 1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	-	-	-	-	13	13
25.1 2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	59/16	23/2	23/2	23/2	66/1	66/1
25.1 3	Web site milik pemerintah daerah (buah)	15	0	0	15	15	15
25.1 4	Pameran/expo terkait Kominfo	-	-	-	-	-	-
26	Perpustakaan						



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
26.1	Jumlah perpustakaan (Unit)	124	215	227	227	227	227
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	269.366	279.366	289.366	296.366	309.266	319.366
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)	85.521	86.65	91.65	96.75	105.315	106.850
II.	Pelayanan Urusan Pilihan						
1	Pertanian dan Peternakan						
1.1	Luas tanam tanaman pangan						
1.1.1	Padi sawah (Ha)	141.582	159.256	183.652	182.634	176.171	198.324
1.1.2	Padi ladang (Ha)	66.602	86.177	102.461	63.915	71.798	78.107
1.1.3	Jagung (Ha)	4.712	5.774	4.404	3.715	4.729	6.072
1.1.4	Kedelai (Ha)	3.465	2.751	1.896	1.595	1.463	1.136
1.1.5	Kacang Tanah (Ha)	880	694	667	511	544	431
1.1.6	Kacang Hijau (Ha)	222	150	237	91	95	51
1.1.7	Ubi Kayu (Ha)	6.320	4.216	3.949	3.666	3.211	2.593
1.1.8	Ubi Jalar (Ha)	1.429	1.528	1.587	1.328	1.240	977
1.2.	Luas Panen tanaman pangan						
1.2.1	Padi sawah (Ha)	147.495	148.068	168.733	169.651	186.509	183.416
1.2.2	Padi ladang (Ha)	100.082	66.093	83.054	77.822	55.979	71.254
1.2.3	Jagung (Ha)	3.247	3.195	2.752	2.062	2.594	2.507
1.2.4	Kedelai(Ha)	2.397	2.443	1.448	1.413	1.166	1.052
1.2.5	Kacang Tanah (Ha)	924	689	687	564	470	465
1.2.6	Kacang Hijau (Ha)	206	125	210	127	70	52
1.2.7	Ubi Kayu (Ha)	6.488	4.181	3.939	3.406	3.608	3.031
1.2.8	Ubi Jalar (Ha)	1.350	1.205	1.339	1.292	1.270	1.049
1.3	Produktivitas tanaman pangan						



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.3.1	Padi sawah (Ku/Ha)	30,74	31,62	33,77	37,43	38,03	39,57
1.3.2	Padi ladang (Ku/Ha)	19,69	21,50	22,36	22,84	23,02	23,50
1.3.3	Jagung (Ku/Ha)	28,78	28,82	28,88	25,30	31,37	32,66
1.3.4	Kedelai (Ku/Ha)	11,53	11,56	11,74	11,92	11,98	12,00
1.3.5	Kacang Tanah (Ku/Ha)	11,17	11,20	11,22	11,24	11,26	11,26
1.3.6	Kacang Hijau (Ku/Ha)	8,25	8,24	8,24	8,27	8,43	8,46
1.3.7	Ubi Kayu (Ku/Ha)	118,17	118,33	118,38	119,68	120,13	150,81
1.3.8	Ubi Jalar (Ku/Ha)	70,99	71,12	71,14	71,27	71,24	91,90
1.4	Produksi tanaman pangan						
1.4.1	Padi sawah (Ton)	453.341	468.168	569.818	634.920	709.357	725.755
1.4.2	Padi ladang (Ton)	197.075	142.068	185.689	177.732	128.850	167.447
1.4.3	Jagung (Ton)	9.345	9.208	7.947	5.217	8.138	8.189
1.4.4	Kedelai (Ton)	2.764	2.823	1.700	1.684	1.397	1.262
1.4.5	Kacang Tanah (Ton)	1.032	772	771	634	529	523
1.4.6	Kacang Hijau (Ton)	170	103	173	105	59	44
1.4.7	Ubi Kayu (Ton)	76.669	49.475	46.630	40.762	43.342	45.712
1.4.8	Ubi Jalar (Ton)	9.583	8.570	9.525	9.208	9.048	9.640
1.5	Luas Panen Tanaman Hortikultura						
1.5.1	Buah-Buahan (Ha)	6.202.496	5.574.390	4.290.025	3.346.216	4.090.695	3.185.622
1.5.2	Sayuran (Ha)	9.754	10.522	11.191	11.799	11.569	31.056
1.5.3	Tanaman Hias (M2)	18.370	16.843	17.889	13.922	28.413	17.718
1.5.4	Tanaman Obat (M2)	458.292	587.888	728.056	646.657	778.822	709.986
1.6	Produksi Tanaman Hortikultura						
1.6.1	Buah-Buahan (Ku)	1.123.246	1.284.548	1.087.063	1.048.571	1.308.120	1.152.212
1.6.2	Sayuran (Ku)	297.231	293.169	278.442	333.234	334.636	319.327



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.6.3	Tanaman Hias (Tangkai)	81.234	68.571	79.040	83.928	66.076	50.255
1.6.4	Tanaman Obat (Kg)	1.440.833	1.364.016	1.888.523	1.694.110	1.731.006	1.467.206
1.7	Populasi Ternak						
1.7.1	Sapi Potong (Ekor)	72.180	42.246	59.385	51.92	65.197	71.445
1.7.2	Kerbau (Ekor)	5.988	6.413	6.778	9.809	10.466	11.463
1.7.3	Kambing (Ekor)	47.185	35.260	46.674	43.463	39.595	43.368
1.7.4	Domba (Ekor)	1.803	990.000	1.884	2>341	2.004	1.502
1.7.5	Babi (Ekor)	192.481	132.352	183.532	193.900	182.442	190.016
1.7.6	Ayam Buras (Ekor)	3.897.909	1.950.748	3.028.271	3.167.218	2.663.843	2.512.553
1.7.7	Ayam Ras Petelur (Ekor)	62.440	19.511	37.330	40.900	94.912	111.776
1.7.8	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	4.455.671	2.936.947	5.225.358	4.892.196	7.274.673	7.902.412
1.7.9	Itik (Ekor)	252.503	143.360	281.063	261.318	271.014	255.056
1.8	Produksi Ternak						
1.8.1	Sapi Potong (Ton)	3.830,54	3.991,91	4.154,17	4.277,19	3.843,99	4.061,07
1.8.2	Kerbau (Ton)	-	26,40	28,05	44,95	56,14	67,15
1.8.3	Kambing (Ton)	117,41	214,64	320,13	338,68	315,25	343,99
1.8.4	Domba (Ton)	216,43	1,20	2,98	4,25	9,97	8,83
1.8.5	Babi (Ton)	4,81	2.021,00	2.374,77	433,64	1.548,74	2.074,23
1.8.6	Ayam Buras (Ton)	3.614,86	4.470,06	2.069,82	2.125,02	2.017,86	1.903,26
1.8.7	Ayam Ras Petelur (Ton)	48,91	33,19	29,28	40,90	21,07	34,58
1.8.8.	Ayam Ras Pedaging (Ton)	12.580,97	17.654,41	15.566,32	7.338,29	10.912,01	11.487,45
1.8.9	Itik (Kg)	145,92	285,17	148,94	143,12	148,43	139,69



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.9.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	2,46	2,17	2,20	2,13	2,20	2,33
1.10.	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,49	1,42	1,48	1,50	1,52	1,59
1.11	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%)	4,01	1,65	2,62	3,38	6,75	5,32
1.12	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%) ****	28,2***	tad	tad	tad	tad	tad
1.13	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	14,90	14,70	13,99	13,73	14,49	13,41
1.14	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	12,21	11,70	12,12	12,15	tad	12,15 **
1,15	Cakupan bina kelompok petani****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
2	Perkebunan						
2.1	Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)	75	14	14	14	14	19
2.2	Penerimaan devisa ekspor per tahun dari komoditas perkebunan (US\$ Juta)	80	255	95	90	95	112
2.3	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)	15	6	9	7	7	7
2.4	peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US\$/KK/Tahun)	1.500-2.000	700	650	700	600	600
2.5	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	15.000	23.703	24.798	20.533	20.600	31.400
2.6	Peningkatan pertumbuhan sub sektor sektor perkebunan (%)	5,49***	12,95	5,15	5,25	5,25	7,00
2.7	Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)	13	3	3	3	3	3



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.8	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun)	150	150	150	150	150	150
3	Kelautan dan Perikanan						
3.1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (Ton)	25.659	30.686,19	51.236,29	53.159	60.848,59	68.693,7
3.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	101.999	96.428,8	90.675,40	105.560,80	104.082,2	130.526,1
3.3	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	35,72	44,36	44,36	45,89	46,19	46,35
3.4	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (Ton) *	9.523	15.17	21.421	25.550	28.422	28.510
3.5	peningkatan produksi benih ikan (Juta ekor)	25.667.000	39.797.000	52.128.000	42.868.000	54.020.000	55.620.000
3.6	Nilai Tukar Nelayan (%) *	106,63	104,05	107,14	104,04	104,64	103,85
3.7	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%) *	2,48	2,48	2,62	2,59	2,46	2,59
4	Kehutanan						
4.1	Penataan kawasan hutan (Jumlah peta penataan kawasan hutan)	-	1	1	1	0	0
4.2	Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen)	-	2	2	1	1	1
4.3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)	27	50	50	50	50	60
4.4	Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (unit)	-	40	56	56	60	60
4.5	Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam (jumlah dokumen)	1	-	1	2	2	0
4.6	Pembedayaan masyarakat local di sekitar kawasan hutan (orang)	30	30	30	30	30	40



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.7	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)	1	1	1	1	1	1
4.8	Pencegahan, pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan)	1	1	1	1	2	2
4.9	Penghijauan dan reboisasi (jumlah batang pohon bibit)	-	5.320	18.716	25.000	45.000	36.000
4.10	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)	-	40	40	40	40	40
5	Pariwisata						
5.1	Kunjungan wisata - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara	35.401	199.177 197.964 1.213	196.773 194.721 2.052	218.245 205.668 12.577	252.901 238.887 14.014	373.610 358.593 15.017
5.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,32	1,54	1,54	1,50	1,50	1,50
5.3	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah *	29,14	55,06	53,6	54,47	55,42	54,84
6	Perdagangan						
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,97	10,73	10,53	10,04	11,33	11,64
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	148.559.164	1.254.690.000	1.017.670.000	1.320.000.000	990.000.000	990.000.000
6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP	3.889	4.593	3.733	4.342	6.296	6.296
7	Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	15,36	14,57	13,99	13,69	16,04	16,15
7,2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
7.3	Pertumbuhan Industri, (unit)	5.649	4.461	4.401	4.807	4.678	5.164
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	11.776	15.205	15.103	16.814	16.180	16.655



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
8	Ketransmigrasian						
8.1	Transmigran swakarsa (KK)	50	0	118	0	0	0
8.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%) ****	10	tad	tad	tad	tad	tad
Aspek Daya Saing							
I.	Kemampuan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	tad	656.900	709.774	803.470	883.144	920.786
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan ****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
1.3.	Produktivitas total daerah****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
2	Pertanian						
2.1	Nilai Tukar Petani %	102,88	101,1	99,25	98,31	101,29	98,66
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1	Perhubungan						
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	18,23	15,88	13,70
1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang)	119.513.879/ 8.545.183	157.647.630/ 12.124.442	157.650.000/ 12.124.842	157.653.570/ 12.125.442	160.281.946/ 12.158.364	162.779.225/ 12.185.214
1.3	Jumlah pengguna angkutan umum *	143.335	146.456	158.763	169.872	171.948	172.948
2	Penataan Ruang						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,7	?	41,65	41,65	tad	72
2.2.	Luas wilayah produktif (Juta Ha)	2	tad	tad	tad	tad	tad
2.3.	Luas wilayah industri (Ha)	15	tad	tad	tad	tad	tad
2.4.	Luas wilayah banjir (Ha)	1.364.523	tad	tad	tad	tad	tad
2.5.	Luas wilayah kekeringan****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
2.6.	Luas wilayah perkotaan (Ha)	289.000	tad	tad	tad	tad	tad



No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	155	166	170	147	147	155
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	35	tad	tad	tad	tad	35
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Buah)	243	tad	567	567	502	519
3.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (Buah)	316	315	309	317	336	377
4	Komunikasi dan Informatika						
4.1	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	106	137	125	150	225	300
4.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	47,4	61,1	60,6	65,1	69,3	69,8
4.3	Rasio desa berlistrik (%)	61,6	65,7	67,9	74,4	77,3	74,8
4.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	76,07	tad	tad	75,83	76,62	76,07
III.	Iklm Berinvestasi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Angka kriminalitas	tad	tad	tad	13,26	16,22	15,71
1.2.	Jumlah demo****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
1.3.	Lama proses perijinan (ljin/Hari)	7/37	tad	tad	tad	tad	tad
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%)	7/109,23; 3/99,88	6/136,76; 3/102,54	4/130,62; 3/108,84	4/86,02; 3/80,02	tad	tad
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda) ****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
1.6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	30,04	tad	tad	tad	tad	tad
IV.	Sumber Daya Manusia						
1	Ketenagakerjaan						
1.1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	317	tad	tad	tad	tad	tad
1.2.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	11,99	tad	tad	tad	tad	tad
1.2	Rasio ketergantungan (%)	51,16	51,16	51,13	47,60	47,61	46,21



Keterangan :

- | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|------|---|---------------------|
| * | : | Indikator baru pada RPJMD 2016-2021 | *** | : | Data tahun 2014 |
| ** | : | Data tahun 2013 | **** | : | Data tidak tersedia |



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Daerah memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2015, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut.



3.1. Kinerja Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)
2011	815.244,77	1.921.944,86	42,42%
2012	945.362,71	2.514.031,29	37,60%
2013	1.093.821,49	2.809.096,14	38,94%
2014	1.253.708,12	3.129.694,75	40,06%
2015	1.174.969,27	3.252.747,36	36,12%
2016	1.233.094,36	3.427.236,87	35,98%
Rata-rata	1.086.033,45	2.842.458,55	38,21%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat kecil yaitu rata-rata 38,21 persen. Diharapkan di tahun – tahun mendatang, pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, APBD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang stabil. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang tersaji pada tabel berikut ini.



Tabel 3. 2
Perkembangan APBD dan Realisasi APBD
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (Juta rupiah)

URAIAN	Realisasi					Rata-rata pertumbuhan (%)	Anggaran 2016*)
	2011	2012	2013	2014	2015		
Pendapatan	1.921.945	2.514.031	2.809.096	3.129.695	3.252.748	14,55	3.427.236
Belanja	1.524.344	2.351.347	2.928.726	3.235.800	3.482.434	24,23	3.328.971
Surplus (Defisit)	397.601	162.684	(119.630)	(106.106)	(229.686)	-31,86	138.276
Penerimaan Pembiayaan	132.101	451.606	559.334	386.720	294.181	52,73	3.244
Pengeluaran Pembiayaan	78.097	55.000	53.000	104.888	25.085	-2,85	141.520
Pembiayaan Netto	54.004	396.606	506.334	281.832	269.096	153,30	(138.276)
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	451.605	559.290	386.705	175.726	39.410	-34,79	0

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

*) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Dari tahun 2011 sampai 2015 pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan, dan diikuti dengan meningkatnya total belanja daerah. Pada 3 tahun pertama, SILPA cukup besar pada tiap tahunnya. Dengan SILPA yang sedemikian besar tiap tahun, maka isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah pada saat itu adalah bagaimana meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan, sehingga penyerapan APBD dapat ditingkatkan demi optimalisasi hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan sehingga pada tahun 2015 SILPA menjadi relatif kecil yakni hanya sebesar 39,41 milyar rupiah.

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase pertumbuhan realisasi pendapatan APBD tahun 2011-2015 fluktuatif dengan rata-rata sebesar 14 persen dan disaat bersamaan, belanja hanya mengalami fluktuatif sebesar 24 persen. Di sini terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan menjadi harapan yang baik bagi optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan. Meskipun demikian, PAD harus tetap diperhatikan kekonsistennannya agar proporsi PAD terhadap pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan. Untuk melihat perilaku (*behaviour*) dari pendapatan, pada tabel 3.3 berikut akan ditunjukkan perkembangan dari komponen pendapatan secara lebih rinci.



Tabel 3. 3
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (dalam Juta rupiah)

Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran*)	Realisasi**)
Pendapatan	1.712.570,05	1.921.944,86	2.260.466,38	2.514.031,29	2.730.453,50	2.809.096,14	3.164.139,12	3.129.694,75	3.545.258,45	3.252.747,57	3.427.236,88	1.798.479,93
1. Pendapatan Asli Daerah	654.805,15	815.244,77	748.307,99	945.362,71	1.046.981,74	1.093.821,49	1.244.990,12	1.253.708,12	1.370.090,50	1.174.969,27	1.233.094,36	525.355,66
1.1 Pajak	517.303,70	707.444,90	640.400,00	836.503,95	926.717,46	973.244,83	1.116.695,33	1.087.630,50	1.222.627,47	1.019.293,67	992.000,00	461.818,74
1.2 Retribusi	6.332,60	6.493,50	6.397,80	6.963,11	7.202,82	7.371,57	8.515,81	9.065,20	8.832,38	9.674,08	10.241,90	88.040,80
1.3 Hasil Pengelolaan Kek. Daerah yang Dipisahkan	17.500,00	19.942,19	20.548,50	22.159,32	25.203,65	25.298,65	29.760,68	29.760,68	37.000,00	37.075,68	44.850,00	43.956,98
1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	113.668,85	81.364,18	80.961,70	79.736,33	87.857,81	87.906,43	90.018,30	127.251,75	101.630,65	108.925,84	186.002,45	19.491,90
2. Dana Perimbangan	1.032.711,33	1.083.088,12	1.234.620,35	1.296.011,13	1.406.916,25	1.442.477,67	1.604.443,27	1.557.416,50	1.781.104,36	1.673.376,69	2.114.424,11	1.251.669,94
2.1 Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	184.980,00	235.356,78	233.180,00	294.570,78	281.100,00	316.661,42	390.084,71	343.057,93	427.982,55	320.254,88	339.870,36	176.225,49
2.2 DAU	795.816,33	795.816,34	951.256,07	951.256,07	1.062.516,94	1.062.516,94	1.152.428,74	1.152.428,74	1.280.595,85	1.280.595,85	1.118.399,18	755.329,28
2.3 DAK	51.915,00	51.915,00	50.184,28	50.184,28	63.299,31	63.299,31	61.929,83	61.929,83	72.525,96	72.525,96	245.126,85	81.707,23
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	25.053,57	23.611,98	277.538,03	272.657,45	276.555,50	272.796,98	314.705,73	318.570,12	394.063,60	404.401,62	574.914,13	259.880,28
3.1 Hibah	0,00	0,00	14.460,23	13.842,58	12.844,27	6.738,34	7.850,00	8.518,90	5.840,37	10.310,50	0,00	2.014,13
3.2 Pendapatan lainnya	18.000,00	16.558,41	18.000,00	17.658,41	18.303,41	8.060,35	13.218,71	13.218,71	28.218,71	15.637,00	21.718,41	19.440,20
3.3 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	7.053,57	7.053,57	245.077,80	241.156,46	245.407,82	248.391,26	290.593,70	249.744,86	356.835,80	371.403,36	459.675,72	236.710,95
3.4 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,71	13.218,71	0,00	0,00	93.520,00	1.715,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Keterangan: *) Perubahan APBD TA. 2016 **) realisasi pendapatan sampai bulan Juni 2016



Dari tabel perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah sudah baik. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa kinerja penerimaan daerah mencapai atau bahkan melebihi target, meskipun pada tahun 2014 dan 2015 perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan. Pertumbuhan tahunan dan rata-rata dari masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (dalam Juta rupiah)

Uraian	Realisasi					Proyeksi	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
PENDAPATAN	1.921.944,86	2.514.031,29	2.809.096,14	3.129.695,75	3.252.747,57	3.427.236,88	12,65
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	815.244,77	945.362,71	1.093.821,49	1.253.708,12	1.174.969,27	1.233.094,35	8,99
Pajak	707.444,90	836.503,95	973.244,83	1.087.630,50	1.019.293,67	992.000,00	7,48
Retribusi	6.493,50	6.963,11	7.371,57	9.065,20	9.674,08	10.241,90	9,73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg. Dipisahkan	19.942,19	22.159,32	25.298,65	29.760,68	37.075,68	44.850,00	17,69
Lain-Lain PAD yang Sah	81.364,18	79.736,33	87.906,43	127.251,75	108.925,84	186.002,45	21,87
B. DANA PERIMBANGAN	1.083.088,12	1.296.011,13	1.442.477,67	1.557.416,50	1.673.376,69	2.172.424,11	14,55
Bagi Hasil Pajak Pusat	235.356,78	294.570,78	316.661,42	343.057,93	320.254,89	339.870,36	8,09
DAU	795.816,34	951.256,07	1.062.516,94	1.152.428,74	1.280.595,85	1.118.399,18	6,72
DAK	51.915,00	50.184,28	63.299,31	61.929,83	72.525,96	245.126,85	55,15
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	23.611,98	272.657,45	272.796,98	318.570,12	404.401,62	574.914,13	228,14
Hibah	-	13.842,58	6.738,34	8.518,90	10.310,50	0,00	-20,77
Pendapatan Lainnya						21.718,41	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.053,57	3.731,23	248.391,26	249.744,86	371.403,36	459.675,72	1.316,6
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah	16.558,41	17.658,41	8.060,35	13.218,71	13.218,71	93.520,00	124,75
Pendapatan Lainnya	-	-	9.607,04	292.165,45	7.050,75	-	0

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



Dari tabel di atas, secara umum terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari tiga komponen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 12,65 persen.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2011 sampai dengan periode tahun 2015 mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tersebut. Perkembangan neraca ini terutama terkait dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2011 sampai 2015. Total aset dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami kenaikan dari semula Rp. 5.763.199.270.000,00 menjadi Rp.11.054.965.000.000,00. Secara rinci pertumbuhan neraca Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5
Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2011-2015 (dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Aset						
1,1	Aset Lancar	655.851,39	870.492,20	738.538,37	791.720,38	759.975,82	5,19
1.1.1	Kas	451.623,66	559.377,89	386.711,68	176.191,77	54.362,66	-32,65
1.1.2	Piutang	5.209,21	45.227,03	45.179,68	2.958,38	5.417,31	189,44
1.1.3	Persediaan	16.703,00	15.199,77	45.446,71	214.960,38	270.805,17	147,24
1.1.4	Investasi Jangka Panjang	182.315,52	250.687,52	261.199,99	397.609,85	429.390,67	25,48
1,2	Aset Tetap	4.810.358,03	7.539.952,11	8.226.704,48	8.985.962,42	10.286.707,00	22,39
1.2.1	Tanah	537.093,77	1.992.882,82	1.992.753,13	2.021.064,39	2.020.822,72	68,11
1.2.2	Peralatan Dan Mesin	287.330,50	354.354,12	437.069,44	420.064,89	462.495,78	13,22



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.2.3	Gedung Dan Bangunan	477.424,81	533.767,45	637.111,95	872.036,82	1.062.186,78	22,46
1.2.4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	3.459.285,89	4.427.026,26	4.626.837,96	5.592.237,26	6.197.095,41	16,04
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	20.434,16	26.304,13	49.471,91	56.769,07	60.764,13	34,65
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.788,90	205.617,33	483.460,09	23.790,00	85.050,07	227,94
1,3	Aset Lainnya	291.870,97	181.463,89	377.730,90	403.989,53	398.309,57	18,97
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	1.884,42	1.585,99	2.320,59	740,37	0	-34,40
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	846,53	821,49	821,49	0	287,65	0
1.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Aset Tak Berwujud	2.369,86	3.131,49	4.857,86	5.200,83	10.002,01	46,66
1.3.5	Aset Lain-Lain	286.770,17	175.924,91	369.730,95	398.048,34	388.019,91	19,16
	Jumlah Aset	5.763.199,27	8.612.809,70	9.380.673,54	10.237.049,60	11.054.965,00	18,87
2	Kewajiban	0	0	0	0	0	0
2,1	Kewajiban Jangka Pendek	96.622,58	110.691,06	119.604,87	120.136,84	164.460,00	14,99
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	19,07	6,85	6,85	289,65	51,65	995,55
2.1.2	Uang Muka Dari Kas Daerah	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	102.886,29	0
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	96.603,52	110.684,22	119.598,02	119.847,19	61.521,25	-6,46
2,2	Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kewajiban	96.622,58	110.691,06	119.604,87	120.222,20	164.460,00	14,98



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
3	Ekuitas Dana	0	0	0	0	0	0
3,1	Ekuitas Dana Lancar	376.913,29	509.113,61	357.733,20	273.973,70		-29,52
3.1.1	Silpa	451.604,59	559.289,89	386.704,83	175.726,24		-40,39
3.1.2	Cadangan Piutang	5.209,21	45.227,03	45.179,68	2.958,38		143,66
3.1.3	Cadangan Persediaan	16.703,00	15.199,77	45.446,71	214.960,38		115,75
3.1.4	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0	81,15	0	175,89		0
3.1.5	Dana Yang Disediakan Untuk Hutang Jangka Pendek	-96.603,52	-110.684,22	-119.598,02	119.847,19		-69,39
3,2	Ekuitas Dana Investasi	5.284.544,52	7.972.103,52	8.865.635,37	9.787.476,44		-6,88
3.1.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	4.810.358,03	7.539.952,11	8.226.704,48	8.985.962,42		-6,23
3.1.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	291.870,97	181.463,89	377.730,90	403.989,53		-5,68
3.1.3	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	182.315,52	250.687,52	261.199,99	397.609,85		-1,52
	Jumlah Ekuitas Dana	5.666.576,69	8.502.118,63	9.500.264,71	10.116.827,40	8.448.838,19	12,95
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	5.763.199,27	8.612.809,70	9.619.869,58	10.237.049,60	8.613.299,00	12,92

Sumber: Biro Keuangan dan Biro Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



Untuk menganalisis neraca Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2011-2015 digunakanlah beberapa analisis rasio seperti:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Provinsi Kalimantan Tengah adalah rasio lancar dengan rumusan seperti di bawah ini:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Dikarenakan neraca pada pemerintah daerah sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terutama pada aset lancar.

Tabel 3. 6
Rasio Lancar
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Aset Lancar	655.851,39	870.492,20	738.538,37	791.720,38	759.975,82
Kewajiban Lancar	96.622,58	110.691,06	119.604,86	120.222,19	164.460
Rasio Lancar	6,79	7,87	6,18	6,59	4,63

Sumber: Biro Aset dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Dengan rasio lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah sangat likuid dengan kemampuan pengembalian hutang lancar mencapai 3,27 terhadap aset lancarnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio *leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana aktiva entitas dibiayai oleh hutang sehingga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio *leverage* adalah:



a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Ekuitas}}$$

Tabel 3.7
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kewajiban	96.622,58	110.691,00	119.604,86	120.222,19	164.460,00
Ekuitas	5.666.576,69	8.502.118,63	9.500.264,70	10.116.827,40	8.448.838,19
Total Debt to equity Ratio	0,0171	0,0130	0,0125	0,01188	0,0194

Sumber: Biro Aset dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kemampuan modal untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

b. Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Total Aktiva}}$$



Tabel 3. 8
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kewajiban	96.622,58	110.691,00	119.604,86	120.222,19	164.460
Aktiva	5.758.080,39	8.591.908,20	9.342.973,75	10.181.672,33	11.444.992,39
Total Debt to Total Aset Ratio	0,0168	0,0129	0,0127	0,0117	0,0143

Sumber: Biro Aset dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas entitas dalam menggunakan aktiva (aset) yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber daya entitas. Dikarenakan adanya perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan perusahaan, maka dalam laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dilihat adalah tingkat rasio pemanfaatan sumber daya entitas dalam menggali PAD. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam mengukur aktivitas laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- a. Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva Tetap}}$$

Tabel 3. 9
Rasio Perputaran Aktiva Tetap
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	815.244,77	945.362,71	1.093.821,49	1.253.708,12	1.174.969,27
Aktiva Tetap	4.810.358,03	7.539.952,11	8.226.704,48	8.985.962,42	10.286.707,00
Rasio Perputaran aktiva tetap	0,17	0,13	0,13	0,14	0,15

Sumber: Biro Aset dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



Dengan rasio perputaran aktiva tetap sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 perputaran aktiva sebesar 14 persen.

b. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva}}$$

Tabel 3. 10
Rasio Perputaran Total Aktiva
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	815.244,77	945.362,71	1.093.821,49	1.253.708,12	1.174.969,27
Aktiva	5.758.080,39	8.591.908,20	9.342.973,75	10.181.672,33	11.444.992,39
Rasio Perputaran Total Aktiva	0,1416	0,1100	0,1171	0,1231	0,1027

Sumber: Biro Aset dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Dengan rasio perputaran total aktiva sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perputaran aktiva berada di 12,31 persen. Hal ini dapat dipahami, karena sebagian besar aset tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung dalam menghasilkan PAD.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Setiap Perangkat Daerah (PD) dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Perangkat Daerah (PD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Keuangan Daerah dan secara administratif harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD.



Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2011-2015 disusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Biro Keuangan yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Badan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolaan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan, Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Provinsi Kalimantan Tengah pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Disclaimer
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)

URAIAN	REALISASI					PROYEKSI	RATA-RATA PER-TUMBUHAN (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	712.053,81	1.229.065,95	1.361.950,80	1.485.025,74	1.649.116,75	1.751.361,04	21,94
Belanja Pegawai	294.770,42	321.002,51	346.955,36	385.757,11	434.769,09	550.832,57	10,22
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	102,5	0
Belanja Subsidi	20.580,94	18.438,99	13.579,96	13.704,96	1.779,02	1.163,30	-30,71
Belanja Hibah	21.500,73	357.148,37	289.034,92	332.463,90	604.198,44	588.883,24	409,70
Belanja Bantuan Sosial	82.097,68	116.714,90	59.366,72	69.886,62	67.090,69	37,492	1,69
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota	248.637,42	372.548,06	485.973,44	527.398,94	372.558,29	564.248,63	14,86
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Partai Politik	42.852,97	43.083,83	165.887,72	154.816,27	165.953,96	5.300,00	71,52
Belanja Tidak Terduga	1.613,64	129,3	1.152,68	967,94	2.767,26	3.338,80	217,34
B. BELANJA LANGSUNG	812.290,46	1.122.281,37	1.566.774,81	1.750.774,46	1.823.317,05	1.577.609,67	16,04
Belanja Pegawai	64.050,68	65.931,23	67.960,91	71.273,65	139.076,93	152.824,56	23,18
Belanja Barang dan Jasa	315.899,79	420.535,88	558.211,28	864.992,98	735.098,57	624.506,89	18,15
Belanja Modal	432.339,99	635.814,26	940.602,63	814.507,82	959.141,54	800.278,22	16,56
C. JUMLAH BELANJA	1.524.344,27	2.351.347,32	2.928.725,62	3.235.800,20	3.482.433,80	3.328.970,71	18,50

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya. Tingginya SILPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Provinsi Kalimantan Tengah dimana hal tersebut menggambarkan belanja pemerintah kurang



diberdayakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13
SILPA
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	SILPA (Rp)
2011	451.604,59
2012	559.289,88
2013	386.704,83
2014	175.726,23
2015	39.409,80

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

SILPA Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Perkembangan Persentase SILPA yang digunakan untuk membiayai belanja Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14
Persentase SILPA
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	SILPA	Pengeluaran APBD
2011	451.604,59	1.524.344,27
2012	559.289,88	2.351.347,31
2013	386.704,83	2.928.725,62
2014	175.726,23	3.235.800,19
2015	39.409,80	3.482.433,79

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Analisis kemandirian keuangan daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah dapat menyelenggarakan otonominya secara efektif dan efisien yang bersumber dari pendanaan sendiri. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa model, salah satunya dengan rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pengeluaran Daerah}} \times 100$$



Tabel 3. 15
Rasio Kemandirian Keuangan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	Total PAD	Pengeluaran Daerah	Rasio PAD/Total Pengeluaran (%)
2011	815.244.76	1.524.344.27	53,48
2012	945.362.71	2.351.347.31	40,21
2013	1.093.821.49	2.928.725.62	37,35
2014	1.253.708.12	3.235.800.19	38,74
2015	1.174.969,27	3.482.433,79	33,74

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Dengan rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 rasio kemandirian berada pada angka 38,74% dan tahun 2015 berada pada angka 33,74%.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2016-2021 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemda dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan), bunga, subsidi, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga. Perkiraan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah sebagaimana tabel 3.16 berikut.



Tabel 3. 16
Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA. 2017	RAPBD TA. 2018	RAPBD TA. 2019	RAPBD TA. 2020	RAPBD TA. 2021	Rata-rata (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.124.985.799.086	1.940.232.551.000	1.896.271.725.565	1.940.054.546.882	2.012.310.571.479	2.090.245.883.731	16,02%
a	Belanja Pegawai	550.832.571.315	1.284.851.349.000	1.316.972.632.725	1.349.896.948.543	1.383.644.372.257	1.418.235.481.563	28,65%
b	Belanja Bunga	102.500.000	-	-	-	-	-	-
c	Belanja Subsidi	1.163.300.000	1.163.300.000	1.163.300.000	1.163.300.000	1.163.300.000	1.163.300.000	0,00%
d	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	564.248.627.771	597.917.902.000	540.835.792.840	578.694.298.339	619.202.899.223	662.547.102.168	3,48%
e	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	5.300.000.000	36.300.000.000	27.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	95,91%
f	Belanja Tidak Terduga	3.338.800.000	20.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	71,80%
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	101.509.989.866	164.990.000.000	69.900.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	-	-13,27%
a	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	90.000.000.000	90.000.000.000	-	-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40.009.989.866	164.990.000.000	69.900.000.000	-	-	-	-
b.1	Penyertaan Modal pada PT. Bank kalteng	40.009.989.866	154.990.000.000	69.900.000.000	-	-	-	-
b.2	Penyertaan Modal pada PT. Banama Tingang Makmur	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-
c	Pembayaran Pokok Utang	61.500.000.000	-	-	-	-	-	-
d	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
Total Belanja Wajib & Mengikat		1.226.495.788.952	2.105.222.551.000	1.966.171.725.565	2.030.054.546.882	2.102.310.571.479	2.090.245.883.731	14,25%

Sumber: Hasil Analisis



Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dikategorikan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) dalam rangka **pencapaian visi dan misi** Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Selaian itu prioritas I juga mengamanatkan kebijakan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi misi Gubernur. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II

Program **Prioritas II** merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, berhubungan dengan **layanan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah** dalam melaksanakan **urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya**, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk **alokasi belanja tidak langsung** seperti: belanja hibah, dan belanja bantuan sosial (organisasi kemasyarakatan). Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.



3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Berikut **proyeksi penerimaan** daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode **2016-2021**:



Tabel 3. 17
Proyeksi Penerimaan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA. 2017	RAPBD TA. 2018	RAPBD TA. 2019	RAPBD TA. 2020	RAPBD TA. 2021	RATA-RATA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.427.236.875.000	4.088.792.553.726	4.158.299.667.225	4.294.901.405.931	4.427.978.426.995	4.615.506.131.000	6,32%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.233.094.359.800	1.327.494.134.000	1.577.720.774.000	1.636.892.724.000	1.700.447.469.000	1.793.067.004.000	7,92%
1.1.1.	Pajak Daerah	992.000.000.000	1.088.380.040.000	1.125.627.250.000	1.161.089.640.000	1.211.945.910.000	1.266.127.680.000	5,03%
1.1.2.	Retribusi Daerah	10.241.903.800	9.934.994.000	9.892.924.000	10.082.984.000	10.310.709.000	10.527.724.000	0,57%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	44.850.000.000	50.204.000.000	252.208.000.000	275.210.000.000	307.213.000.000	335.215.000.000	88,83%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	186.002.456.000	178.975.100.000	189.992.600.000	190.510.100.000	170.977.850.000	181.196.600.000	-0,33%
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.172.424.105.200	2.760.273.619.726	2.579.533.393.225	2.656.943.431.931	2.726.443.432.995	2.821.329.127.000	5,92%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.703.396.385.200	2.143.548.424.726	1.960.308.198.225	2.027.718.236.931	2.087.218.237.995	2.172.103.932.000	5,55%
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	172.165.322.000	147.925.558.000	110.535.263.375	116.887.235.712	120.550.150.021	125.312.425.688	-5,31%
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	167.705.035.052	163.537.809.300	127.375.041.850	138.433.108.219	144.270.194.974	149.393.613.312	-1,63%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.118.399.176.148	1.612.657.546.426	1.545.432.013.000	1.595.432.013.000	1.645.432.013.000	1.720.432.013.000	10,19%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	245.126.852.000	219.427.511.000	176.965.880.000	176.965.880.000	176.965.880.000	176.965.880.000	-5,97%
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	459.675.720.000	613.295.195.000	615.795.195.000	625.795.195.000	635.795.195.000	645.795.195.000	7,72%
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Penyesuaian	459.675.720.000	613.295.195.000	615.795.195.000	625.795.195.000	635.795.195.000	645.795.195.000	7,72%



No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA. 2017	RAPBD TA. 2018	RAPBD TA. 2019	RAPBD TA. 2020	RAPBD TA. 2021	RATA-RATA (%)
1.2.4	Bantuan Keuangan	9.352.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	-12,66%
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	9.352.000.000	3.185.000.000	3.185.000.000	3.185.000.000	3.185.000.000	3.185.000.000	-13,19%
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Kota	-	245.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.718.410.000	1.024.800.000	1.045.500.000	1.065.250.000	1.087.525.000	1.110.000.000	-17,44%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	21.718.410.000	1.024.800.000	1.045.500.000	1.065.250.000	1.087.525.000	1.110.000.000	-17,44%
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.243.825.472	62.364.824.000	-	-	-	180.000.000.000	-
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	3.243.825.472	62.364.824.000	-	-	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	180.000.000.000	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	3.430.480.700.472	4.151.157.377.726	4.158.299.667.225	4.294.901.405.931	4.427.978.426.995	4.795.506.131.000	7,17%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016; hasil analisis



Proyeksi penerimaan Provinsi Kalimantan Tengah tiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,17 persen selama 6 (enam) tahun (2016-2021), dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2016-2021 rata-rata sebesar 7,92 persen. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, mengindikasikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah cukup memiliki kemandirian fiskal dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan tahun 2016-2021.

Berdasarkan data tabel 3.17 tersebut di atas, terlihat bahwa proyeksi target PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2016-2021 berturut-turut adalah 35,98 persen, 32,47 persen, 37,94 persen, 38,11 persen, 38,40 persen, dan 38,85 persen pada tahun 2021. Sedangkan proyeksi perbandingan target PAD terhadap total pendapatan transfer tahun 2016-2021 berturut-turut adalah 57,01 persen, 48,15 persen, 61,24 persen, 61,69 persen, 62,45 persen dan 63,63 persen pada tahun 2021.

Peningkatan proyeksi target PAD secara signifikan diarahkan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Guna merealisasikan PAD dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain: revitalisasi BUMD/Perusda dan ekstensifikasi usaha dalam berbagai sektor, seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, jasa konstruksi dan bidang usaha lainnya melalui penyertaan saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat tersebut pada tabel 3.16 dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil adalah dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan rumusan total penerimaan dikurangi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Tabel 3.18 berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.



Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 3.16 dan 3.17 tersebut di atas, dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 18
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021(dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata (%)
I	Penerimaan	3.430.480.700.472	4.151.157.377.726	4.158.299.667.225	4.294.901.405.931	4.427.978.426.995	4.795.506.131.000	7,17%
	<i>dikurangi:</i>							
II	Belanja Wajib dan Mengikat dan Prioritas Utama	1.226.495.788.952	2.105.222.551.000	1.966.171.725.565	2.030.054.546.882	2.102.310.571.479	2.090.245.883.731	14,25%
	Kapasitas Riil (I-II)	2.203.984.911.520	2.045.934.826.726	2.192.127.941.660	2.264.846.859.049	2.325.667.855.515	2.705.260.247.269	4,46%

Sumber: Hasil analisis



Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi kapasitas keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 19
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2016-2021 (dalam Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata (%)
Prioritas I	1.051.242.138.749	1.059.640.346.201	1.205.200.761.934	1.263.537.981.322	1.309.601.783.789	1.626.391.745.542	9,44%
Prioritas II	526.367.530.771	503.550.689.799	525.143.389.000	541.525.087.000	556.282.281.000	619.084.711.000	3,42%
Prioritas III	626.375.242.000	482.743.790.726	461.783.790.726	459.783.790.726	459.783.790.726	459.783.790.726	-5,54%
Total	2.203.984.911.520	2.045.934.826.726	2.192.127.941.660	2.264.846.859.048	2.325.667.855.515	2.705.260.247.268	4,46%

Sumber: Hasil analisis

Penetapan anggaran tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya anggaran, tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar anggaran ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang diproyeksikan untuk menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah di masa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun baris total untuk kolom rupiah menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal dalam menetapkan pagu indikatif program atau pagu indikatif urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara simultan hal tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk persentase final prioritas III. Berikut rincian anggaran yang dialokasikan untuk prioritas III.



Tabel 3. 20
Alokasi Prioritas III
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata (%)
Belanja Bantuan Sosial	37.492.000.000	30.960.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-21,02%
Belanja Hibah	588.883.242.000	451.783.790.726	451.783.790.726	451.783.790.726	451.783.790.726	451.783.790.726	-4,66%
Total	626.375.242.000	482.743.790.726	461.783.790.726	459.783.790.726	459.783.790.726	459.783.790.726	-5,54%

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Secara garis besar, proyeksi kerangka pendanaan tahun 2016-2021, yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut. Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam perkembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD tahun 2017-2021).



Tabel 3. 21
Proyeksi Kerangka Pendanaan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah)

No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA. 2017	APBD TA. 2018	APBD TA. 2019	APBD TA. 2020	APBD TA. 2021	RATA-RATA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.427.236.875.000	4.088.792.553.726	4.158.299.667.225	4.294.901.405.931	4.427.978.426.995	4.615.506.131.000	6,32%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.233.094.359.800	1.327.494.134.000	1.577.720.774.000	1.636.892.724.000	1.700.447.469.000	1.793.067.004.000	7,92%
1.1.1.	Pajak Daerah	992.000.000.000	1.088.380.040.000	1.125.627.250.000	1.161.089.640.000	1.211.945.910.000	1.266.127.680.000	5,03%
1.1.2.	Retribusi Daerah	10.241.903.800	9.934.994.000	9.892.924.000	10.082.984.000	10.310.709.000	10.527.724.000	0,57%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	44.850.000.000	50.204.000.000	252.208.000.000	275.210.000.000	307.213.000.000	335.215.000.000	88,83%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	186.002.456.000	178.975.100.000	189.992.600.000	190.510.100.000	170.977.850.000	181.196.600.000	-0,33%
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.172.424.105.200	2.760.273.619.726	2.579.533.393.225	2.656.943.431.931	2.726.443.432.995	2.821.329.127.000	5,92%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.703.396.385.200	2.143.548.424.726	1.960.308.198.225	2.027.718.236.931	2.087.218.237.995	2.172.103.932.000	5,55%
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	172.165.322.000	147.925.558.000	110.535.263.375	116.887.235.712	120.550.150.021	125.312.425.688	-5,31%
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	167.705.035.052	163.537.809.300	127.375.041.850	138.433.108.219	144.270.194.974	149.393.613.312	-1,63%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.118.399.176.148	1.612.657.546.426	1.545.432.013.000	1.595.432.013.000	1.645.432.013.000	1.720.432.013.000	10,19%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	245.126.852.000	219.427.511.000	176.965.880.000	176.965.880.000	176.965.880.000	176.965.880.000	-5,97%
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	459.675.720.000	613.295.195.000	615.795.195.000	625.795.195.000	635.795.195.000	645.795.195.000	7,72%
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Penyesuaian	459.675.720.000	613.295.195.000	615.795.195.000	625.795.195.000	635.795.195.000	645.795.195.000	7,72%
1.2.4	Bantuan Keuangan	9.352.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	3.430.000.000	-12,66%
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	9.352.000.000	3.185.000.000	3.185.000.000	3.185.000.000	3.185.000.000	3.185.000.000	-13,19%
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Kota	-	245.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	0,00%



No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA. 2017	APBD TA. 2018	APBD TA. 2019	APBD TA. 2020	APBD TA. 2021	RATA-RATA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.718.410.000	1.024.800.000	1.045.500.000	1.065.250.000	1.087.525.000	1.110.000.000	-17,44%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	21.718.410.000	1.024.800.000	1.045.500.000	1.065.250.000	1.087.525.000	1.110.000.000	-17,44%
2.	BELANJA	3.328.970.710.606	3.986.167.377.726	4.088.399.667.225	4.204.901.405.931	4.337.978.426.995	4.795.506.131.000	7,77%
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.751.361.041.086	2.422.976.341.726	2.358.055.516.291	2.399.838.337.608	2.472.094.362.205	2.550.029.674.457	8,72%
2.1.1	Belanja Pegawai	550.832.571.315	1.284.851.349.000	1.316.972.632.725	1.349.896.948.543	1.383.644.372.257	1.418.235.481.563	28,65%
2.1.2	Belanja Bunga	102.500.000	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	1.163.300.000	1.163.300.000	1.163.300.000	1.163.300.000	1.163.300.000	1.163.300.000	0,00%
2.1.4	Belanja Hibah	588.883.242.000	451.783.790.726	451.783.790.726	451.783.790.726	451.783.790.726	451.783.790.726	-4,66%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	37.492.000.000	30.960.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-21,02%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	564.248.627.771	597.917.902.000	540.835.792.840	578.694.298.339	619.202.899.223	662.547.102.168	3,48%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	5.300.000.000	36.300.000.000	27.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	95,91%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.338.800.000	20.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	71,80%
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8)	1.751.361.041.086	2.422.976.341.726	2.358.055.516.291	2.399.838.337.608	2.472.094.362.205	2.550.029.674.457	8,72%
2.2	Belanja Langsung	1.577.609.669.520	1.563.191.036.000	1.730.344.150.934	1.805.063.068.323	1.865.884.064.789	2.245.476.456.543	7,56%
2.2.1	Belanja Pegawai	152.824.558.398	125.055.282.880	121.124.090.565	126.354.414.783	111.953.043.887	134.728.587.393	-1,61%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	624.506.891.323	625.276.414.400	640.227.335.846	667.873.335.279	634.400.582.028	763.461.995.225	4,43%
2.2.3	Belanja Modal	800.278.219.799	812.859.338.720	968.992.724.523	1.010.835.318.261	1.119.530.438.874	1.347.285.873.926	11,24%
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2.2.1 s/d 2.2.3)	1.577.609.669.520	1.563.191.036.000	1.730.344.150.934	1.805.063.068.323	1.865.884.064.789	2.245.476.456.543	7,56%
D	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH (B + C)	3.328.970.710.606	3.986.167.377.726	4.088.399.667.225	4.204.901.405.931	4.337.978.426.995	4.795.506.131.000	7,77%
E.	SURPLUS / (DEFISIT)	138.276.154.260	102.625.176.000	69.900.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	(180.000.000.000)	-65,78%



No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA. 2017	APBD TA. 2018	APBD TA. 2019	APBD TA. 2020	APBD TA. 2021	RATA-RATA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.243.825.472	62.364.824.000	-	-	-	180.000.000.000	-
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	3.243.825.472	62.364.824.000	-	-	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	180.000.000.000	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-	-	-
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)	3.243.825.472	62.364.824.000	-	-	-	180.000.000.000	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	141.519.979.732	164.990.000.000	69.900.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	-	-22,46%
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	90.000.000.000	90.000.000.000	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40.009.989.866	164.990.000.000	69.900.000.000	-	-	-	-
3.2.2.1.	Penyertaan Modal pada PT. Bank kalteng	40.009.989.866	154.990.000.000	69.900.000.000	-	-	-	-
2.2.2.3.	Penyertaan Modal pada PT. Banama Tingang Makmur	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	61.500.000.000	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)	141.519.979.732	164.990.000.000	69.900.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	-	-22,46%
H	Pembiayaan Netto (F-G)	(138.276.154.260)	(102.625.176.000)	(69.900.000.000)	(90.000.000.000)	(90.000.000.000)	180.000.000.000	-65,78%
I	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H+E)	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng, 2016; Biro Keuangan Setda Provinsi Kalteng, 2016



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu permulaan yang relevan. Melalui analisis permasalahan, pemerintah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat prediksi berbagai peluang ataupun ancaman bagi pelaksanaan pembangunan. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional, untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan tepat sasaran dan faktor penghambat lajunya pembangunan dapat diantisipasi dengan menjadikannya sebagai akselerator capaian pembangunan.

Hal tersebut pada akhirnya menjadi poin utama dalam merumuskan kebijakan, sehingga perencanaan diharapkan mampu menjadi poros untuk menentukan prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Optimalisasi pembangunan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi untuk permasalahan yang ada. Penuntasan dan penyelesaian permasalahan merupakan esensi dari tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan tahapan demi tahapan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah, mengingat permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks dan multidimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.



Permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan ini nantinya akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang tepat, relevan, efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu, penting adanya pengendalian dan evaluasi capaian kegiatan serta program sebagai bagian dari pemahaman tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dimasa lalu untuk memecahkan setiap permasalahan pembangunan.

Identifikasi permasalahan dapat diverifikasi dari informasi dan kinerja yang telah dicapai sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum pada bab gambaran umum kondisi daerah. Segala perbandingan perihal apa yang telah dicapai terhadap standar dan rencana atau dengan melakukan *benchmarking*, dapat diketahui berbagai kinerja pembangunan yang masih harus diperbaiki. Selain itu, pemahaman berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan pembangunan akan terdeteksi melalui kajian dan analisis indikator kinerja pemerintah.

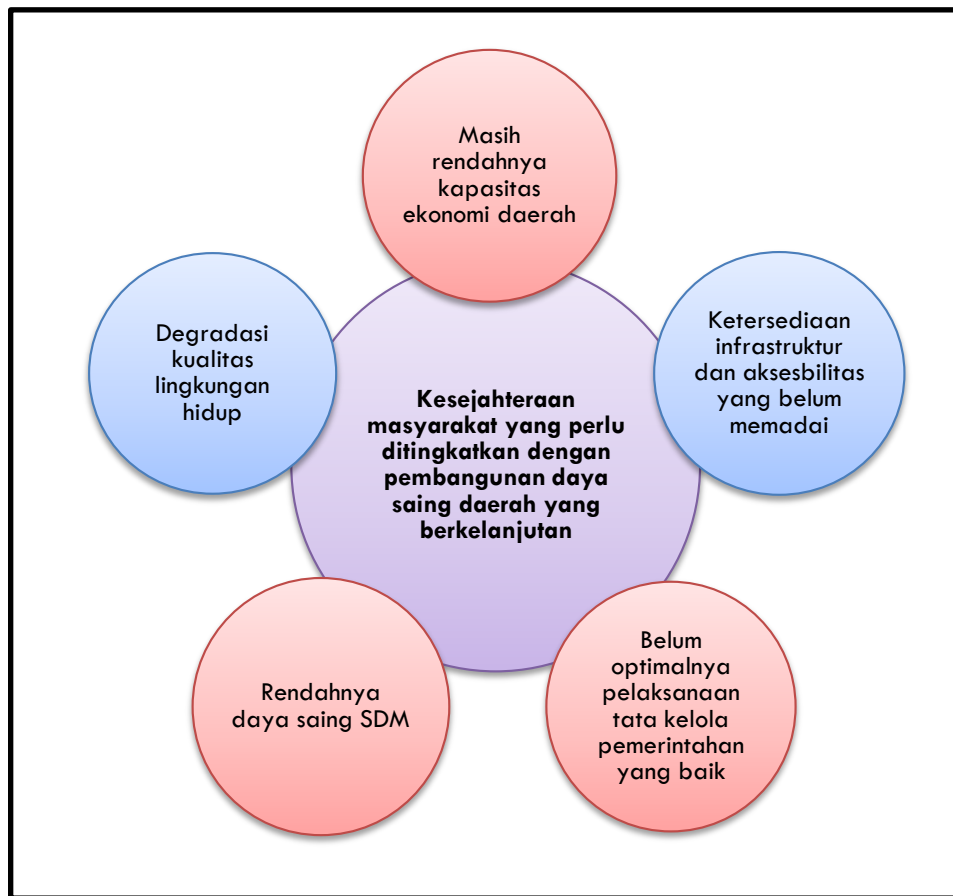
Dari hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu **“Kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh beberapa permasalahan pokok Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah;
2. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Rendahnya daya saing SDM; dan
5. Degradasi kualitas lingkungan hidup.

Berikut ini pemetaan permasalahan-permasalahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah periode 2016-2021:



Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah



Pengelolaan potensi sumber daya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan realisasi perumusan sistem pemerintahan desentralisasi (otonomi daerah) dalam penyelenggaraan efisiensi pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi baik sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan pencapaian pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam menentukan perencanaan kebijakan yang disempurnakan dengan berbagai tahapan evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Permasalahan pokok pembangunan daerah akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

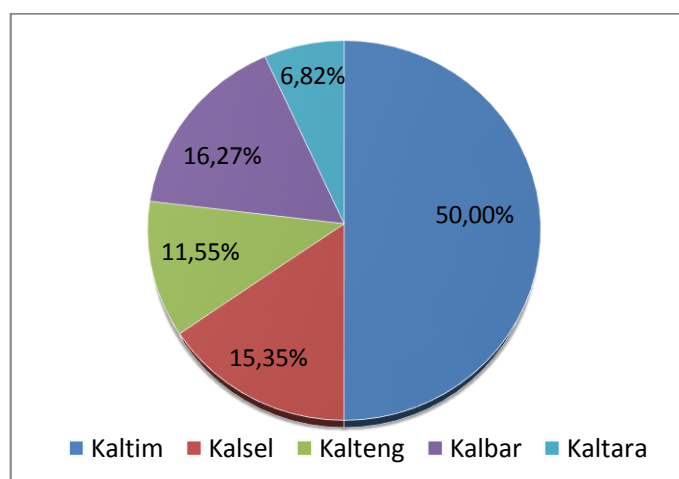


1) Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi terkait dengan finansial dan kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier. Trend positif ditunjukkan oleh perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan yang relatif stabil pada kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi potensi bagi peningkatan perekonomian provinsi utamanya pada sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, industri pengolahan, ataupun pertambangan dan penggalian. Dalam skala Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian memang berkembang dari tahun ke tahun, namun perlu digarisbawahi terkait pemerataan perkembangan perekonomian di setiap wilayah regional administrasi masih kurang efisien dalam pergerakan roda perekonomian wilayah utamanya daerah terpencil/pelosok.

Permasalahan pemerataan pergerakan ekonomi menjadi penghambat utama perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini dikarenakan produktivitas setiap wilayah akan mengalami ketimpangan yang menyebabkan secara kumulatif pembangunan daerah berjalan tidak seimbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu memberi perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah yang masih memiliki kesulitan pergerakan ekonominya. Ekonomi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional dan Regional Kalimantan secara keseluruhan, yaitu berada di kisaran 6 - 7 persen.

Gambar 4.2
Share Ekonomi Kalimantan Tengah terhadap Ekonomi Regional Kalimantan tahun 2016*)



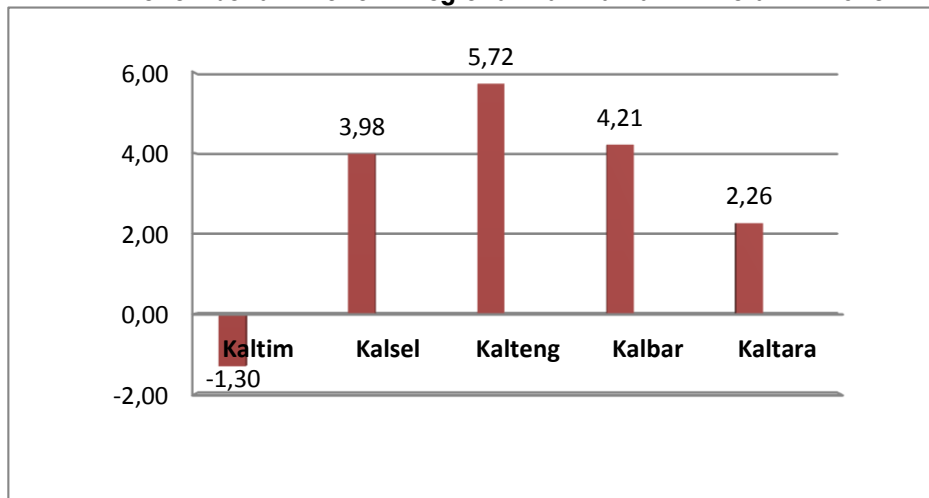
Sumber: BPS Prov. Kalteng, 2016

*) Triwulan-II tahun 2016 (year on year)

Gambar 4.3



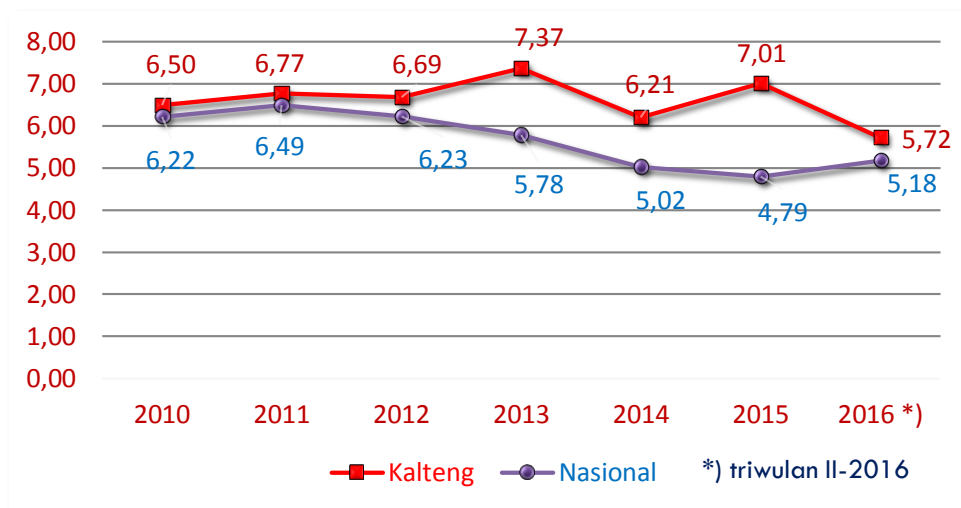
Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan Triwulan II- 2016



Sumber: BPS Prov. Kalteng, 2016
Triwulan II-2016 (year on year)

Pada triwulan II 2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 5,72%. Kontribusi ekonomi Kalimantan Tengah terhadap ekonomi Kalimantan sebesar 11,55%. Meski termasuk yang terendah, kontribusi ekonomi Kalimantan Tengah cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada Triwulan II-2016, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah relatif tinggi dibandingkan Provinsi lain di Regional Kalimantan.

Gambar 4.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)
*) Triwulan II-2016 (year on year)



Pada tahun 2015, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 7,01 persen. Angka ini menunjukkan percepatan dalam pembangunan perekonomian daerah dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 6,21 persen.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah masih berada pada jalur positif dan berada pada urutan atas jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi lain se-regional Kalimantan maupun nasional yang tumbuh sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi ini memberikan dampak yang cukup besar dalam realisasi pembangunan daerah dimana perekonomian memberi ruang lebih bagi pemberdayaan berbagai sektor ekonomi terutama sektor ekonomi kerakyatan.

Tabel 4.1.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Regional Kalimantan dan Nasional, Tahun 2012-2016

Provinsi	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*)
1. Kalimantan Barat	5,83	6,08	5,02	4,81	4,21
2. Kalimantan Tengah	6,69	7,37	6,21	7,01	5,72
3. Kalimantan Selatan	5,73	5,18	4,85	3,84	3,98
4. Kalimantan Timur	3,98	1,59	2,02	-0,85	-1,30
5. Kalimantan Utara	-	-	-	-	2,26
Kalimantan	4,83	3,49	3,19	1,31	1,13
PDB Indonesia	6,23	5,78	5,02	4,79	5,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalteng, 2016 (Tahun dasar 2010)

*) Triwulan II-2016 (year on year)

Permasalahan “**Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah**“ dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengelolaan SDA Kalimantan Tengah

Dari segi luas wilayah, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut serta letak geografis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, maka secara fisik kawasan ini memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Sektor pertanian memang menjadi sektor andalan mengingat ketersediaan lahan potensial masih cukup besar. Di sektor pertanian ini, sub sektor yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan adalah sub sektor perkebunan yang terlihat dari kontribusi subsektor perkebunan tahunan dalam pembentukan PDRB (mencapai 13,41% pada tahun 2015).

Pada tahun 2016 sektor pertanian Kalimantan Tengah masih akan berada dalam kondisi melambat. Produktivitas perkebunan khususnya kelapa sawit yang masih terpengaruh fenomena alam El Nino pada tahun 2015 akan menjadi faktor penahan



pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan. Di sisi lain, meskipun harganya sudah membaik paska adanya kesepakatan pembatasan ekspor negara produsen, produksi komoditas karet Kalimantan Tengah pada tahun 2016 masih mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan sektor perkebunan masih tradisional dan mengandalkan cuaca. Selanjutnya dari sisi Tabama (Tanaman Bahan Makanan), diperkirakan produksi padi di Kalimantan Tengah di bawah target produksinya.

Selain dari sektor pertanian, sektor pertambangan masih mendominasi perekonomian di Kalimantan Tengah. Bahan penggalian yang saat ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi berkembang dengan pesat seperti batubara, emas (dan mineral pengikat seperti perak), bijih besi, pasir zircon (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Pada tahun 2016 sektor pertambangan Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh dalam level yang rendah. Perlambatan ekonomi negara importir batubara Kalimantan Tengah diperkirakan akan menahan ekspor komoditas ini pada tahun 2016.

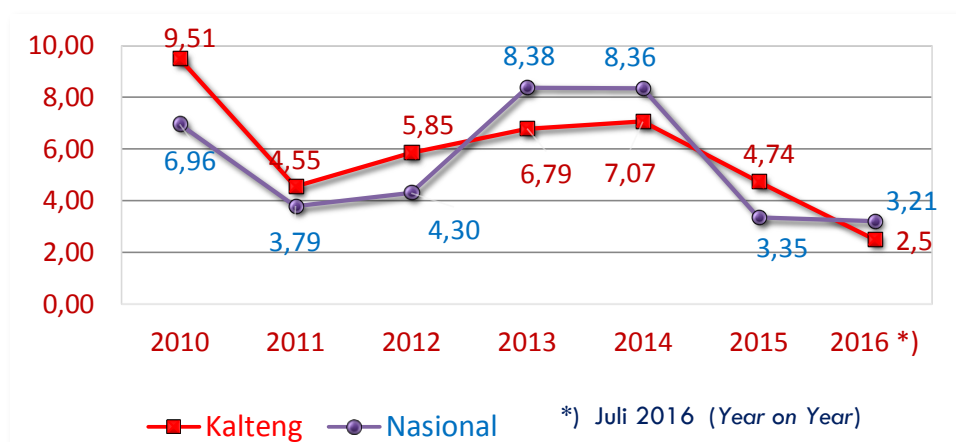
b. Ekonomi masyarakat belum diberdayakan secara optimal

Permasalahan ekonomi masyarakat yang belum diberdayakan secara optimal dapat dilihat dari berbagai data sebagai berikut:

b.1. Angka Inflasi

Stabilnya laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 4,20 persen dan Sampit sebesar 5,72 persen pada tahun 2015. Kedua kota tersebut merupakan Kota Indeks Harga Konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penghitungan laju inflasi.

Gambar 4.5
Inflasi Tahunan Kalteng dan Nasional Tahun 2010-2016



Sumber: BPS Prov. Kalteng, 2016



Inflasi Kalimantan Tengah hingga bulan Juli 2016 mencapai 2,5% atau berada dibawah inflasi nasional yang sebesar 3,21% (year on year). Rendahnya realisasi inflasi Kalimantan Tengah didorong oleh menurunnya tekanan bahan makanan pada periode laporan.

Tabel 4.2.
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2015 (%)

Keterangan (Inflasi-yoy)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*)
Inflasi Tahunan Palangka Raya	1,39	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	4,20	1,82
Inflasi Tahunan Sampit	2,85	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	5,72	3,72
Inflasi Kalimantan Tengah	2,02	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74	2,50
Inflasi Nasional	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

*) inflasi bulan Juli 2016 (year on year)

Inflasi Kota Palangka Raya secara tahunan lebih rendah dibandingkan Kota Sampit. Program pengendalian inflasi yang intensif di Palangka Raya mendorong pencapaian inflasi Palangka Raya lebih rendah dibanding Sampit. Hingga Juli 2016, inflasi Kota Palangka Raya sebesar 1,82% (y o y) tercatat berada dibawah inflasi Sampit yang mencapai 3,72% (y o y).

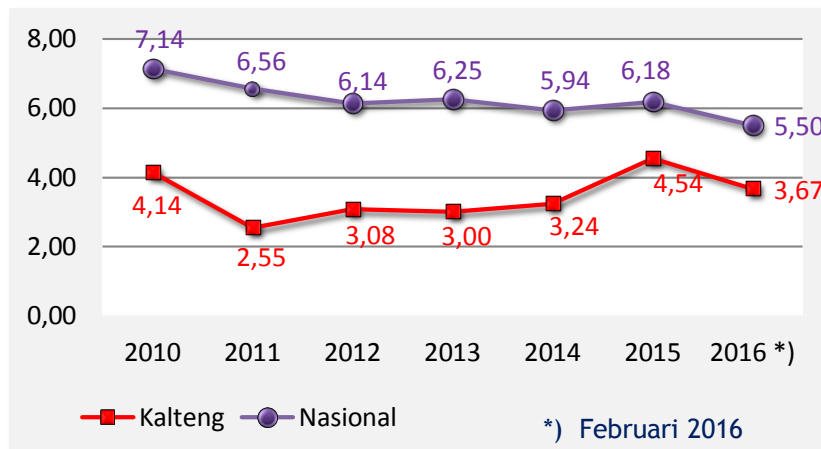
b.2. Tingkat Pengangguran yang fluktuatif

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2015 mencapai 1.272.461 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,11 persen. Angka tersebut hanya meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar merupakan angkatan kerja laki-laki yang mencapai 783.607 orang dengan TPak Laki-laki mencapai 86,90.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang bekerja sebanyak 1.214.681 orang. Secara absolut, jumlah penduduk yang bekerja cukup fluktuatif, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 2011-2015 memiliki kecenderungan meningkat, yakni 2,55 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 4,54 pada tahun 2015. Angka tersebut merupakan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data Februari 2016, pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah menurun dibandingkan tahun 2015, yakni pada kisaran 3,67 persen.



Gambar 4.6
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

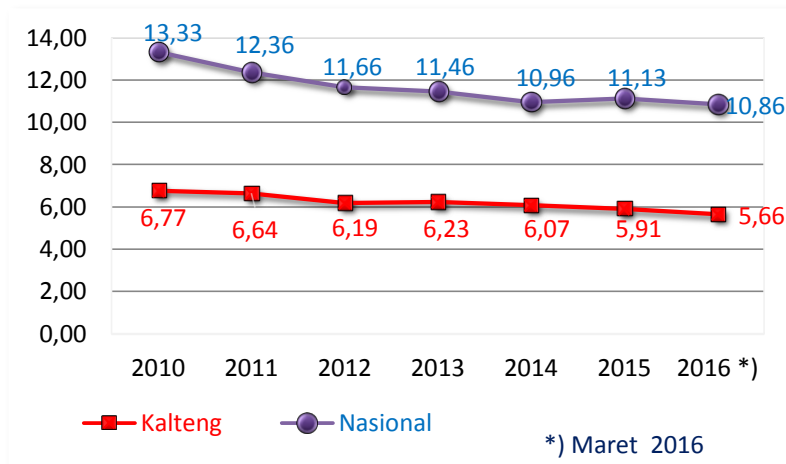
b.3. Tingkat Kemiskinan

Proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, salah satunya ditandai dengan adanya penurunan jumlah angka kemiskinan. Secara umum, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan hingga mencapai 6,07 persen pada tahun 2014 dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 5,91 persen dan kondisi bulan Maret 2016 menjadi 5,66 persen. Meskipun mengalami penurunan, namun angka kemiskinan sebesar 5,66 persen tersebut masih perlu diwaspadai mengingat jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, angka kemiskinan pada tahun 2014 tertinggi berada di wilayah Kabupaten Barito Timur dengan persentase kemiskinan sebesar 8,55 persen dan diikuti oleh Kabupaten Seruyan yang mencapai 8,39 persen. Namun, jika dilihat berdasarkan angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 27.940 jiwa dan Kabupaten Kapuas sebanyak 21.180 jiwa.



Gambar 4.7
Tingkat Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

b.4. Upah Minimum Provinsi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik usaha

Upah minimum provinsi menunjukkan tingkat kepedulian pemerintah terhadap pekerja tanpa memperhatikan kemampuan pemilik usaha dalam menggerakkan roda perekonomian. Jika dibandingkan dengan UMP se regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan setiap tahun dimana pada tahun 2015 dengan nilai Rp 1.896.367, meskipun masih berada dibawah UMP Kalimantan Timur yaitu senilai Rp 2.026.126,- . Angka tersebut masih jauh di atas pengeluaran rata-rata per kapita dimana hal tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan pemilik usaha dalam merealisasikan UMP dengan berbagai alasan.

Tabel 4.3.
Upah Minimum Provinsi
Regional Kalimantan, Tahun 2014-2015

Provinsi	Upah Minimum Provinsi (UMP)	
	2014	2015
1. Kalimantan Barat	Rp 1.400.000,-	Rp 1.615.000,-
2. Kalimantan Tengah	Rp 1.723.970,-	Rp 1.896.367,-
3. Kalimantan Selatan	Rp 1.620.000,-	Rp 1.870.000,-
4. Kalimantan Timur	Rp 1.886.315,-	Rp 2.026.126,-

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2016



c. Kehidupan masyarakat pesisir yang belum berkualitas

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan pantai adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan pantai antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (aquadkultur), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Manfaat ekosistem pantai sangat banyak, namun demikian tidak terlepas dari permasalahan lingkungan, sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pantai. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perairan pantai, adalah pencemaran, erosi pantai, banjir, intrusi air laut, penurunan biodiversitas pada ekosistem mangrove dan rawa, serta permasalahan sosial ekonomi.

Oleh karena itu didalam pengelolaan daerah pesisir diperlukan suatu kajian keruangan dengan memperhatikan Rencana Zonasi mengingat perubahan ini bervariasi antar suatu tempat dengan tempat lain. Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan laut selama ini bersifat tidak optimal dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.
Rumusan Permasalahan
“Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pengelolaan SDA Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat harga komoditas unggulan masyarakat (karet dan gabah) rendah dengan harga berfluktuasi.2. Pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal belum terlembagakan secara baik3. Kurangnya dukungan pengembangan investasi.4. Produktivitas sektor pertanian yang belum optimal5. Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan6. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan



No	Permasalahan	Akar Permasalahan
2	Ekonomi masyarakat belum diberdayakan secara optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunnya daya beli masyarakat2. Belum optimalnya peranan koperasi dan UMKM3. Terbatasnya Akses Sumber Daya Produktif/permodalan bagi Koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan4. Lapangan kerja masih dominan sektor informal5. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Tengah6. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial7. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil8. Belum berkembangnya kawasan industri9. Masih rendahnya produk export
3	Pengelolaan ekonomi pesisir belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Potensi perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal2. Sarana dan prasarana perikanan belum optimal3. Kawasan pesisir belum menjadi prioritas pembangunan4. Masih kurangnya daya dukung peluang investasi unggulan dibidang perikanan laut skala besar dengan teknologi tinggi.5. Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pesisir yang menjadi road map pembangunan Kawasan Pesisir

2) Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah geografis yang cukup sulit dan terjal sehingga pembangunan daerah bidang sarana prasarana infrastruktur memiliki berbagai kendala. Dengan melihat kondisi geografis, akses infrastruktur serta sarana prasarana pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, program peningkatan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya merata. Pemerataan kualitas sumber daya manusia ini diperlukan agar seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan taraf hidup yang akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah mengindikasikan terjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk. Peningkatan indeks gini memperlihatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata dari tahun ke tahun. Peningkatan indeks gini perlu menjadi perhatian untuk memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.5.
Gini Rasio Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2011-2016

Provinsi	Gini rasio (Indeks Gini)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kalimantan Barat	0,40	0,38	0,40	0,39	0,33	0,34
Kalimantan Tengah	0,33	0,32	0,34	0,34	0,32	0,33
Kalimantan Selatan	0,37	0,38	0,36	0,36	0,35	0,33
Kalimantan Timur	0,38	0,36	0,37	0,35	0,32	0,32
Kalimantan Utara	-	-	-	-	0,29	0,30
Indonesia	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40

Sumber: Badan Pusat Statistik RI 2016

Gini rasio Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 memiliki angka 0,32 yang berarti Kalimantan Tengah memiliki ketimpangan sedang. Angka ini memang tidak berada di peringkat teratas jika dibandingkan dengan gini rasio rata-rata regional Kalimantan dan nasional yang mencapai 0,41. Angka tersebut menunjukkan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pemerataan pembangunan yang lebih baik jika dibandingkan provinsi lain di regional Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, Kalimantan Tengah perlu mewaspadaai naiknya angka yang menunjukkan ketimpangan tinggi sebesar 0,5. Hal ini akan meningkatkan potensi kerawanan sosial mengingat kerentanan gejolak perekonomian akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Minimnya infrastruktur dan aksesibilitas wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah dirasakan oleh penduduk terutama di wilayah pedesaan yang merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pedesaan harus terus dikembangkan terutama dalam pembangunan sektor pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan harus ditingkatkan dengan dukungan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan.

Dari Permasalahan “Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai“, ditegaskan dengan data dibawah ini:



a. Belum memadainya infrastruktur dasar dan aksesibilitas

Listrik dan jalan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap daerah. Dari total panjang jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.102,08 km, kondisi permukaan jalan baik mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 yakni mencapai 1.635,51 km pada tahun 2015. Namun hal yang sama juga terjadi pada setiap kondisi jalan dimana panjang jalan dengan kondisi sedang mencapai 1.133,64 km, kondisi rusak sepanjang 246,14 km, dan kondisi rusak berat sepanjang 86,79 km.

Tabel 4.6.
Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi
Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015

No	Jalan (Nasional dan Provinsi)	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik	1.431,92	1.694,71	1.647,08	1.595,76	1.635,51
2.	Kondisi Sedang Rusak	1.063,91	662,89	817,52	933,09	1.133,64
3.	Kondisi Rusak	459,46	312,69	250,61	217,95	246,14
4.	Kondisi Rusak Berat	383,29	144,54	99,62	68,03	86,79
	Jalan secara keseluruhan (nasional dan provinsi)	3.338,5	2.814,8	2.814,8	2.814,8	3.102,08

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng, 2016

Pasokan listrik Provinsi Kalimantan Tengah didapatkan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Krisis daya listrik masih terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tahun 2013. Berdasarkan tabel di bawah ini, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki penduduk paling sedikit menggunakan PLN sebagai sumber penerangan dibandingkan provinsi lainnya di regional Kalimantan dan hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik PLN. Terlihat pada tabel 4.7 bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN sebanyak 70,2 persen. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di regional Kalimantan, Kalimantan Tengah berada pada urutan paling bawah, disusul oleh Kalimantan Barat sebanyak 78,20 persen, Kalimantan Utara sebanyak 85,58 persen, Kalimantan Timur sebanyak 87,55 persen dan Kalimantan Selatan sebanyak 95,62 persen pada tahun 2015.



Tabel 4.7.
Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Persen)

Provinsi	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	68.43	70.99	73.91	75.59	76,10	78,20
Kalimantan Tengah	62.29	65.49	68.49	66,1	69,3	70,2
Kalimantan Selatan	89.74	89.54	92.63	93.81	99,42	95,62
Kalimantan Timur	81.79	81.02	81.92	85.40	85,88	87,55
Kalimantan Utara	-	-	-	-		85,58

Sumber: BPS RI, 2016

b. Realisasi perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang belum konsisten dan berkualitas

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari masa ke masa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kesesuaian antara program pembangunan dengan rencana tata ruang, ternyata pemanfaatan rencana tata ruang untuk program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum seperti yang diharapkan/direncanakan. Selain itu berbagai masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan perkotaan.

Fungsi dan status kawasan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8.
Fungsi dan Status Kawasan Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah

No.	Fungsi dan Status Kawasan	Luas (Ha)
A	Kawasan Hutan Lindung	
1	Hutan Lindung (HL)	1.391.604
2	Hutan Adat (HA)	600.000
3	Suaka Margasatwa (SM)	57.389
4	Cagar Alam (CA)	198.597
5	Taman Nasional (TN)	1.168.284
6	Taman Wisata Alam (TWA)	2.954
7	Taman Hutan Raya (Tahura)	35.627
8	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada Areal Ex. PLG	154.002



No.	Fungsi dan Status Kawasan	Luas (Ha)
9	Kawasan Konservasi Ekosistem Air Hitam (KEAH)	17.626
10	Kawasan Reservaat	23
11	Kawasan Lindung Lainnya	4.036
Total Kawasan Hutan Lindung		3.630.142
B	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.335.571
2	Hutan Produksi (HP)	3.896.706
3	Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi (HPK)	2.258.274
4	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.629.779
Total Kawasan Budidaya		12.120.330
Total Kawasan Hutan Lindung+Budidaya		15.750.472

Sumber: Perda No 5 Tahun 2015 tentang RTRW Prov. Kalteng 2015-2035

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 4.9.
Rumusan Permasalahan
“Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum memadainya Infrastruktur dasar dan aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa yang terbatas. 2. Belum optimalnya sistem dan jaringan transportasi hingga ke seluruh wilayah (sebagian daerah masih sangat tergantung dengan transportasi air/sungai) 3. Kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan informasi sampai ke pelosok – pelosok 4. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penghubung antar daerah di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra-regional) dan antar pusat pelayanan (inter-regional) 5. Belum optimalnya pengembangan energi baru dan terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi 6. Pelayanan Air Bersih masih sangat terbatas 7. Pemenuhan infrastruktur dasar yaitu jalan, infrastruktur kelistrikan, air minum layak, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi layak (persampahan, limbah dan drainase lingkungan) masih jauh dari harapan



No	Permasalahan	Akar Permasalahan
2	Realisasi perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang belum konsisten, berkualitas dan akomodatif	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki kontribusi positif terhadap penyelesaian permasalahan tata ruang.2. Inkonsistensi dalam proses penataan pemanfaatan dan pengendalian ruang.3. Penyusunan pola ruang belum optimal dan akomodatif

3) Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam usaha mencapai reformasi birokrasi pemerintah daerah yang optimal terutama dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting yang meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

a. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel

Reformasi birokrasi yang belum terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1. Opini BPK
2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi
5. Penindakan kasus korupsi

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah merupakan salah satu permasalahan birokrasi yang harus diberantas. Begitu pula di Kalimantan Tengah, KKN harus menjadi perhatian utama oleh bidang terkait agar jumlah kasus KKN dapat diminimalisir. Pencegahan KKN dapat dilakukan dengan fokus pada monitoring pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi menyeluruh agar tidak ada celah bagi



aparatur negara untuk melakukan praktek KKN. Dari data berikut terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah kasus penindakan KKN yang paling tinggi yakni pada tahun 2014 terjadi 12 kasus jika dibandingkan dengan Provinsi lain di regional Kalimantan seperti di Kalimantan Selatan terjadi 3 kasus, Kalimantan Timur 4 kasus, disusul dengan Kalimantan Barat 8 kasus.

Tabel 4.10.
Penindakan Kasus Korupsi
Regional Kalimantan, Tahun 2013-2014

Provinsi	Tahun	
	2013	2014
1. Kalimantan Barat	5	8
2. Kalimantan Tengah	9	12
3. Kalimantan Selatan	3	3
4. Kalimantan Timur	3	4

Sumber: ICW

b. Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan good governance

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki berbagai tugas pokok dan fungsi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait dengan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), yakni: partisipasi, penegakan hukum, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pengawasan, efisien dan efektif, serta profesionalisme. Pelaksanaan *good governance* tersebut antara lain bertujuan untuk: 1) mengurangi KKN di birokrasi; 2) terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; 4) menjamin konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut apabila dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan seksama akan berkontribusi positif dalam pencapaian tujuan dan kinerja pembangunan. Sebagai pelaksana inti dari pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum maksimal dalam mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

c. Kinerja Aparatur Sipil Negara belum optimal

Kinerja sumber daya aparatur pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum optimal menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkompeten dan berkualitas menjadi



kendala bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian *Good Governance* melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah perlu meningkatkan kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Hal ini akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

d. Belum optimalnya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya pendapatan daerah. Hal ini esensial dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodir berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dari berbagai sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama daerah. PAD dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi menarik karena PAD juga menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang besar.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengelolaan pendapatan daerah tidak selalu berjalan maksimal. Hal ini tergambar dari beberapa praktek di lapangan, dimana masih ditemukan beberapa sumber pendapatan daerah dikelola dengan tidak profesional. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah peningkatan SDM pengelola pendapatan yang kompeten dan profesional, serta mampu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 4.11.
Rumusan Permasalahan
“Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel	1. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan belum optimal 2. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN
2.	Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan <i>good governance</i>	1. Lemahnya penegakan hukum 2. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif



No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none">3. Pengolahan data sebagian masih menggunakan sistem manual dan tidak terintegrasi.4. Masih ada desa dengan status tertinggal5. Belum optimalnya pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang harus terus direalisasikan
3.	Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Motivasi kerja sebagian pegawai masih rendah, yang terlihat dari rendahnya disiplin pegawai2. Belum adanya penerapan sistem pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang sesuai terhadap pegawai3. Belum optimal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi4. Manajemen SDM aparatur masih belum berjalan secara efektif
4.	Belum optimalnya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah2. Belum optimalnya upaya melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

4) Rendahnya daya saing SDM

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset dasar dalam pencapaian pembangunan nasional melalui peningkatan dan pemberdayaan kualitas subyek pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia akan menjadi penentu utama dalam pergerakan capaian pembangunan. Setiap program kegiatan baik yang direncanakan, dilaksanakan, hingga evaluasinya merupakan domain sumber daya manusia. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berkualitas mutlak menjadi modal dasar optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor perekonomian daerah. Sumber daya manusia yang berdaya saing, secara otomatis akan meningkatkan ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta mendorong tercapainya target pada segala aspek pembangunan. Peningkatan daya saing akan menginterpretasikan penyerapan tenaga kerja yang diikuti dengan maksimalnya kualitas hasil pekerjaan.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar



pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi (paritas daya beli).

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten hingga mencapai 68,53 pada tahun 2015. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahun berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen penyusunnya baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomiannya. Meskipun mengalami capaian positif di setiap tahunnya, namun IPM Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 69,55 pada tahun 2015.

Tabel 4.12.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2011-2015

Provinsi	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Kalimantan Barat	62,35	63,41	64,30	64,89	65,59
2. Kalimantan Tengah	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53
3. Kalimantan Selatan	65,89	66,68	67,17	67,63	68,38
4. Kalimantan Timur	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17
5. Kalimantan Utara	-	-	67,99	68,64	68,76
Indonesia	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2016

Tabel 4.13.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
1	Kotawaringin Barat	70,07	12,13	8,01
2	Kotawaringin Timur	69,51	12,05	7,70
3	Kapuas	68,40	11,64	6,94
4	Barito Selatan	66,48	11,99	8,59
5	Barito Utara	71,01	11,50	8,33
6	Sukamara	71,24	11,55	7,81
7	Lamandau	69,12	12,43	7,68
8	Seruyan	68,88	11,56	7,45



No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
9	Katingan	65,28	12,03	8,62
10	Pulang Pisau	67,64	12,16	7,59
11	Gunung Mas	69,89	11,44	8,93
12	Barito Timur	67,71	12,31	9,02
13	Murung Raya	69,21	11,69	7,36
14	Palangka Raya	72,97	14,90	10,74
Kalimantan Tengah		69,54	12,22	8,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Menelaah dari pembahasan di atas, permasalahan “**Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia**”, dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

a. Masih rendahnya mutu dan kualitas pelayanan pendidikan

Secara umum, bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase angka melek huruf maupun komponen IPM harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2014, angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 99,59 persen, ini berarti penduduk yang buta huruf hanya sebesar 0,41 persen. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Kalimantan Tengah mencapai 8,03 tahun, mengindikasikan bahwa penduduk rata-rata menduduki jenjang pendidikan formal selama 8,03 tahun atau mencapai Sekolah Menengah Lanjutan Pertama (SLTP) kelas 8 semester 1.

Pada capaian harapan lama sekolah, angka Provinsi Kalimantan Tengah sudah sangat baik dimana harapan masyarakat berumur 7 tahun untuk mengenyam jenjang pendidikan mencapai 12,22 tahun ke depan atau setara dengan pendidikan perguruan tinggi.

Tabel 4.14.
Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Tahun	Angka Melek Huruf	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
1	2010	97,78	11,09	7,62
2	2011	97,84	11,15	7,68
3	2012	97,88	11,22	7,73
4	2013	97,99	11,71	7,79
5	2014	99,59	11,93	7,82
6	2015	98,90	12,22	8,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

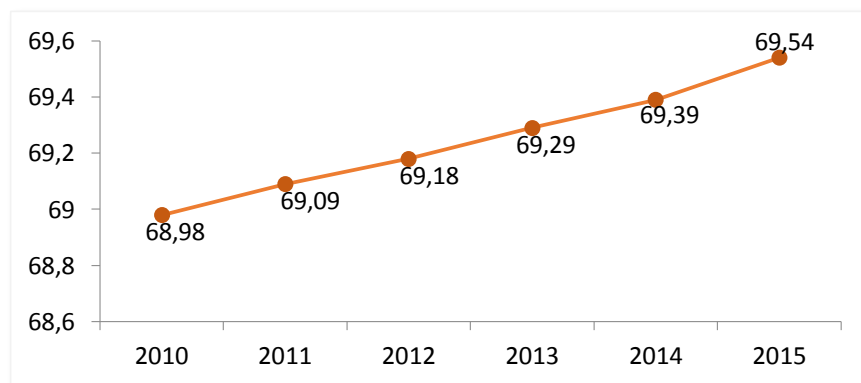


Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa tinggi atensi masyarakat terhadap pendidikan sesuai usia sekolah pada umumnya. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka semakin tinggi masyarakat usia sekolah yang mengenyam bangku pendidikan. Angka partisipasi sekolah Kalimantan Tengah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Namun secara jenjang, semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka partisipasi sekolah menurun dimana APS 7-12 tahun sebesar 99,46 persen, sedangkan APS 16-18 tahun hanya sebesar 65,84 persen.

b. Rendahnya akses pelayanan kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa periode pembangunan terakhir. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan utamanya tenaga medis. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini terlihat dari kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 yang mencapai 69,54 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2015 memiliki peluang hidup hingga berumur 69-70 tahun.

Gambar 4.8
Angka Harapan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Meskipun mengalami peningkatan pelayanan kesehatan di setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan angka harapan hidup se-regional Kalimantan, Kalimantan Tengah yang memiliki angka harapan hidup 69,54 di tahun 2015 berada di bawah provinsi lain



kecuali Kalimantan Selatan. Berikut perbandingan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan provinsi lain di regional Kalimantan.

Tabel 4.15.
Perbandingan Angka Harapan Hidup
Regional Kalimantan, Tahun 2011-2015

Provinsi	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Kalimantan Barat	69,26	69,46	69,66	69,76	69,87
2. Kalimantan Tengah	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54
3. Kalimantan Selatan	66,88	67,11	67,35	67,47	67,80
4. Kalimantan Timur	73,10	73,32	73,52	73,62	73,65
5. Kalimantan Utara	71,60	71,82	72,02	72,12	72,16
Indonesia	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78

Sumber: BPS RI, 2016

c. Belum optimalnya SDM pengelola pariwisata

Secara umum, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Namun potensi tersebut belum didukung oleh SDM pengelola pariwisata sehingga menyebabkan perkembangan pariwisata terkesan stagnan dari waktu ke waktu, antara lain terlihat dari tingkat penghunian kamar hotel, baik berbintang maupun hotel non bintang yang fluktuatif jumlahnya setiap tahun dalam mendatangi tempat wisata di Kalimantan Tengah.

Tabel 4.16.
Tingkat Penghunian Kamar Hotel (Persen)
Provinsi Regional Kalimantan Tahun 2011-2014

Provinsi	Hotel Berbintang				Hotel Nonbintang			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Kalimantan Barat	47.01	54.19	54.27	49.48	35.45	37.14	32.50	33.88
Kalimantan Tengah	54.78	53.81	60.92	57.74	38.56	37.97	44.40	35.01
Kalimantan Selatan	55.63	52.71	52.65	50.66	43.33	40.16	39.11	38.80
Kalimantan Timur	58.18	59.47	61.24	56.73	54.73	53.06	58.43	45.03
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPS RI, 2016



Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 4.17.
Rumusan Permasalahan
“Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih rendahnya mutu dan kualitas pelayanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Kompetensi dan daya saing tenaga pendidikan masih perlu ditingkatkan2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan3. Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi standar Nasional Pendidikan (NSP).4. Belum optimalnya Pendidikan Non Formal (PNF)
2	Rendahnya akses pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang masih rendah2. Jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas belum optimal terutama di daerah terpencil3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah yang layak huni, sanitasi layak (sampah, limbah dan drainase lingkungan), air bersih dan air minum layak4. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan dasar5. Belum optimalnya penanganan masalah gizi.6. Belum optimalnya ketersediaan mutu, manfaat dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan.7. Belum optimalnya sistem informasi kesehatan.8. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat dan sanitasi dasar
3	Belum optimalnya SDM pengelola pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pariwisata2. Masih rendahnya pendidikan sosial budaya3. Belum berkembangnya pendidikan formal nonformal pariwisata budaya

5) Degradasi kualitas lingkungan hidup

Degradasi Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah berkembangnya perekonomian berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup mendorong semua pemangku kepentingan melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator lingkungan hidup diukur secara parsial, yaitu berdasarkan media seperti air, udara, dan lahan sehingga sulit



untuk mendapatkan gambaran yang dapat mewakili kondisi lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh.

Dilihat dari tabel di bawah ini, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 yaitu sebesar 70,37, yang termasuk tinggi di regional Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kualitas yang baik, sehingga di tahun-tahun mendatang perlu adanya upaya untuk memertahankan maupun meningkatkan IKLH.

Tabel 4.18.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Regional Kalimantan Tahun 2011-2014

Provinsi	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kalimantan Barat	73,65	69,91	68,12	68,31
Kalimantan Tengah	75,02	70,84	69,53	70,37
Kalimantan Selatan	60,96	57,10	56,20	57,51
Kalimantan Timur & Kalimantan Utara	74,41	73,12	72,41	74,00

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016

Menelaah dari pembahasan di atas, permasalahan “**Degradasi kualitas lingkungan hidup**”, dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

a. Belum terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung ekonomi berkelanjutan

Sejak tahun 1997, kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah selalu berulang dengan tingkatan intensitas yang semakin meningkat, terutama pada tahun 2014 dan 2015. Melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.48/536/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pertimbangan jumlah hotspot yang meningkat, nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berada pada rentang membahayakan (>350 PM), serta jarak pandang yang terbatas.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah tahun 2015 berdampak pada seluruh sektor di Kalimantan Tengah diantaranya sektor



ekonomi, tingkat inflasi, kesehatan dan pendidikan. Berikut kajian tentang dampak kabut asap:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dengan pangsa terbesar di Kalimantan Tengah, yaitu mencapai 23,75 persen. Adanya bencana kabut asap cukup berpengaruh terhadap produksi dua komoditas perkebunan utama di Kalimantan Tengah yaitu, kelapa sawit dan karet. Menurut catatan kami, pada bencana kabut asap tahun 2015 terdapat 321,55 Ha lahan kelapa sawit dan 223,52 Ha lahan karet yang ikut terbakar dengan kerugian mencapai 9,3 Milyar rupiah. Sementara untuk subsektor hortikultura menunjukkan adanya penurunan hasil panen akibat bencana kabut asap sebesar 30-40 juta rupiah tiap petani.

Bencana kabut asap berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor pertambangan. Berdasarkan data *Southern Oscillation* Indeks level pada tahun 2015 terjadi fenomena *El Nino* yang cukup parah sehingga diperkirakan fenomena ini akan membuat debit air sungai menurun dan kinerja sektor pertambangan ikut menurun.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang mengalami persentase kerugian yang cukup tinggi akibat bencana kabut asap. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada angka rata-rata *occupancy rate* perhotelan sebesar 10-15 persen di Kalimantan Tengah dengan kerugian sebesar 2,07 Milyar rupiah.

Dengan penurunan kegiatan ekonomi pada beberapa sektor ekonomi, maka bencana kabut asap selama bulan September 2015 diperkirakan telah mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi tahunan Kalimantan Tengah sebesar 0,04 - 0,10 persen.

b. Inflasi (IHK)

Akibat kabut asap yang melanda Kalimantan Tengah selama ± 3 bulan telah menyebabkan pasokan berbagai komoditas menurun akibat minimnya sinar matahari. Di samping itu, kabut asap menyebabkan permasalahan dalam bidang transportasi sehingga pasokan dari luar Kalimantan Tengah terkendala untuk masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini memicu tingginya inflasi pada tahun 2015 yang lalu.



c. Kesehatan

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus dan September 2015 terdapat peningkatan pada jumlah Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) di wilayah Kalimantan Tengah. Total penderita ISPA pada bulan Agustus s.d September 2015 adalah 21.905 jiwa. Selain itu, kenaikan jumlah penderita diare menjadi 8.165 jiwa pada bulan Agustus s.d September 2015. Kondisi ini disebabkan karena kabut asap berpengaruh terhadap penurunan kualitas air.

d. Pendidikan

Dampak kabut asap terhadap pendidikan Kalimantan Tengah cukup signifikan dimana ribuan siswa/siswi tingkat SD s/d SMA di beberapa kabupaten/kota diliburkan pada tanggal 10 September – 1 Oktober 2015 dan diperpanjang hingga 24 Oktober 2015. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan siswa/siswi di Kalimantan Tengah dan memberikan beban yang lebih besar bagi siswa/siswi SMA yang akan mengikuti seleksi ujian nasional perguruan tinggi. Akibat bencana kabut asap diperkirakan kualitas hasil pendidikan tahun 2015 menurun dibandingkan dengan tahun 2014.

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian masih banyak ijin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih pada tahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah yang rendah.

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah tersebar pada beberapa kawasan. Di bagian barat, terhampar tanaman perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 900.000 Ha. Perkebunan karet tersebar hampir di semua kawasan. Sedangkan potensi tambang batubara berada di bagian timur-utara, dengan jumlah potensi cadangan sekitar 4,8 milyar ton.



Selain mempunyai nilai ekonomi, potensi sumber daya alam juga mempunyai nilai daya dukung lingkungan yang strategis. Kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mencapai luas sekitar 3 juta hektar dengan kandungan gambut sekitar 6,3 giga ton merupakan ekosistem yang perlu dilindungi karena berfungsi sebagai sumber air dan sumber plasma nutfah yang sangat berharga. Selain itu kawasan gambut juga berfungsi penting sebagai penahan emisi karbon yang jika terusik dan rusak akan berdampak terhadap perubahan iklim global.

Kawasan lainnya yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan penting adalah kawasan *Heart of Borneo* (HoB). Inisiatif *Heart of Borneo* (Jantung Borneo) adalah sebuah inisiatif yang dirancang sebagai program pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi yang bertujuan mempertahankan keberlanjutan manfaat salah satu hutan terbaik yang masih tersisa di wilayah Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Cakupan wilayah kerja *HoB* membentang pada rangkaian dataran tinggi Borneo yang terhubung secara langsung dengan dataran rendah di bawahnya. Wilayah kerja ini melintasi wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam meliputi areas seluas kira-kira 22 juta hektar yang secara ekologis saling terhubung. Jika pola pendayagunaan sumber daya alam terus berlanjut seperti sekarang yang cenderung tidak terkendali maka berbagai kawasan seperti kawasan lahan gambut dan kawasan *HoB* serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tak ternilai akan terancam serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.

b. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran, serta pengawasan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur pembagian urusan kehutanan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Menurut undang-undang tersebut, urusan bidang kehutanan sebagian besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap urusan bidang kehutanan terletak pada sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kewenangan Pemerintah Daerah hanya untuk pelaksanaan pengelolaan tanaman hutan rakyat (TAHURA) saja. Hal ini tentu saja membatasi wewenang Pemerintah Daerah dalam mengelola bidang kehutanan. Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.19.
Kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam Urusan Lingkungan Hidup
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

No	Sub Bidang	Kewenangan
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH provinsi.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP provinsi.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati provinsi.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
8	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi.
9	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Provinsi.
10	Pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.



Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.20.
Rumusan Permasalahan
“Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Belum terlaksananya upaya untuk mendukung ekonomi berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan dan hutan serta gerakan pemanfaatan lahan terlantar2. Belum optimalnya penanganan terhadap kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Ijin).3. Masih kurangnya RTH perkotaan, masih tingginya angka backlog4. Implementasi penggalan sumber daya alam yang masih belum menerapkan asas ekonomi hijau5. Pengendalian perizinan pembukaan lahan yang belum sesuai asas ekonomi hijau
2	Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran, serta pengawasan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya upaya penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan2. Belum adanya kebijakan yang terintegrasi terkait konflik kepemilikan lahan3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Permasalahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya melibatkan perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan daerah. Permasalahan Kabupaten/Kota juga terkait dengan permasalahan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemicu permasalahan. Setiap masalah pokok tidak disebabkan oleh faktor tunggal, namun faktor determinannya bersifat kompleks. Oleh karena itu permasalahan-permasalahan di Kabupaten/Kota memicu masalah pokok provinsi. Untuk melihat pemecahan masalah pokok provinsi, perlu melihat analisis wilayah-wilayah mana yang menjadi fokus permasalahan. Di bawah ini terdapat empat indikator makro yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk diselesaikan, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Indikator tersebut di-break down ke dalam



4 Kabupaten/Kota terendah nilainya untuk menjadi fokus Pemerintah Provinsi mendongkrak angka, sehingga memicu kenaikan target Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari keempat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi paling rendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Perlu adanya peran pemerintah Provinsi yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Seruyan.

Tabel 4.21.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Barito Selatan	-	7,06	5,32	5,24	5,32	5,59
2	Barito Utara	-	7,93	6,23	7,04	4,24	5,20
3	Seruyan	-	4,82	5,16	6,28	5,31	5,12
4	Barito Timur	-	6,98	6,04	6,73	5,26	5,15

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

2. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur menjadi Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan potensi, baik SDA maupun SDM di Kabupaten Barito Timur.

Tabel 4.22.
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kotawaringin Timur	8,22	7,43	6,90	6,85	6,67
2	Seruyan	10,58	8,82	7,91	8,77	8,39
3	Gunung Mas	7,19	7,12	6,56	6,90	6,7
4	Barito Timur	9,89	9,27	8,52	8,83	8,55

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



3. Indeks Pembangunan Manusia

IPM digunakan untuk merefleksikan status pembangunan manusia. IPM di Provinsi Kalimantan Tengah masih di bawah angka nasional. Untuk mendongkrak angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menaikkan target capaian pada tingkat Kabupaten/Kota. Di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Pulang Pisau merupakan Kabupaten yang memiliki nilai IPM terendah. Perlu adanya perhatian khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap upaya peningkatan IPM.

Tabel 4.23.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kapuas	63,32	64,01	64,38	64,82	65,29	66,07
2	Sukamara	62,41	62,86	63,52	63,92	64,44	65,80
3	Seruyan	61,60	62,16	62,39	62,81	63,49	64,77
4	Pulang Pisau	63,76	64,06	64,28	64,76	65,00	65,76

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

4. Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan isu permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi pada semua daerah. Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran. Kabupaten Barito Selatan yang memiliki angka pengangguran yang cukup besar pada tahun 2015, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya angka pengangguran cenderung rendah.

Tabel 4.24.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Barito Selatan	5,51	3,12	1,72	2,10	3,77	9,99
2	Katingan	3,34	4,92	3,35	5,56	5,23	5,97
3	Murung Raya	1,03	0,63	1,49	3,45	1,13	6,33
4	Kota Palangka Raya	8,48	9,01	6,40	5,03	3,36	6,30

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



4.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena memberikan pengaruh yang krusial terhadap pelaksanaan pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Dengan memperhatikan setiap isu strategis yang teridentifikasi, diharapkan dalam waktu lima tahun ke depan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah lebih signifikan sebagai perwujudan menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Penentuan prioritas dan penanganan isu strategis yang terpetakan meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di suatu daerah. Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun kedepan. Rumusan isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling berpengaruh dan memiliki keterkaitan.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

A. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan kurun waktu selama 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Kerangka Pembangunan Paska 2015 menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Ada tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, yaitu :



indikator pertama yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs paska MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Secara Global terdapat 17 Goals yang harus dicapai hingga 2030 yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak.
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energy untuk semua
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak.
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki keandalan, dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan.
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan



- 15) Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, dan mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati.
- 16) Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan dan kelembagaan terbuka pada setiap level.
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Green Economic (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai *green economic global* yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema *The Role of Local Government on Blue Economy*. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh pemerintah daerah Surabaya.

Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai penerapan *Green Economy* yang telah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi.

Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan



emisi gas rumah kaca global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

C. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang nantinya akan berdampak pada perekonomian beberapa Negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam pertemuan para pemimpin 20 Negara (G-20) di Los Cabos, Meksiko, memaparkan bahwa sejak 2008 negara-negara industri Barat dihempaskan oleh krisis ekonomi. Dalam menghadapi resesi global, sepertinya program penanggulangan krisis ekonomi tidak banyak memberikan harapan. Negara Amerika Serikat sebagai negara adidaya belum sepenuhnya dapat keluar dari krisis ekonomi, termasuk negara-negara zona euro.

Ancaman ini bermula dari tingginya tumpukan hutang, baik oleh rakyat maupun negaranya sehingga berimbas pada krisis ekonomi, termasuk Indonesia.

D. Sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber energi terbarukan



seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan keterbatasan cadangan energi.

E. Antisipasi menipisnya cadangan mineral dunia

Pada era saat ini mineral sangat dibutuhkan dalam setiap pembangunan seperti emas, tembaga, timah, batubara, bijih besi, dan sebagainya. Mineral ini merupakan bahan pendukung dalam pembangunan sehingga dengan banyaknya pembangunan yang sedang berlangsung di semua negara, kebutuhan mineral akan semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya antisipasi terhadap perkembangan perekonomian tanpa mengindahkan kualitas lingkungan hidup menjadi pembangunan berkelanjutan memerhatikan etika pembangunan serta kualitas lingkungan.

F. Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya kelestarian hidup yang buruk dengan ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi pemanasan global (*global warming*). Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek pemanasan global dapat diminimalisir atau dapat dihindari, namun ekonomi tetap tumbuh secara lebih baik.

G. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan



perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depan nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai konsumen tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang berdaya saing internasional.

4.2.2 Isu atau Kebijakan Strategis Nasional: Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar mempengaruhi arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada masa mendatang adalah kebijakan dari Pemerintah. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dan RPJPD, serta harus mengacu pula pada RPJPN.

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan **visi RPJM Nasional tahun 2015-2019** sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**



Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui **Misi RPJMN 2015-2019** sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,



8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksportor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

4.2.3 Isu atau Kebijakan Strategis Regional

A. Pengembangan Wilayah Kalimantan (Buku III RPJMN 2015-2019: Agenda Pengembangan Wilayah)

Pada perencanaan pembangunan nasional periode 2015-2019, **tema pengembangan wilayah regional Kalimantan** sesuai RPJMN 2015-2019 (Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah) adalah:

- 1) Mempertahankan fungsi **Kalimantan sebagai paru-paru dunia**, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
- 2) **Lumbung energi nasional** dengan pengembangan **hilirisasi komoditas batubara**, termasuk **pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari** atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
- 3) **Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa**; dan



- 4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah **satu lumbung pangan nasional**.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada **keunggulan dan potensi daerah masing-masing**, melalui:

- 1) **Pengembangan hilirisasi komoditas** batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;
- 2) **Penyediaan infrastruktur wilayah;**
- 3) **Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi** secara terus menerus.

Adapun **sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan** adalah: (1) **Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk provinsi** dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) **Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35%** dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatkan jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) **Terlaksananya penggunaan block grant (inpres) yang efektif** dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatkan kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatkan implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatkan persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatkan persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan; (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan.

Sasaran penanggulangan bencana adalah **mengurangi indeks resiko bencana** pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, **Kota Palangka Raya**, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.



Diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.25.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	5.9	6.0	6.2	7.2	7.9
Kalimantan Tengah	6.1	7.0	7.5	8.2	8.7
Kalimantan Selatan	5.0	6.2	6.8	7.6	8.6
Kalimantan Timur	4.5	5.6	5.6	6.4	7.0
Kalimantan Utara	5.0	5.0	6.0	6.4	6.9

Sumber : RPJMN 2015-2019: Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah

Tabel 4.26.
Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	8.7	8.0	7.4	6.8	6.1
Kalimantan Tengah	6.0	5.8	5.3	4.8	4.3
Kalimantan Selatan	4.5	4.2	3.8	3.5	3.2
Kalimantan Timur	5.1	4.7	4.3	3.9	3.5
Kalimantan Utara	6.7	6.2	5.7	5.1	4.6

Sumber : RPJMN 2015-2019: Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah

Tabel 4.27.
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Pulau Kalimantan Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				
	2015	2015	2015	2015	2015
Kalimantan Barat	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Tengah	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Selatan	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4
Kalimantan Timur	8.4	8.0	7.6	7.2	6.9
Kalimantan Utara	7.9	7.6	7.2	6.6	6.3

Sumber : RPJMN 2015-2019: Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah



Arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah strategis Pulau Kalimantan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Pulau Kalimantan

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas mineral, pertanian pangan, kelapa sawit, karet, dan rotan;
2. Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahan mineral dan kelapa sawit berorientasi ekspor;
3. Meningkatkan produktivitas hasil olahan mineral dan kelapa sawit di dalam dan sekitar pusat industri; serta
4. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, dan rotan.

2. Percepatan Penguatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya, arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Kalimantan Tengah adalah Pengembangan Distribusi Air Baku; pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.

3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Strategi yang dilakukan:

1. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang energi pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
2. Memberikan pembinaan kelembagaan badan usaha pengelola kawasan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing internasional;
3. Pembangunan *Science Park* berteknologi tinggi di bidang perkebunan dan pertambangan sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan; serta
4. Pembangunan *Technology Park* komoditas mineral, kelapa sawit, karet, dan rotan untuk meningkatkan inovasi teknologi.



4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Diiperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

1. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan;
3. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal;
4. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; serta
5. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi.

Tabel 4.28.

Lokasi Prioritas Kota Sedang Yang Berfokus Pada Upaya Pemerataan Wilayah di Kalimantan

Kode	Lokasi Prioritas	Fokus Pengembangan
P2	Palangka Raya	Diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perdagangan, pertanian, dan pertambangan galian logam.

Sumber : RPJMN 2015-2019: Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah

Tabel 4.29.

Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota Untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Kalimantan

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D4	Pangkalan Bun dan sekitarnya (Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng)	<ul style="list-style-type: none"> • PKW Pangkalan Bun • Kawasan Agropolitan (Jagung): Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Arut Selatan. • Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Kumai • Kawasan Pariwisata: KSPN Tanjung Puting 	<ul style="list-style-type: none"> • Jagung • Perikanan Tangkap • Wisata Taman Nasional • Wisata Pantai/Bahari, • Wisata Situs Sejarah

Sumber : RPJMN 2015-2019: Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah

Terkait dengan kebijakan dalam penanggulangan bencana di Kalimantan, beberapa hal yang menjadi isu strategis di wilayah Kalimantan antara lain:

- (1) kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Kalimantan
- (2) bencana banjir dan kekeringan



Untuk mendukung pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, arah kebijakan penanggulangan bencana diarahkan untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana. Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana di wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi Pengurangan Resiko Bencana dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, melalui :

- a. Pengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah;
- b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran.
- c. Integrasi kajian dan peta resiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) serta menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD

2. Penurunan Kerentanan Terhadap Bencana

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.;
- b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, baik melalui media cetak, radio dan televisi;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana dan pasca bencana;
- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah paska bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah paska bencana alam di wilayah Pulau Kalimantan;
- e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Kapuas, Mahakam dan Barito maupun daerah rawan bencana alam lainnya;
- f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.



3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah, diantaranya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah;
- b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- c. **Meningkatkan monitoring hot spot** di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, **Kalimantan Tengah** dan Kalimantan Utara;
- d. Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan;
- f. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana;
- g. Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di kabupaten/kota;
- h. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah pulau Kalimantan yang dapat menjangkau wilayah terpencil;

Tabel 4.30.
Profil Kerawanan Dan Risiko PKN, PKW dan PKSN
di Wilayah Pulau Kalimantan

Wilayah	Index Kerawanan (IRBI 2011)	Indeks Risiko tingkat Kabupaten/Kota (IRBI 2013)
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kalimantan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kalimantan		
Palangka Raya	Tinggi untuk ancaman: kebakaran hutan dan lahan,	Kota Palangka Raya: Tinggi
Muara Teweh – Kab. Barito Utara	Tinggi untuk ancaman: banjir	Barito Utara: Tinggi

Sumber : RPJMN 2015-2019: Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah



Sesuai dengan Buku III RPJMD 2015-2019 (Agenda Pengembangan Wilayah), beberapa program strategis di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31.
Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai RPJMN 2015-2019

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai
2. Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pembuang – Teluk Segintung
3. Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga Bulik
4. Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas)
5. Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang/Mangkatip - Batanjung
6. Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangka Raya
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Tjilik Riwut
2. Pembangunan Bandara Muara Teweh
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai
2. Pengembangan pelabuhan Pangkalan Bun
3. Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang
4. Pengembangan Pelabuhan Bagendang
5. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau
6. Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan
7. Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat
JALAN
1. Pembangunan Jalan Palangka Raya-Bukit Liti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah
2. Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran
3. Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senamang-Bts Kalbar
4. Pembangunan Jembatan Tumbang Samba
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baik di Kab. Barito Utara
2. Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan
3. Pengadaan Bus Air
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru, Kab. Katingan
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak, Kab. Pulang Pisau
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW, di Kab. Barito Utara
2. PLTU Kalselteng 1 100 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
4. Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut KalimantanTengah ke Jawa tengah
5. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Telekomunikasi dan Informatika
1. Pembangunan Serat Optik seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI



Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional	
SUMBER DAYA AIR	
1.	Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat, Kab Kotawaringin Barat
2.	Revitalisasi lahan rawa ex PLG
PENDIDIKAN	
1.	Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD
2.	Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)
3.	Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)
4.	Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan
KESEHATAN	
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar : akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar
2.	Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu; b. Peningkatan pemenuhan layanan spesialisik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs
3.	Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
4.	Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, untuk pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Sehat) agar masyarakat miskin yang belum menerima (JKN-PBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Sehat; b. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian
5.	Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem <i>Surveillance</i> terpadu; e. <i>Universal Child Immunization</i> (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis

Sumber : RPJMN 2015-2019: Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah

B. Telaah RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, **visi pembangunan jangka panjang** daerah adalah “**Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil**”. Adapun **misi pembangunan jangka panjang** dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah



4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, sesuai tahapan RPJMD ke-tiga (tahun 2015-2020), pembangunan daerah ditujukan untuk **lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.**



TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD PROV. KALTENG TAHUN 2005-2025

VISI RPJPD 2005-2025 : KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI, DAN ADIL



Dalam **5 (lima) tahun ketiga tahapan RPJPD (2015-2020), prioritas pembangunan** adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang V - 22 berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.



7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

C. Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai **Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah** meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;



- e. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- f. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- g. pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, **Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi** terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana utama;
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

- a. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**, Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
- b. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**, meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
- c. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**, meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi darat:

1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan, mencakup:

Rencana pengembangan jaringan jalan:

- ✓ Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:
Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.
- ✓ Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi:
Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang – Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km
- ✓ Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :
 - (1) Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km;



- (2) Bawan – Lahei – Batekong sepanjang 261,18 Km;
- (3) Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) – Sebangau sepanjang 15 Km;
- (4) Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki – Pagatan sepanjang 125 Km;
- (5) Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwayat sepanjang 25 Km;
- (6) Pelabuhan Bukit Pinang – Kalampangan sepanjang 6,4 Km;
- (7) Simpang Sepaku (Nanga Bulik) – Parigi – Pangkut – Rantau Pulut – Kuala Kuayan – Simpang Sei Babi – Tangar – Parenggean – Kalanaman – Buntut Bali – Takaras – Bawan;
- (8) Tewah – Tumbang Miri – Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
- (9) Simpang Batapah – Tumpang Laung – Muara Teweh;
- (10) Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
- (11) Simpang Trinsing (Muara Teweh) –Trinsing sepanjang 16 Km;
- (12) Tampa – Pinang Tunggal – Jihi sepanjang 40 Km;
- (13) Rikut Jawu (Buntok) – Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan
- (14) Simpang Penopa – Tapin Bini sepanjang 28 Km.
- (15) Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian sepanjang 56,5 Km;
- (16) Palantaran – Parenggean - Tb.Sangai – Tb.Kalang sepanjang 90 Km;
- (17) Mendawai – Pagatan sepanjang 39,05 Km;
- (18) Sp.Kenawan – Riam Durian – Sukamara sepanjang 112,7 Km;
- (19) Pulang Pisau – Pangkoh – Bahaur sepanjang 80 Km;
- (20) Kuala Kapuas – Palingkau – Dadahup – Lamunti dan A5 sepanjang 94,7 Km;
- (21) Simpang Pundu – Tb.Samba sepanjang 68 Km;
- (22) Sampit – Samuda sepanjang 35,38 Km;
- (23) Patung – Hayaping – Bentot sepanjang 34,8 Km;
- (24) Km.34 M.Teweh – Sp.Benangin sepanjang 55 Km.

2) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:

✓ Jaringan angkutan sungai dan danau:

- (1) Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;
- (2) Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;



- (4) Sungai Kumai: Pangkalan Banteng - Kumai;
- (5) Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
- (6) Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang;
- (7) Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang - Kuala Pembuang;
- (8) Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggean - Hanjalipan;
- (9) Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang - Samuda;
- (10) Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi;
- (11) Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb. Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai - Pagatan;
- (12) Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantanan - Muara Sebangau;
- (13) Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya - Pulang Pisau – Maluku - Pangkoh – Bahaur;
- (14) Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling – Palangka Raya;
- (15) Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam;
- (16) Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh – Montalat - Buntok – Bangkuang – Mengkatip – Telang Baru - Jenamas – Banjarmasin;
- (17) Anjir Serapat: Banjarmasin – Kapuas;
- (18) Anjir Kelaman: Pulang Pisau - Mandomai;
- (19) Anjir Basarang: Kuala Kapuas - Basarang – Mintin;
- (20) Terusan Raya: Kuala Kapuas – Bahaur; dan
- (21) Terusan Hantipan: Pulau Hanaut – Pagatan.

✓ **Jaringan angkutan penyeberangan :**

- (1) Kumai – Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);
- (2) Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);
- (3) Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
- (4) Bahaur – Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).



b. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;

- 1) Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi:
 - (1) Jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;
 - (2) Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang -Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
 - (3) Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit –Kuala Pembuang – Teluk Segintung;
 - (4) Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan
 - (5) Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.
- 2) Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api dengan:
 - Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
 - Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh – Buntok – Tanjung; dan
 - Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.
- 3) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah, meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

c. Sistem jaringan transportasi laut;

Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :

- ✓ Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- ✓ Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- ✓ Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
- ✓ Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

d. sistem jaringan transportasi udara.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

a. Rencana sistem jaringan energi, mencakup;

1) Pembangkit Tenaga Listrik;

- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas;



- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
- ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

2) Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik, meliputi;

- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;
- ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan Puruk Cahu – Muara Juloi;
- ✓ Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah).
- ✓ Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- ✓ Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

3) Gardu Induk (GI), terdiri atas; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu



- 4) **Depo Bahan Bakar Minyak (BBM)**, mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiyang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok
- 5) **Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi**, berupa Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin

b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari;

1) **Sistem Jaringan Backbone;**

Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut

2) **Remote Metro Junction (RMJ);**

Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio

3) **Sistem Jaringan Akses**

Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (*Verry Small Aperture Terminal*)

c. Rencana sistem sumberdaya air, terdiri atas:

1) **Wilayah Sungai (WS)**, mencakup;

a) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi:

- ✓ Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai, DAS Jelai;
- ✓ Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;

b) Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.

c) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi:

- ✓ Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segintung; dan
- ✓ Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.

2) **Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ**, meliputi;

- a) **Bendung** Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tampa, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau,



- Bendung Tanjung Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan;
- b) **Bendungan** Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau;
- c) **Embung** Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
- d) **Danau** Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- e) **Situ** Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau
- 3) **Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak**, terdiri dari;
- **Daerah Irigasi (DI)**
- a) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat** yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam); DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.
- b) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi**, meliputi:
- ✓ Kabupaten Barito Timur, yaitu:
 - DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan
 - DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha).
 - ✓ Kabupaten Barito Utara, yaitu DI. Lahei (Luas Pelayanan 3.000 Ha).
 - ✓ Kabupaten Katingan, yaitu:
 - DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan
 - DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha)



- c) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten** meliputi:
- ✓ Kabupaten Kotawaringin Barat, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 1.519 Ha
 - ✓ Kabupaten Lamandau, 1 lokasi dengan luas pelayanan 25 Ha
 - ✓ Kabupaten Kotawaringin Timur, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.000 Ha
 - ✓ Kabupaten Pulang Pisau, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 400 Ha
 - ✓ Kabupaten Barito Selatan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 750 Ha
 - ✓ Kabupaten Barito Timur, mencakup 3 lokasi dengan luas pelayanan 631 Ha
 - ✓ Kabupaten Barito Utara, mencakup 11 lokasi dengan luas pelayanan 3.750 Ha
 - ✓ Kabupaten Gunung Mas, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 2.220 Ha
 - ✓ Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.800 Ha
- **Daerah Rawa (DR)**
- a) **Daerah Rawa Kewenangan Pusat**, meliputi:
- ✓ DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi),
 - ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48.582 Ha/ 12 lokasi Kecamatan)
 - ✓ DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha/11 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 Ha/18 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 Ha/lokasi Eks PLG).
- b) **Daerah Rawa Kewenangan Provinsi**, meliputi:
- ✓ DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/4 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lokasi)



- ✓ DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69.526,25 Ha/ 36 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 21.925 Ha/13 lokasi)
 - ✓ DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 Lokasi),
- **Daerah Rawa Tambak**, di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- 4) **Pengamanan Pantai**, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km, meliputi:
- ✓ pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru),
 - ✓ pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);
 - ✓ pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
 - ✓ pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran),
 - ✓ pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan
 - ✓ pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat, Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).
- 5) **Instalasi Pengolahan Air Minum**, mencakup:
- Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi:
- ✓ Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai
 - ✓ Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota
- 6) **Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai**, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.



Adapun **rencana pola ruang provinsi** pada **kawasan budidaya** terdiri atas:

- a. **kawasan peruntukan hutan produksi** meliputi:
 - 1) hutan produksi terbatas (HPT) seluas $\pm 3.335.571$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) hutan produksi tetap (HP) seluas $\pm 3.896.706$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - 3) hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas $\pm 2.258.274$ Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas $\pm 624.101.04$ Ha yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. **Non kawasan hutan** seluas $\pm 2.629.779$ Ha dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) **kawasan peruntukan pertanian** meliputi:
 - a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas $\pm 187.814,65$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas 178.572,86 Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas $\pm 64.001,81$ Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas $\pm 37,385$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
 - d) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha;
 - e) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kanan dan 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - f) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.
 - 2) **Kawasan Peternakan** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 3) **Kawasan peruntukan perkebunan** tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 4) **kawasan peruntukan perikanan laut** seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.



- 5) **kawasan peruntukan industri** terdiri atas:
 - a) kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b) Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
- 6) **kawasan peruntukan pariwisata** disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.
- 7) **kawasan peruntukan permukiman** terdiri atas:
 - a) kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar di seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8) **kawasan peruntukan transmigrasi** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9) **kawasan peruntukan *technopark*** perkebunan, *technopark* pertambangan, *technopark* perikanan, *technopark* kehutanan, *technopark* pertanian, *technopark* peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 10) **kawasan peruntukan lainnya**, yaitu:
 - a) kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan *geostrategic* nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ± 65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
 - d) Hutan Monumental seluas ± 600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wilayah Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- a. **kawasan peruntukan pertambangan** yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan



menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan

- b. **kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi** di 14 Kabupaten/Kota.

4.2.4 Isu Strategis Provinsi Sekitar

Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil mempertimbangkan kedua provinsi tersebut terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan kedua provinsi. Berikut ini adalah telaah isu atau kebijakan strategis provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

A. Kebijakan Strategis Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2016-2021 mengusung visi, “**Terwujudnya Pembangunan yang Mandiri dan Merata Berbasis Agrobisnis di Kalimantan Selatan**”. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah **misi** sebagai aplikasi dari pencapaian visi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis sektor unggulan pertanian;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
2. *Sustainability Development* sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan *good governance* melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan



7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan

Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 direncanakan pembangunan jembatan Tabukan-Dadahup di wilayah Kalimantan Tengah. Rencana pembangunan jembatan tersebut dalam rangka memperlancar arus barang dan orang yang menghubungkan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Tabukan dan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di Dadahup. Sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut perlu menjadi perhatian, sehingga rencana pembangunan jembatan tersebut terwujud sesuai target waktu yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

B. Kebijakan Strategis Provinsi Kalimantan Barat

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013–2018 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”**.

Adapun **Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018** adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana prasarana infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai.



6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perdalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah tersebut, **prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018** adalah sebagai berikut:

Prioritas 1 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mewujudkan prioritas tersebut, terdapat 10 (sepuluh) fokus prioritas yaitu: revitalisasi pertanian, revitalisasi perkebunan, revitalisasi bidang perikanan dan kelautan, revitalisasi peternakan, revitalisasi kehutanan, revitalisasi industri, penguatan perdagangan, pembangunan kepariwisataan, pengembangan koperasi dan UMKM, serta pembangunan energi dan sumber daya mineral.



Prioritas 2 : Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia

Untuk mewujudkan prioritas tersebut, dilaksanakan melalui fokus prioritas peningkatan keterampilan masyarakat.

Prioritas 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terdapat 2 (dua) fokus prioritas yaitu peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Prioritas 4 : Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan aparaturnya pemerintah yang handal untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat, dan sederhana, fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan sumber daya aparaturnya dan restrukturisasi organisasi dan perangkatnya.

Prioritas 5 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar

Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infratsruktur dasar, fokus prioritas diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana; pemeliharaan sarana dan prasarana; dan program khusus.

Prioritas 6 : Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

Untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dilakukan dengan 3 (tiga) fokus prioritas pembangunan yaitu : penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi; peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan peningkatan sumber pendanaan dekonsentrasi.

Prioritas 7 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil, aman, damai dan memiliki ketahanan budaya, terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan iklim dan suasana kondusif; peningkatan kerukunan beragama; dan peningkatan ketahanan budaya.

C. Kebijakan strategis Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada



lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada **model pembangunan ekonomi hijau** sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2013-2018 mengusung visi, **“Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”**. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah **misi** sebagai aplikasi dari pencapaian visi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kedua belas **prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018**, meliputi:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan
6. Percepatan transformasi ekonomi;
7. Pengembangan agribisnis;
8. Peningkatan produksi pangan;
9. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; dan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.



Salah satu kebijakan yang terkait langsung antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan adalah kebijakan mengenai Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.

Kawasan Industri Tanaman Pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai *hinterland* Kota Balikpapan, memiliki letak geo-strategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha.

Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur

4.2.5 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat dirumuskan **isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah** sebagai berikut:

A. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun

Sumber daya hutan yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan Kalimantan Tengah perlu diperhatikan keberlanjutannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Dampak bencana asap akibat kebakaran lahan, hutan dan kebun yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya tahun 2015 yang lalu sangat mengganggu aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan



sosial masyarakat. Bahkan indeks partikulat Kota Palangka Raya pernah mencapai 2.900 (angka 359 sudah dianggap berbahaya), mengakibatkan masyarakat tidak mendapat oksigen yang cukup dan inilah yang dirasakan ribuan keluarga yang terpapar kabut asap.

Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga perlu dilanjutkan, antara lain: optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan; optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis; perlindungan hutan terhadap kebakaran dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; pementapan pengelolaan kawasan konservasi; pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektifitas kawasan konservasi.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, luas wilayah Kalteng sebesar 15.750.472 ha dikelompokkan berdasarkan fungsi lindung, yang dibagi ke dalam kawasan lindung 23 persen dan kawasan budidaya 77 persen. Di dalam luasan kawasan tersebut terkandung kekayaan sumberdaya alam yang memiliki nilai jasa ekosistem dalam menunjang perikehidupan manusia.

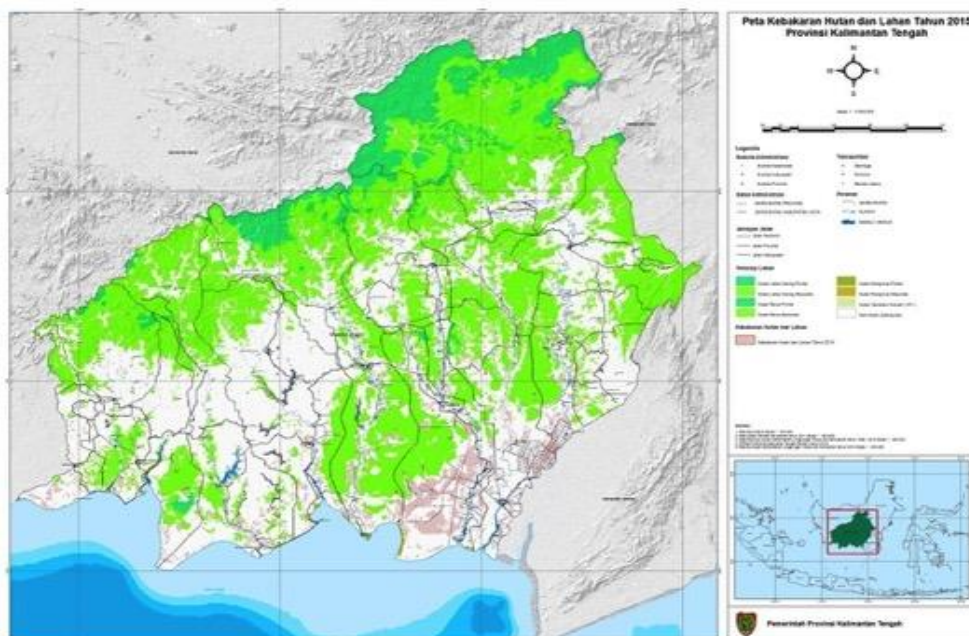
Isu strategis yang teridentifikasi dalam dalam dokumen **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021**, antara lain kebakaran, alih fungsi lahan, dan pencemaran lingkungan hidup. Isu-isu ini muncul disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah masih memerlukan upaya yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- **Kebakaran Hutan dan Lahan**

Sejak dibukanya Proyek Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah (Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1995), setiap tahun Provinsi Kalimantan Tengah selalu terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Tiga dampak besar yang terjadi sejak pembukaan Eks Proyek Lahan

Gambut (Eks PLG) selalu terulang secara periodik, yakni pada tahun 1997, 2006 dan yang terakhir pada tahun 2015. Sesuai dokumen KLHS RPJMD 2016-2021, luas kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 mencapai 581.067,58 ha, sebagian besar terjadi di bagian selatan yang didominasi lahan gambut khususnya di lokasi Eks PLG. Dari luasan eks-PLG yang hanya 9% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah terbakar sekitar 46%-nya dan luas Eks PLG Blok C dengan luas hanya 3% dari Provinsi Kalimantan Tengah terbakar seluas 27% dari total luas kebakaran yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Peta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sebagaimana gambar 4.10 berikut.

Gambar 4.10.
Peta kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID-Lestari Kalteng-2016 (Dokumen KLHS RPJMD Prov. Kalteng 2016-2021)

Berdasarkan implementasi dari PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 17 Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang berstatus sebagai KHG Lintas Kabupaten/Kota. Dari jumlah 17 KHG tersebut terdapat 4 KHG dengan prosentase tutupan vegetasi hutan minimal, yakni mulai dari yang terendah, KHG KT-KH19 tanpa tutupan hutan sama sekali (0%), KHG KT-KH17 dengan tutupan hutan hanya 4,27%, KHG KT-KH14 dengan tutupan hutan 8,17% dan KHG KT-KH18 dengan tutupan 8,76% berupa hutan.

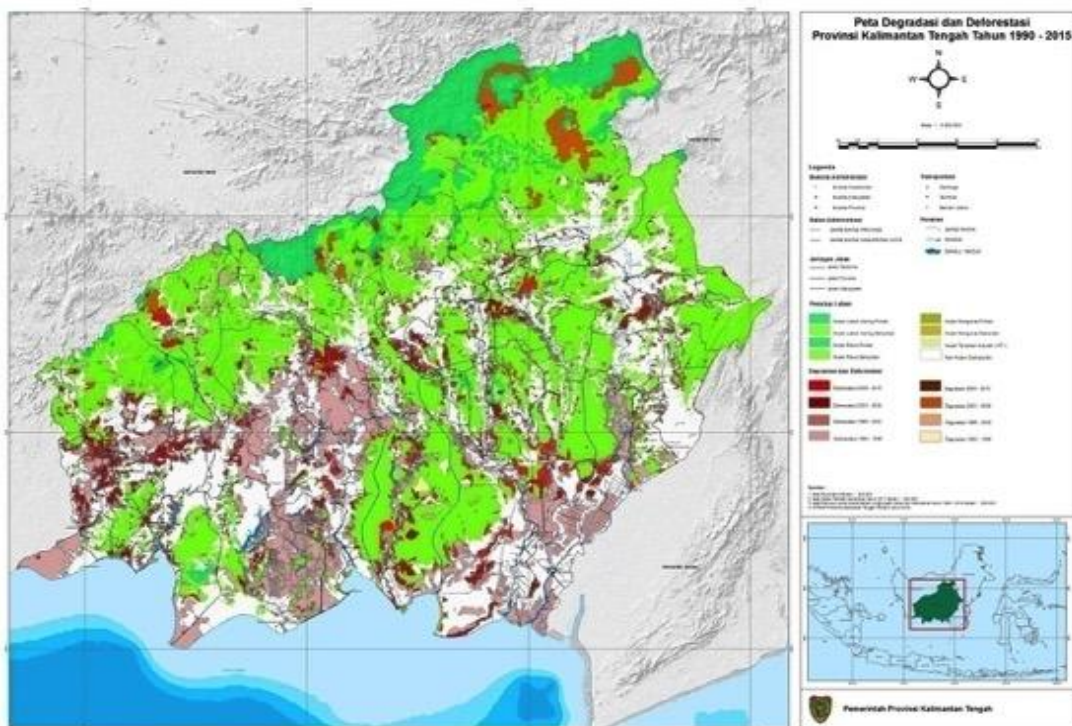


- **Alih Fungsi Lahan**

Berdasarkan hasil analisis interpretasi perubahan tutupan lahan antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2015, terlihat bahwa tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah sebesar 3.921.959,26 ha. Tipe perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut didominasi oleh perubahan Hutan Rawa Sekunder menjadi Belukar Rawa, yaitu sebesar 1.003.495,20 ha atau sebesar 25,6 persen dari total luas perubahan yang ada. Selanjutnya perubahan Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Perkebunan juga cukup besar, yaitu seluas 585.008,72 ha atau sebesar 14,9 persen dari total perubahan lahan. Gambar 4.11 menunjukkan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami deforestasi dan degradasi lahan.

Selanjutnya perubahan lahan yang paling kecil pada rentang tahun tersebut (1990 – 2015) di Provinsi Kalimantan Tengah adalah degradasi dari Hutan Lahan Kering Primer menjadi Kawasan Air, yaitu sebesar 5,83 ha dari total luas perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 4.11
Peta perubahan tutupan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1990 – 2015



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID-Lestari Kalteng (2016)



- **Pencemaran Lingkungan Hidup**

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh berbagai pihak di Kalimantan Tengah. Namun, masih terdeteksi pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran air, tanah dan udara. Data yang disajikan oleh BPS Kalimantan Tengah tahun 2014 menunjukkan ada 970 desa yang mengalami pencemaran lingkungan atau 61 persen desa (dari 1.569 desa) yang mengalami pencemaran lingkungan.

B. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.

Memiliki SDM yang berdaya saing tinggi akan menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah siap menghadapi segala tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan peningkatan SDM berdaya saing hingga level nasional akan menempatkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Tengah setara dengan kota-kota besar di Indonesia. Hal tersebut menjadikan SDM mampu bersaing pada kancah nasional maupun Internasional. Efek lain dari peningkatan kualitas SDM adalah pengembangan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih maksimal dan optimal dalam menyerap tenaga kerja local sehingga penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Tengah dapat diminimalisir.

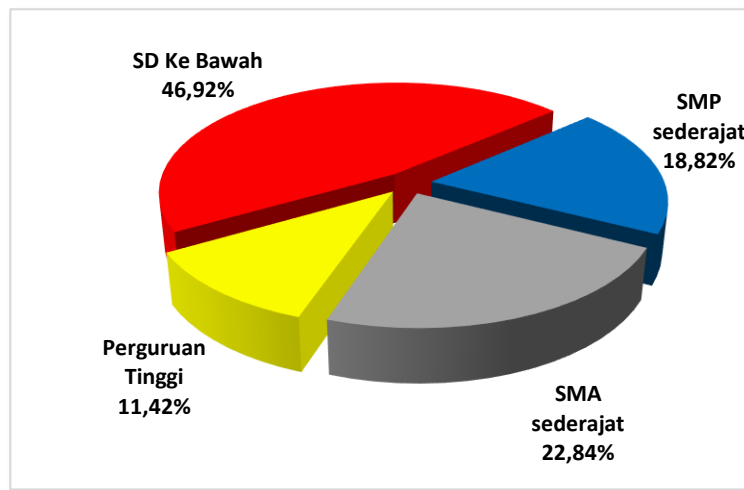
Realisasi potensi sumber daya manusia yang telah menjadi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Namun demikian tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,54 persen dan Februari 2016 sebesar 3,67 persen. Dari besaran angka pengangguran ini, yang perlu digaris bawahi adalah kualitas sumber daya manusia yang menjadi



tenaga kerja baik berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja, maupun buruh/karyawan/ pegawai terindikasi masih memiliki daya saing yang rendah.

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah hanya pernah mengenyam pendidikan hingga SD atau belum lulus SD bahkan ada yang tidak sekolah yakni sebesar 46,92 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi hanya sebesar 11,42 persen, yakni yang memiliki pendidikan Diploma I/II/III dan jenjang S1/S2/S3.

Gambar 4.12
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016 (Kondisi Februari 2016)

Peningkatan tenaga kerja dari segi pendidikan dapat menjadi awal jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga secara otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berpacu pada pendidikan formal saja dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun tenaga kerja ini, akan tetapi pendidikan non formal seperti keterampilan khusus secara teknis akan memberi poin tersendiri pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. Pengembangan green economy dan green government dalam realisasi pembangunan daerah

Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan pada hakekatnya adalah pembangunan pada sektor ekonomi yang memenuhi kebutuhan generasi saat



ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi ini merupakan pelaksanaan pembangunan dan upaya mempertahankan kelestarian kualitas lingkungan hidup dengan tetap menggerakkan roda pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa mengurangi prinsip etika lingkungan.

Provinsi Kalimantan Tengah telah berinisiatif menjadi anggota dan terlibat secara aktif dalam forum pertemuan tahunan *Governors Climate and Forest (GCF) Taskforce* sejak tahun 2009. Pertemuan GCF yang telah dilaksanakan berturut-turut di California, Matto Gruso-Brasil, Palangka Raya-Indonesia, Rio de Janeiro-Brasil, Santo Christobal-Meksiko memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah. Forum pertemuan tahunan GCF di California melahirkan *Call for Leadership* yakni sebuah himbuan kepada pemimpin dunia untuk mengambil peran lebih progresif dalam upaya pencegahan pemanasan global. GCF dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi untuk lapangan kerja hijau, meningkatkan penggunaan energi bersih, mengurangi polusi, menumbuhkan ekonomi hijau (*green economy*), dan mengurangi pemanasan global.

Dari GCF ini telah lahir berbagai kerjasama terkait penyelamatan lingkungan hidup, terutama wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki fungsi sebagai salah satu paru-paru dunia. Kerjasama tersebut antara lain dukungan terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, program konservasi orang utan dan habitatnya, kerjasama ICDP (*Integrated Conservation and Development Programme*) dengan USAID dan WWF yang melahirkan perencanaan Taman Nasional Sebangau, kerjasama dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan, restorasi hidrologi wilayah, penghijauan kembali wilayah Kalimantan Tengah, pengembangan dan konservasi lingkungan, hingga restorasi ekosistem di Katingan dan Kotawaringin Timur.

D. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama yang akan tercapai dengan adanya pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Dengan pemerataan



kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan dapat terdongkrak dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah.

Perlu adanya perlakuan khusus bagi Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemeratakan hasil pembangunan daerah sebagai sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat. Akses wilayah yang cukup sulit di banyak wilayah menjadikan hambatan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Tengah untuk berkembang. Hal tersebut tentu saja menjadikan masyarakat tidak leluasa menikmati hasil pembangunan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki di setiap wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki “pekerjaan rumah” yang khusus dalam hal peningkatan aksesibilitas wilayah, baik di internal Provinsi Kalimantan Tengah, maupun dengan luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan

Ketahanan pangan merupakan salah satu ancaman Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan berkurangnya lahan pertanian akibat pengalihan fungsi lahan yang potensial terhadap bahan pangan menjadi lahan untuk sektor industri maupun sektor pertambangan (batu bara). Selain masalah lahan, keterjangkauan dan kesinambungan penyediaan pangan perlu alur pendistribusian yang didukung dengan infrastruktur memadai sehingga memperlancar pendistribusian pangan dari produsen ke konsumen.

Peningkatan produktivitas sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah daerah karena dengan peningkatan ini maka perekonomian juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor ini pada struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral yang cukup baik. Mengingat masih banyaknya pengelolaan sektor pertanian dengan cara tradisional, maka penggunaan teknologi tepat guna bagi pengembangan sektor pertanian menjadi basis peningkatan produktivitas sektor saat ini.

Selain itu, transformasi sektoral pada pengembangan industri agro dapat menjadi alternatif yang menjanjikan mengingat ketersediaan potensi sumber daya alam maupun manusia serta pendukung-pendukungnya cukup tersedia.



Pengembangan agroindustri merupakan bagian (subsistem) dari agribisnis secara lebih luas. Adanya pengembangan industrialisasi sektor pertanian tersebut akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan tersebut, dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan.

Peran aktif pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara sinergi. Jika semua program berjalan sebagaimana mestinya, maka Provinsi Kalimantan Tengah akan mampu meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

F. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

Pembangunan daerah merupakan pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai, dan sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat yang tumbuh dalam rasa kekeluargaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan



biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong pembangunan di bidang lain.

G. Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi

Sebagai salah satu wilayah di Pulau Kalimantan yang merupakan wilayah tropis sekaligus memiliki sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi meningkatkan daya dukung perkembangan perekonomiannya melalui penggalian sumber daya alam berbasis lingkungan hidup. Eksploitasi setiap sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Optimalisasi investasi memiliki tujuan utama yakni mengembangkan perekonomian daerah dengan berimbang positif pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur melalui CSR. Namun perlu digarisbawahi untuk eksploitasi berupa subsektor kehutanan, perusahaan memiliki beberapa kewajiban utama dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan hidup agar tidak terjadi degradasi lingkungan seperti reboisasi, rehabilitasi lahan, dan sebagainya. Sedangkan untuk eksploitasi barang tambang mineral harus merujuk pada UU Minerba yang menggariskan kewenangan eksklusif pusat dalam hal:

- a. Penetapan kebijakan nasional,
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan,
- c. Penetapan standar, pedoman, dan kriteria,
- d. Penetapan sistem perijinan pertambangan mineral nasional, dan
- e. Penetapan wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan Pemda dan berkonsultasi dengan DPR.

Di samping itu, jenis-jenis kewenangan (terutama terkait perijinan) antar pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bersubstansi sama dan hanya berbeda dalam skala cakupan wilayah, yakni:



1. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kabupaten/kota tersebut;
2. Pemerintah provinsi untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan wilayah laut 0-12 mil;
3. Pemerintah pusat untuk wilayah lintas provinsi dan wilayah laut di atas 12 mil dari garis pantai.

H. Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam *good governance* mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (*government*), dunia usaha (*swasta*), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai aparat pemerintah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang sehingga peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan perekonomian melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan visi dan misi yang jelas serta peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya menjadi penting. Menerjemahkan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran yang selaras dengan analisis teknokratik sangat menentukan apa dan bagaimana masa depan lima tahun pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah akan diwujudkan.

5.1 VISI

Visi pembangunan yang baik dapat menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada kemajuan, keadilan, dan kemandirian secara menyeluruh dalam berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

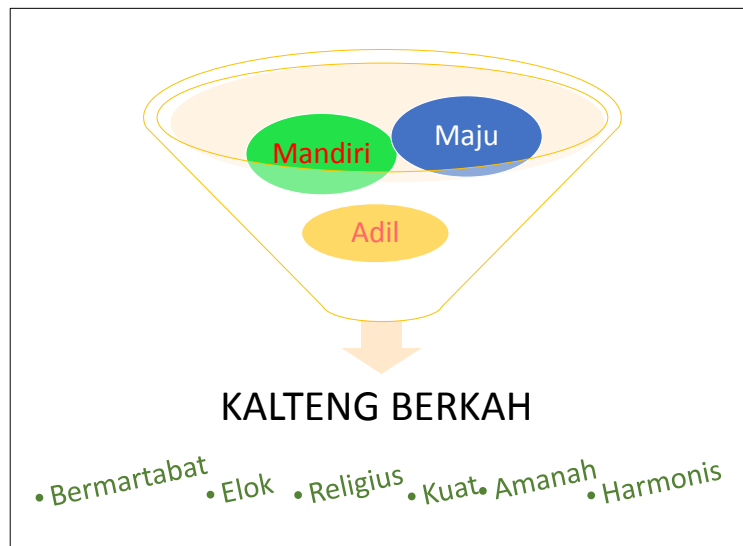
Berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD ketiga (2016-2021), pembangunan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk lebih **memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat**. Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:



Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu **Maju, Mandiri, dan Adil** yang bertujuan untuk mencapai **Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)** sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 5.1.
Hubungan Antar-Elemen Visi



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Maju

Tingkat kemajuan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja sektor perekonomian dan sosial. Perekonomian dapat dinilai dari tingkat pendapatan properti sektor industri dan jasa dalam pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja, keterpaduan antar sektor ekonomi, keberlanjutan dan kemiskinan. Kemajuan juga diukur dari indikator kependudukan dan SDM.

Suatu daerah dikatakan maju dan dapat dilihat dari masyarakatnya yang sejahtera, ditandai antara lain dengan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi akan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan dari *saving*, investasi dan produktivitas yang tinggi. Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang memiliki wilayah



terluas di area Kalimantan, mempunyai banyak potensi untuk memajukan daerahnya. Dari segi Sumber Daya Alam, provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kekayaan alam yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat memajukan perekonomian. SDA yang dimiliki provinsi Kalimantan Tengah berpotensi sangat besar dan bisa menjadi penyokong pesatnya pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan SDA yang tepat akan menjadikan penopang ekonomi sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan dari segi Sumber Daya Manusia, Provinsi Kalimantan Tengah meskipun sudah cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun ekonominya.

2. Mandiri

Definisi dari kata mandiri adalah dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunannya yang memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan ekonominya. Kemandirian diperlukan untuk memutus mata rantai ketergantungan dengan daerah-daerah lain, dengan upaya tersebut sehingga Kalteng BERKAH terwujud serta mampu mensejahterakan masyarakat dan diharapkan secara bertahap lebih maju lagi dari daerah sekitarnya.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya. Pemerintah terus berusaha mengembangkan



sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat.

3. Adil

Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, maka segala proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia semaksimal mungkin diarahkan menuju tercapainya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sendiri bermakna keadaan dimana semua orang mendapatkan hak menurut kewajibannya. Maksud dari elemen misi Adil ini adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan hak dan kewajibannya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah secara merata. Keadilan diwujudkan dalam aspek yang luas, yakni kesempatan meningkatkan taraf hidup, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan hak politik, pertahanan dan keamanan, perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Ketiga elemen ini yaitu **maju, mandiri, dan adil** diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang **BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)**. Elemen maju, mandiri, dan adil ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah selalu hidup rukun dan damai serta sejahtera. Strategi yang implementatif dan efektif serta sinergis dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH, sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

5.2 MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiridengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.



Mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis, serta visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, maka **misi pembangunan daerah jangka menengah** sebagai berikut:

1. **Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi**
2. **Pengelolaan Infrastruktur**
3. **Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai**
4. **Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan**
5. **Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah**
6. **Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata**
7. **Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam**
8. **Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Misi pembangunan jangka menengah daerah (tahun 2016-2021) tersebut di atas, memiliki keterkaitan dan konsistensi dengan misi pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025), sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan/Konsistensi Muatan RPJMD dengan RPJPD
dan Prinsip Manfaat Pembangunan

No.	MISI RPJMD 2016-2021	MISI RPJPD 2005-2025
1	Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Misi 2: Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
		Misi 3: Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
		Misi 11: Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan
		Misi 12: Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku



No.	MISI RPJMD 2016-2021	MISI RPJPD 2005-2025
2	Misi 2: Pengelolaan Infrastruktur	Misi 1: Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
3	Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai	Misi 2: Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
		Misi 11: Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan
4	Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 1: Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
		Misi 3: Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
		Misi 4: Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
		Misi 9: Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan
5	Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 7: Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
6	Misi 6: Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata	Misi 6: Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
		Misi 8: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada



No.	MISI RPJMD 2016-2021	MISI RPJPD 2005-2025
		kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		Misi 9: Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan
		Misi 10: Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
7	Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Misi 11: Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
8	Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 3: Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
		Misi 4: Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.

Adapun penjelasan masing-masing misi tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pemantapan perencanaan pembangunan daerah dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dengan pembangunan sektoral adalah pemantapan tata ruang wilayah. Pentingnya pemantapan penataan ruang didasarkan pada semakin meningkat dan dinamisnya kegiatan pembangunan serta gerakan masyarakat yang telah meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang oleh aktivitas-aktivitas yang satu sama lain sering tidak sesuai. Hal ini dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang yang kian rumit dan sulit diatasi, selanjutnya dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai masalah sosial budaya.

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan,



keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengeturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, dimana pola ruangnya didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 yang telah diupdate, terlihat bahwa kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar \pm 18 persen, sedangkan kawasan hutan \pm 82 persen. Beberapa permasalahan terkait dengan RTRWP antara lain masih banyak desa, prasarana wilayah, ruang kelola masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan. Untuk mengakomodir rencana pembangunan sarana dan prasana wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya perlu ruang yang cukup dan memadai yang didasarkan pada analisis dan kajian teknokratik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu RTRWP Kalteng perlu dilakukan perbaikan guna mengatasi permasalahan kawasan tersebut di atas.

Penataan ruang perlu dimantapkan karena merupakan instrumen demi terwujudnya pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang serasi, selaras, dan berkesinambungan, baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, pendekatan penataan ruang diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi terhadap program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan. Penataan ruang adalah merupakan kegiatan lintas sektor dan wilayah, dengan demikian faktor penting yang harus menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Kualitas perencanaan tata ruang sangat ditentukan pula oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat dan *up to date*, baik pemanfaatan ruang secara eksisting maupun data-data dasar sehingga peningkatan ketersediaan data dan informasi juga terus dilakukan.

2. Pengelolaan Infrastruktur

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauhmana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas secara merata. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dalam



rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan jalan, permukiman, perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian yang terintegrasi sebagai simpul moda transportasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur kelistrikan. Peningkatan jalan mantap dilakukan melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada jalan nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan-jalan strategis yang menuju outlet produksi dan distribusi. Peningkatan elektrifikasi dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, gas, bayu dan mikrohidro, maupun perluasan jaringan transmisi.

3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai

Kalimantan Tengah memiliki garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas. Garis pantai pada umumnya merupakan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan.

Sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang serbesar-besarnya kepada seluruh *stakeholders* terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (aquakultur), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Manfaat ekosistem pantai sangat banyak, namun demikian tidak terlepas dari permasalahan lingkungan, sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pantai. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perairan pantai, adalah



pencemaran, erosi pantai, banjir, inturusi air laut, penurunan biodiversitas pada ekosistem mangrove dan rawa, serta permasalahan sosial ekonomi.

Oleh karena itu di dalam pengelolaan daerah pesisir diperlukan suatu kajian keruangan mengingat perubahan ini bervariasi antar suatu tempat dengan tempat lain. Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan kelautan selama ini belum optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan pantai adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pantai antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain itu harus diperhatikan juga upaya pengawasan, serta pengendalian kerusakan pantai sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Pengendalian kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan dilakukan secara menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh.

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan

Stabilitas inflasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan investasi, dan berproduksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan *agregat* (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan



inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Untuk mendorong perekonomian rakyat, paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlu peranan pemerintah, pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektivitasnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta inflasi yang rendah dan stabil, maka masyarakat akan meningkatkan pendapatannya secara riil, sehingga jumlah masyarakat miskin secara otomatis menjadi berkurang.

Pembangunan daerah akan lebih efektif apabila bertumpu pada kompetensi dasar dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Kalimantan Tengah. Seluruh aspek kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang untuk mencapai suatu keadaan ekonomi yang stabil. Untuk menghindari berhentinya kreatifitas masyarakat, kegiatan produksi harus ditingkatkan. Upaya peningkatan aktivitas perekonomian yang dilakukan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung dunia usaha, serta meningkat dan berkembangnya koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi



untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumberdaya manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kualitas pendidikan diukur dengan beberapa indikator yakni angka melek huruf (%) dan angka rata-rata lama sekolah (tahun). Hal tersebut dipengaruhi masalah keterjangkauan dan akses penduduk terhadap prasarana pendidikan. Dalam 5 tahun ke depan APK, APM, Rasio guru terhadap murid, persentasi guru berkualifikasi D4/S1 dan bersertifikasi dalam semua jenjang pendidikan akan ditingkatkan menjadi diatas rata-rata nasional, meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik dan kependidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Selama periode pemerintahan 2016-2021, aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan di seluruh pelosok Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, tersistem, bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, tenaga pendidikan dan kependidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur akan terus dibenahi dan ditingkatkan. Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa peningkatan mutu pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Tengah, baik pendidikan formal maupun informal. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Sehingga



diharapkan SDM Kalimantan Tengah harus mampu mengelola sumber daya daerah guna mendongkrak pendapatan daerah.

Pemuda adalah tiang negara, pada saatnya nanti para pemuda harus mampu menerima tongkat estafet kepemimpinan dalam berbagai hal. Mengingat penting dan strateginya peranan pemuda ini maka pemerintah wajib untuk melakukan pembenahan dan pemberdayaan dalam proses pembangunan melalui organisasi kepemudaan.

Olahraga memiliki peran penting dan sentral dalam kehidupan manusia, mengingat pentingnya hal ini maka pembinaannya harus dilakukan sejak dini. Kalimantan Tengah pernah jaya dalam beberapa cabang olahraga antara lain dayung. Pembinaan, pengembangan beberapa cabang olahraga ke depan menjadi prioritas.

Dalam bidang kesehatan, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah harus mempunyai akses yang mudah terhadap sarana prasarana kesehatan. Untuk itu keberadaan sarana prasarana kesehatan harus didekatkan kepada masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Saat ini sudah ada 2 Rumah Sakit tipe B rujukan yakni Sampit dan Pangkalan Bun dan 1 Rumah Sakit tipe B pendidikan yakni RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya. Untuk wilayah Timur yakni daerah Barito, RSUD Muara Teweh akan ditingkatkan menjadi RSUD tipe B rujukan.

Dalam 5 tahun ke depan berbagai program kegiatan akan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akses terhadap sarana prasarana kesehatan. Demikian pula rasio dan prasarana kesehatan per satuan balita/penduduk, rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk akan ditingkatkan. Indikator lain yang juga terus diperbaiki/ditingkatkan adalah umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk dan sebagainya.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, maka angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah juga akan mengalami perbaikan. Bahaya Narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan yakni darurat narkoba, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu, terencana, terukur, dan komprehensif. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan perang terhadap Narkoba di Kalimantan Tengah. Berbagai upaya baik berupaya mencegah, penindakan dan rehabilitasi dilakukan secara simultan, baik di kota maupun di desa.



Kalimantan Tengah memiliki objek wisata yang sangat beragam, mulai dari ekowisata, wisata religi kuliner, wisata susur sungai, wisata religi ziarah, wisata orang hutan, wisata pantai dan danau, dan lain sebagainya.

Seni dan Budaya merupakan identitas yang harus tetap terpelihara dan terjaga serta dikembangkan dimasa yang akan datang melalui sanggar-sanggar, padepokan dan organisasi. Berbagai event yang telah terjadwal selama ini tetap diteruskan, baik untuk tujuan wisata maupun dalam rangka pelestarian budaya. Dalam hal pengembangan wisata, di Kalimantan Tengah berpotensi juga untuk pengembangan "wisata religius" karena banyaknya daerah-daerah yang sakral atau di sakralkan.

Dengan melihat potensi dan sumberdaya daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pariwisata dan seni budaya merupakan salah satu kekayaan daerah yang mampu menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk berkunjung. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam sektor pariwisata, sehingga perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang cukup intens. Secara tidak langsung dengan berkembangnya sektor pariwisata, maka akan banyak aspek lain yang ikut bergerak secara positif. Misalnya apabila sektor pariwisata berkembang, akan banyak wisatawan yang berkunjung sehingga PAD akan meningkat. Pengembangan pariwisata dan seni budaya secara terencana, terpadu, dan sistematis merupakan salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian masyarakat mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi mengembangkan sektor pariwisata sehingga pendapatan masyarakat bertambah, kriminalitas menurun karena masyarakat mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang positif. Dengan ini diharapkan sektor pariwisata dapat menjadi sektor yang mampu menopang dan mendukung berkembangnya sektor ekonomi, yang akan mampu mendongkrak pendapat asli daerah (PAD).

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk



hidup lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah harus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sesuai dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Upaya perlindungan sumber daya alam tidak hanya mencakup beberapa obyek saja melainkan di bidang yang luas termasuk perlindungan flora dan fauna. Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting, karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam.

8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan daerah dimaksudkan agar penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah didapatkan secara maksimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pengelolaan pendapatan daerah di sini lebih diarahkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka memperbesar volume APBD.

Banyak persoalan mengenai pendapatan daerah yang terasa sekali sangat kurang mendapatkan perhatian. Sementara di sisi lain belum banyak komponen warga masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui warga masyarakat, yakni hal pengelolaan pendapatan daerah. Diperlukan suatu transparansi pengelolaan pendapatan daerah dengan menumbuhkan sikap kejujuran dan tanggungjawab moral dari pengelola pendapatan daerah (pemerintah daerah Provinsi



Kalimantan Tengah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan daerah. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memunculkan kesadaran dari warga masyarakat agar ikut aktif merasa bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam peningkatan pendapatan daerah ini adalah terkait SDM pengelola pendapatan daerah yang kompeten dan profesional dalam melakukan terobosan-terobosan dan bekerja secara profesional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Tengah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran diklasifikasikan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan *lagging indikator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indikator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.



Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan **tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan** diuraikan sebagai berikut.

1. **Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas**
2. **Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas**
3. **Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, Daerah Pesisir dan Pantai**
4. **Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah**
5. **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara Konsisten**
6. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**
7. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
8. **Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata**
9. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**
10. **Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan**

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan **sasaran pembangunan** pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas**

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara berkesinambungan. dari masa ke masa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kesesuaian antara program pembangunan dengan rencana tata ruang, ternyata pemanfaatan rencana tata ruang untuk program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum seperti yang diharapkan/direncanakan.

Sehingga sangat perlu untuk meningkatkan kesesuaian tata ruang, karena kesesuaian dengan tata ruang akan menjadi instrumen penapis awal sebelum dokumen Amdal dinilai oleh komisi Amdal. Menjadi sangat penting menyetarakan pemahaman tentang tata ruang bagi semua pemangku kepentingan Amdal, termasuk Komisi Amdal yang berada di Provinsi Kalimantan tengah. Guna **meningkatkan kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas**, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:



- a. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten, dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang.

2. Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas

Indikator kemakmuran dan kemajuan suatu daerah salah satunya adalah penyediaan fasilitas infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas dan ketercukupan energi yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya.

Guna **meningkatkan infrastruktur yang berkualitas** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya konektivitas antar daerah, dengan indikator persentase jalan mantap dan persentase konektivitas jalan.
- b. Meningkatnya ketercukupan energi, dengan indikator meningkatnya rasio desa berlistrik dan Rasio elektrifikasi.

3. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, daerah Pesisir dan Pantai

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan pembangunan daerah. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik yang



berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan daerah serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda.

Peningkatan sumber daya air di Kalimantan Tengah, antara lain melalui pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air, meliputi: wilayah sungai, danau, daerah irigasi, daerah rawa dan tambak, termasuk pengamanan pantai, pengendalian banjir dan longsor tebing dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, terutama padi, yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Terkait dengan pengelolaan daerah pesisir dan pantai, dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, akses permodalan dan pasar teknologi. Selain itu juga pengadaan stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk para nelayan pada sejumlah kabupaten atau daerah-daerah yang letak geografisnya sangat strategis.

Guna **meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir dan pantai** di Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan.

4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari



pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat maka perlu untuk dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berbasis “*win-win solution*”.

Guna mewujudkan **kualitas perekonomian daerah**, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator Laju Inflasi dan pendapatan perkapita

5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara konsisten

Salah satu wujud kesejahteraan dari suatu daerah adalah tingkat perekonomian yang baik dan konsisten. Karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus berusaha menciptakan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus menunjukkan konsistensi yang baik hingga kini. Namun, masih dibutuhkan upaya dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengembangkan tatanan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing serta berkeadilan, melalui optimalisasi potensi sumber daya alam secara umum dan sistem perdagangan yang adil untuk menopang kemajuan industri, mempromosikan investasi, mengembangkan pariwisata yang tangguh, mengembangkan kemitraan antar-pelaku ekonomi, pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal lainnya, melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif dalam kerangka peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin serta ketahanan pangan masyarakat.

Guna **meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten**, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau, dengan indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB



- b. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan tingkat pengangguran terbuka.

6. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna **mewujudkan tata pemerintahan yang baik** yang merupakan prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, baik dalam taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Tengah secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.



Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, tentunya tidak terlepas dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Hal ini ditempuh melalui berbagai upaya, antara lain: 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan proses dan bidang pembangunan di tingkat nasional maupun di daerah; 2) Penerapan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; 3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender; 4) peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), melalui a) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; b) Penguatan mekanisme koordinasi antar Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; c) Penguatan lembaga/jejaring PUG di Pusat dan daerah termasuk Perguruan Tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.

Guna **meningkatkan kualitas sumber daya manusia** Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator IPM, rata-rata lama sekolah dan angka harapan usia sekolah
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup

8. Meningkatkan peran Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama



berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia.

Guna **meningkatkan kontribusi sektor pariwisata** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Terpasarkannya destinasi wisata, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan.

9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Lingkungan yang nyaman merupakan cita-cita bagi setiap Pemerintah daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Pembangunan harus memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah digunakan dan menjadi instrumen pendukung dalam penyusunan RPJMD yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin antara lain dalam usulan perbaikan rumusan visi misi dan rekomendasi penyempurnaan Kajian Rencana Program (KRP) pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Guna **meningkatkan kualitas lingkungan hidup** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Menurunnya degradasi lingkungan, dengan indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan

Setiap daerah diberikan hak untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dapat mendorong perkembangan dan pembangunan Daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai



aspek kehidupan, merubah tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah kearah yang lebih baik, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi didaerah.

Sebagaimana konsep dasar dari otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka butuhkan sehingga perlu peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan agar otonomi daerah yang diberikan kepada Daerah provinsi Kalimantan tengah dapat berjalan optimal. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggerakkan segala kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan didaerah.

Guna **meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, persentase PAD terhadap total pendapatan transfer dan persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini.



Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Visi: Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)									
Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	Target akhir (2021)
Misi pertama: Pematapan Tata Ruang Wilayah Provinsi									
1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	1. Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang	18	18	45	45	45	45	45
Misi kedua: Pengelolaan Infrastruktur									
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	2. Meningkatnya konektivitas antardaerah	Prosentase jalan mantap	47,52	59,7	67,78	75,85	83,93	92	92
		Persentase konektivitas jalan	89,4	89,8	93,2	96,6	100	100	100
	3. Meningkatnya ketercukupan energi	Rasio desa berlistrik (%)	74,8	81,8	85,3	89,3	94,3	100	100
		Rasio elektrifikasi (%)	69,8	75,5	79,5	83,5	87,5	92,5	92,5
Misi ketiga: Pengelolaan Sumber Daya Air, daerah Pesisir & Pantai									
3. Meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir & pantai	4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Produktivitas padi (kw/ha)	35,07	37,34	38,28	39,04	39,60	40,02	40,02
		Nilai Tukar Petani (NTP)	97,74	102,75	103,5	103,5	106	107,5	107,5
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,84	104,90	105,45	105,90	106,26	107	107
Misi keempat: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan									
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	5. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan (%)	10,85	13	14	14	15	15	15
		Laju pertumbuhan ekonomi(%)	7,01	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5	7,5
		Tingkat kemiskinan (%)	5,91	5,3	5,02	4,8	4,5	4,3	4,3



**Visi: Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	Target akhir (2021)
	6. Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju inflasi (%)	4,74	4,4 – 4,5	4,3 – 4,4	4,2 – 4,3	4,1 – 4,2	3,4	3,4
		PDRB perkapita (Juta Rp.)	40,14	43,54	45,41	47,61	49,95	52,67	52,67
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten	7. Meningkatnya sektor ekonomi hijau	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (%)	23,50	24	24,35	24,65	25	25,5	25,5
		8. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	16,15	16,5	16,8	17,1	17,5	18
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	4,50	4,00	4,00	4,00	3,50
Misi kelima: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah									
6. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik	9. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	10. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,23	80	82	84	86	88	88
	11. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	47,52	65	70	75	80	85	85
	12. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A
Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah		B	B	BB	BB	BB	A	A	



**Visi: Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	Target akhir (2021)
Misi keenam: Pendidikan, Kesehatan & Pariwisata									
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	13. Meningkatnya kualitas pendidikan	IPM	68,53	69,30	70,00	70,70	71,60	72,50	72,50
		Rata-rata Lama Sekolah	8,03	8,50	8,75	9,00	9,50	10,00	10,00
		Angka Harapan Usia Sekolah	12,22	12,75	13,00	13,50	14,00	15,00	15,00
	14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,54	70,50	70,90	71,40	72,00	72,75	72,75
8. Meningkatkan peran Sektor Pariwisata	15. Terpasarkannya industri wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	373.000	433.000	493.000	553.000	613.000	673.000	673.000
Misi ketujuh: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam									
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	16. Menurunnya degradasi lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	70,37	71,5	72	72,5	73	73,5	73,5
Misi kedelapan: Pengelolaan Pendapatan Daerah									
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	17. Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah (%)	36,60	30-32	32-35	35-40	40-45	45-50	45-50
		Persentase PAD terhadap total pendapatan transfer (%)	58,32	42,33	40-50	50-55	55-60	55-60	55-60
		Persentase belanja langsung terhadap APBD (%)	47,38	33,3	45-50	45-50	50-55	55-60	55-60



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses mengagendakan aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik.

Strategi atau prioritas pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui arah kebijakan pembangunan. Sedangkan, arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke program-program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kalimantan Tengah melalui tahapan pembangunan yang harus dilalui dari tahun ke tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;



3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun 2016-2021)

Sasaran		Strategi/prioritas					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten	S(1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah					
2	Meningkatnya konektivitas antardaerah	S(2) Pemerataan infrastruktur wilayah					
3	Meningkatnya ketercukupan energi						
4	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	S(3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai					
5	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	S(4) Stabilitas ekonomi daerah					
6	Meningkatnya daya beli masyarakat						
7	Meningkatnya sektor ekonomi hijau						
8	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat	S(5) Peningkatan pendapatan masyarakat					
9	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	S(6) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi					
10	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik						
11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan						
12	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan						
13	Meningkatnya kualitas pendidikan	S(7) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas					
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S(8) Pengelolaan Industri Pariwisata					
15	Terpasarkannya Industri wisata						
16	Menurunnya degradasi lingkungan	S(9) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan					
17	Meningkatnya pendapatan daerah	S(10) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)					



Berdasarkan tabel 6.1 di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 6.1 di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Penjelasan kesepuluh prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah

Salah satu instrumen untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen perencanaan tata ruang. Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang yang berkualitas bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang. dalam pembangunan perlu memerhatikan dampak bagi investasi terhadap daya dukung sumber daya yang tersedia agar tetap menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Investasi pembangunan diupayakan berada pada lokasi-lokasi yang terbaik dan optimum.

Mengingat proses penyelenggaraan tata ruang adalah bersifat lintas sektor, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kinerja kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) melalui optimalisasi peran dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian rencana tata ruang.

Untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang *up to date* berkaitan dengan kondisi eksisting pemanfaatan ruang ataupun tata guna lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka kegiatan pemetaan dan inventarisasi pemanfaatan lahan terus dilaksanakan melalui kegiatan SKPD maupun kerjasama dengan berbagai lembaga, khususnya di tingkat pusat.

Berkenaan dengan wacana Palangka Raya sebagai ibukota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pernah digaungkan oleh presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno, dan terakhir ditegaskan oleh Presiden



Republik Indonesia Ir. Joko Widodo saat kunjungan ke Palangka Raya dalam rangka HKSNI tanggal 20 Desember 2016, untuk mendukung rencana tersebut, langkah-langkah dan upaya-upaya yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain: 1) koordinasi dengan pihak terkait untuk menghasilkan tata ruang guna penyiapan rencana lokasi ibukota Pemerintahan NKRI di Provinsi Kalimantan Tengah; 2) melakukan identifikasi lokasi, diantaranya mengkaji status lahan dan letak (kawasan), serta melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota; 3) pengembangan potensi wilayah dan mencadangkan lahan dengan pengembangan komoditas unggulan baru di wilayah *hinterland*-nya seperti padi organik, singkong, tebu, bambu, sengon; 4) mencadangkan lahan untuk rencana lokasi ibukota NKRI seluas 300.000 sampai 500.000 hektar, yang mencakup 3 (tiga) wilayah administrasi, yakni Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya, dimana ketiga Kepala Daerah tersebut berkomitmen untuk menyediakan lahan dimaksud; 5) membuat kajian hingga sosialisasi kajian-kajian tentang potensi sumberdaya, sarana prasarana dan tata ruang.

2. Pemerataan infrastruktur wilayah

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan, jembatan, perhubungan, energi penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktifitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

Upaya pemerataan aksesibilitas wilayah diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat ekonomi serta pendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan termasuk **kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**. Terkait hal tersebut, upaya yang akan dilakukan antara lain pembangunan jalan sepanjang 200 km sampai ke pinggir pantai yang akan menunjang Kawasan Industri di Kabupaten Katingan, pengembangan pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas serta jalan akses di lima titik outlet pelabuhan yakni, Kabupaten Katingan, Kotawaringin Barat, Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Seruyan. Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Suksesnya peningkatan aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.



Terkait dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, direncanakan peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan provinsi di Kalimantan Tengah melalui *multi years* tahun 2017-2020. Beberapa ruas jalan dan jembatan provinsi yang akan direncanakan melalui kegiatan *multi years* adalah:

1. ruas jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama (pile slab dan jalan)
2. ruas jalan Telaga Pulang-Kuala Pembuang
3. ruas jalan Tumbang Sangai-Tumbang Kalang
4. ruas jalan Mendawai-Pagatan
5. ruas jalan Palantaran-Parenggean-Tumbang Sangai
6. ruas jalan Simpang Kenawan-Riam Durian
7. ruas jalan Pulang Pisau-Pangkoh
8. ruas jalan Kuala Kapuas-Palingkau-Dadahup
9. ruas jalan Riam Durian-Sukamara
10. ruas jalan Pangkoh-Bahaur
11. ruas jalan Simpang Pundu-Tumbang Samba
12. ruas jalan Simpang Bangkal-Telaga Pulang
13. ruas jalan Patung-Hayaping-Bentot
14. ruas jalan Sampit-Samura
15. ruas jalan Kotawaringin Lama-Riam Durian
16. ruas jalan Dadahup-Lamunti
17. ruas jalan Dadahup-A5
18. ruas jalan Km 34 Muara Teweh-Simpang Benangin

Dalam rangka mempermudah akses barang dan orang, rencana pembangunan jalan kereta api, baik yang dibangun oleh swasta maupun Pemerintah akan dituntaskan sampai dengan periode 2021, yakni JKA Puruk Cahu–Bangkuang–Batanjung, Kudangan–Nanga Bulik–Kumai/Kawasan Industri Sebuai, Palangka Raya–Pulang Pisau–Kapuas–Banjarmasin, serta ruas-ruas lainnya. Semua itu menjadi peluang investasi bagi berbagai pihak.

Selain pada wilayah penyumbang pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur wilayah juga akan dilakukan pada kawasan transmigrasi. Hal ini dilakukan mengingat aksesibilitas dan infrastruktur dasar pada kawasan transmigrasi di Kalimantan Tengah masih belum memadai dan ke depan perlu ditingkatkan lagi, antara lain jalan akses, jembatan yang menghubungkan dengan desa terdekat, peningkatan akses dan penyediaan air bersih dan air minum, infrastruktur kelistrikan, dan sebagainya.

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai

Kalimantan Tengah memiliki garis pantai sepanjang 750 kilometer yang terbentang dari Kabupaten Kapuas sampai Sukamara. Dengan garis pantai sepanjang itu, perlu ada penanganan khusus karena pantai dan laut memiliki peran penting dalam



perekonomian masyarakat. Kondisi masyarakat pesisir dan daerah pantai relatif lemah, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, modal usaha, dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. Perlu adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat pesisir dan pantai untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Selain keseimbangan masyarakat pesisir, yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat pesisir dan pantai menghadapi dampak perubahan iklim. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memberi pemahaman bagi masyarakat pantai dan pesisir tentang kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim.

Selain masyarakat pesisir, peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan juga menjadi perhatian dan prioritas untuk lima tahun ke depan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya petani, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengembangkan kluster sapi. Hal ini bersinergi dengan program pengentasan kemiskinan. Dengan adanya pengembangan kluster sapi ini, diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat pedesaan/petani. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Kalteng sehingga tidak bergantung dengan provinsi lain, malahan diharapkan bisa mengekspor ke provinsi lain. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah pada umumnya dan peningkatan pendapatan masyarakat pada khususnya.

4. Stabilitas Ekonomi Daerah

Upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian diarahkan dengan mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan ekonomi lokal daerah. Dengan pengembangan ekonomi lokal daerah, maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertangguh perekonomian daerah.

Pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan dimaksudkan untuk penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam/agraria secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam pengontrolan dan pengelolaan pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.



Kalimantan Tengah ingin membangun ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah dan terkendali sekaligus menurunkan angka kemiskinan dalam satu paket kebijakan. Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dengan PDRB sekitar 100,148 Triliun Rupiah atas dasar harga berlaku (ADHB), kontribusi Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan baru mencapai 10,85 persen. Di akhir periode perencanaan, yakni tahun 2021, target kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan adalah meningkat menjadi 20 persen. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah dan sangat menyambut baik setiap investasi yang serius di Kalimantan Tengah.

Berbagai Kawasan Industri (KI), akan segera dibangun, antara lain: Kawasan Industri Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kawasan Industri Batanjung di Kabupaten Kapuas, Kawasan Industri Bagendang dan Kawasan Industri Sei Sugih serta Kawasan Industri Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sentra Industri di Kabupaten Seruyan dan lain-lain. Selain itu, direncanakan pembangunan pabrik baja di Sebuai Kabupaten Kotawaringin Barat dan pabrik bauksit di Kabupaten Kotawaringin Timur bekerjasama dengan investor dari luar negeri (Tiongkok). Dengan adanya pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Kalimantan Tengah, serta memperkuat stabilitas ekonomi daerah.

5. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pembangunan merupakan proses membangun manusia seutuhnya, bukan pembangunan dalam arti fisik saja (bangunan, jalan, bendungan dan lain sebagainya). Pembangunan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Dampak yang sering terjadi dalam proses pembangunan adalah hasrat konsumsi dari masyarakat yang tinggi sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Masalah pendapatan tidak hanya dilihat dari jumlahnya saja, tetapi bagaimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai.

Kegiatan ekonomi pertanian dan perdagangan, serta hotel dan restoran memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor-sektor tersebut yang bisa menyerap tenaga kerja paling banyak di Kalimantan Tengah. Kegiatan ekonomi suatu lapangan usaha sangat terkait dengan kegiatan ekonomi lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi tidak menurunkan produktivitas.



6. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan salah satunya dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi sistem manajemen kinerja dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat. Tata kelola pembangunan memerlukan pembiayaan yang diperuntukan dalam membiayai seluruh kegiatan dalam pembangunan daerah

Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Untuk mengatasi masalah pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin akan dibantu dalam penyelesaian pendidikan minimal pada jenjang S1, serta pemberian bea siswa pendidikan kepada masyarakat miskin dan siswa berprestasi. Selain itu, guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur desa, akan dilakukan diklat-diklat teknis dan bimbingan teknis kepada Kepala Desa.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas prima diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.



Dalam rangka peningkatan SDM di Kalimantan Tengah yang lebih terampil dan siap kerja, diprogramkan 1 kecamatan 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dan program Balai Latihan Kerja (BLK), yakni 1 kabupaten 1 BLK. Selain itu, untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing, diprioritaskan juga peningkatan pendidikan untuk masuk TNI/POLRI dan bidang khusus lainnya.

Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar.

Saat ini sudah ada 2 Rumah Sakit tipe B rujukan yakni Sampit dan Pangkalan Bun dan 1 Rumah Sakit tipe B pendidikan yakni RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya. Untuk wilayah Timur yakni daerah Barito, RSUD Muara Teweh akan ditingkatkan menjadi RSUD tipe B rujukan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah, juga direncanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Kalimantan Tengah yang berlokasi di Palangka Raya. Selain itu, dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan narkoba, direncanakan juga pembangunan rumah sakit rehabilitasi korban narkoba di Palangka Raya.

8. Pengelolaan Industri Pariwisata

Pulau Kalimantan adalah pulau yang memiliki kekayaan dengan berbagai suku serta keberagaman budaya dan alam yang unik, salah satunya Kalimantan Tengah. Pengelolaan industri kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan memanfaatkan keragaman adat budaya secara arif dan bijaksana dalam rangka proses pembangunan yang berkelanjutan.

Wilayah Kalimantan Tengah yang didominasi hutan hujan tropis menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata di wilayah ini karena terdapat banyak fauna dan flora khas, seperti orangutan dan anggrek. Selain keindahan alam, Kalteng juga terkenal dengan potensi wisata budaya dan kuliner. Kebudayaan khas Kalteng seperti masyarakat adat Dayak lengkap dengan Rumah Betang tentu menjadi sebuah daya tarik sendiri untuk dikunjungi.

Selain itu, dalam rangka peningkatan pembangunan bidang pariwisata di Kalimantan Tengah, akan dikembangkan program penguatan pariwisata daerah sebagai wisata unggulan daerah, serta penguatan produk lokal khas untuk buah tangan (suvenir) sebagai promosi produk lokal.



9. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Hasil hutan, hasil laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian memberikan kontribusi produk domestik bruto (PDB) nasional, dan menyerap 45 persen tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Atas dasar fungsi tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara bijaksana untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah.

Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan juga merupakan salah satu upaya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ke depan hal tersebut menjadi perhatian dan akan diprogramkan secara bertahap.

10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah dilihat dari kemampuan dan kemandirian daerah serta struktur penerimaan daerah yang kuat, peranan PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah perlu ditingkatkan. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai upaya mendukung kemandirian daerah, dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan upaya koordinasi dan kerjasama antarperangkat daerah dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendapatan daerah. Perlu beberapa kebijakan yang mengatur pendapatan atau penerimaan daerah, serta bekerjasama dengan Perusahaan Daerah atau pihak lain terkait (*stakeholder*) penerimaan pendapatan daerah.



Untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah $\pm 1,2$ kali luas Pulau Jawa, memerlukan anggaran yang besar secara berkelanjutan. Saat ini perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah sekitar 30 berbanding 70, sedangkan perbandingan antara PAD dengan pendapatan transfer sekitar 50 berbanding 50. Berbagai upaya terus dilakukan untuk perbaikan kondisi ini secara bertahap, sehingga di akhir periode RPJMD (2021) diharapkan perbandingan antara PAD terhadap total pendapatan daerah dan perbandingan PAD terhadap total pendapatan transfer sudah semakin membaik dan berimbang pada peningkatan penerimaan daerah.

Beberapa upaya dalam rangka peningkatan PAD tersebut ditempuh antara lain melalui Intensifikasi pendapatan asli daerah, yakni:

- 1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), seluruh kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah harus disuplai dari pemasok BBM yang terdaftar di Kalimantan Tengah.
- 2) Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah wajib:
 - Memiliki NPWP Kalimantan Tengah
 - Menggunakan kendaraan operasional yang berplat KH
 - Menggunakan BBM dari supplier resmi yang berlokasi di Kalimantan Tengah
 - Memiliki kantor di Kalimantan Tengah
 - Memiliki nomor rekening dan menabung di Bank Kalteng
 - Membayar gaji karyawan dan manajemen melalui Bank Kalteng
- 3) Pembinaan dan pemberdayaan perusahaan daerah
 - Salah satu upaya untuk memenuhi perbaikan proporsi antara PAD dengan total pendapatan daerah dan proporsi PAD dengan pendapatan transfer pada tahun 2021, adalah dengan membentuk dan/atau merevitalisasi perusahaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan
 - Seluruh perusahaan daerah akan dibenahi dengan menggunakan tenaga profesional di bidangnya
 - Adanya kemungkinan perusahaan daerah memiliki saham di setiap perusahaan sekitar 15-20 persen sesuai ketentuan yang berlaku
 - Peningkatan status Bank Kalteng menjadi Buku II pada tahun 2017

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi



permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1.
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahunan, RKPd Tahun 2016-2021



Untuk selanjutnya, masing-masing tema pembangunan di atas diterjemahkan dalam arah kebijakan sesuai prioritas pembangunan tiap tahun sebagaimana tabel 6.2 berikut.



Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Strategi/prioritas		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang			x	x		
		2	Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang		x	x	x		
2	Pemerataan infrastuktur wilayah	3	Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi	x	x	x	x	x	x
		4	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi	x	x	x	x	x	x
		5	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak		x	x	x	x	x
		6	Peningkatan ketercukupan energi		x	x	x	x	x
3	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	7	Pemberdayaan petani			x	x	x	x
		8	Peningkatan ketersediaan sumber daya air			x	x	x	x
		9	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan		x	x	x	x	x
		10	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai		x	x	x	x	x
4	Stabilitas Ekonomi Daerah	11	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis		x	x	x	x	x



Strategi/prioritas	Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	12	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin		x	x	x	x	x	
	13	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	x	x	x	x	x	x	
	14	Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah	x	x	x	x			
	15	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah		x	x	x	x		
5	Peningkatan pendapatan masyarakat	16	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian	x	x	x	x	x	x
		17	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta	x	x	x	x	x	
		18	Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu		x	x	x	x	
		19	Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian		x	x	x	x	x
6	Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	20	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik	x	x	x	x	x	x
		21	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan	x	x	x	x	x	x
		22	Peningkatan standar pelayanan publik	x	x	x	x	x	x



Strategi/prioritas	Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	23	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		x	x	x	x	x	
	24	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi		x	x	x	x	x	
	25	Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan		x	x	x	x	x	
7	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	26	Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan		x	x	x	x	x
		27	Pengoptimalisasi manajemen pendidikan		x	x	x	x	x
		28	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan		x	x	x	x	x
		29	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	x	x	x	x		x
		30	Peningkatan promosi kesehatan masyarakat	x	x	x	x	x	
		31	Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	x	x	x	x	x	
8	Pengelolaan Industri Pariwisata	32	Pengembangan objek-objek pariwisata	x	x	x	x	x	x
		33	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kepariwisata	x	x	x			



Strategi/prioritas		Arah Kebijakan		Tahapan Pembangunan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	34	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	x	x	x	x	x	x
		35	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis		x	x	x	x	x
		36	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan		x	x	x		
		37	Pengelolaan pertambangan	x	x	x	x	x	x
		38	Pemanfaatan hasil SDA	x	x	x	x	x	x
10	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	39	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah		x	x	x	x	x



Tabel 6.3. Strategi, Arah dan Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah

VISI : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)			
MISI pertama : Pemanjapan Tata Ruang Wilayah Provinsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	1.1. terealisasinya tata ruang yang akomodif dan konsisten	1.1. peningkatan kualitas tata ruang wilayah	1.1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 1.2. pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang
MISI kedua : Pengelolaan Infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	2.1. Meningkatnya konektivitas antar daerah 2.2. Meningkatnya ketercukupan energi	2.1. pemerataan infrastruktur wilayah	2.1. peningkatan sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informasi 2.2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infratsruktur transportasi 2.3. peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak 2.4. peningkatan ketercukupan energi
MISI ketiga : Pengelolaan sumber daya pesisir dan pantai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
3. Meningkatkan pembangunan sumberdaya air, daerah pesisir dan pantai	3.1. meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	3.1. peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	3.1. pemberdayaan petani 3.2. peningkatan ketersediaan sumberdaya air 3.3. pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan 3.4. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai



MISI keempat : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
4. meningkatkan daya saing ekonomi daerah	4.1. meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat 4.2. meningkatnya daya beli masyarakat	4.1. stabilitas ekonomi daerah	4.1. menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis 4.2. pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin 4.3. peningkatan daya saing produk unggulan daerah 4.4. peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah 4.5. pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah
5. Meningkatnya perekonomian masyarakat secara konsisten	5.1 meningkatnya sektor ekonomi hijau 5.2. meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat	5.1. peningkatan pendapatan masyarakat	5.1. peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor pertanian 5.2. perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintah dan swasta 5.3. pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu 5.4. pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian
MISI kelima : Pemanjatan Tata Kelola Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
6. meningkatkan tata pemerintahan yang baik	6.1. terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN 6.2. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 6.3. meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah 6.4. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	6.1. peningkatan kualitas reformasi birokrasi	6.1. pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik 6.2. peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan 6.3. peningkatan standar pelayanan publik 6.4. peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalteng 6.5. peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi 6.6. perbaikan sistem tata kelola pemerintahan



MISI keenam : Peningkatan pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	7.1. meningkatnya kualitas pendidikan 7.2. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7.1. peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	7.1. peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan 7.2. pengoptimalisasian manajemen pendidikan 7.3. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 7.4. peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 7.5. peningkatan promosi kesehatan masyarakat 7.6. peningkatan kualitas dokter dan paramedis
8. meningkatkan peran sektor pariwisata	8.1. terpasarkannya destinasi pariwisata	8.1. peningkatan dan pengembangan destinasi wisata	8.1. pengembangan objek-objek pariwisata 8.2. peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan
MISI ketujuh : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	9.1. menurunnya degradasi lingkungan	9.1. pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana yang berkelanjutan	9.1. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 9.2. pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis 9.3. pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan 9.4. pengelolaan pertambangan 9.5. pemanfaatan hasil sumber daya alam
MISI kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	10.1. meningkatnya pendapatan daerah	10.1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.1. peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah



6.2.2. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Penetapan kawasan strategis provinsi (KSP) meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan yaitu: pertumbuhan ekonomi, social budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Uraian masing-masing kawasan strategis di Kalimantan Tengah sebagai berikut:

6.2.2.1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

- 1) Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya;
- 2) Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
- 3) Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Lamandau;
- 4) Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
- 5) Kawasan pertanian lahan gambut di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
- 6) Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya;
- 7) Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di 14 Kabupaten/Kota;
- 8) Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, peti kemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara berupa KSP Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, KSP Sampit - Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur, KSP Batanjung - Kapuas di Kabupaten Kapuas, Sigitung di Kabupaten Seruyan dan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;
- 9) Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Lamunti Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Kecamatan Dusun Tengah



Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau; dan

- 10) Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Seruyan.

6.2.2.2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, meliputi:

- 1) Kawasan Strategis Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas;
- 2) Kawasan Strategis sekitar Pahewan, seperti Pahewan Kalawa di Kabupaten Pulang Pisau, Pahewan Kalaru di Kabupaten Katingan dan Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya;
- 3) Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.2.2.3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi:

- 1) Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 2) Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

6.2.2.4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:

- 1) Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:
 - a) Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau;



- b) Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove) di sepanjang jalur pantai selatan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - c) Kawasan Ekosistem Gambut terdiri atas kawasan rawa gambut, kawasan kubah gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar di dataran bagian Selatan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.
 - 3) Kawasan Strategis *Heart of Borneo (HoB)* meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara.

6.2.2.5. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- 1) Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya;
- 2) Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya;
- 3) Cagar Alam Pararawen I dan II di Kabupaten Barito Utara;
- 4) Suaka Margasatwa Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
- 5) Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan;
- 6) Taman Nasional Sebangau, Pahewan Kalawa, Danau Sabuah di Kabupaten Pulang Pisau;
- 7) Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, Pahewan Kalaru, Danau Kamipang di Kabupaten Katingan;
- 8) Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 9) Konservasi Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur;
- 10) Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan;
- 11) Danau Burung di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan
- 12) Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, Danau Lewu di Kota Palangka Raya.

6.2.2.6. Kawasan Strategis Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Area*)

- 1) Kawasan Lindung (kawasan yang menyediakan fungsi pendukung keanekaragaman hayati untuk kawasan lindung atau konservasi) di seluruh kabupaten/kota kecuali Barito Timur dan sebagian besar terkonsentrasi di kawasan gambut dan rawa campuran di bagian selatan dan relatif kecil di



sepanjang bagian utara pada hutan lahan kering (berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Timur)

- 2) Lanskap alamiah yang luas (lanskap alamiah dengan kapasitas untuk memelihara proses dan dinamika ekologi alamiah) berada di dua benteng utama yaitu:
 - a) Bagian utara khususnya Kabupaten Murung Raya dan melebar ke bagian barat daerah pegunungan di Kabupaten Katingan
 - b) Bagian tengah dan selatan yang mencakup kawasan gambut dan rawa campuran, termasuk kawasan konservasi (khususnya Kabupaten Katingan, Kapuas dan Pulau Pisau)
- 3) Ekosistem transisi (kawasan yang terdiri dari dua atau lebih ekosistem berdekatan)
 - a) Transisi elevansi pada kawasan pegunungan di bagian utara
 - b) Keranggas ke non keranggas pada bagian tengah dan bagian utara
 - c) Rawa ke non rawa pada bagian tengah dan selatan
- 4) Ekosistem langka dan terancam pada umumnya di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Katingan yang merupakan kawasan dengan tingkat deforestasi yang cukup besar namun ekosistem masih terjaga. Di kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Barito Utara, serta di Kabupaten Murung Raya dengan deforestasi yang masih terbatas.
- 5) Jasa lingkungan tertentu (Kawasan penting untuk perlindungan terhadap erosi dan sedimentasi) tingkat kemiringan yang tinggi dan solum tanah yang dangkal yang tersebar di hampir seluruh kawasan Kalimantan Tengah dengan resiko tertinggi di bagian utara.

6.3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kewilayahan ini ditinjau berdasarkan dokumen perencanaan pada level nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, tinjauan-tinjauan dan data pendukung lainnya sebagai bagian dari proses pembangunan. Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) sangat diperlukan untuk menentukan daerah-daerah potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564 km². Pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 14 kabupaten/kota. Kalimantan Tengah merupakan salah



satu provinsi dengan beraneka ragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan tropis (124.118, 49 km²). Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, merupakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, komoditi pertanian dan pertambangan di Kalimantan Tengah masih cukup stabil, sehingga dapat dikembangkan menjadi industri hulu.

6.3.1. Pengembangan Potensi Prioritas di Kalimantan Tengah

Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan **Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah**, yang dibagi menjadi **3 Zona**. Antara lain **Zona 1 (Barat)**, **Zona 2 (Tengah)**, dan **Zona 3 (Timur)**, dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut:

Tabel 6.3.
Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Zona	Kabupaten/Kota	Potensi	Pengembangan Potensi
1	Zona 1 (Barat)	<ul style="list-style-type: none">• Sukamara• Lamandau• Kotawaringin Barat• Seruyan• Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none">- Kelapa Sawit (CPO)- Pertambangan (baja, nikel, lumina, dll)- Perikanan tangkap- Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">➤ Industri berbasis sawit➤ Industri berbasis metal➤ Industri berbasis perikanan tangkap➤ Taman Nasional Tanjung Puting
2	Zona 2 (Tengah)	<ul style="list-style-type: none">• Katingan• Gunung Mas• Palangka Raya• Pulang Pisau• Kapuas	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian (tanaman pangan)- Perikanan darat- Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengembangan kawasan argo industri Batanjung di Kapuas)➤ Budidaya perikanan sungai➤ Taman Nasional Sebangau
3	Zona 3 (Timur)	<ul style="list-style-type: none">• Murung Raya• Barito Utara• Barito Selatan• Barito Timur	<ul style="list-style-type: none">- Batubara- Hasil hutan (kayu, rotan, dll)- Karet- HOB (<i>Heart Of Borneo</i>)	<ul style="list-style-type: none">➤ Pembangkit tenaga listrik➤ Industri berbasis hasil hutan➤ Industri berbasis karet (<i>rubber industry</i>)➤ Konservasi Hayati di pegunungan <i>Muller Schwaner</i>

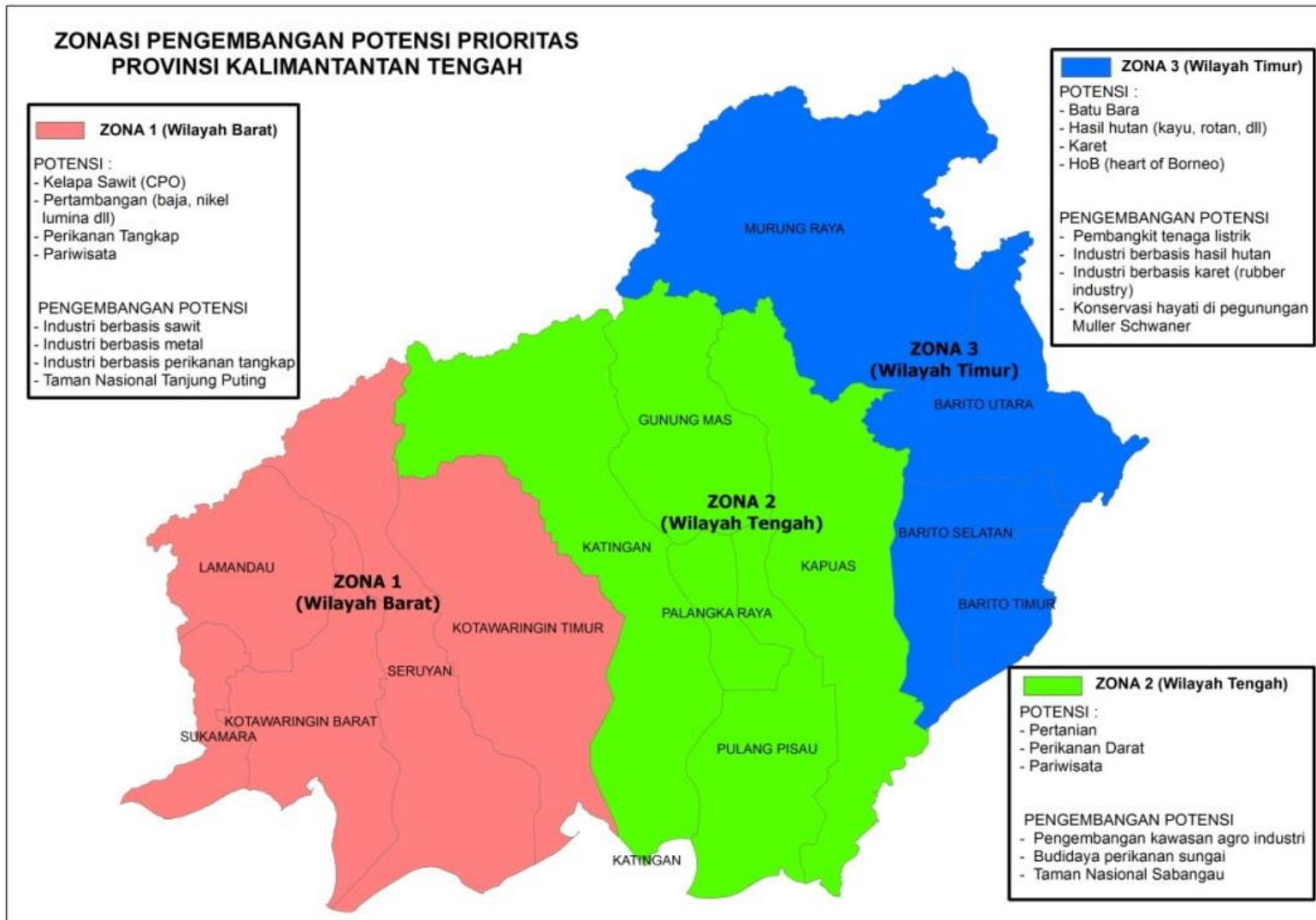
Sumber: Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035

Secara spasial, pengembangan potensi prioritas dan pengembangan potensi masing-masing zona di Kalimantan Tengah melalui pembagian wilayah atau zonasi dapat dilihat pada gambar berikut.





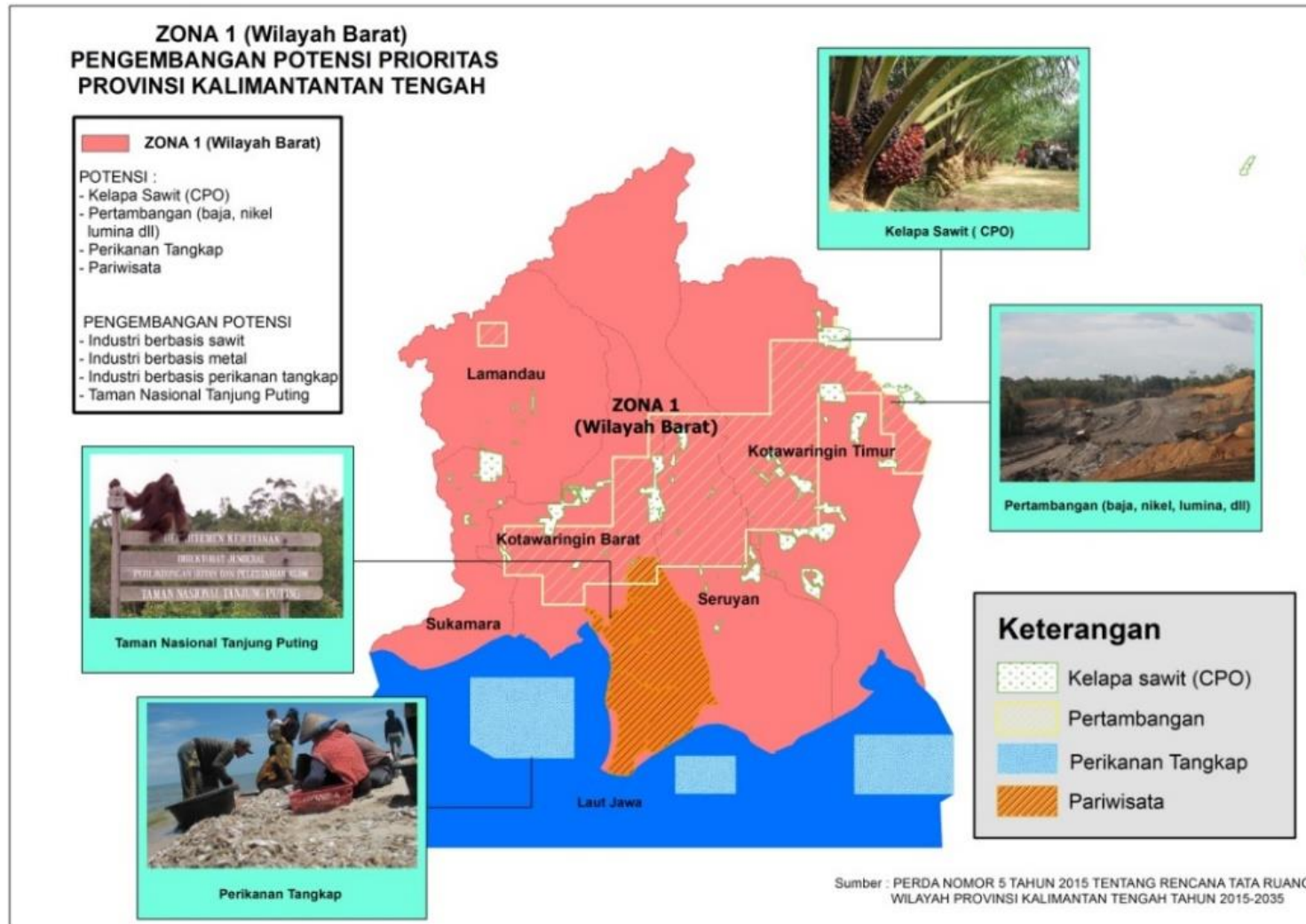
Gambar 6.2.
Pembagian Wilayah ke dalam 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035



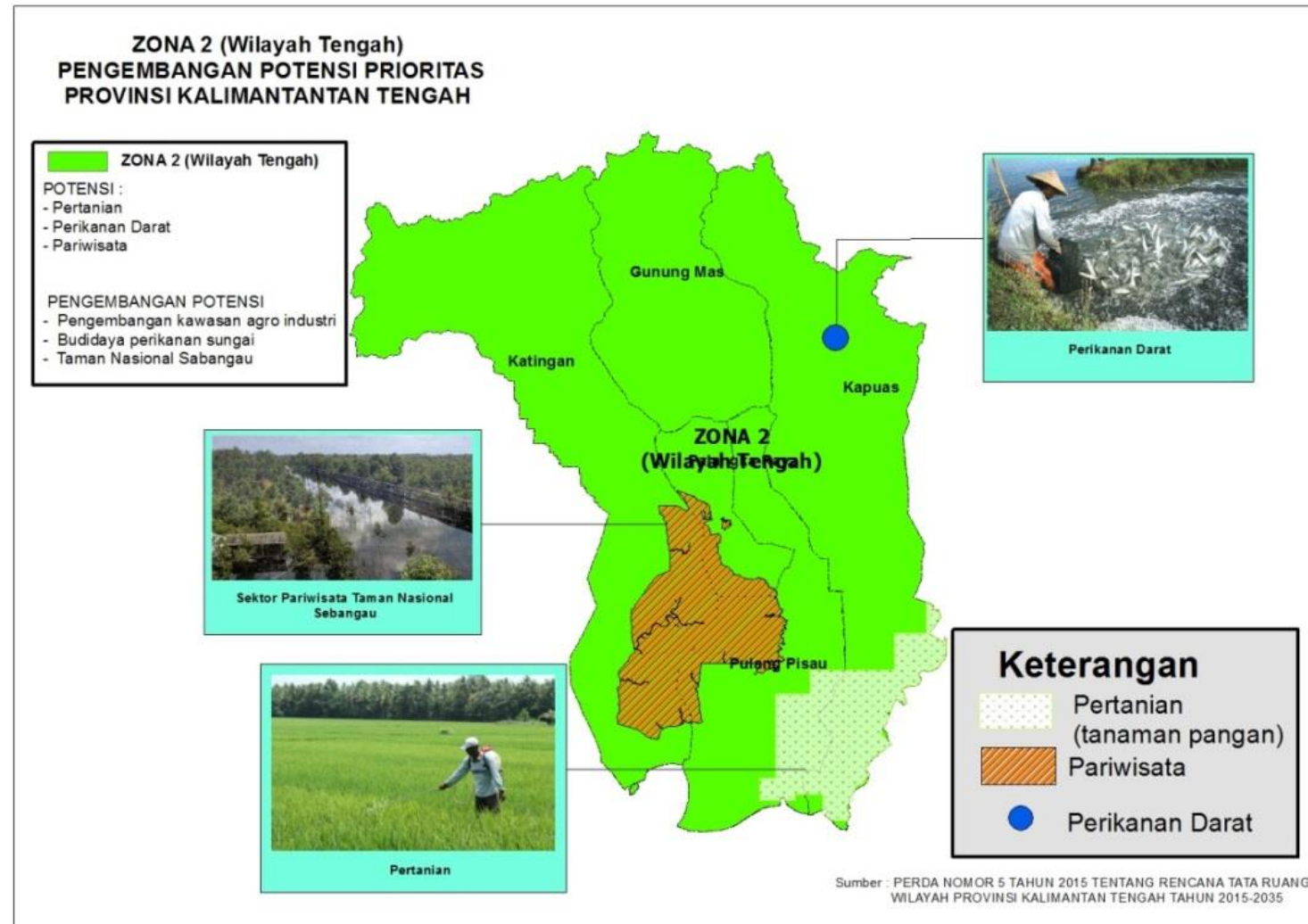
Gambar 6.3.
Pengembangan Potensi pada Zona 1
(Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur)



Sumber : Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035



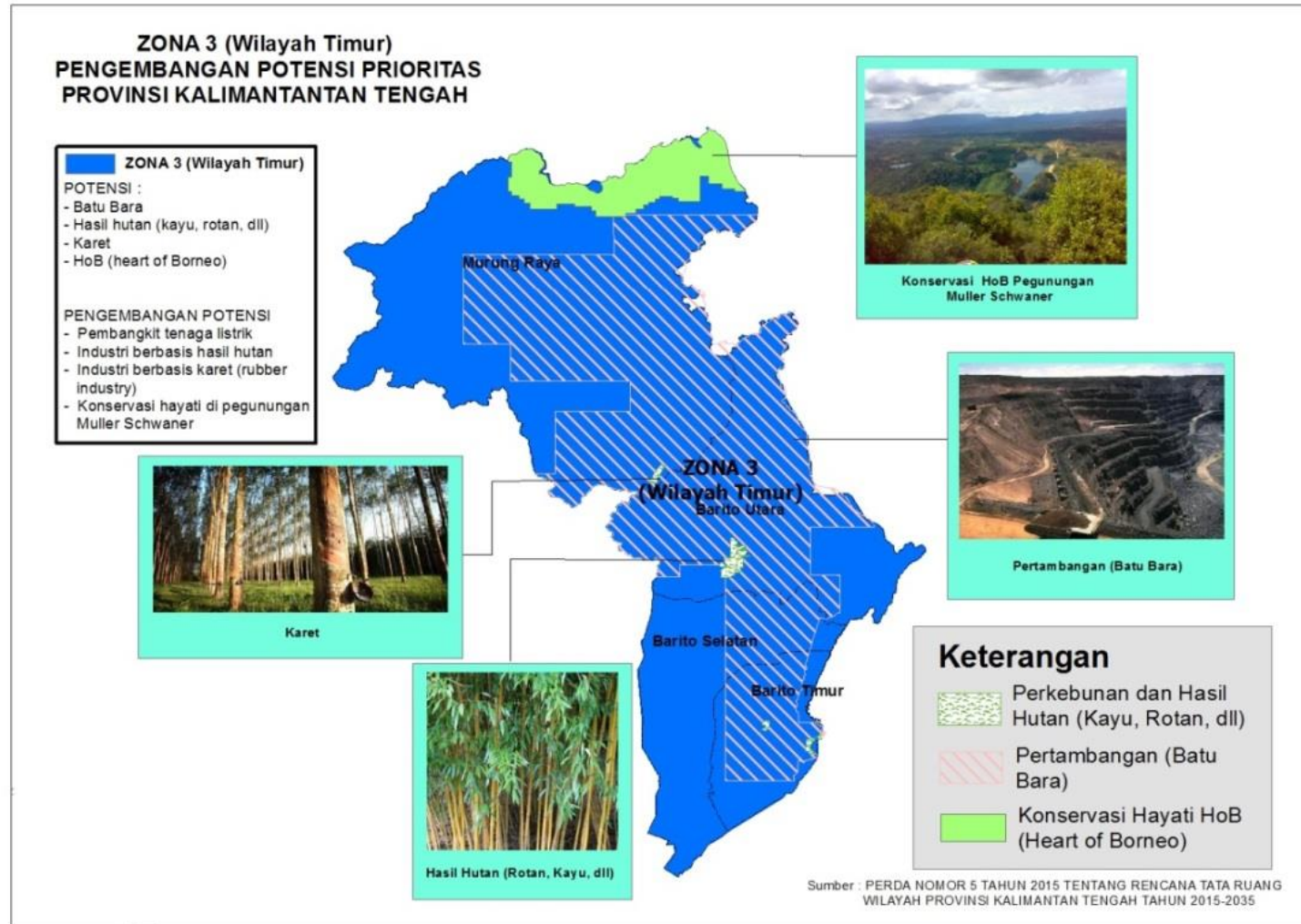
Gambar 6.4.
Pengembangan Potensi pada Zona 2
(Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas)



Sumber : Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035



Gambar 6.5.
Pengembangan Potensi pada Zona 3
(Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur)



Sumber : Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035



6.3.2. Pengembangan Potensi Komoditas Unggulan Daerah di Kalimantan Tengah

Pembangunan spasial berdasarkan 3 zona di Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan setiap kabupaten/kota memiliki potensi daerah unggulan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi geografisnya. Dari beberapa potensi tersebut kabupaten/kota diarahkan untuk mengembangkan satu komoditi unggulan yang dapat menjadi “icon” bagi kabupaten/kota tersebut.

1. Kota Palangka Raya

Kota palangka Raya merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, sektor yang menjadi potensi daerah Kota Palangka Raya adalah sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan dan pariwisata.

Dari beberapa potensi tersebut sektor peternakan menjadi unggulan Kota Palangka Raya dengan **komoditi utama sapi pedaging/potong**. Komoditi sapi pedaging/potong cukup berkembang di Kota Palangka Raya. Sapi potong merupakan jenis ternak yang mempunyai nilai jual tinggi diantara ternak-ternak lainnya. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan daging yang juga meningkat, oleh karena itu usaha sapi potong merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu pangsa pasar sapi pedaging sangat luas sehingga pemasarannya cukup mudah.

Tabel 6.4.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Sapi Pedaging Kota Palangka Raya

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">▪ Budidaya sapi bisa diintegrasikan dengan kelapa sawit.▪ Permintaan akan daging sapi setiap tahun selalu meningkat.▪ SDM dan luas lahan yang cukup banyak.▪ Pemasaran sangat terbuka, pasar terbuka lebar.▪ Masih sedikit masyarakat yang beternak sapi.	<ul style="list-style-type: none">▪ Terbatasnya modal usaha.▪ Masyarakat lebih meminati daging ikan dibandingkan daging sapi.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none">▪ Pemasarannya mudah.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketersediaan pakan terbatas.

2. Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumberdaya potensial yang terdapat di Kotawaringin Barat antara lain pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup beraneka ragam jenisnya. Terdapat wisata alam, antara lain: Pantai Kubu dan Tanjung keluang, Pantai Teluk Bogam, Tanjung Penghujan dan Taman



Nasional Tanjung Putting. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat akan lebih mengedepankan ecowisata yang berbasis pada budaya.

Dari beberapa potensi tersebut sektor perkebunan menjadi unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan **komoditi utama yaitu Kelapa Sawit**. Produksi kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat terus meningkat. Perkebunan kelapa sawit terdapat di seluruh kecamatan. Beberapa yang terluas diantaranya Kecamatan Kotawaringin Lama (17.551,38 Ha), Kecamatan Pangkalan Lada (13.111,78 Ha) dan Kecamatan Kumai (5.575,31 Ha).

Pengembangan sawit di Kotawaringin Barat banyak menyerap tenaga kerja. Jumlah petani kelapa sawit terbanyak dibandingkan petani komoditas perkebunan lainnya. Harapan besar petani terhadap budidaya kelapa sawit ini adalah didirikannya pabrik pengelolaan sawit untuk masyarakat. Dengan demikian dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing kepala sawit. Selain itu, harga jual sawit akan meningkatkan kesejahteraan petani. Adanya usaha budidaya kelapa sawit, menumbuhkan berbagai usaha lainnya terutama pada sektor jasa pengangkutan CPO dan usaha bengkel bagi perbaikan angkutan sawit. Hal tersebut tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Tabel 6.5.
Peluang-Tantangan serta Titik kekuatan-Titik Kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Barat

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">▪ Pabrik tersedia.▪ Adanya kebutuhan yang cukup besar sehingga pasar terbuka luas.▪ Produk turunannya bisa dikembangkan.▪ Merupakan bahan pokok makanan.▪ Adanya sektor jasa pendukung (transportasi CPO, Vulkanisir dan Perbengkelan).▪ Tersedianya SDM yang cukup.	<ul style="list-style-type: none">▪ Mahalnya biaya oprasional sehingga komoditi sawit umumnya lebih dikuasi oleh perusahaan besar (PBS).▪ Harga jual belum dapat dikendalikan oleh pemerintah.▪ Isu lingkungan bahwa akan terjadi kerusakan lahan jika ditanami sawit.▪ Pabrik sawit untuk tandan buah segar dari masyarakat (UMKM) belum tersedia.▪ Belum diolah menjadi produk lain yang bermanfaat.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none">▪ Lahan yang digunakan saat ini masih cukup luas.▪ Dipasarkan hingga keluar daerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Kualitas bibit masih belum ada standar baku sehingga bibit sawit yang ditanam masyarakat (UMKM) umumnya bukan bibit unggulan.▪ Bibit dan pupuk sulit di dapat.▪ Proses produksi tergantung perusahaan besar swasta (PBS).▪ Masih dilakukan secara tradisional.▪ Belum ada integrasi sektor hulu sawit dengan pasca panen.▪ Sarana dan prasarana pendukung budidaya belum tersedia (pupuk dan sebagainya).



3. Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan kondisi eksisting geografisnya, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi daerah yaitu: sektor pertanian dan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Pada sektor kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi hutan (411.898 Ha). Peruntukan hutan tanaman produksi (HTI) 85.230 Ha, hutan produksi terbatas 234.804,10 Ha, hutan produksi tetap 388.932,13 Ha, monumental 625 Ha, kawasan pemukiman dan penggunaan lahan lainnya (KPP) 258.129,38 Ha, dan kawasan pengembangan produksi 595.607,97 Ha.

Potensi pertambangan juga cukup besar. Potensi tambang yang telah dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah biji besi dan tambang emas rakyat. Selain itu potensi pariwisata juga cukup layak dikembangkan. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki beberapa objek wisata yang cukup berpotensi dan sangat menarik untuk dikunjungi karena memiliki kekhasan tersendiri. Objek wisata yang dimiliki antara lain: Rumah adat Betang Antang Kalang Tumbang gagu, Arung jeram di kecamatan Antang Kalang dan pantai Ujung Pandaran. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Timur akan lebih mengedepankan ekowisata yang berbasis pada budaya.

Dari beberapa potensi tersebut sektor pertanian tanaman pangan menjadi unggulan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan **komoditi utama padi sawah**. Padi sawah memang layak untuk dikembangkan. Budidaya padi sawah selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dapat pula meningkatkan pendapatan dan taraf hidup baik pelaku usaha pertanian padi sawah maupun pelaku usaha/produsen beras serta pedagang beras. Prospek pengembangan padi sawah di Kotawaringin Timur dapat dikatakan cukup baik. Lahan garapan masih cukup tersedia, pemasarannya pun mudah dan lancar.

Tabel 6.6.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Padi Sawah Kabupaten Kotawaringin Timur

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">Merupakan kebutuhan pangan masyarakat.Ketersediaan lahan untuk pengembangan memadai.	<ul style="list-style-type: none">Persaingan cukup tinggi, karena beras masih banyak didatangkan dari Jawa.Harga jual di tingkat petani masih rendah.Penyediaan kredit usaha masih minim.Hasil panen belum diserap oleh bulog.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none">Bahan baku (bibit) tersedia cukup di pasaran.Biaya pemasaran yang lebih murah karena tidak mendatangkan dari luar.Mudahnya memperoleh alsintan.	<ul style="list-style-type: none">SDM belum memadai, masih tradisional sehingga pemahaman tentang hama dan penyakit tanaman rendah, penanganan pasca panen juga masih kurang baik.Belum ada hubungan pemasaran dari petani ke



<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya teknologi anjuran yang dapat diterapkan untuk peningkatan kualitas tanaman dan hasil panen. 	<ul style="list-style-type: none"> pasar yang terkelola baik. <i>Hand function</i> sulit mendapatkan solar. Lahan sangat tergantung pada pasang surut air, sistem irigasi masih kurang memadai, dan belum ada alternatif lain. Produk belum di-branding sehingga padi sawah belum bisa dipasarkan luas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, justru ke Banjar.
---	---

4. Kabupaten Kapuas

Sumberdaya alam yang dimiliki Kapuas sangat menjanjikan yang menjadikan Kabupaten Kapuas memiliki potensi daerah antara lain: pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.

Kabupaten Kapuas bahkan telah mampu memberikan kontribusi pangan terbesar di Kalimantan Tengah, khususnya padi hingga mencapai 52 persen. dari sisi sumberdaya hutan, pohon rotan cukup banyak tumbuh di lahan pertanian di Kabupaten Kapuas. Kapuas juga kaya akan sumberdaya tambang. Saat ini pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan identifikasi dan inventarisasi sumberdaya mineral dan batubara yang ada dalam rangka menarik investor menanamkan modalnya di bidang pertambangan. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Kapuas merupakan kekayaan alam tak terbaharukan yang mempunyai peranan penting serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dari beberapa potensi tersebut sektor pertanian tanaman pangan menjadi unggulan Kabupaten Kapuas dengan **komoditi utama padi sawah**. Jumlah produksi tanaman padi sawah di Kabupaten Kapuas terus mengalami peningkatan. Hampir seluruh kecamatan terdapat areal padi sawah. Hasil padi yang dijual di Kapuas banyak berupa gabah, untuk itu dukungan stakeholder berupa bantuan penambahan unit penggilingan padi menjadi sangat penting.

Tabel 6.7.
Peluang-Tantangan serta Titik kekuatan-Titik Kritis Komoditi Padi Sawah Kabupaten Kapuas

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> Peluang pasar bagus. Perbankan mendukung. Adanya komitmen pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terangkatnya taraf hidup perekonomian petani. Kekurangan pabrik penggilingan padi
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya bibit dan pupuk. Pemasaran sangat luas. Irigasi yang mendukung. Hasil panen yang memuaskan. 	<ul style="list-style-type: none"> Panen hanya satu kali. Penanganan pasca panen masih cara tradisional, menjemur padi masih belum sesuai standar Bulog. Produktivitas padi masih kurang (varian padi siam).



5. Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi daerah yaitu pertanian dan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan, perdagangan, serta pariwisata.

Kabupaten Barito Selatan yang sebagian besar wilayahnya berada di daerah aliran sungai Barito, menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Dengan potensi sungai, danau dan rawa yang tersebar di seluruh kecamatan, menjadikan sektor ini sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Berbagai jenis ikan tawar cocok di budidayakan, seperti, patin, mas, nila, gabus, dan lain-lain, dengan sistem budidaya kolam atau karamba.

Hutan alam Barito Selatan memiliki beragam jenis pohon dan hasil hutan ikutan lainnya dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi, khususnya kayu, juga hasil hutan ikutan lainnya seperti berbagai jenis rotan, damar, gaharu, dan lain-lain.

Potensi sumberdaya alam akan barang tambang yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan juga cukup berlimpah. Pertambangan terbesar adalah batubara. Selain batubara juga terdapat jenis barang tambang lain yaitu penggalan (golongan C) yaitu pasir, kerikil, batu belah, dan tanah. Selain memiliki potensi pertambangan, Barito Selatan memiliki potensi pertanian untuk tanaman pangan yang juga cukup berkembang seperti padi, kacang tanah, kacang kedelai. Potensi perkebunan yang banyak dibudidayakan antara lain karet, kelapa, kopi, sawit, dan kakao. Potensi peternakan yang banyak dibudidayakan diantaranya kerbau, sapi, kambing, babi, ayam, itik dan lain-lain.

Dari berbagai potensi tersebut sektor pertanian tanaman pangan menjadi unggulan Kabupaten Barito Selatan dengan **komoditi utama padi sawah**. Padi merupakan komoditi yang diunggulkan di Barito Selatan. Padi sawah di sebagian besar Barito Selatan dibeli langsung oleh pedagang local atau untuk konsumsi sendiri, sebab masih terbatas belum menjangkau pemasaran luar Kabupaten. Tenaga kerja banyak dilibatkan dalam proses penanaman, panen dan pasca panen. Terdapat pula jasa tenaga khusus untuk berkembangnya padi sawah ini adalah penggilingan padi.

Tabel 6.8.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Padi Sawah
Kabupaten Barito Selatan

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">▪ Pasar bagus berasnya disukai oleh banyak orang.▪ Didukung oleh usaha penggilingan.▪ Teknologi pengembangan bisa didapatkan.▪ Menjanjikan menjadi komoditi usaha masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">▪ Bersifat musiman, dipengaruhi faktor alam seperti cuaca hujan dan kekeringan.▪ Pemasaran tidak merata.▪ Adanya tantangan harga: pupuk mahal, harga jual jadi mahal, lebih dari itu harga banyak dimainkan oleh perdagangan tengkulak/spekulan, persaingan kurang sehat, sehingga harga masih unggul di daerah luar.▪ Penanganan pasca panen sering terkendala cuaca.



<ul style="list-style-type: none">Permodalan ada baik untuk petani maupun UMKM.Program pemerintah sangat intensif.	
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none">Suplai bahan baku sangat banyak, ketersediaan pupuk cukup.Lahan yang digunakan masih luas.Tersedianya mesin dan peralatan yang memadai.Pemasaran mudah dan distribusi tidak ada kendala.Produksi melimpah.Bibit yang ditangani unggulan.	<ul style="list-style-type: none">Belum ada penangkaran bibit.Seluruh proses bahkan hingga pemasaran masih dilakukan oleh petani secara mandiri.Tidak ada silo dryer kapasitas besar.Rentan terhadap hama dan penyakit.Kekurangan modal, tidak ada jaminan dari kreditor.Ketersediaan sarana produksi terbatas.

6. Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Barito Utara kaya dengan sumberdaya alam. Kabupaten Barito Utara memiliki potensi daerah yaitu sektor pertanian taaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan sungai, perindustrian, pertambangan, perdagangan, jasa, pariwisata dan transportasi. Kabupaten Barito Utara Berdasarkan stratigrafi wilayah geologis Kabupaten Barito Utara serta data inventarisasi sebaran mineral yang ada, diperut bumi Seribu Ria mini terkandung beragam SDA yang potensial untuk dikembangkan. Mulai dari bahan galian logam seperti emas, batubara, minyak bumi, pospat, batu gamping, pasir kwarsa, antimonite, kaolin, dan lempung/tanah liat. Pemerintah Kabupaten Barito Utara memproyeksikan bahwa bidang pertambangan dan penggalian ini, terutama batubara, akan dikembangkan menjadi salah satu andalan pendapatan daerah. Karenanya, bidang inilah yang kini giat ditawarkan kepada investor, baik nasional dan internasional.

Selain sumberdaya tambang, sumberdaya kehutanan juga berlimpah. Kayu yang dihasilkan cukup dapat meningkatkan pendapatan daerah. Beragam jenis kayu yang dihasilkan seperti meranti, rimba campuran dan kayu indah. Selain itu, keindahan panorama Barito Utara juga sangat memukau yang dapat dijadikan andalan sektor pariwisata. Terdapat banyak kawasan wisata diantaranya Air Terjun Jantur Doyan, yang saat ini banyak dijadikan sebagai tempat rekreasi penduduk Kota Muara Teweh dan sekitarnya. Wisatawan juga dapat menikmati sejumlah keindahan alam Barito Utara lainnya, seperti cagar alam atau Hutan Lindung Pararawen, Panorama danau Butong, air terjun dan Danau Inih serta bendungan (dam) Irigasi Trinsing.

Dari berbagai potensi tersebut sektor perkebunan menjadi Sektor unggulan Kabupaten Barito Utara dengan **komoditi utama Karet**. Potensi karet Barito Utara memang sangat besar. Kesesuaian agroklimat di Barito Utara menjadi salah satu keuntungan besar dalam pengembangan karet. Selain itu permintaan akan komoditi karet selalu tinggi. Penyerapan tenaga kerja pada komoditi karet paling tinggi dibanding komoditi perkebunan lainnya.



Tabel 6.9.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet
Kabupaten Barito Utara

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peluang pasar terbuka luas. ▪ Permintaan terhadap karet selalu meningkat. ▪ Merupakan komoditi pasar dunia. ▪ Sistem monopoli lebih kecil dari kelapa sawit. ▪ Dukungan tenaga kerja/masyarakat memiliki budaya atau tradisi menanam karet secara turun temurun. ▪ Ramah lingkungan dan memiliki kesesuaian yang tinggi dengan agroklimat Kalimantan. ▪ Dapat dikombinasikan dengan produk lain. ▪ Tersebar secara merata ke seluruh daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya fluktuasi harga. ▪ Adanya permainan harga oleh kelompok/kertel tertentu. ▪ Investasi swasta masih rendah. ▪ Asosiasi pengusaha tani karet belum ada. ▪ Nilai tambah pada hasil karet belum ada kerana industri hilit tidak tersedia. ▪ Pedagang tidak memperhatikan mutu. ▪ Pembeli atau pengumpul ada di luar daerah.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan bahan baku karet secara kontinyu dan cukup besar melalui program kemitraan. ▪ Ketersediaan lahan yang cukup bagi budidaya karet selama ini. ▪ Akses transportasi lancar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulit masih rendah. ▪ Iklim cuaca mempengaruhi pasokan bahan baku. ▪ SDM bagi pengelolaan bahan baku belum memadai. ▪ Karet yang dihasilkan belum berkualitas karena ingin cepat dijual. ▪ Jarak tempuh ke pembeli cukup jauh (kassel). ▪ Belum menerapkan teknologi budidaya.

7. Kabupaten Sukamara

Kabupaten Sukamara memiliki potensi daerah antara lain: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, transportasi dan pariwisata. Kabupaten Sukamara memiliki keberagaman dan potensi kekayaan sumberdaya hayati yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kecukupan pangan masyarakatnya. Sumberdaya hutan yang dimiliki Sukamara sangatlah luas. Kawasan hutan yang ada terdiri dari 3 (tiga) kawasan hutan yaitu: hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan konversi. Sumberdaya tambang juga tersedia di Kabupaten Sukamara. Terdapat beberapa bahan tambang potensial di Kabupaten Sukamara, yaitu Koalin, Pasir Kuarsa, Kristal Kuarsa, Batuan beku/Batu Belah, Zircon, dan Bauksit.

Kabupaten Sukamara memiliki potensi pariwisata bahari atau pantai, di karenakan posisi wilayah Sukamara yang strategis yaitu perbatasan dengan Laut Jawa. Pemndangannya bernuansa bahari, kkampung nelayan yang eksotik, makanan laut (kerang, udang, dll) serta menyaksikan keindahan matahari terbenan (*sunset*). Adapun pantai-pantai indah tersebut diantaranya Pantai Kuala Jelai, Pantai Tanjung Nipah, Pantai Tanjung Selaka, Pantai Sungai Ramis, dan Pantai Kampung Baru.

Dari berbagai potensi tersebut sektor perkebunan menjadi unggulan Kabupaten Sukamara dengan **komoditi utama kelapa sawit**. Provinsi Kalimantan Tengah menempati urutan ke-4 perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kontribusi kelapa sawit terhadap PDRB



Kabupaten Sukamara berpengaruh cukup signifikan. Penyerapan tenaga kerja di subsektor perkebunan kelapa sawit ini lebih banyak disbanding yang terserap pada sektor komoditi lainnya.

Tabel 6.10.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Sukamara

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan bagi pengembangan sawit masih luas. ▪ Tingginya minat masyarakat untuk menanam sawit. ▪ Adanya potensi pembiayaan dari perbankan. ▪ Adanya pabrik kelapa sawit swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Malaysia masih menguasai pasar Amerika dan Eropa. ▪ Produksi tidak terserap semua di pabrik Kelapa Sawit. ▪ Kelapa Sawit dijual dalam bentuk mentah belum diolah. ▪ Kelembagaan di tingkat petani tidak mantap/solid. ▪ Kekurangan pelatihan/sosialisasi kepada petani. ▪ Integrasi sawit dengan sektor yang lain belum ada. Misalnya dengan peternakan. ▪ Produksi pasca panen masih tergantung perusahaan besar swasta (PBS) sehingga harga dipermainkan PBS. ▪ Modal syariah belum ada di Sukamara.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedian bibit berserifikat. ▪ Lahan yang digunakan masih luas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya bibit ilegal yang beredar sehingga kualitas menjadi tidak jelas. ▪ Masih kurangnya kemampuan petani. ▪ Keterbatasan SDM dan modal.

8. Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau memiliki potensi daerah yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Sumberdaya alam yang terdapat di lamandau sangat mendukung perekonomian daerah. Potensi pertanian di lamandau cukup berlimpah. Kabupaten Lamandau merupakan penyumbang produksi kedelai terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain kedelai, potensi pertanian pangan lain yang juga berkembang adalah padi. Potensi perkebunan juga sangat banyak, ada 2 (dua) komoditi perkebunan yang dominan di Kabupaten Lamandau yaitu karet dan sawit. Untuk potensi peternakan yang banyak dibudidayakan adalah sapi dan babi, demikian juga jenis unggas diusahakan oleh masyarakat di seluruh kecamatan. Selanjutnya potensi perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Lamandau, yaitu perikanan tangkap (perairan umum) dan budidaya (kolam dan keramba).

Dari berbagai potensi tersebut sektor perkebunan menjadi unggulan Kabupaten Lamandau Sektor unggulan Kabupaten Lamandau adalah sektor perkebunan dengan **komoditi utama kelapa sawit**. Perkebunan kelapa sawit di Lamandau memiliki dampak positif dalam



mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, cukup banyak masyarakat yang juga bekerja sama dengan perusahaan dengan pola kemitraan. Pengembangan komoditi kelapa sawit didukung potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan. Prospek pasar bagi olahan kelapa sawit juga sangat menjanjikan karena permintaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selain kelapa sawit ini menghasilkan berbagai keuntungan.

Tabel 6.11.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Lamandau

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">▪ Lahan pengembangan yang masih luas.▪ Pasar global terbuka yakni Amerika dan Eropa.▪ Harga relative stabil.▪ Permintaan pasar yang besar.▪ Nilai ekonomi tinggi.▪ Banyaknya bisnis turunan yang dapat digarap dengan jasa perbankan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengelolaan kebun sawit yang belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat.▪ Modal yang cukup besar.▪ Masih adanya penguasaan lahan yang tidak jelas/tumpang tindih.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none">▪ Mudah dipasarkan apabila bibit bersertifikasi.▪ Teknologi penanaman dan perawatan yang cukup mudah.	<ul style="list-style-type: none">▪ Harga bibit yang berkualitas dan bersertifikat sulit didapat.▪ Bahan bersertifikat masih kurang.▪ Infrastruktur jalan masih kurang.▪ Keterbatasan modal.

9. Kabupaten Seruyan

Kabupaten Seruyan memiliki potensi daerah yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Sektor pertambangan dalam beberapa tahun ke belakang memiliki potensi yang besar, seperti batubara, zircon, biji besi, dan galena. Sejak moratorium gubernur diterbitkan, seluruh perusahaan pertambangan, baik itu perusahaan yang saat ini sedang melangsungkan tahapan operasi produksi maupun eksplorasi, seuruhnya menghentikan aktivitas produksinya. Moratorium Gubernur tersebut menjadikan peranan subsektor pertambangan di wilayah Seruyan mengalami pertumbuhan negatif.

Dari berbagai potensi tersebut sektor perkebunan menjadi unggulan Kabupaten Seruyan dengan **komoditi utama Kelapa sawit**. Subsektor perkebunan kelapa sawit di Seruyan cukup banyak menyerap tenaga kerja. Kelapa sawit banyak di kembangkan bahkan hampir di seluruh kecamatan hanya kecamatan Suling Tambun yang tidak terdapat perkebunan sawit. Keberhasilan kelapa sawit di Seruyan bukan hanya karena faktor-faktor klimatologis, teknis agronomis, dan kesesuaian lahan. Tetapi juga karena adanya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan industri kelapa sawit. Kelapa sawit telah



memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah Seruyan terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 6.12.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Seruyan

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana dari lembaga keuangan juga mendukung. ▪ Tersedianya peluang pasar yang luas di dalam dan luar negeri. ▪ Adanya dukungan pemerintah daerah bagi pengembangan kelapa sawit. ▪ Harga relative stabil. ▪ Petani sudah biasa (familiar) dengan komoditi ini dan pemeliharaan juga relative mudah. ▪ Lahan pengembangan yang cukup luas dan kondisi alam yang cukup mendukung. ▪ Perusahaan pengolahan kelapa sawit sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses transportasi masih mengalami kendala. ▪ Adanya ketergantungan dengan perusahaan besar swasta. ▪ Investasi masih kurang. ▪ Pihak perusahaan belum bisa mengakomodir masyarakat sekitar sehingga sering terjadi keributan. ▪ Kapasitas produksi pabrik pengolahan kelapa sawit masih kurang menampung seluruh produksi TBS masyarakat.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan baku tersedia. ▪ Tersedianya lahan sawit yang luas. ▪ Penanganan bahan baku gampang ditanam karena tidak mudah rusak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelapa sawit fluktuatif harganya. ▪ Jalur akses distribusi kurang. ▪ Perlu dana besar untuk pemeliharaan seperti membeli pupuk pestisida. ▪ Sulit mendapat bibit yang unggul. ▪ Munculnya penyakit dan hama eksplosif. ▪ Ketersediaan modal minim

10. Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan memiliki potensi daerah yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan perairan/sungai, pertambangan, perindustrian, dan pariwisata. Sektor kehutanan di Kabupaten Katingan, rotan merupakan primadona hasil hutan dan merupakan komoditi ekspor utama. Kebun rotan terutama rotan jenis sega/tanam sebagian besar masih berasal dari warisan turun temurun yang dikelola secara tradisional. Selain sumberdaya hutan berlimpah, Kabupaten Katingan juga kaya akan barang tambang. Beberapa potensi barang tambang dan mineral yang telah berhasil diidentifikasi antara lain adalah batubara, biji besi, zircon, pasir kwarsa, batu mulia, perak dan tembaga.

Potensi perikanan laut yang berasal di katingan meliputi udang putih, udang dogol, tongkol, bawal hitam, kakap, belanak, telang, senangin, kembung, selar, bambangan, cumi-cumi dan kepiting. Sedangkan di kawasan perairan umum komoditi perikanan tangkap terdiri dari udang, galah, jelawat, baung, gabus, lais, botia (ikan hias) dan betutu. Sedangkan potensi pertanian yang cukup banyak berkembang salah satunya adalah pisang, jenis pisang yang paling banyak di budidayakan adalah pisang mahuli, pisang pinang, pisang ambon, dan pisang pulau laut.



Dari berbagai potensi tersebut Sektor perkebunan menjadi unggulan Kabupaten Katingan dengan **komoditi utama kelapa sawit**. Budidaya kelapa sawit banyak diminati masyarakat karena permintaan akan komoditi ini cukup tinggi. budidaya kelapa sawit selain dapat meningkatkan pendapatan daerah juga memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.

Tabel 6.13.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Kelapa Sawit Kabupaten Katingan

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan masih banyak yang belum tergarap. ▪ Berkembangnya perkebunan besar sehingga dapat menghasilkan produk jadi seperti: minyak goreng produksi katingan sendiri. ▪ Banyak koperasi yang berkembang dengan baik ▪ Harga lokal masih terjangkau ▪ Komoditi sangat dibutuhkan, permintaan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum maksimalnya program perbankan dalam membiayai usaha perkebunan kelapa sawit, khususnya untuk perorangan. ▪ Tingginya suku bunga yang ada sehingga membuat kesempatan berwirausaha perkebunan sawit menjadi sulit ▪ Belum pastinya agunan/tanah sebagai jaminan pinjaman perbankan, karena BPN belum sepenuhnya dapat menerbitkan sertifikat tanah. ▪ Kurangnya perhatian pihak swasta kepada masyarakat setempat di sekitar. ▪ Pembukaan lahan sawit banyak mencemari dan merusak lingkungan. ▪ Harga fluktuatif. ▪ Adanya resiko kebakaran hutan. ▪ Kapasitas tata ruang belum tuntas. ▪ Pabrik CPO masih didominasi oleh perusahaan besar swasta. ▪ Adanya konflik social/lahan.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan baku tersedia, masih memadai ▪ Pemasaran mudah kepada perusahaan besar swasta. ▪ Tenaga kerja tersedia. ▪ Biaya perawatan terjangkau. ▪ Proses penanaman/pemeliharaan mudah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memerlukan modal yang cukup besar. ▪ Bibit tidak bersertifikat. ▪ Pupuk mahal. ▪ Distribusi kurang lancar, infrastruktur jalan banyak yang rusak. ▪ Belum tersedianya tempat penampungan bahan baku..

11. Kabupaten Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi daerah yaitu sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi. Kabupaten Pulang Pisau merupakan Kabupaten penghasil padi terbesar ke-2 di Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi kabupaten Pulang Pisau yang berbatasan dengan laut Jawa, memberikan peluang bagi Kabupaten Pulang Pisau untuk mengembangkan potensi perikanan laut. Ada 2 (dua) Kecamatan di Pulang Pisau yang memiliki potensi laut, yaitu Kecamatan Kahayam dan Kecamatan Sebangau Kuala. Persentase luas perikanan laut



Pulang Pisau sebesar 57,21 persen, yang berarti dari 100 Ha luas perikanan, ada 57,21 Ha yang berupa laut dan sisanya 42,79 ha berupa perikanan darat.

Dari berbagai potensi tersebut Sektor pertanian tanaman pangan menjadi sektor unggulan Kabupaten Pulang Pisau dengan **komoditi utama padi sawah**. Sebagian besar bahan pokok utama padi memegang posisi yang strategis untuk di kembangkan. Melihat produksi yang terus meningkat dan mengalami surplus merupakan satu peluang besar untuk membangun pabrik pengolah padi menjadi beras. Hal ini tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat Pulang Pisau. Penyerapan tenaga kerja dalam budidaya padi sawah sangat besar.

Tabel 6.14.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Padi Sawah
Kabupaten Pulang Pisau

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">▪ Kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat▪ Kondisi geografis kabupaten yang berupa lahan pasang surut yang membawa endapan lumpur yang menyuburkan tanah.▪ Merupakan komoditi unggulan daerah (swasembada) pangan nasional.▪ Adanya komitmen pemerintah	<ul style="list-style-type: none">▪ Terbatasnya modal.▪ Minimnya infrastruktur pertanian untuk mencapai sentra-sentra produksi.▪ Sulitnya menerapkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan lahan.▪ Persaingan dengan beras impor
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan
<ul style="list-style-type: none">▪ Tersedianya bibit dan pupuk.▪ Lahan tanam tersedia luas.▪ Tersedianya alat-alat pasca panen.▪ Proses produksi mudah, sederhana	<ul style="list-style-type: none">▪ Harga pupuk yang mahal▪ Minimnya bibit unggul, bibit yang ada masih kurang cocok untuk kondisi keasaman tanah.▪ Kualitas padi masih belum bisa bersaing.▪ Infrastruktur dan teknologi pertanian yang belum memadai.▪ Kesulitan dalam pembiayaan.

12. Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi daerah yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan. Perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Kabupaten Gunung Mas memiliki sumberdaya alam yang potensial khususnya pada hasil pertambangan. Bahan tambang yang terdapat di Gunung Mas cukup potensial terdiri atas mineral logam, batubara, dan bahan galian golongan C.

Dari berbagai sektor tersebut Sektor perkebunan menjadi sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas dengan **komoditi utama karet**. Perkebunan karet merupakan komoditi perkebunan yang banyak disuhakan di Gunung Mas. Suaha budidaya karet merupakan usaha yang turun temurun di masyarakat Gunung Mas. Proses perkembangan karet di Gunung Mas dapat dikatakan sangat bagus. Hal ini disebabkan adanya dukungan pemerintah serta pasar yang terbuka lebar. Cukup banyak lembaga keuangan/perbankan yang memfasilitasi



permodalan untuk budidaya karet. Prospek budidaya karet semakin baik sebab kualitas karet Mentah Gunung Mas cukup bagus. Dari segi budidaya juga mudah. Para petani cukup memahami cara pengelolaan bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak memerlukan peralatan canggih.

Tabel 6.15.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet
Kabupaten Gunung Mas

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan untuk pengembangan tersedia luas. ▪ Masyarakat familiar dengan karet, karena sebagian besar masyarakat bergerak di sektor pertanian. ▪ Transportasi lancar. ▪ Dukungan pemerintah cukup tinggi. ▪ Prospek cukup bagus karena kualitas karet mentah cukup bagus. Karenanya pasar cukup mudah. ▪ Sumber permodalan sebenarnya banyak baik dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Perbankan mendukung komoditi ini 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga yang masih fluktuatif. ▪ Belum adanya asosiasi sebagai wadah koordinasi antar petani karet. ▪ Kualitas SDM masih rendah pengendalian harga dan mutu masih kurang. ▪ Belum terdapat industri pengolahan karet yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, sehingga mata rantai pemasaran menjadi lebih panjang.
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknologi produksi/pengolahan karet yang selalu dikembangkan. ▪ Para petani memahami cara pengolahan bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus dan cukup mudah, juga tidak memerlukan peralatan yang canggih. ▪ Pasokan cukup banyak karena area perkebunan cukup luas. ▪ Hanya sampai pengelolaan slop karet tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya kontrol kualitas terhadap bibit lokal/tidak (bibit unggul) juga dalam hal peremajaan dari instansi terkait. ▪ Pemasaran tergantung tengkulak, dikuasai oleh jaringan-jaringan tertentu. ▪ Proses produksi yang agak lamadan dikelola secara tradisional. ▪ Kurangnya sarana distribusi seperti angkutan. ▪ Manajemen usaha yang masih sederhana.

13. Kabupaten Barito Timur

Kabupaten Barito Timur memiliki potensi daerah yaitu sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, transportasi dan pariwisata. Kabupaten Barito Timur memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan wilayahnya. Sumberdaya tambang Barito Timur sangat melimpah. Jenis pertambangan di Kabupaten Barito Timur salah satunya adalah pertambangan batubara. Batubara merupakan sumberdaya alam yang sifatnya tak terbaharukan. Selain barang tambang, Kabupaten Barito Timur memiliki banyak objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi ecowisata yang berbasis budaya.

Dari berbagai potensi tersebut Sektor perdagangan menjadi unggulan Kabupaten Barito Timur dengan **komoditi utama perdagangan karet**. Hampir 70 persen masyarakat menyandarkan hidupnya pada karet. Ketertarikan masyarakat terhadap karet tidak lepas



dari besarnya peluang pemasaran karet. Berapapun karet yang dihasilkan pasti habis terjual karena permintaanya yang sangat tinggi. pemasaran hingga keluar daerah sangat terbuka lebar. Bahan baku juga selalu tersedia, produksi karet cukup melimpah di Barito Timur.

Tabel 6.16.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Perdagangan Karet Kabupaten Barito Timur

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">▪ Pemasaran sangat terbuka karena permintaan karet tinggi.▪ Mendapat dukungan pemerintah daerah.▪ Pengiriman keluar daerah sangat terbuka.▪ Mayoritas penduduk memiliki usaha perkebunan karet.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebutuhan pasar internasional lebih untuk jenis karet sintetis bukan karet alami.▪ Sering terjadi kecurangan timbangan dari pihak pembeli karet yang merugikan masyarakat penjual karet.▪ Belum adanya asosiasi pedagang karet.▪ Harga karet terkadang turun drastic.▪ Belum adanya pabrik karet lokal.
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan
<ul style="list-style-type: none">▪ Pemasaran mudah dan lancar.▪ Bahan baku mudah diperoleh dan banyak tersedia.▪ Produksinya cukup melimpah.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kualitas karet masih belum standar ekspor

14. Kabupaten Murung Raya

Kebupaten Murung Raya memiliki beberapa sektor unggulan yang menjadi potensi daerah antara lain: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan, pariwisata dan transportasi.

Dari berbagai sektor unggulan tersebut Sektor perkebunan menjadi unggulan Kabupaten Murung Raya dengan **komoditi utama Karet**. Perkebunan karet merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Murung raya. Salah satu kelemahan di sektor komoditi karet di Murung raya saat ini yaitu belum adanya standar karet. Harga karet tergantung benar kepada mekanisme pasar. Sebagian besar masyarakat Murung raya mengandalkan kehidupan dari komoditi ini. Karena itu besar harapan petani agar para pegambil kebijakan baik pemerintah Murung raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dapat mempuat kebijakan tentang standar harga karet. Penting bagi petani untuk terus berupaya dalam meningkatkan kualitas karet. Petani juga harus memperhatikan mutu karet yang dihasilkan. Apabila karet bermutu tinggi tetap dicari pembeli.

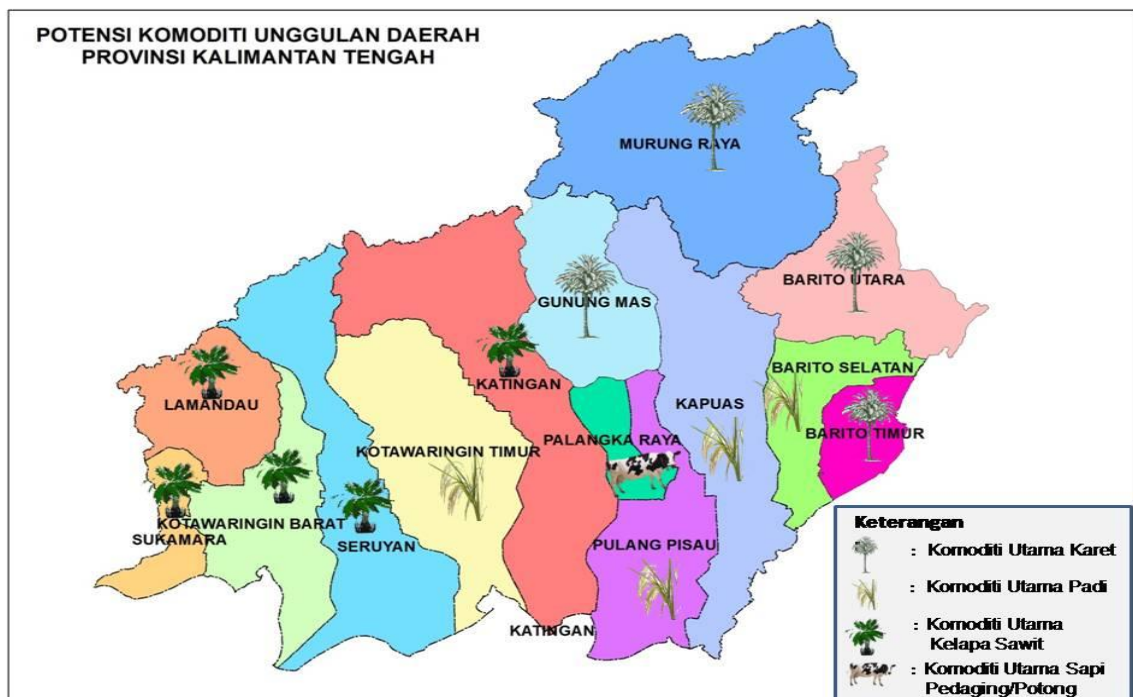


Tabel 6.17.
Peluang-Tantangan Serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet
Kabupaten Murung Raya

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanaman karet bisa diperbaharui. ▪ Adanya peluang pengembangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada pabrik karet. ▪ Belum ada asosiasi usaha tani karet. ▪ Harga karet fluktuatif dan cenderung rendah. Harga masih dikuasai oleh tengkulak.
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemasaran mudah dan lancar. ▪ Bahan baku mudah diperoleh dan banyak tersedia. ▪ Mudah dibudidayakan, terlebih karena mayoritas penduduk memiliki usaha perkebunan karet secara turun temurun dan menguasai teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanaman karet banyak yang sudah tua, sehingga produksi tidak stabil. ▪ Kadar air karet masih tinggi. ▪ Petani sulit mendapatkan bibit unggul yang bersertifikasi. ▪ Budidaya tanaman karet masih bersifat tradisional sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. ▪ Perawatan tanaman karet yang masih kurang. ▪ Kurangnya pemberian sarana produksi antara lain: pisau sadap, talang, asam semut dan mesin press. ▪ Masih di jual dalam bentuk lump.

Secara spasial, pengembangan potensi komoditas unggulan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 6.6.
Pengembangan Potensi Komoditas Unggulan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: analisis dari berbagai sumber, 201



6.3.3 Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Pembangunan potensi prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah akan berhasil jika didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata di setiap kabupaten/kota. Pemerataan aksesibilitas wilayah menjadi penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan aksesibilitas dalam hal mendukung pembangunan kewilayahan berdasarkan 3 zonasi pendanaannya tidak hanya bergantung pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah saja, keterlibatan dari pusat (APBN), kabupaten/kota (APBD Kabupaten/Kota) dan masyarakat (swasta) sangat penting untuk mempercepat pembangunan tersebut. Berikut prioritas pembangunan kewilayahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 6.18.
Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

No.	Prioritas	Lokasi (Kab/Kota)
Infrastruktur Jalan dan Jembatan		
1.	Pemeliharaan Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan.	Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya, Katingan, Kotim, Seruyan, Kobar dan Lamandau
2.	Pembangunan/Peningkatan jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah.	Barito Utara, Kapuas, Gunung Mas, Katingan
3.	Pembangunan Jalan Akses Ke Pelabuhan Batanjung	Kapuas
4.	Pemeliharaan Jalan Nasional/Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota
5.	Penggantian dan pemeliharaan jembatan.	Seluruh Kabupaten/Kota
6.	Pembangunan Jembatan Kahayan II	Palangka Raya
7.	Pembangunan Jalan Palangka Raya-Bukit Liti-Bukit Batu-Buntok-Ampah	Palangka Raya, Barito Selatan
8.	Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran	Kotawaringin Timur, Seruyan
9.	Pembangunan jalan Tumbang Samba-Tumbang Senamang-Batas Kalbar	Gunung Mas, Barito Utara
10.	Pembangunan Jembatan Tumbang Samba	Katingan
Infrastruktur Pelabuhan Laut		
1.	Pengembangan Pelabuhan Batanjung	Kapuas
2.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Sigintung	Seruyan
3.	Pengembangan Pelabuhan Kumai	Kotawaringin Barat
4.	Pengembangan Pelabuhan Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat
5.	Pengembangan pelabuhan Sampit, Bagendang dan Samuda	Kotawaringin Timur
6.	Pengembangan Pelabuhan Sukamara dan Kuala Jelai.	Sukamara
7.	Pengembangan pelabuhan Teluk Sebangau	Pulang Pisau
8.	Pengembangan Pelabuhan Bukit Pinang	Palangka Raya
9.	Pembangunan Pelabuhan Rangka Ilung	Barito Selatan.
10.	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan	Pulang Pisau
11.	Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar.	Katingan



No.	Prioritas	Lokasi (Kab/Kota)
12	Pembangunan Pelabuhan Sebuai	Kotawaringin Barat
Infrastruktur Bandara		
1.	Pengembangan Bandara Tjilik Riwut	Palangka Raya
2.	Pengembangan Bandara Beringin.	Muara Teweh
3.	Pengembangan Bandara Khusus Dirung.	Murung Raya
4.	Pengembangan Bandara Sanggu	Barito Selatan
5.	Pengembangan Bandara Kuala Kurun	Gunung Mas
6.	Pengembangan Bandara Tumbang Samba	Katingan
7.	Pengembangan Bandara Iskandar	Kotawaringin Barat
8.	Pengembangan Bandara H. Asan Sampit	Kotawaringin Timur
9.	Pengembangan Bandara Kuala Pembuang	Seruyan
Infrastruktur/Prasarana Perhubungan Sungai		
1.	Pembangunan Dermaga Lanting di Desa Bawan	Pulang Pisau
2.	Pembangunan Dermaga Sungai di Desa Lamunti	Kapuas
3.	Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Jenamas, Bangkuang dan Mengkatip	Barito Selatan
4.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan di Desa Lemo, Desa Mntalat, dan Desa Bintang Ninggi	Barito Utara
5.	Pembangunan Dermaga Sungai Mitak Seruyan	Seruyan
6.	Rehabilitasi Dermaga Sungai di Jabiren	Pulang Pisau
7.	Rehabilitasi Dermaga Sungai di Petuk Ketimpun dan Tangkiling	Palangka Raya
8.	Rehabilitasi Dermaga Sungai di Tumbang Samba	Katingan
9.	Pengadaan Bus Air	Kotawaringin Barat
10.	Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Dalam Kabupaten Sungai Kumai	Kotawaringin Barat
Infrastruktur Kereta Api		
1.	Pembangunan Jalur KA : Kudangan-Nanga Bulik-Kumai	Kotawaringin Barat, Lamandau
2.	Pembangunan Jalur KA : Puruk Cahu-Kuala Kurun-Rabambang-Tumbang Samba-Sampit-Kuala Pembuang-Teluk Segintung	Murung Raya, Gunung Mas, Katingan, dan Seruyan.
3.	Pembangunan Jalur KA : Tumbang Samba-Rantau Pulut-Nanga Bulik	Katingan, Seruyan, dan Lamandau
4.	Pembangunan Jalur KA : Kuala Kurun-Rabambang-Palangka Raya-Pulang Pisau-Batanjung (Kuala Kapuas)	Gunung Mas, Palangka Raya, Pulang Pisau dan Kapuas
5.	Pembangunan Jalur KA : Puruk Cahu-Bangkuang/Mengkatip-Batanjung	Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kapuas
6.	Pembangunan Jalur KA : Banjarmasin-Palangka Raya	Palangka, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas
7.	Pembangunan Jalur KA : Palangka Raya-Sampit-Nanga Bulik	Palangka Raya, Katingan, Kotim, Seruyan, Kobar dan Lamandau
Infrastruktur Komunikasi dan Informatika		
1.	Pembangunan Serat Optik	Palangka Raya



No.	Prioritas	Lokasi (Kab/Kota)
2.	Pengembangan Transmisi Penyiaran TVRI	seluruh Kabupaten/Kota
3.	Pembangunan BTS pada daerah permukiman yang masih <i>blank spot</i>	seluruh Kabupaten/Kota
Infrastruktur energi		
1.	Pembangunan PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW	Barito Utara
2.	Pembangunan PLTU Kalimantan Selatan Tengah 1 100 MW	Katingan
3.	Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	seluruh Kabupaten/Kota
4.	Persiapan pembangunan jaringan kabel listrik bawah laut Kalimantan Tengah ke Jawa Tengah	Sukamara
5.	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (bio energi dan bio <i>massa</i>)	Kalimantan Tengah
Infrastruktur Pemukiman dan Perkotaan		
1.	Penataan Flamboyan Bawah sebagai "Waterfront City"	Palangka Raya
2.	Penataan Bundaran Besar sebagai "Landmark" Palangka Raya.	Palangka Raya
3.	Pengembangan kawasan strategis Zona III (Pahandut Seberang)	Palangka Raya
4.	Pengembangan kawasan strategis I, Penataan Kawasan Lingkar Luar Kota Palangka Raya	Palangka Raya
5.	Peningkatan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung Gerakan Nasional 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi)	seluruh Kabupaten/Kota
Sumberdaya Air		
1.	Pembangunan Prasarana Air Baku	Kotawaringin Barat
2.	Revitalisasi lahan rawa eks PLG	Kapuas
Pengembangan Kawasan Ekonomi		
1.	Pengembangan Kawasan Industri Sebuai	Kotawaringin Barat
2.	Pengembangan Kawasan Industri Bagendang	Kotawaringin Timur
3.	Pengembangan Kawasan Industri Sei Sugih	Kotawaringin Timur
4.	Pengembangan Kawasan Industri Parenggean	Kotawaringin Timur
5.	Pengembangan Kawasan Industri Batanjung	Kapuas
6.	Pengembangan Minapolitan Basarang	Kapuas
7.	Pengembangan Agropolitan Basarang	Kapuas
8.	Pengembangan Minapolitan Sei Ijum	Kotawaringin Timur
9.	Pengembangan Kawasan Industri Pulau Damar	Katingan
10.	Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lamunti	Kapuas
11.	Pengembangan kluster sapi	Palangka Raya
12.	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pusat Perfilman Asia Tenggara	Katingan
13.	Pengembangan Taman Nasional Gunung Lumut	Barito Utara

Pengembangan potensi kewilayahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 tersebut secara spasial ditunjukkan pada gambar-gambar berikut.



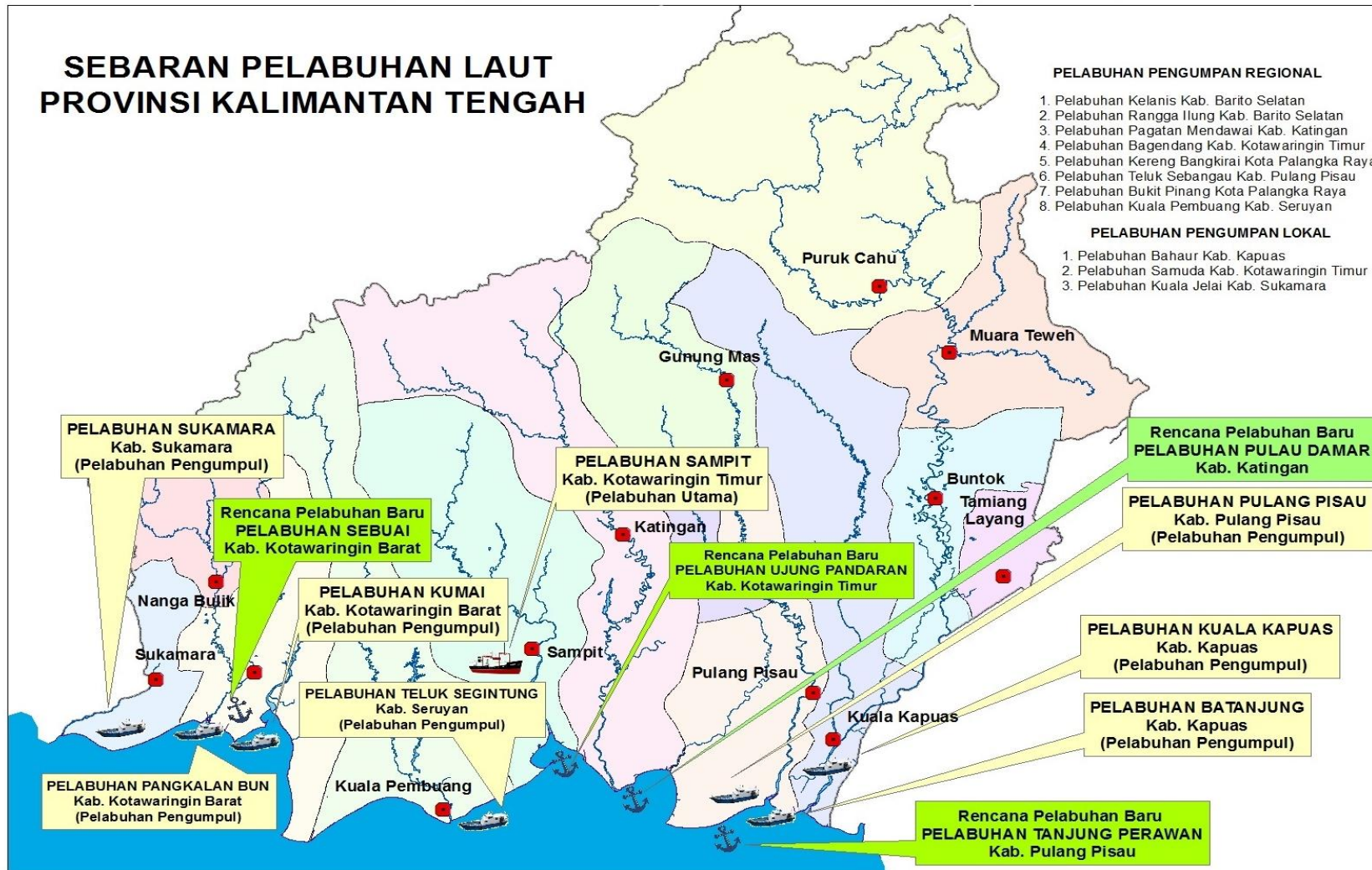
Gambar 6.7
Prioritas Pengembangan Infrastruktur Jalan di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035



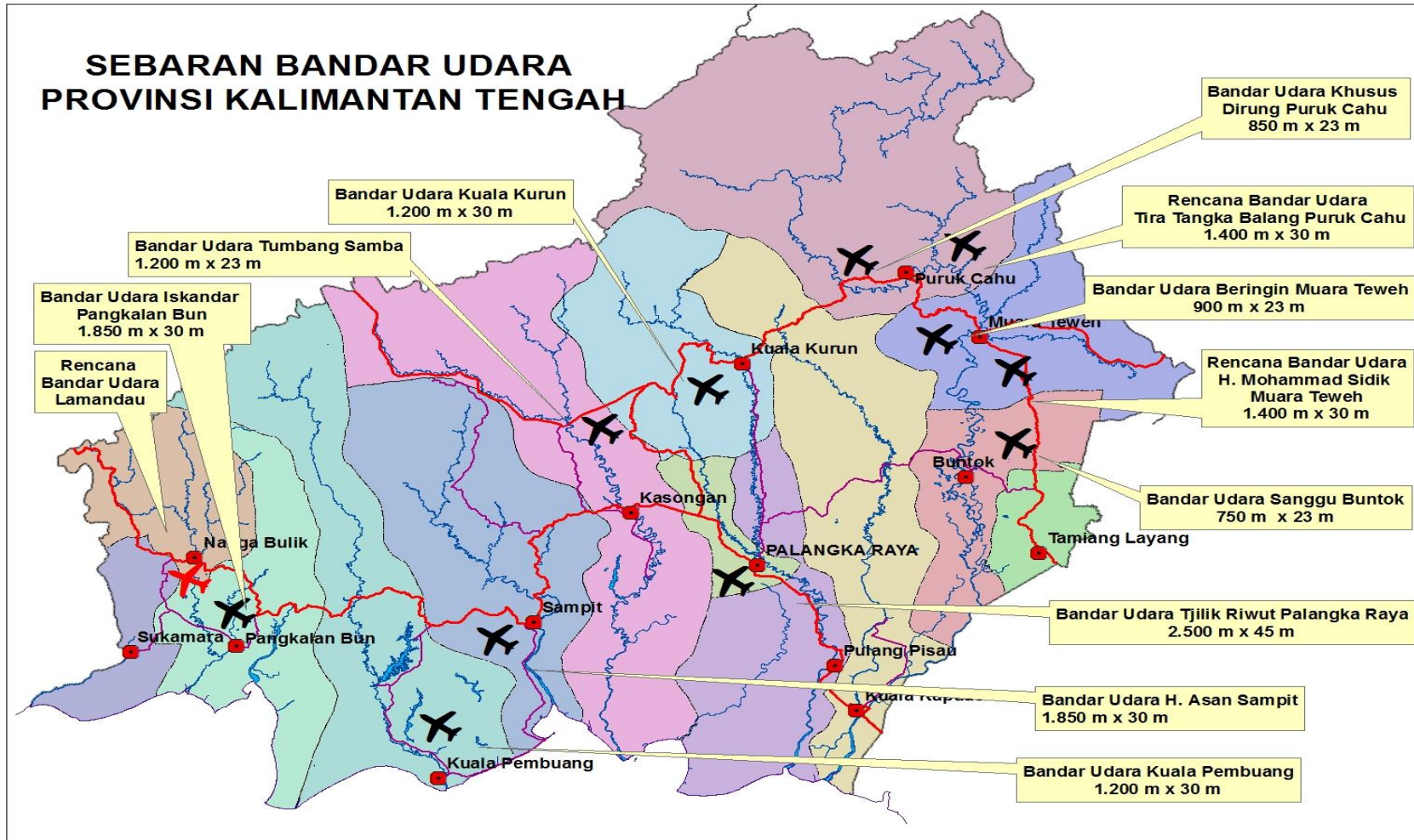
Gambar 6.8
Prioritas Pengembangan Pelabuhan Laut di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035



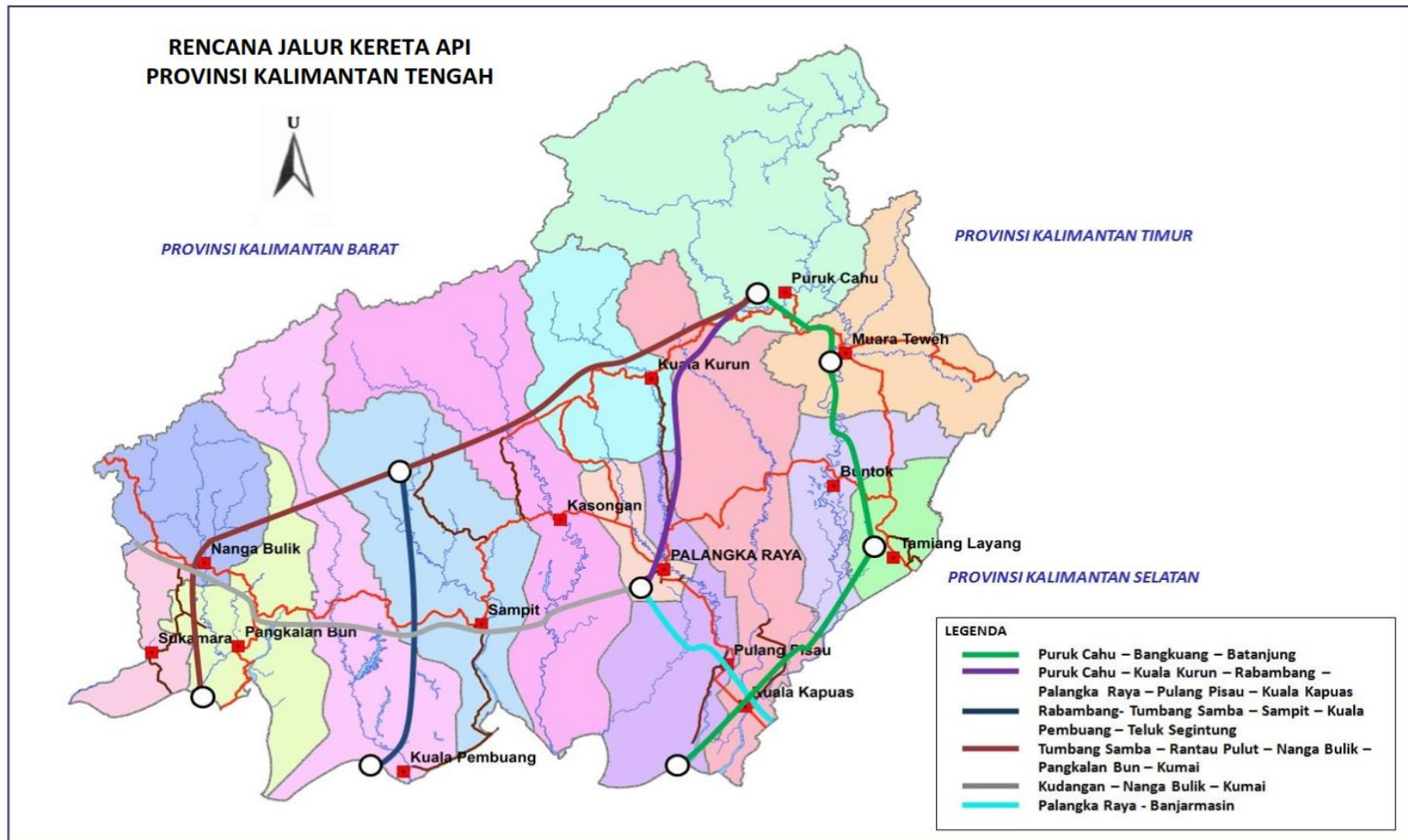
Gambar 6.9
Prioritas Pengembangan Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035



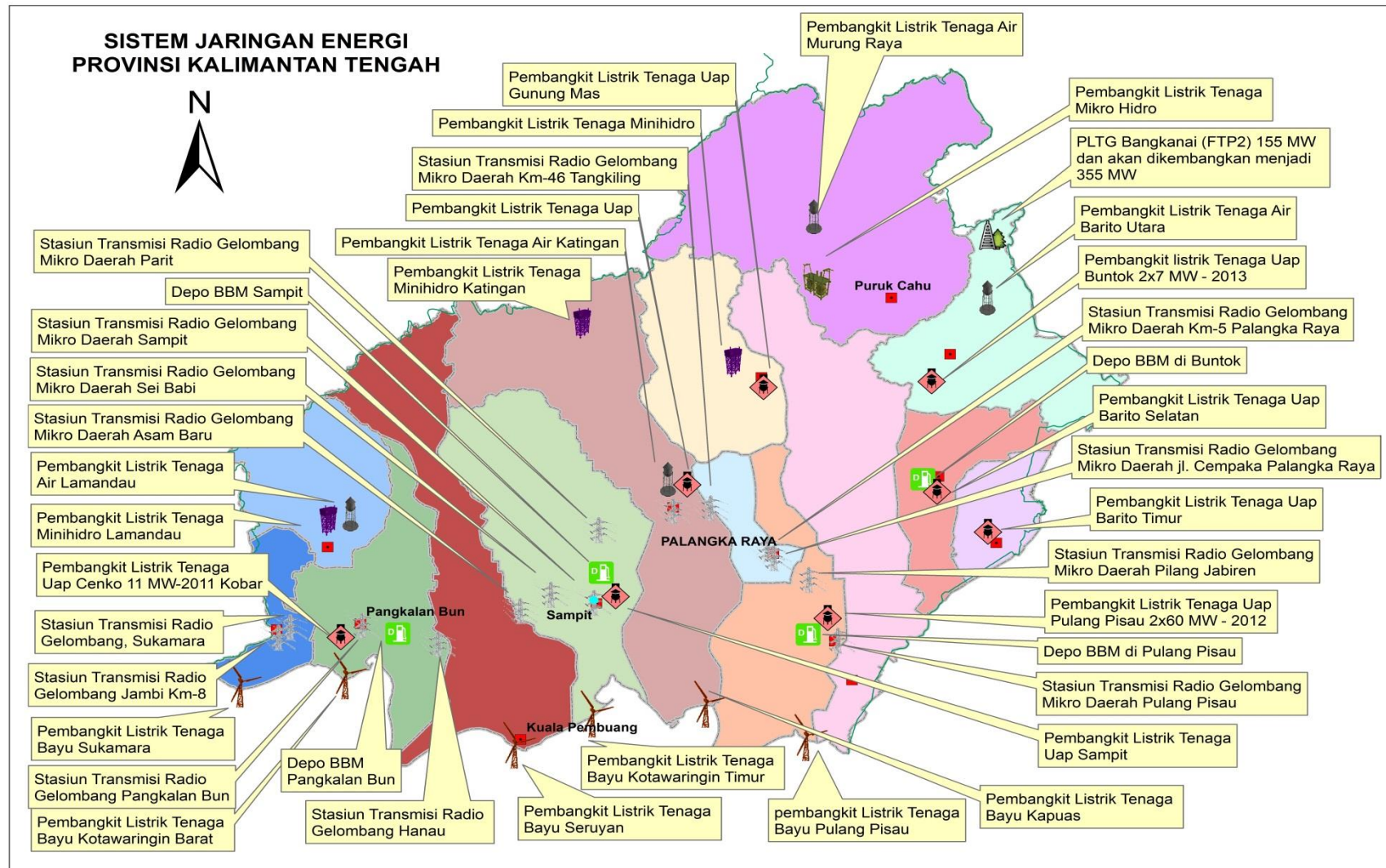
Gambar 6.10
Prioritas Rencana Jalur Kereta Api di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035



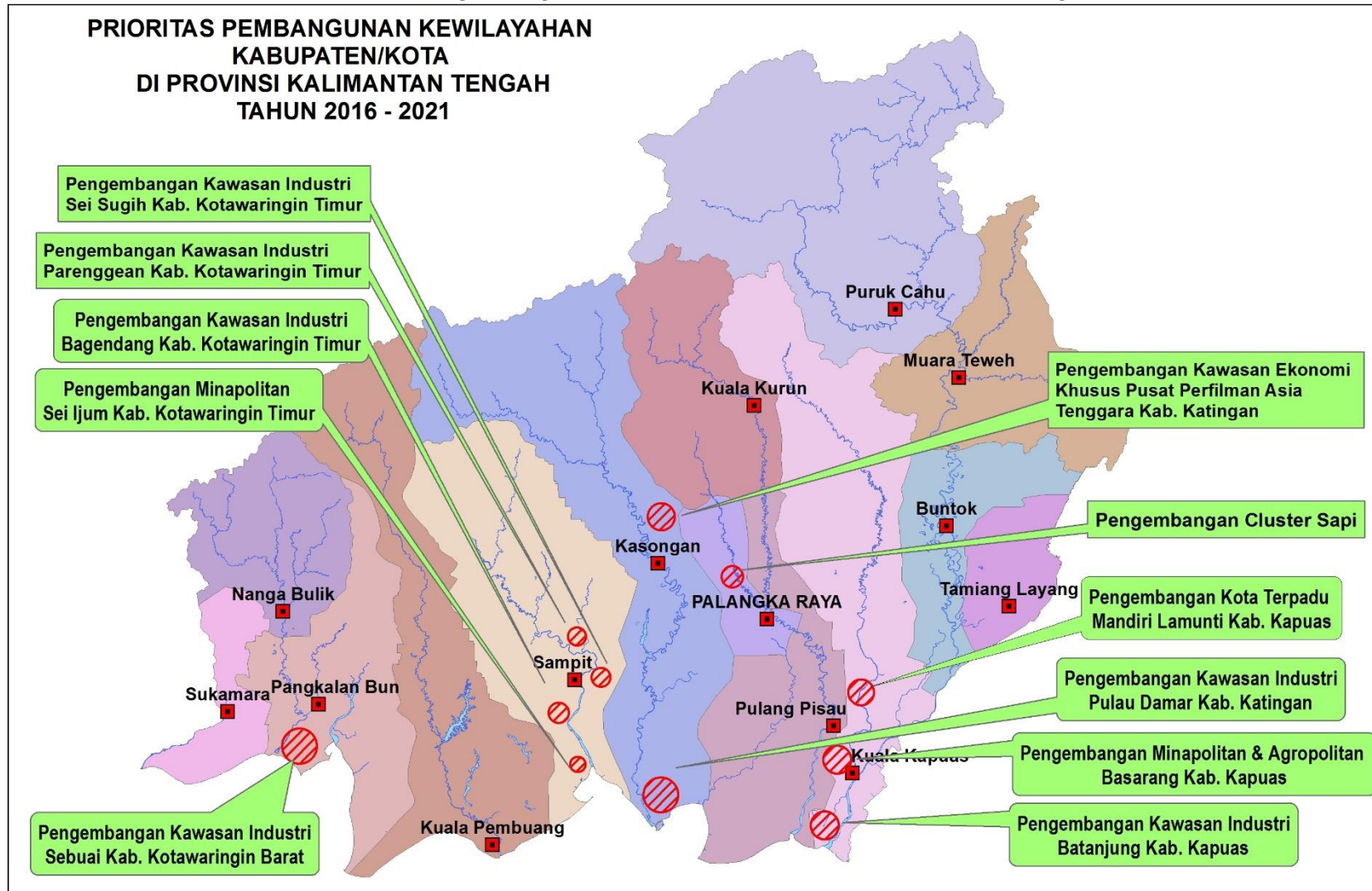
Gambar 6.11
Prioritas Pengembangan Sistem Jaringan Energi di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035



Gambar 6.12
Prioritas Pengembangan Kawasan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : analisis dari berbagai sumber, 2016



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program perangkat daerah untuk mewujudkan setiap sasaran. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2016-2021.

7.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Program pembangunan daerah, diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan Arah Kebijakan pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Program-program pada masing-masing strategi disebut sebagai program pembangunan daerah yang menggambarkan capaian secara langsung terhadap sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah Strategi Provinsi Kalimantan Tengah yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan tahunan, yaitu:

1. Strategi Pertama: Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah, antara lain:

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang; dan
- Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang.



Tabel 7.1
Arah Kebijakan dari strategi pertama: Peningkatan Kualitas Perencanaan
Tata Ruang Wilayah

Sasaran		• Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [1]: Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah			
1.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program perencanaan tata ruang	Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035
			Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Prov. Kalteng
2	Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pengembangan kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
			Pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi
			Identifikasi lokasi (mengkaji status lahan dan letak kawasan), dan mencadangkan lahan seluas 300.00 Ha untuk rencana ibukota Pemerintahan NKRI di Provinsi Kalimantan Tengah, yang diprioritaskan di Kota Palangka Raya, Kab. Gunung Mas, Kab. Katingan
			pengembangan potensi wilayah dan mencadangkan lahan dengan pengembangan komoditas unggulan baru di wilayah <i>hinterland</i> -nya seperti padi organik, singkong, tebu, bambu, sengon
			koordinasi dengan pihak terkait untuk menghasilkan tata ruang guna penyiapan rencana lokasi ibukota Pemerintahan NKRI di Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Palangka Raya, Kab. Gunung Mas, Kab. Katingan)
			membuat kajian hingga sosialisasi kajian-kajian tentang potensi sumberdaya, sarana prasarana dan tata ruang dalam rangka penyiapan ibukota Pemerintahan NKRI di Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Palangka Raya, Kab. Gunung Mas, Kab. Katingan)

2. Strategi Kedua: Pemerataan infrastruktur wilayah

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Pemerataan infrastruktur wilayah, antara lain:

- Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi;
- Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi;
- Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/kota yang layak; dan
- Peningkatan ketercukupan energi.



Tabel 7.2
Kebijakan dari strategi kedua: Pemerataan infrastruktur wilayah

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas antar daerah Meningkatnya ketercukupan energi 	
No.	Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [2]: Pemerataan infrastruktur wilayah			
1.	Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembangunan sarana prasarana (IT) Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan	Penuntasan Pembangunan Jalan lintas Kalimantan poros selatan dan poros tengah
			Pembangunan jalan akses ke pelabuhan laut
			Pembangunan jalan dari pusat produksi ke jalan utama/outlet-inlet.
			Peningkatan Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan provinsi dan jalan nasional dari 8 ton menjadi 12 ton
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Penyelesaian pembangunan pelabuhan Teluk Segintung, Batanjung dan Sebuai
			percepatan pembangunan Pelabuhan Batanjung, Teluk Segintung, Sebuai dan Pulau Damar, terutama terkait penyediaan jalan akses menuju pelabuhan dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah
Pengembangan bandara utama dan bandara perintis			
Pembangunan dan peningkatan dermaga sungai/dermaga penyeberangan			
3.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Peningkatan dan pengembangan serta pemasangan fasilitas keselamatan jalan
			Program pembangunan jalan dan jembatan
		Program peningkatan jalan	
			Peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi dengan prioritas pada penyumbang pertumbuhan ekonomi
peningkatan jalan akses yang menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh/kawasan transmigrasi dalam rangka			



Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya konektivitas antar daerah Meningkatnya ketercukupan energi 	
No.	Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [2]: Pemerataan infrastruktur wilayah			
			menggerakkan ekonomi wilayah
		Program penggantian dan pemeliharaan jembatan	Penggantian dan pemeliharaan jembatan provinsi dengan prioritas pada penyumbang pertumbuhan ekonomi
4	Peningkatan ketercukupan energi	Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan
			Melaksanakan survei potensi energi
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Melaksanakan inventarisasi desa belum berlistrik
			Pembuatan peta jaringan listrik desa
			Sosialisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
			Monitoring dan evaluasi pembangunan listrik desa
Sosialisasi hemat energi			

3. Strategi Ketiga: Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai, antara lain:

- Pemberdayaan petani;
- Peningkatan ketersediaan sumber daya air;
- Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan; dan
- Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai.

Tabel 7.3
Kebijakan dari strategi ketiga: Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [3]: Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai			
1.	Pemberdayaan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ternak
			Optimalisasi lahan tidak produktif
2.	Peningkatan ketersediaan sumber daya air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa
			Operasional dan Pemeliharaan (OP) Bendung
			Pemasangan Pipa-pipa air bersih untuk penyediaan air bersih baik di perkotaan maupun di pedesaan dan pesisir terutama pada daerah-daerah rawan air, mendukung Gerakan Nasional 100 – 0 – 100



Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [3]: Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai			
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Operasional dan pemeliharaan (OP) prasarana mikro hidro
		Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Pembangunan pengamanan abrasi pantai
			Pembangunan prasarana pengendalian banjir
3.	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan laut
			Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan Perairan Umum Daratan (PUD)
			Peningkatan Sarana dan Parasarana Pelabuhan Perikanan
			Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
			Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan
			Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan perairan umum daratan dan laut
			Monitoring evaluasi sumberdaya ikan perairan dan kelembagaan pengelolaan SDI
			Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitasi pokok dan fungsi pelabuhan perikanan
			Pemberdayaan Wanita Nelayan
			Pendampingan Sertifikasi Tanah Nelayan dan Asuransi Nelayan
		Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Penyusunan Peraturan Daerah zonasi WP3K Provinsi
			Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan pesisir
			Pantai berseri
			Penyusunan peraturan daerah zonasi WP3K Provinsi Kalimantan Tengah
			Peningkatan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kawasan konservasi (DAK)
		Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Gerakan pantai bersih dan berseri (DAK)
			Pengadaan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan sarana prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK)



Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [3]: Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai			
4	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	Pengembangan usaha pengolahan Perikanan skala kecil
			Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
			Pengembangan Ragam produk olahan bernilai tambah
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba
			Pengembangan Usaha Pakan Ikan Skala Mini (Gerakan Pakan Mandiri)
			Pengembangan Budidaya ikan di kawasan Minapolitan
			Pemberdayaan Pembudidaya ikan skala kecil
Pengembangan dan Peningkatan Mutu UPTD/UPR			

4. Strategi Keempat: Stabilitas Ekonomi Daerah

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Stabilitas Ekonomi Daerah, antara lain:

- Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis;
- Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin;
- Peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
- Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah; dan
- Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar.

Tabel 7.4
Kebijakan dari strategi keempat: Stabilitas Ekonomi Daerah

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat; Meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [5]: Stabilitas Ekonomi Daerah			
1.	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	Pengendalian distribusi bahan kebutuhan pokok
			Pengawasan dan pengendalian harga kebutuhan pokok
			Dukungan untuk pasar penyeimbang
		Program Pengendalian Inflasi daerah	Penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
			Penyusunan kebijakan pengendalian inflasi
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen			



Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat; • Meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [5]: Stabilitas Ekonomi Daerah			
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dukungan kelancaran distribusi barang dan jasa
2.	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan serta Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan
			Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
			Pemberian bantuan kepada koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah
			Mempercepat ijin usaha ekonomi menengah ke bawah
			Penguatan produk kerajinan lokal untuk industri kecil dan menengah
			Membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja
			Pengadaan paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan
			Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif
			Bantuan bahan bangunan perumahan dan sarana lingkungan
			Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan sosial bagi masyarakat miskin, KIT, Kartu Indonesia Pintar		
Program pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja fakir miskin Bantuan Kelompok usaha bersama		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada PMKS		
Program peningkatan sarana dan prasarana panti sosial	Pengembangan Panti Binsa Laras dan Panti Lanjut Usia/Jompo dan Rehabilitasi Panti PSBRKW dan PSTW		
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembangunan kawasan agropolitan, minapolitan Perdesaan.		
3.	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bimbingan dan pelatihan serta pendampingan produk-produk UMKM



Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat; • Meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [5]: Stabilitas Ekonomi Daerah			
		Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM	Pengembangan produk KUMKM unggulan Daerah yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara melalui: <ul style="list-style-type: none"> - promosi/publikasi produk-produk unggulan daerah OVOP berbasis KUMK - Pameran, Website KUMKM, - magang, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran produk unggulan KUMKM)
4.	Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	UPT.Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah
			Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
			Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Swasta
			Standarisasi pada industri makanan dan minuman (SNI wajib)
		Program penumbuhan Industri agro, pertambangan, kehutanan dan perikanan	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Pelabuhan Batanjung Kab. Kapuas
			Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalan Bun, Seruyan dan Sampit
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Komoditi Unggulan, Karet, Kelapa Sawit dan Hasil Laut
			Hilirisasi industri (CPO, karet, smelter batubara, alumina)
5.	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyiapan infrastruktur pemasaran dan energi listrik
			Penyiapan potensi unggulan daerah untuk dipromosikan
		Program Peningkatan Iklim Investasi	Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
			Fasilitasi dalam rangka percepatan dan mempermudah ijin usaha sesuai ketentuan perundangan Meningkatkan evaluasi IUT dan Masterlist ke PMA/PMDN



5. Strategi Kelima: Peningkatan pendapatan masyarakat

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Peningkatan pendapatan masyarakat, antara lain:

- Peningkatan produktivitas pada setiap subsektor pertanian;
- Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta;
- Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu; dan
- Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian.

Tabel 7.5
Kebijakan dari strategi kelima: Peningkatan pendapatan masyarakat

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau • Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [5]: Peningkatan pendapatan masyarakat			
1.	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pencukupan alsintan, bibit dan pupuk
			Saprodi untuk Pencetakan Sawah Baru
			Pengembangan Bibit Unggul Pertanian
			Pengembangan, Pembinaan dan pengadaan, Alat dan Mesin Pertanian
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pembangunan dan pengembangan kluster sapi potong
			Pengembangan kawasan peternakan
2.	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja
			Bursa pencarian kerja <i>online</i>
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Optimalisasi fungsi BLK dan sekolah kejuruan/SMK
			Peningkatan/pengembangan/pembangunan SMK (1 kecamatan 1 SMK)
			Peningkatan/pengembangan/pembangunan BLK (1 kabupaten 1 BLK)
3.	Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu	Program Peningkatan Daya Saing UMKM	Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas usaha KUMKM sehingga mampu menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (Naik Kelas atau Scalling Capital) dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran KUMKM dalam pengembangan Usaha; - Fasilitasi SHAT untuk mengakses Pembiayaan; - kemitraan antara UMK dan Usaha Besar



Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau • Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [5]: Peningkatan pendapatan masyarakat			
4.	Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian	Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	Pemberdayaan KUMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif yang didukung peningkatan peran masyarakat dalam pemberdayaan KUMKM serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha KUMKM melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan UMK, - Pendampingan Ijin Usaha Mikro Kecil (Implementasi Prepres 98 Tahun 2014 dan Permendagri 83 Tahun 2014)
		Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif	Peningkatan Akses KUMKM kepada Sumber Produktif yang berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai kebutuhan dan perkembangan KUMKM khususnya melalui Bank dan Non Bank (LKM berbadan Hukum Koperasi), KUR; <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penjaminan Kredit Daerah bagi KUMKM, sebagai bagian untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran - berkaitan akses teknologi, ; akses pasar dan pemasaran bagi KUMKM kegiatan ini antara lain : - Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, - Pendampingan kepada UM dan UK melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM (PLUT-KUMKM), - Sosialisasi KUR dan Penjaminan Kredit Daerah; - pengawasan terhadap LKM berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop)
		Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM	Peningkatan Kapasitas dan produktivitas SDM Koperasi dan UMKM di bidang manajemen Organisasi, Pemasaran, Teknologi melalui: Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan yang didukung dunia usaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi tinggi dan wirausaha handal; - meningkatkan wirausaha baru yang didukung pengembangan, Pelatihan/Bimtek kewirausahaan yang tersistem

6. Strategi Keenam: Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi antara lain:

- Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik



- Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan
- Peningkatan standar pelayanan publik
- Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi
- Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan

Tabel 7.6
Kebijakan dari strategi ketujuh: Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN • Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan • Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik • Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [6]: Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi			
1.	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Optimalisasi pengelolaan keuangan berbasis akrual
			Diklat teknis bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Inventarisasi dan pengelolaan aset/barang daerah
			Diklat pengelolaan aset/barang daerah
		Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)
			Diklat penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik			
2.	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan	Program Pendidikan Kedinasan	Pemberian tugas belajar bagi ASN
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishmen</i>
3.	Peningkatan standar pelayanan publik		Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Asistensi dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
4.	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pembinaan dan supervisi kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggaran
			Pengendalian, pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran
			Pengendalian dan Evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Analisis Jabatan
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah



Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN • Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan • Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik • Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [6]: Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi			
5.	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Asistensi dan Survei Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)
6.	Perbaiki sistem tata kelola pemerintahan	Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
			Pengelolaan Data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
			Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
			Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian terintegrasi dengan SIM Keuangan Daerah
		Program pendidikan politik masyarakat	Pengendalian dan pengelolaan <i>website</i> Pemerintah Provinsi
			Sosialisasi, Bimtek berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat

7. Strategi Ketujuh: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, antara lain:

- Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan;
- Pengoptimalisasi manajemen pendidikan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- Peningkatan promosi kesehatan masyarakat; dan
- Peningkatan kualitas dokter dan paramedis.



Tabel 7.7

Kebijakan dari strategi ketujuh: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [7]: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
1.	Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah
2.	Pengoptimalisasi manajemen pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Optimalisasi Manajemen Berbasis Sekolah, dan peningkatan pelayanan bidang pendidikan
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Tersedianya dan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan menengah sesuai dengan standar, baik secara kuantitas maupun kualitas
		Program pendidikan Luar biasa	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan Luar Biasa yang berkualitas dan sesuai dengan standar
		Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Peningkatan/pengembangan/pembangunan SMK (1 kecamatan 1 SMK)
			Dukungan untuk peningkatan pendidikan masuk TNI/POLRI dan bidang khusus lainnya
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa melalui diklat-diklat teknis, bimtek
			Fasilitasi dan dukungan peningkatan pendidikan melalui Universitas Terbuka (UT)
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Bimbingan teknis kepada pengelola perpustakaan dan sosialisasi literasi sekolah		
4.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau
		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru –Paru/Rumah Sakit Mata	Penyediaan sarana dan prasarana RSUD, RSJ
		Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu/kelas III gratis
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu/kelas III
5.	Peningkatan promosi kesehatan masyarakat	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Bimbingan dan penanganan peningkatan derajat kesehatan masyarakat (gizi, balita, ibu hamil dan manula)
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Rumah Sakit
			Dukungan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka



Sasaran		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [7]: Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
			menunjang masuk TNI/POLRI dan bidang khusus lainnya
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di instansi pemerintah maupun swasta, sekolah-sekolah/ perguruan tinggi
			Pendampingan/dukungan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba
			Bantuan peningkatan sarana dan prasarana panti rehabilitasi narkoba
			Pembangunan rumah sakit khusus korban penyalahgunaan narkoba
		Program kesehatan lingkungan	Program sharing Investasi PemProv KalTeng dalam rangka Memorandum Program Sanitasi (MPS)
			Mendukung Gerakan Nasional 100 – 0 – 100, yaitu <ul style="list-style-type: none"> - pemenuhan akses air minum, penanganan kawasan kumuh dan akses sanitasi layak - pembangunan akses jalan lingkungan di perkotaan
6.	Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Program Sumber Daya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi Peningkatan kesempatan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi Peningkatan kualifikasi dokter dan paramedis

8. Strategi Kedelapan: Pengelolaan industri pariwisata

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Pengelolaan industri pariwisata, antara lain:

- Pengembangan objek-objek pariwisata; dan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan.



Tabel 7.8
Kebijakan dari Strategi Kedelapan: Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata

Sasaran		• Terpasarkannya destinasi wisata	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Pokok
Strategi [8]: Pengelolaan industri pariwisata			
1.	Pengembangan objek-objek pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan/Pembangunan objek pariwisata
			Peningkatan/pembangunan sarana prasarana pariwisata termasuk jalan akses menuju objek pariwisata
			Optimalisasi pengembangan destinasi wisata
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan pemasaran destinasi wisata melalui promosi kerjasama swasta	
		Promosi pariwisata melalui penguatan produk lokal yang khas untuk buah tangan (suvenir) sebagai promosi produk lokal	
	Program pengelolaan kekayaan budaya	Penyediaan kalender atraksi wisata budaya	
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kepariwisata	Program pengembangan SDM Kepariwisata	Peningkatan SDM pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan SDM

9. Strategi Kesembilan: Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan, antara lain:

- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis;
- Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan;
- Pengelolaan pertambangan
- Pemanfaatan hasil SDA

Tabel 7.9
Kebijakan dari strategi kesembilan : Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan

Sasaran		• Menurunnya degradasi lingkungan	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan pokok
Strategi [9]: Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan			
1.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Optimalisasi monitoring dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
			Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
	Program Pencegahan Bencana		



Sasaran		• Menurunnya degradasi lingkungan	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan pokok
Strategi [9]: Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan			
2.	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis	Program pencegahan, pengendalian kebakaran hutan	Optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor (pemerintah, koporasi dan masyarakat) pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan
3.	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan prona sertifikasi dan <i>land reform</i>
4.	Pengelolaan pertambangan	Program Pembinaan Dan Pelayanan Perijinan Pertambangan	Pembinaan dan pengawasan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
5.	Pemanfaatan hasil SDA	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi
			Melibatkan masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan kritis dengan tanaman industri
		Program Penanganan Kawasan Lahan Gambut (PLG)	Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan pada lahan PIPPIB, gambut dalam, PIAPS, dan Wilayah Adat ditentukan melalui peta usulan Kawasan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, Wilayah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah.
			Rehailitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektar
Program pengembangan kawasan startegis dan cepat tumbuh	Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi		
	Penataan kawasan strategis/kawasan transmigrasi		

10. Strategi Kesepuluh: Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, antara lain:

- Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah



Tabel 7.10

Kebijakan dari strategi kesepuluh: Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Sasaran		• Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	
No.	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan pokok
Strategi [10]: Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD			
1.	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	Program Intensifikasi Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
			Pembenahan, pemberdayaan dan pembentukan Perusahaan Daerah di berbagai sektor (perkebunan, kehutanan, pertambangan, jasa konstruksi)
			Peningkatan kompetensi SDM pengelola pendapatan daerah
			Kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan swasta untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah

7.2 Program Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

7.2.1. Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2016-2021 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2016-2021 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra PD. Program pembangunan daerah tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi, misi pembangunan daerah adalah sebagaimana tabel 7.11 berikut ini.



Tabel 7.11
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten	1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program perencanaan tata ruang	Prosentase Kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang	18 %	45 %	PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
			2. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	7 kawasan	11 kawasan	PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
2.	2. Meningkatnya konektivitas antar daerah	2. Pemerataan infrastruktur wilayah	3. Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan komunikasi, informasi dan media massa	24 kegiatan, 100 berita 20 orang terlatih	324 kegiatan, 350 berita 45 orang terlatih	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
				Program pengembangan pos, telekomunikasi dan informatika	Jumlah pos, telekomunikasi dan informatika yang dikembangkan	2 BTS	5 BTS	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sungai dalam kondisi baik	40%	60%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	60%	80%	Perhubungan	Dinas Perhubungan



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase berkurangnya angka kecelakaan angkutan umum	5%	20%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	957,58 km	1.200 km	PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program peningkatan/ pembangunan jalan	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	1.100 km	1.200 km	PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi	Panjang jalan yang direhab/dipelihara rutin	20 km	475 km	PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program penggantian dan pemeliharaan jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara/diganti	360 m	450 m	PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
3.	3. Meningkatnya ketercukupan energi		6. Peningkatan ketercukupan energi	Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	Rumah tangga pengguna listrik	600.212 unit	650.000 unti	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
					Rasio elektifikasi	69,8%	92,5%		
					Rasio desa berlistrik	74,8%	100%		
				Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	persentase SDM bidang ketenagalistrikan mendapat pembinaan	80%	100%	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
4.	4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	7. Pemberdayaan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani	97,74	107,5	Pertanian	Dians Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8. Peningkatan ketersediaan sumber daya air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dikembangkan	9.122 ha	62.500 ha	PU & Penataan Ruang	Dinas PU & Penataan Ruang
				Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Luasan yang dikembangkan/dikelola/konservasi	1 ha	2 ha	PU & Penataan Ruang	Dinas PU & Penataan Ruang
				Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Luasan bangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	1.080 ha	8.690 ha	PU & Penataan Ruang	Dinas PU & Penataan Ruang
				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	2.100 m	3.600 m	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
			9. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Jumlah produksi Perikanan Tangkap (Ton)	130.526	130.526	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Jumlah luasan konservasi perairan	171.679	171.679	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah luas rehabilitasi kawasan pesisir (ha/tahun)	2,5	2,5	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Presentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%)	70	100	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)	22	40	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
					Konsumsi ikan (kg/th)	51,89	54,00	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				10. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (ton)	31.037	34.450	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya (Ton)	68.693	125.322	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produksi benih ikan (ekor)	55.620.000	70.335.200	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		
5	5. Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat	4 Stabilitas Ekonomi Daerah	11. Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis	Program stabilisasi harga kebutuhan pokok	Laju inflasi provinsi (%)	4,74	3,4	Perdagangan & Perindustrian	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengananan Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	11,64	12,50	Perdagangan & Perindustrian	Dinas Perdagangan & Perindustrian	



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP	6.296	7.750	Perdagangan & Perindustrian	Dinas Perdagangan & Perindustrian					
				Program Penanggulangan Kemiskinan	Angka kemiskinan (%)	5,91	4,75	Sosial	Dinas Sosial;					
			12. Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan	Angka kemiskinan (%) Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan sosial	5,91 800 Orang	4,75 4.000 Orang	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koperasi dan UKM, Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Koperasi dan UKM; ;Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan;					
				Program perlindungan sosial masyarakat sangat miskin									Pertanian, Perdagangan & Perindustrian	Disbun; Dinas Perdagangan & Perindustrian
													Perencanaan	Bappeda
								Sosial	Dinas Sosial					
					Program peningkatan sarana dan prasarana panti sosial	Persentase pemenuhan sarana/prasarana bagi pelayanan panti	50%	75%	Sosial	Dinas Sosial				
					Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30%	50%	Sosial	Dinas Sosial				
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial (Org)	1.078	1.278	Sosial	Dinas Sosial				



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	6. Meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan			Program pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan sosial (Org)	120	250	Sosial	Dinas Sosial	
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial (org)	300	400	Sosial	Dinas Sosial	
				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Lembaga Kampung berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa (buah)	1.434	14.55	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Program Pengembangan Perekonomian dan SDA	Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	16.655	20.000	Perindustrian	Setda (Biro Administrasi Perekonomian & SDA)	
				13. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM	Persentase jumlah UMKM yang naik kelas	60%	90%	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,15	18,00	Perdagangan & Perindustrian	Dinas Perdagangan & Perindustrian
				14. Peningkatan nilai tambah produksi regional	Program penumbuhan Industri agro, pertambangan, kehutanan dan perikanan	Persentase pertumbuhan Industri argo	70%	90%	Perdagangan & Perindustrian	Dinas Perdagangan & Perindustrian



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kalimantan Tengah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	505 unit	618 unit	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
			15. Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah	Program Peningkatan Iklim Investasi	Realisasi investasi :			Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
				Program Peningkatan Iklim Investasi	- PMDN (milyar Rp)	1.088.548,80	2.500.000	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	- PMA (US\$ ribu)	27.992.647,91	42.500.000		
					Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	7	3	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
					Produktivitas tanaman pangan (kwintal/ha)	405,23	462,85	Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau	5. Peningkatan pendapatan masyarakat	16. Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi daging ternak (Ton/ Thn)	20.120,25	23.508	Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	8. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	71,11	72,50	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			17. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja (%)	24,01	31,04	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Daya Saing UMKM	jumlah UKM (unit)	298.979	337.685	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			18. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu	Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	jumlah lembaga keuangan mikro dan kecil	267 unit	355 unit	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
			19. Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian	Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif	Persentase peningkatan produktivitas usaha kecil menengah yang mengakses ke pembiayaan	60%	90%	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM	Jumlah Nilai Transaksi UMKM yang dipromosikan Produknya	Rp. 25 milyar	Rp. 85 milyar	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang dilatih/diklat (orang)	20 orang	40 orang	Pengawasan	Inspektorat
9. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	6. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	20. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase selisih perhitungan nilai aset oleh Bid Asset Badan Keu Daerah dengan audit BPK (%)			Keuangan	Badan Keuangan Daerah	
			Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (orang)	506	530	Tata Laksana Pemerintahan	Setda (Biro Organisasi)	



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasan (orang)	20 orang	50 orang	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	
	10. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan		21. Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	jumlah aparatur yang mendapat pembinaan dan pengembangan	670 orang; 2.100 SK	1.340 orang; 4.000 SK	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	
				Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan layanan masyarakat	77,23	88	Tata Laksana Pemerintahan	Setda (Biro organisasi)	
	11. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik		22. Peningkatan standar pelayanan publik	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Temuan LHP	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil reviu RKA PD	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil reviu RKA PD	Pengawasan	Inspektorat	
				23. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Jumlah PD yang memenuhi tata laksana pelayanan publik (%)	20%	50%	Tata Laksana Pemerintahan	Setda (Biro Organisasi)
					Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani	90%	95%	Pengawasan	Inspektorat



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			24. Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi	Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)	Cakupan layanan SIMDA	1 kegiatan	5 kegiatan	Komunikasi dan Informatika	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik
	12. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		25. Perbaiki sistem tata kelola pemerintahan	Program pendidikan politik masyarakat	Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah	15	11	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesbang dan Politik
				Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	13. Meningkatnya kualitas pendidikan	7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	26. Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	75,00%	90,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)	52,36	62,5	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	70,70	84,4	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			27. Pengoptimalisasi manajemen pendidikan						
			28. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana						



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			dan prasarana pendidikan	Program pendidikan Luar biasa	Persentase Sekolah Luar Biasa yang terpenuhi sarana dan prasarananya sesuai standar (%)	65,25	80,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan			
				Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Angka Melek Huruf (%)	98,90	99,80	Pendidikan	Dinas Pendidikan			
				Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah rumah sakit dan puskesmas dengan layanan terakreditasi	7 RS; 39 puskesmas	12 RS; 90 puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan			
			14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			29. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Jumlah laboratorium dan personil kesehatan yang memenuhi standar	10 lab; 56 personil kesehatan	20 lab; 76 personil kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru –Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Rujukan sesuai standar (%)	65%	90%	Kesehatan	RSUD; RSJ Kalawa Atei
							Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Peserta JKN (%)	0%	85%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan					70%	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan		



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah anak dan balita mendapat pelayanan kesehatan dengan baik	29 orang	80 orang	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			30. Peningkatan promosi kesehatan masyarakat	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Posyandu Aktif (unit)	2.210	2.250	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program kesehatan lingkungan	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Kota Sehat (%)	100	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	-	800 orang	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan (orang)	30 orang	70 orang	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			31. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah wisatawan (orang)	373.000	673.000	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	15. Terpasarkannya destinasi wisata	8 Peningkatan dan pengembangan destinasi wisata	32. Pengembangan objek-objek pariwisata (alam, budaya,	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah)	490	500	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan minat khusus)	Program pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah pertemuan dengan mitra pariwisata	2 kali	3 kali	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			33. Peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	5.094	6.094	Kehutanan	Dinas Kehutanan
	16. Menurun nya degradasi lingkungan	9. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	34. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pencegahan Bencana	Menurunnya indeks resiko bencana (%)	75,32	70	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Program pencegahan, Pengendalian kebakaran hutan				Persentase penurunan kawasan kebakaran hutan (%)	90%	100%	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup;	
35. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis			Program pencegahan, Pengendalian kebakaran hutan	Persentase penurunan kawasan kebakaran hutan (%)	90%	100%	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup;	
							Kehutanan	Dinas Kehutanan;	
									Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			36. Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah inventarisasi penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	5 paket	10 paket	Pertanahan	Setda (Biro Pemerintahan)
			37. Pengelolaan pertambangan	Program Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan	Jumlah perijinan tambang yang dibina (buah)	100	200	Energi dan Sumber daya Mineral	Dinas ESDM



No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Kondisi Awal 2016	Kondisi Akhir 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Jumlah perusahaan yang dibina/dilakukan pengawasan (IUP)	0	554	Energi dan Sumber daya Mineral	Dinas ESDM
			38. Pemanfaatan hasil SDA	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase Pencapaian Target Produksi Hasil Hutan (%)	20%	40%	Kehutanan	Dinas Kehutanan
				Program Penanganan Kawasan Lahan Gambut (PLG)	Luas kawasan lahan gambut yang ditangani (ha)	200 ha	1.000 ha	Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	17. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	39. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	Program Intensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah	35%	45-50%	Keuangan	Badan Keuangan Daerah
					Perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer	58%	60%	Keuangan	Badan Keuangan Daerah
					Persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD	49%	55-60%	Keuangan	Badan Keuangan Daerah



7.2.2. Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Dalam Rangka Pencapaian Visi, Misi dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan **urusan pemerintahan konkuren**, yang mencakup **urusan wajib dan urusan pilihan**, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut, terdiri dari:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**, meliputi 6 (enam) urusan yakni:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 6) sosial.
2. **Urusan Pemerintahan Wajib** yang **tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) perpustakaan;
 - 18) kearsipan.
3. **Urusan Pemerintahan Pilihan**, meliputi 8 (delapan) urusan yakni:



- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian;
- 8) transmigrasi

4. **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**, yakni:

- a. perencanaan
- b. keuangan
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
- d. penelitian dan pengembangan
- e. fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup:
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat DPRD
 - 3) Inspektorat
 - 4) Penghubung Pemprov Kalteng di Jakarta

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi:

2. **Dinas Daerah Provinsi**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Dinas Sosial
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9) Dinas Ketahanan Pangan
- 10) Dinas Lingkungan Hidup
- 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



- 13) Dinas Perhubungan
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17) Dinas Pemuda dan Olah Raga
- 18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 20) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
- 22) Dinas Perkebunan
- 23) Dinas Kehutanan
- 24) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 25) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

3. **Badan Daerah Provinsi**, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 2) Badan Keuangan Daerah
- 3) Badan Kepegawaian Daerah
- 4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Badan Penghubung Pemprov Kalteng di Jakarta

3. **Sekretariat Daerah**, terdiri dari:

- 1) Biro Pemerintahan
- 2) Biro Hukum
- 3) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
- 4) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 5) Biro Administrasi Pembangunan
- 6) Biro Pengadaan Barang/Jasa
- 7) Biro Organisasi
- 8) Biro Umum
- 9) Biro Protokol dan Komunikasi Publik



4. **Sekretariat DPRD**
5. **Inspektorat**
6. **RSUD dr. Doris Sylvanus**
7. **RSJ Kalawa Atei**

Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, disamping untuk mendukung visi dan misi kepala daerah secara langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, yang antara lain dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program-program pembangunan dalam rangka pencapaian visi, misi dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dimaksud adalah sebagaimana tabel 7.12 berikut.

Tabel 7.12
Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Dalam Rangka Pencapaian Visi, Misi dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)					
1.01	Pendidikan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Pendidikan
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Pendidikan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Pendidikan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Pendidikan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	8 Laporan	Dinas Pendidikan
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	M6	APM PAUD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pendidikan
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun I		Jumlah sekolah unggulan/sasaran (SD/SMP) terhadap total unit sekolah - APK/APMSD/SMP	3.000 siswa, 15.000 buku	0	Dinas Pendidikan
8	Program Pendidikan SMA	M6	APM SMA	0	77,52%	Dinas Pendidikan
9	Program Pendidikan SMK	M6	APM SMK	77,52%	77,62%	Dinas Pendidikan
10	Program Pendidikan Non Formal	M6	Jumlah peserta pendidikan non formal	100 orang	100 orang	Dinas Pendidikan
11	Program Pendidikan Luar Biasa	M6	Jumlah siswa sekolah luar biasa	100%	100%	Dinas Pendidikan
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	M6	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70.00%	100%	Dinas Pendidikan
13	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	M6	Jumlah pengunjung perpustakaan	30.00%	90.00%	Dinas Pendidikan
14	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	M6	Persentase sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	75.00%	100.00%	Dinas Pendidikan
15	Program Pendidikan Tinggi		Jumlah sekolah tinggi yang difasilitasi/dibantu (buah)	10 (buah)	10 (buah)	Dinas Pendidikan
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik secara Proporsional		Jumlah tenaga pendidik mendapat tunjangan kesejahteraan (orang)	100	200	Dinas Pendidikan
17	Program Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Pendidikan		Persentase teknologi pendidikan terbaru	30%	80%	Dinas Pendidikan
18	Program Pendidikan Menengah II		APM SMA	77,52%	77,62%	Dinas Pendidikan
19	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun II		APM SD/SDLB/Paket A; APM SMP/SMP/PLB/Paket B	95,60%; 85,70%	95,60%; 85,70%	Dinas Pendidikan
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan II		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50%	70%	Dinas Pendidikan
21	Program Pengembangan Pendidikan Karakter	M6	Persentase jumlah anak didik yang berkarakter baik (berprestasi)	60%	85%	Dinas Pendidikan
22	Program Pembinaan dan Fasilitas Pendidikan	M6	Jumlah dan kualitas pemberian beasiswa S1 dan S2 (orang)	0	4.000 orang (S1), 200 orang (S2)	Dinas Pendidikan
23	Program Pendidikan Menengah I		APM SMA	77,62%	77,62%	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan					
24	Program Pembinaan Kesehatan		Jumlah masyarakat mendapat sosialisasi pembinaan masalah kesehatan	35 OT	35 OT	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
25	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Kesehatan
26	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Kesehatan
27	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Kesehatan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Kesehatan
29	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	1 laporan	Dinas Kesehatan
30	Program Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Kesehatan
31	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar (Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dibagi jumlah dikali 100%)	70%	95%	Dinas Kesehatan
32	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Persentase Pemberdayaan Masyarakat melalui Posyandu Purnama dan mandiri	70%	95%	Dinas Kesehatan
33	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Persentase Masyarakat dengan gizi baik	70%	95%	Dinas Kesehatan
34	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Persentase Kampung/kelurahan yang stop Buang Air Besar Sembarangan	70%	95%	Dinas Kesehatan
35	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	M6	Jumlah penderita penyakit menular ditanggulangi	200 orang	400 orang	Dinas Kesehatan
36	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	M6	Jumlah Laboratorium dan personel kesehatan yang memenuhi standar	10 lab; 56 personel kesehatan	20 lab; 76 personel kesehatan	Dinas Kesehatan
37	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	M4	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan	70%	95%	Dinas Kesehatan
38	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	M6	Jumlah anak dan balita mendapat pelayanan kesehatan dengan baik	29	80	Dinas Kesehatan
39	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	M6	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (SPM)	50	58	Dinas Kesehatan
40	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	M6	menurunnya angka kematian ibu (AKI), menurunnya angka kematian bayi (AKB)	AKI: 300; AKB: 25	AKI: 175; AKB: 5	Dinas Kesehatan
41	Program Upaya Kesehatan Perorangan	M6	Jumlah rumah sakit dan puskesmas dengan layanan terakreditasi	7 RS; 39 puskesmas	12 RS; 90 puskesmas	Dinas Kesehatan
42	Program Sumber Daya Kesehatan	M5	Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan	30 orang	70 orang	Dinas Kesehatan
43	Program Penanggulangan Masalah Kesehatan	M6	Jumlah masalah kesehatan tertanggulangi	10 kasus	30 kasus	Dinas Kesehatan
44	Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan		Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan dengan optimal	1	1	Dinas Kesehatan
45	Program Penyuluhan Masyarakat PHBS		Jumlah Pengadaan KIT Upaya Kesehatan Sekolah	25 paket	50 paket	Dinas Kesehatan
46	Program Kesehatan Haji		Jumlah haji mendapat pelayanan kesehatan	1.600 orang	1.600 orang	Dinas Kesehatan
47	Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (PTM)		Jumlah penderita penyakit tidak menular ditanggulangi	20	100	Dinas Kesehatan
48	Program kesehatan lingkungan		Jumlah desa dengan kualitas kesehatan lingkungan yang baik	40	65	Dinas Kesehatan
49	Program Peningkatan Peralatan Kesehatan dan Bahan Penunjang Laboratorium		Jumlah peralatan kesehatan dalam kondisi baik	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	Dinas Kesehatan
50	Program Pengujian dan Kalibrasi Peralatan Kesehatan (Sister Lab)		Jumlah alat uji dan kalibrasi kesehatan tersedia	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	Dinas Kesehatan
51	Program Informasi Publik dan Dokumentasi		Jumlah buku profil kesehatan	100 eksemplar	300 eksemplar	Dinas Kesehatan
52	Program Pengawasan, Pembinaan pengendalian Kesehatan Makanan		Jumlah data TPM terbina	7 data inspeksi TPM	20 data inspeksi TPM	Dinas Kesehatan
53	Program Pembiayaan Kesehatan		Jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi dan monitoring	40 OT	160 OT	Dinas Kesehatan
54	Program Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan		Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100%	100%	Dinas Kesehatan
55	Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian		jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang siap diproduksi didalam negeri, jumlah fasilitas/supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan atau makanan	1 paket	1 paket	Dinas Kesehatan
56	Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Serta Peralatan Kesehatan	M6	Penyelesaian sarana dan prasarana serta alat kesehatan di 14 Kabupaten/Kota	45 Puskesmas	55 Puskesmas	Dinas Kesehatan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
57	Program Jaminan Kesehatan	M6	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring	45 OT	70 OT	Dinas Kesehatan
58	Program Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan		Jumlah kegiatan movev di kabupaten/kota	15 OT	35 OT	Dinas Kesehatan
59	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	RSJ Kalawa Atei
60	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	RSJ Kalawa Atei
61	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	RSJ Kalawa Atei
62	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	RSJ Kalawa Atei
63	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	M6	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan	40 orang	75 orang	RSJ Kalawa Atei
64	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	M6	Persentase sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	65%	90%	RSJ Kalawa Atei
65	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	M6	Jumlah unit pengolahan limbah dan gedung RS terpelihara	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	RSJ Kalawa Atei
66	Program Upaya Kesehatan Perorangan	M6	Jumlah orang dalam tim akreditasi yang mendapat bimbingan	28 orang	80 orang	RSJ Kalawa Atei
67	Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit	M6	Persentase realisasi akreditasi RS	50%	100%	RSJ Kalawa Atei
68	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	RSUD dr. Doris Sylvanus
69	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	RSUD dr. Doris Sylvanus
70	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	RSUD dr. Doris Sylvanus
71	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	RSUD dr. Doris Sylvanus
72	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	14	RSUD dr. Doris Sylvanus
73	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	M6	Jumlah layanan informasi RS bagi masyarakat	5	18	RSUD dr. Doris Sylvanus
74	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	M6	Persentase sarana&prasarana RS yang sesuai standar	65%	90%	RSUD dr. Doris Sylvanus
75	Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	M6	Jumlah masyarakat mendapat jaminan kesehatan	1.500 klaim	1.900 klaim	RSUD dr. Doris Sylvanus
76	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD dr. Doris Sylvanus		Persentase peningkatan pelayanan kesehatan	65%	70%	RSUD dr. Doris Sylvanus
77	Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit	M6	Persentase realisasi target peningkatan mutu RS	persiapan akreditasi KARS 98%	terakreditasi JCI 100%	RSUD dr. Doris Sylvanus
78	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 dokumen	1 dokumen	RSUD dr. Doris Sylvanus
1.03	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang					
79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
80	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
81	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
82	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
83	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	1 paket, 4 laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
84	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	M2	panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun (m)	2,100	1,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
85	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	M3	luas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dikembangkan (ha)	9.122	63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86	Program penyediaan dan pengolahan air baku	M3	Luasan yang dikelola (ha)	6	5/2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
87	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	M3	luasan yang dikembangkan/dikelola/konservasi (ha)	1	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	M2	panjang pipa air minum dan air limbah yang dibangun/dikembangkan (km)	16 km	9 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
89	Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai	M3	Luasan bangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun (ha)	1080 ha	8690 ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
90	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	M1	Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	7 kawasan, 4 unit, 2 kegiatan	5 kawasan, 8 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
91	Program penggantian dan pemeliharaan jembatan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah	M2	Parjang jembatan yang dipelihara/diganti (m)	360 m	450 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur		Meningkatnya kualitas informasi publik bidang infrastruktur	0	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
93	Program perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah		jumlah paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan	100.00 %	100.00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
94	Program peningkatan/pembangunan jalan Provinsi Kalimantan Tengah	M2	Parjang jalan yang ditingkatkan/dibangun (km)	114 km	570 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
95	Program rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	M2	panjang jalan yang direhab/pemeliharaan rutin (km); panjang jembatan yang direhab/pelihara (m)	20 km	475 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
96	Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial	M2	1. Tersedianya rumah ibadah yang memadai; 2. tersedia fasilitas sosial yang memadai"	3 Kawasan, 6 unit	1 Kawasan, 13 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
97	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	14 laporan, 16 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98	Program Perencanaan Teknis		Tersedianya dokumen perencanaan	0	60 Dokumen, 1 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
99	Program Perencanaan Tata Ruang	M1	Persentase Kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang	22%	45 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100	Program Pemanfaatan Ruang	M1	'Konsistensi Pemanfaatan Ruang dengan meningkatnya SDM dalam Penataan Ruang	100 Orang	500 Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
101	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	M1	Jumlah Perda RTRWP/K	6	14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
102	Program Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	M6	Tersedianya fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat	0	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
103	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
104	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
105	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
106	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	0	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
107	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	4 laporan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
108	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
109	Program Pengembangan Perumahan	M2	Parjang drainase yang dibangun	42.000 m	98.000 m	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
110	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur		Tersedianya dan terbukanya informasi publik untuk masyarakat	250 orang, 20 Alat Uji, 2 Paket Koordinasi, 1 Dokumen	960 orang, 20 Alat Uji, 2 Paket Koordinasi, 1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
111	Program Perencanaan Teknis		Tersedianya dokumen perencanaan	0	60 Dokumen, 1 kegiatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
112	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	M2	Tersedianya sarana prasarana jalan, jembatan, untuk masyarakat desa ; Tersedianya saluran/gorong-gorong untuk masyarakat desa"	33.000 m	85.000 m	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
113	Program Sharing Investasi PemProv Kalteng dalam rangka Memorandum Program Sanitasi (MPS)	M2	Tersedianya dana pendamping program sanitasi	0	9 unit, 25.380 m	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
114	Program Penataan dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	M2	Tersedianya jalan lingkungan, drainase, penanganan persampahan dan instalasi pengelolaan limbah komunal pada kawasan kumuh kota; Tersedianya sistem air bersih bagi warga kota"	0	21 kegiatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
115	Program Pengembangan Wilayah Pesisir	M3	Tersedianya air minum untuk masyarakat pesisir	0	7 kegiatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
116	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
117	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
118	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
119	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
120	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
121	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
122	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	M5	Tingkat kejadian konflik	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
123	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	M5	Jumlah kantrantibmas	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
124	Program pengembangan wawasan kebangsaan	M5	Tingkat peningkatan hari besar negara dan kebudayaan	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
125	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
126	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
127	Program pendidikan politik masyarakat	M5	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Kalteng	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
128	Program peningkatan Ketahanan sosial budaya dan ekonomi	M5	Jumlah kejadian konflik kerusuhan	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
129	Program Data dan Informasi		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
130	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
131	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
132	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
133	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
134	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
135	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
136	Program Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
137	Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur		Persentase Terlatihnya Anggota Satuan (Satuan Relawan Kebakaran)	0	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
138	Program Peningkatan Pemadam Kebakaran	M7	Persentase peningkatan pemadam kebakaran	0	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
139	Dukungan Manajemen dan Teknis		Jumlah program Dukungan Manajemen dan Teknis terlaksana	1 Paket	1 paket	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
140	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	M7	Persentase terlaksananya Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
141	Program Tanggap Darurat	M7	Jumlah program tanggap darurat terlaksana	1 Paket	1 paket	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
142	Program Tanggap Paska Bencana		tersedianya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	1 Dokumen	1 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
143	Program logistik dan peralatan		Jumlah logistik dan peralatan bencana tersedia	1 Paket	1 paket	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
144	Program Penanggulangan Bencana	M7	Tersedianya Peta Resiko Bencana	1 Dokumen	1 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
145	Program Pencegahan Bencana	M7	persentase penurunan indeks resiko bencana	0	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
146	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat		persentase penurunan indeks resiko bencana	0	100 %	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
147	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana		Persentase Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	0	5 Orang	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
148	Program Penanganan Keadaan Darurat		jumlah SDM bersertifikat Penanggulangan Bencana; jumlah sarana prasarana vital kondisi darurat terbangun	0	250 org; 3 buah	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
149	Program Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana		Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	0	5 Paket	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
150	Program Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan		Data informasi dan pelaporan kebencanaan	0	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
151	Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran		Peningkatan sarana dan prasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau ke seluruh lapisan publik	0	1 Paket	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
152	Program Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Telaahan Hukum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana		Tersedianya peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum kerjasama dalam dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana	0	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
153	Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kehumasan		Jumlah dokumen pelaporan pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan		1 Paket	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
154	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
155	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
156	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
157	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
158	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
159	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	M5	Tingkat kejadian konflik	50%	30%	Satuan Polisi Pamong Praja
160	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	M5	Jumlah kantrantibmas	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.06	Sosial					
161	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
162	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Sosial
163	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Sosial
164	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Sosial
165	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Sosial
166	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Dinas Sosial
167	Program Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan PD	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Sosial
168	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	M4	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	100%	100%	Dinas Sosial
169	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	M4	Persentase Terlaksananya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	Dinas Sosial
170	Program pembinaan anak terlantar	M4	Persentase terlaksananya Program pembinaan anak terlantar	100%	100%	Dinas Sosial
171	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Persentase terlaksananya Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100%	100%	Dinas Sosial
172	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	M4	Persentase terlaksananya Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	100%	100%	Dinas Sosial
173	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	M4	Persentase terlaksananya Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100%	100%	Dinas Sosial
174	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	Dinas Sosial
175	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	M4	Persentase terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	Dinas Sosial
2	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)					
201	Tenaga Kerja					
176	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
177	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
178	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
179	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
180	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	M4	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
181	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	M4	Persentase angkatan kerja	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
182	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Jumlah kasus ketenagakerjaan mendapat penanganan	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
183	Program Pendayagunaan Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah aparatur pengawas	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
184	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
185	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
186	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
187	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
188	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
189	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
190	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Jumlah peserta sosialisasi keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	50 orang	120 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
191	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	M5	Jumlah PD Provinsi terdampingi dalam penyusunan anggaran responsif gender	30	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
192	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	M5	Jumlah orang dalam satgas PKDRT	100 orang	250 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
193	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	M5	Dokumen hasil Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	4 dokumen	14 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
194	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	M5	Dokumen Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	0	1 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
195	Program Penyusunan Profil Lembaga		Jumlah profil lembaga tersusun	5 dokumen	17 dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
203	Pangan					
196	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
197	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
198	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
199	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
200	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
201	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
202	Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	M4	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	80%	90%	Dinas Ketahanan Pangan
203	Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan		Penanganan daerah rawan pangan (%)	36,96%	56,65%	Dinas Ketahanan Pangan
204	Program Good Governance		Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	1	2	Dinas Ketahanan Pangan
205	Program pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	M4	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	229	338	Dinas Ketahanan Pangan
206	Program ketahanan pangan dan gizi keluarga		Jumlah kelompok pengankaragaman konsumsi/diversifikasi pangan	40%	56%	Dinas Ketahanan Pangan
207	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kalteng Berkah	M4	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	37,72%	37,72%	Dinas Ketahanan Pangan
204	Pertanahan					
208	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	M1	Jumlah Inventarisasi Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5 paket	1 paket	Biro Pemerintahan
209	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	M1	Persentase konflik yang terselesaikan	20%	30%	Biro Pemerintahan
205	Lingkungan Hidup					
210	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
211	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
212	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
213	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
214	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Lingkungan Hidup
215	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	0	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
216	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	M7	Persentase sampah dikelola	0	90%	Dinas Lingkungan Hidup
217	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	M7	Persentase penanganan tingkat pencemaran lingkungan (%)	52%	80%	Dinas Lingkungan Hidup
218	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	M7	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem	1	3	Dinas Lingkungan Hidup
219	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	M7	Persentase wilayah rusak direhabilitasi	0	85%	Dinas Lingkungan Hidup
220	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase data Informasi Lingkungan Hidup yang terUpdate	60%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
221	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan		Persentase pengelolaan lingkungan ekowisata laut dan hutan (%)	50%	80%	Dinas Lingkungan Hidup
222	Program Pengendalian kebakaran hutan	M7	Persentase penurunan kawasan kebakaran hutan	90%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
223	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	M3	Persentase ekosistem pasir dan laut direhabilitasi	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
224	Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH	M5	Jumlah Perda	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
225	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	M7	Jumlah dokumen perubahan iklim	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
206	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
226	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	0	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
227	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	0	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
228	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	0	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
229	Program Penataan Administrasi Kependudukan	M5	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dan sejalan kebijakan kependudukan dan catatan sipil	0	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
230	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	M5	Data Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
207	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
231	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
232	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
233	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
234	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	0	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
235	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
236	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
237	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	M4	jumlah LPM berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
238	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	M4	Jumlah kelompok usaha Ekonomi Produktif masyarakat kampung yang aktif	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
239	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	M4	Jumlah Lembaga Kampung berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
240	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	M5	Jumlah kampung yang telah menyampaikan laporan pemerintahan kampung yang baik	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
241	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	M4	Persentase perempuan yang partisipasi dalam pembangunan pedesaan/kampung	0	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
242	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		Cakupan pemanfaatan SDA dan penggunaan teknologi tepat guna	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
243	Program Keluarga Berencana		Persentase peserta KB aktif terhadap PUS	100%	100%	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
244	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Jumlah remaja per kab/kota mengikuti Program Kesehatan Reproduksi Remaja	5 orang	30 orang	Dinas Kesehatan
245	Program Pengembangan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak		Jumlah Pemegang program terlatih	40 orang	110 orang	Dinas Kesehatan
246	Program Keluarga Berencana		Jumlah pasangan usia subur ber-KB	100	700	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
209	Perhubungan					
247	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Perhubungan
248	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Perhubungan
249	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Perhubungan
250	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Perhubungan
251	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Dinas Perhubungan
252	Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi dan workshop		Jumlah sosialisasi terselenggara	0	4 kegiatan	Dinas Perhubungan
253	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	M2	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	11 dokumen	11 dokumen	Dinas Perhubungan
254	Program Peningkatan pelayanan angkutan	M2	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	20 kegiatan	23 kegiatan	Dinas Perhubungan
255	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	M2	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sungai dalam kondisi baik	17 kegiatan	11 kegiatan	Dinas Perhubungan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
256	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	M2	Persentase berkurangnya angka kecelakaan angkutan umum	1 Paket	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	Dinas Perhubungan
257	Program Pengadaan Fasilitas Operasional Kendaraan Bermotor		Tersedianya fasilitas Operasional Kendaraan bermotor	0	1 unit	Dinas Perhubungan
258	Program Peningkatan Kelembagaan dan kualitas aparatur	M5	Jumlah aparatur memenuhi standar kompetensi	3 laporan	3 laporan	Dinas Perhubungan
259	Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan		Jumlah fasilitas keselamatan jalan terpasang	38 lokasi dan 1 kegiatan pemeliharaan	78 lokasi dan 1 pemeliharaan	Dinas Perhubungan
260	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Perhubungan
210	Komunikasi dan Informatika					
261	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
262	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
263	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
264	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
265	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	1 tahun	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
266	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	0	1 Dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
267	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Cakupan layanan komunikasi, informasi dan media massa	24 kegiatan, 100 berita, dan 20 orang terlatih	32 kegiatan, 350 berita dan 45 orang terlatih	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
268	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	M5	Tertaksananya Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1 workshop/sosialisasi	3 workshop/sosialisasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
269	Program kerjasama informasi dan media massa		Jumlah informasi dapat diakses	4 kegiatan	5 kegiatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
270	Program pengembangan pos telekomunikasi dan informatika		jumlah pos telekomunikasi dan informatika yang dikembangkan	3 dokumen	3 dokumen, 5 buah BTS	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
271	Program pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	0	3 paket	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
272	Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)	M5	Cakupan layanan SIMDA	1 kegiatan	5 kegiatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
273	Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dimanfaatkan dengan optimal	1 kegiatan	3 kegiatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
274	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dimanfaatkan dengan optimal	7 kegiatan	10 kegiatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
211	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
275	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
276	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
277	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
278	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
279	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
280	Program penguatan Kelembagaan koperasi	M4	Jumlah lembaga koperasi	3.178 unit	3.478 unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
281	Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	M4	Jumlah lembaga keuangan mikro	267 unit	355 unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
282	Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif	M4	Persentase peningkatan produktivitas usaha kecil menengah	60%	90%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
283	Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM	M4	Nilai Transaksi UMKM yang dipromosikan Produknya	25%	85%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
284	Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM	M4	Persentase Jumlah UMKM	90%	90%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
285	Program Peningkatan Daya Saing UMKM	M4	Persentase jumlah wirausaha	70%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12	Penanaman Modal					
286	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
287	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
288	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
289	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
290	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
291	Program Pameran Promosi Investasi		Jumlah promosi dan kerjasama investasi	5 buah	5 buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
292	Program Capaian Realisasi Investasi	M4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	35	48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
293	Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah	M4	Persentase capaian target pengawasan	0	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
294	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik	M5	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan investasi	7	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
295	Program Pengembangan Iklim Investasi	M4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	505	618	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
296	Program penyediaan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah		jumlah sarana dan prasarana yang disiapkan	2 unit	2 unit	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olahraga					
297	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		Jumlah kegiatan kepemudaan	50 orang	50 orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
298	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
299	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
300	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
301	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
302	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	8 Laporan	Dinas Pemuda dan Olahraga
303	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		Jumlah kegiatan kepemudaan	67 kegiatan	72 kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
304	Program peningkatan peran serta kepemudaan	M5	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	67 buah	72 buah	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
305	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	M4	Persentase pemuda berwirausaha	0	56%	Dinas Pemuda dan Olahraga
306	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	M6	jumlah peserta (pemuda) yang mengikuti sosialisasi pencegahan narkoba	0	450 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
307	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		Jumlah organisasi olahraga	42 buah	43 buah	Dinas Pemuda dan Olahraga
308	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	M6	Jumlah cabang olah raga yang dibina; persentase peningkatan pembinaan olah raga	0	21	Dinas Pemuda dan Olahraga
309	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	M2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	60%	75%	Dinas Pemuda dan Olahraga
310	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	38	39	Dinas Pemuda dan Olahraga
311	Program Pembinaan dan pengembangan Prestasi Olah Raga	M6	Jumlah pemuda yang berprestasi	0	90 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
312	Program Peningkatan Budaya dan Prestasi Olah Raga	M6	Jumlah festival olahraga dan budaya yang terselenggara	0	3 kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
313	Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan		peringkatan penyediaan data dan informasi	1	4	Dinas Pemuda dan Olahraga
214	Statistik					
314	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah		Jumlah dokumen pengembangan data/informasi/statistik daerah	0	30 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
315	Program Statistik Sektoral		jumlah dokumen hasil kompilasi statistik sektoral	0	6 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
316	Program Statistik Dasar		Jumlah dokumen hasil kompilasi statistik dasar	0	4 dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
215	Persandian					
317	Program Pengembangan Persandian Daerah		Tersedianya layanan dan pengembangan persandian daerah	0	3 paket	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
318	Program Analisis Sinyal		jumlah hasil analisis sinyal	0	2 kegiatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
319	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Tertelaksananya pengamanan informasi	0	2 kegiatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
320	Program Akreditasi dan Sertifikasi		Jumlah peserta yang mengikuti akreditasi dan sertifikasi persandian	0	150 orang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
216	Kebudayaan					
321	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
322	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
323	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
324	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
325	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
326	Program Pengembangan Nilai Budaya		Jumlah pegelaran seni dan budaya	5 buah	5 kali	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
327	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	M6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	50 buah	50 buah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
328	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Jumlah pagelaran seni dan budaya	2 buah	2 buah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
329	Program Pengembangan Karakter dan Pekerti Bangsa		Jumlah organisasi pemuda	0	67 buah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
330	Program Peningkatan Seni Budaya	M6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490 buah	500 buah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
217	Perpustakaan					
331	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
332	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
333	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
334	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
335	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	8 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
336	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	M6	Jumlah pengunjung perpustakaan	110400 orang	140.400 orang	Dinas Perpustakaan dan Arsip
337	Program Pengembangan Dokumentasi		Jumlah dokumen perencanaan pengembangan perpustakaan	14 dokumen	14 dokumen	Dinas Perpustakaan dan Arsip
338	Program Koordinasi Pengembangan Kepustakaan		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi kepustakaan	65%	95%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
339	Program peningkatan kapasitas sarana dan fasilitas perpustakaan		Jumlah sarpras perpustakaan dalam kondisi baik	0	30 unit	Dinas Perpustakaan dan Arsip
340	Program peningkatan koleksi perpustakaan		Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)	0	107	Dinas Perpustakaan dan Arsip
341	Program peningkatan SDM pengelola perpustakaan	M5	Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang berkinerja baik	5 orang	10 orang	Dinas Perpustakaan dan Arsip
342	Program monitoring dan evaluasi pengembangan perpustakaan		Persentase pencapaian target	80%	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
343	Program pengembangan data/informasi		Jumlah Data dan Informasi	14 jenis	14 jenis	Dinas Perpustakaan dan Arsip
218	Arsip					
344	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		Persentase dokumen administrasi yang telah diarsipkan dengan baik	65%	90%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
345	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		Prosentase Arsip Statis Hasil Akuisisi yang dikelola dengan Baik	80%	80%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
346	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	60%	85%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	URUSAN PILIHAN					
301	Kelautan dan Perikanan					
347	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
348	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
349	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
350	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
351	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Kelautan dan Perikanan
352	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
353	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	M3	Jumlah hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (Ton/Tahun)	131	131	Dinas Kelautan dan Perikanan
354	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	M3	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	300	50	Dinas Kelautan dan Perikanan
355	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	M3	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha/tahun); Jumlah luas dan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha/tahun); dan Dokumen kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (dokumen)	172	171.679,2,5; dan 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
356	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	M3	Jumlah Pokmaswas yang aktif (kelompok/tahun); dan Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan UU (%)	75	40,85	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
357	Program Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan		Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	70%	87%	Dinas Kelautan dan Perikanan
358	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	M3	Produksi ikan konsumsi (ton/tahun); dan produksi benih (ekor)	31	119.876.05 ; 70.335 ribu	Dinas Kelautan dan Perikanan
359	Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		Persentase capaian program perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan	100%	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
302	Pariwisata					
360	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
361	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	M6	Jumlah kunjungan wisata	80%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
362	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	M6	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	2	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
363	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	M6	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah	80%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
303	Pertanian					
364	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	M4	Nilai Tukar Petani	102	1,075	Dinas Ketahanan Pangan
365	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	M4	Koefisien varian harga/fluktuasi harga beras (%)	5%	5%	Dinas Ketahanan Pangan
366	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM	M5	Persentase jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan /workshop dengan jumlah penyuluh yang ada (%)	20,70%	355%	Dinas Ketahanan Pangan
367	Program Penyelenggaraan Penyuluhan dan Sarana dan Prasarana Penyuluhan		Jumlah pembuatan unit percontohan/demplot penyuluhan pertanian, perikanan dan pertanian (Unit)	40 unit	50 unit	Dinas Ketahanan Pangan
368	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Perkebunan
369	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Perkebunan
370	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Perkebunan
371	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Perkebunan
372	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Perkebunan
373	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Perkebunan
374	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	M4	Nilai tukar petani	102	1,075	Dinas Perkebunan
375	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	M4	Penyuluhan peningkatan produktivitas komoditi perkebunan (orang/tahun)	50 orang/th	100 orang/th	Dinas Perkebunan
376	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	M4	Persentase hasil produksi perkebunan yang dipasarkan (%)	94%	100%	Dinas Perkebunan
377	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		Persentase penerapan teknologi pertanian/perkebunan (%)	80%	100%	Dinas Perkebunan
378	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	M4	Produktivitas hasil pertanian/perkebunan 6 komoditas (kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada dan kopi) (Kg/Ha)	3	3	Dinas Perkebunan
379	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
380	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
381	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
382	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
383	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
384	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
385	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	M4	Nilai Tukar Petani	102	1,075	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
386	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	M4	Jumlah hasil produksi pertanian yang dipasarkan (%)	50%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
387	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		Persentase petani menggunakan teknologi pertanian modern (%)	30%	50%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
388	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	M4	Produktivitas tanaman pangan (Ku/Ha)	3,626	4,002	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
389	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		Persentase ternak yang terkena penyakit (%)	10%	5%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
390	Program peningkatan produksi hasil peternakan	M4	Jumlah Produksi Ternak (ton/tahun)	4	5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
391	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		Persentase produksi ternak yang dipasarkan (%)	50%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
392	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan		Persentase peternak menggunakan teknologi peternakan modern (%)	25%	50%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
393	Program Penanganan Kawasan Lahan Gambut (PLG)	M7	Luas kawasan lahan gambut yang ditangani (Ha)	200 ha	1.000 ha	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
304	Kehutanan					
394	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Kehutanan
395	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Kehutanan
396	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Kehutanan
397	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		Jumlah PNS yang pindah/purna tugas	3 Orang		Dinas Kehutanan
398	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Kehutanan
399	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Kehutanan
400	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Kehutanan
401	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	M7	Persentase pencapaian target produksi hasil hutan (%)	80%	100%	Dinas Kehutanan
402	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	M7	Luas lahan kritis yang direhabilitasi di dalam dan diluar kawasan hutan (Ha)	45.555 ha	45.555 ha	Dinas Kehutanan
403	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	M7	Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan (%)	80 %	100 %	Dinas Kehutanan
404	Program perencanaan dan pengembangan hutan		Luas pemeliharaan hutan industri dan hutan wisata	4 dokumen	4 dokumen	Dinas Kehutanan
405	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan		Jumlah unit KPH dan Tahura di Kalimantan Tengah	4	4	Dinas Kehutanan
305	Energi dan Sumber Daya Mineral					
406	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
407	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
408	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
409	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
410	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
411	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	M2	Jumlah SDM bidang ketenagalistrikan mendapat pembinaan (%)	80%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
412	Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas		Jumlah pengusaha minyak dan gas yang mendapat pembinaan (kabupaten)	2	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
413	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Mgas dan Panas Bumi		Persentase tingkat kualitas dan akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Mgas dan Panas Bumi (%)	93%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
414	Program Pembinaan Dan Pelayanan Perijinan Pertambangan	M5	Meningkatnya pelayanan perijinan pertambangan (%)	97%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
415	Program Bimbingan Teknis Dan Penyiapan Wilayah Pertambangan		Persentase Terlaksananya bimbingan teknis dan wilayah pertambangan (%)	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
416	Program Pengusahaan Listrik Dan Energi	M2	Persentase terwujudnya perusahaan listrik dan energi (%)	80%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
417	Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	M2	Rasio elektrifikasi (%)	72,5%	92,5%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
418	Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi		Persentase meningkatnya informasi di bidang geologi (%)	80%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
419	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium		Persentase terwujudnya Peningkatan Kapasitas Laboratorium (%)	96%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
420	Program Monitoring Dan Evaluasi		Jumlah program yang dimonitoring dan dievaluasi	17	17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
421	Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan		Jumlah GMP yang diterapkan oleh pemegang izin usaha pertambangan	79	554	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
422	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Persentase promosi dan kerjasama investasi (%)	80%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
306	Perdagangan					
423	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
424	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
425	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
426	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
427	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
428	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
429	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	M4	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	1,1%	1,35%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
430	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	M4	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	1	1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
431	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	M4	Persentase pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal/ Penerbitan SIUP (%)	90%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
432	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	M4	Tingkat inflasi yang terkendali (%)	0	3,4%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
307	Perindustrian					
433	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	M4	Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	657 orang	830 orang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
434	Program penumbuhan Industri agro	M4	Persentase pertumbuhan Industri agro (%)	70%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
308	Transmigrasi					
435	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Jumlah Transmigran swakarsa (KK)	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
436	Program Percepatan Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	M1	Jumlah kawasan transmigrasi terbangun	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
437	Program pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
438	Pengembangan Masyarakat dan kawasan transmigrasi	M4	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
439	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	M4	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	0	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
440	Program pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	0	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	PENUNJANG URUSAN PEVERINTAHAN					
4.01	Perencanaan					
441	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
442	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
443	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
444	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
445	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	25 laporan, 1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
446	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	0	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
447	Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	10%	30%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
448	Program Kerjasama Pembangunan		Jumlah kerjasama	1 dokumen	2 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
449	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
450	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah aparatur perencana yang dilatih/diklat teknis/bimtek	200 orang	200 orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
451	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	M5	jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	19 dokumen	19 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
452	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, SDA dan Kerjasama	3 dokumen	3 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
453	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	2 dokumen	2 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
454	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah	7 dokumen	7 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
455	Program Penataan Ruang Wilayah		Efektivitas/peningkatan kinerja BKPRD Prov. Kalteng	2 dokumen	10 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
456	Program Perencanaan Pembangunan Kependudukan dan Tenaga Kerja		Jumlah dokumen perencanaan bidang kependudukan dan tenaga kerja	1 dokumen	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
457	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal		Jumlah dokumen perencanaan daerah tertinggal	2 dokumen	2 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
458	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
459	Program Pengembangan Cluster Ekonomi		Persentase duster yang dikembangkan	1 dokumen	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
460	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	M5	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	12 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
461	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	0	35 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
462	Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	M4	Jumlah kebijakan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang disusun, persentase peningkatan kinerja TKPKD	0	5 dokumen, 20%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
402	Keuangan					
463	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Badan Keuangan Daerah
464	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Badan Keuangan Daerah
465	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Badan Keuangan Daerah
466	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		Jumlah PNS yang pindah/purna tugas	0	7 org	Badan Keuangan Daerah
467	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Badan Keuangan Daerah
468	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100 %, 7 laporan, 46 SKPD	Badan Keuangan Daerah
469	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M5	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	Badan Keuangan Daerah
470	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	M5	Jumlah PNS bagian keuangan mendapat pembinaan	0	42 raperda/Raperbub/300 orang	Badan Keuangan Daerah
471	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan	M5	Jumlah kampung yang telah menyampaikan laporan keuangan pemerintahan kampung yang baik	14 laporan, 14 keputusan	14 laporan, 14 keputusan	Badan Keuangan Daerah
472	Program Intensifikasi Pendapatan Daerah	M8	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	100%	100%	Badan Keuangan Daerah
473	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	M5	Persentase selisih perhitungan nilai aset oleh Bid Aset Badan Keuangan Daerah dengan audit BPK	1 Dokumen	5 dokumen	Badan Keuangan Daerah
474	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah	M5	Jumlah temuan pelanggaran keuangan yang itindaklanjuti	0	1 buah	Badan Keuangan Daerah
475	Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah	M8	Jumlah SDM pengelola keuangan yang berkinerja baik	0	1 dokumen	Badan Keuangan Daerah
476	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	M8	Persentase peningkatan pendapatan daerah		45%	Badan Keuangan Daerah
403	Kepegawaian					
477	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
478	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
479	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
480	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	M5	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
481	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	15 laporan, 50 eksemplar	Badan Kepegawaian Daerah
482	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dimanfaatkan dengan optimal	9.000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	9.000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	Badan Kepegawaian Daerah
483	Program Pendidikan Kedinasan	M5	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasan	20 laporan	20 laporan	Badan Kepegawaian Daerah
484	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
485	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	M5	Persentase aparatur yang mendapat pembinaan	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn))	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn))	Badan Kepegawaian Daerah
486	Program Penguatan Kelembagaan KORPRI		Tingkat Capaian Kinerja	47 kali, 5 dokumen	47 kali, 5 dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
487	Program Pemeliharaan Rutin Atau Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan		Jumlah sarparas arsip yang terpelihara	12 laporan	12 laporan	Badan Kepegawaian Daerah
4.04	Pendidikan dan Pelatihan					
488	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
489	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
490	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
491	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
492	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	25 laporan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
493	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	M5	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	1,197 orang	1,197 orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
494	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur	M5	Jumlah aparatur yang berkinerja baik	1 kali	1 kali	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
495	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dimanfaatkan dengan optimal	1 tahun	1 tahun	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
496	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan		Cakupan informasi dan perpustakaan yang terlayani	1 tahun	1 tahun	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
497	Program Pendidikan Kedinasan	M5	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasan	400 orang	400 orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05	Penelitian dan Pengembangan					
498	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK		Jumlah dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan	4 dokumen	4 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
499	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK		Jumlah IPTEK dimandataakan	4 dokumen, 1 rapat	4 dokumen, 1 rapat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
500	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK		Terlaksananya penguatan dan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Prov. Kalteng	1 dokumen	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4.06	Sekretariat Daerah					
501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
502	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
503	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
504	Program Pembinaan Pendidikan		Jumlah peserta didik mendapat pembinaan	40 OT	40 OT	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
505	Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan		Persentase kepuasan pembina pelayanan keem	350 orang	350 orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
506	Program Pembinaan Kesra dan Kemasyarakatan	M5	Jumlah peserta/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan kesra dan kemasyarakatan, jumlah dokumen hasil pembinaan kesra dan kemasyarakatan	0	650 orang, 355 buku, 1 dok	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
507	Program Pembinaan Mental		Jumlah masyarakat yang terbina	2.100 orang	2.100 orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
508	Program Pembinaan Kemasyarakatan		Jumlah masyarakat mendapat pembinaan	100 damang	100 damang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
509	Program Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak		Jumlah perempuan dan anak mendapat pembinaan kesejahteraan	250 orang	250 orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat
510	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan
511	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan
512	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan
513	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Biro Administrasi Pembangunan
514	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentase peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	90 %	100%	Biro Administrasi Pembangunan
515	Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)		Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan SIMDA	44 orang, 1 kegiatan	44 orang, 1 kegiatan	Biro Administrasi Pembangunan
516	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan
517	Program pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Biro Administrasi Pembangunan
518	Program Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan		Banyaknya dokumen monitoring dan evaluasi Kebijakan Pembangunan	0	1 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan
519	Program Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan		-	0	1 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan
520	Program Pelaksanaan dan Pengendalian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		Persentase pelaksanaan secara elektronik	0	100%	Biro Administrasi Pembangunan
521	Program Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan		Jumlah dokumen pelaporan, analisis, pengkajian	4 dokumen	4 dokumen	Biro Administrasi Pembangunan
522	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
523	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
524	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
525	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
526	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,25 %	16,25 %	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
527	Program Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen hasil pengembangan/pembinaan administrasi perekonomian dan SDA	13 set dokumen laporan	13 set dokumen laporan	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
528	Program Pengendalian Perekonomian Daerah		Hasil laporan evaluasi pemberdayaan perekonomian dan SDA	0	1 dokumen	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
529	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Hukum
530	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Biro Hukum
531	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Biro Hukum
532	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	M5	Jumlah peraturan yang diperdakan	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	Biro Hukum
533	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM		Jumlah pelanggaran hukum dan HAM yang diatasi	4 lap hasil	4 lap hasil	Biro Hukum
534	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum		Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum	10 perkara litigasi, 20 non litigasi	10 perkara litigasi, 20 non litigasi	Biro Hukum
535	Program Perencanaan Hukum		Jumlah produk hukum setiap tahun	1 dok program legislasi daerah	1 dok program legislasi daerah	Biro Hukum
536	Program pembinaan sarana dan prasarana hukum		Jumlah sarpras hukum yang terpelihara	300 katalog, 1.500 data produk, 12 keg, 100 cetak publikasi, 500 buku	300 katalog, 1.500 data produk, 12 keg, 100 cetak publikasi, 500 buku	Biro Hukum

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
537	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Organisasi
538	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Biro Organisasi
539	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Biro Organisasi
540	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	M5	Persentase Jumlah PD yang memenuhi tata laksana pelayanan publik	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	Biro Organisasi
541	Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	M5	Jumlah PNS yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	980 org, 65 dok	980 org, 65 dok	Biro Organisasi
542	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	M5	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	365 orang, 2x rapat	365 orang, 2x rapat	Biro Organisasi
543	Program Pengkajian, Pelayanan Informasi dan Perpustakaan		Cakupan informasi dan perpustakaan yang terlayani	0	85 buku	Biro Organisasi
544	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Pemerintahan
545	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Biro Pemerintahan
546	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Jumlah pemda yang bekerjasama	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	Biro Pemerintahan
547	Program Pemerintahan Umum		Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	Biro Pemerintahan
548	Program Otonomi Daerah		Tersedianya data/informasi	0	100%	Biro Pemerintahan
549	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Jumlah jenis koordinasi dan pembinaan kabupaten/kota ke provinsi	4 dok, 2 laporan, 3 keg	4 dok, 2 laporan, 3 keg	Biro Pemerintahan
550	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatkannya tertib adm Pemerintahan umum dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	Biro Pemerintahan
551	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Jumlah orang yang menggunakan pelayanan dalam bidang kependudukan	200 Orang	200 Orang	Biro Pemerintahan
552	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Pengadaan Barang/Jasa
553	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Biro Pengadaan Barang/Jasa
554	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	3 lap, 20 dok	Biro Pengadaan Barang/Jasa
555	Program pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	0	100%	Biro Pengadaan Barang/Jasa
556	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	M5	Jumlah paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	Biro Pengadaan Barang/Jasa
557	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Protokol dan Komunikasi Publik
558	Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolan		Cakupan penyebaran formasi, Kehumasan dan Keprotokolan	1 paket, 14.315 eks	1 paket, 14.315 eks	Biro Protokol dan Komunikasi Publik
559	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Biro Umum
560	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Biro Umum
561	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Biro Umum
562	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS		Jumlah PNS yang pindah/purna tugas	2 Orang	1 tahun	Biro Umum
563	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Biro Umum

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
564	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	7 dokumen	Biro Umum
565	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 dokumen	1 dokumen	Biro Umum
566	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Termanfaatkan dengan Optimal	1 tahun	1 tahun	Biro Umum
567	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase peningkatan Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	5 dok	5 dok	Biro Umum
568	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		Persentase kepuasan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 tahun	1 tahun	Biro Umum
407	Sekretariat DPRD					
569	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Sekretariat DPRD
570	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Sekretariat DPRD
571	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Sekretariat DPRD
572	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Sekretariat DPRD
573	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Sekretariat DPRD
574	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		Persentase Perda yang Ditetapkan	1 tahun	1 tahun	Sekretariat DPRD
575	Program Peningkatan Pelayanan Rapat-Rapat bagi anggota DPRD		Jumlah rapat Anggota DPRD yang terlayani	0	1 tahun	Sekretariat DPRD
576	Program Kehumasan dan Dokumentasi		Cakupan informasi dan perpustakaan yang terlayani	1 tahun	1 tahun	Sekretariat DPRD
577	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat DPRD
408	Inspektorat					
578	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Inspektorat
579	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Inspektorat
580	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Inspektorat
581	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Inspektorat
582	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100%	Inspektorat
583	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	100%	Inspektorat
584	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	M5	Jumlah Temuan LHP	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil revidi RKA SKPD	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil revidi RKA SKPD	Inspektorat
585	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	M5	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang berkinerja baik	1 paket	1 paket	Inspektorat
586	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	M5	ASN Inspektorat Provinsi Kalteng	1 paket	1 paket	Inspektorat
587	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	M5	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil revidi keuangan (LHR)	0	122 LHP, 36 LHE, 38 LHR	Inspektorat
588	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintah Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	M5	Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap LKPPD, laporan hasil monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	0	48 LHE	Inspektorat
589	Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi	M5	Jumlah laporan kasus dan laporan kerugian negara	0	20 lap kasus, 75 lap kerugian negara	Inspektorat
409	Penghubung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Jakarta					
590	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Badan Penghubung

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
591	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	100%	Badan Penghubung
592	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Badan Penghubung
593	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Badan Penghubung
594	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		Persentase kepuasan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	Badan Penghubung
595	Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolan		Persentase penyebaran formasi, Kehumasan dan Keprotokolan (%)	100%	100%	Badan Penghubung



KETERANGAN:

M1 = Misi 1 Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi

M2 = Misi 2 Pengelolaan Infrastruktur

M3 = Misi 3 Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai

M4 = Misi 4 Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan

M5 = Misi 5 Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah

M6 = Misi 6 Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata

M7 = Misi 7 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

M8 = Misi 8 Pengelolaan Pendapatan Daerah



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berisikan program-program prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi pembangunan jangka menengah daerah dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan pelaksanaan fungsi pelayanan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (provinsi). Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan, dimana program-program prioritas disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis-PD, termasuk penjabaran kegiatan Perangkat Daerah beserta kebutuhan pendanaannya.

Program Pembangunan Daerah merupakan instrumen penjabaran langkah dari arah kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja dan atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan, dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan, dan dalam pelaksanaannya pagu indikatif tersebut disusun sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, yang dituangkan dalam RKPD, KUA-PPAS, dan APBD tahun 2016-2021.



8.1. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi

Sebagaimana diuraikan di atas, program-program prioritas terdiri dari program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada bagian ini disajikan program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dimana terdiri dari 8 (delapan) misi sebagaimana diuraikan pada Bab V. Untuk lebih lengkapnya, program-program prioritas dimaksud beserta kerangka pendanaan disajikan pada tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi dan Misi.

Tabel 81
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Untuk Mencapai Visi dan Msi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Msi 1																	
Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi																	
1	1.03-29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	7 kawasan, 4 unit, 2 kegiatan	6 kawasan, 2 unit, 1 kegiatan	9,500,000,000	5 kawasan, 2 unit, 5 kegiatan	11,959,300,000	5 kawasan, 1 unit, 7 kegiatan	12,090,490,000	5 kawasan, 11 kegiatan	12,800,000,000	5 kawasan, 8 kegiatan	14,032,000,000	5 kawasan, 8 kegiatan	60,381,790,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03-59	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang	22%	25 %	5,788,000,000	32 %	12,068,030,000	40 %	13,081,322,000	42 %	13,285,448,000	45 %	13,985,727,000	45 %	58,208,527,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.03-60	Program Pemanfaatan Ruang	*Konsistensi Pemanfaatan Ruang dengan meningkatnya SDM dalam Penataan Ruang	100 Orang	100 Orang	170,000,000	100 Orang	597,800,000	100 Orang	657,400,000	100 Orang	697,200,000	100 Orang	707,900,000	500 Orang	2,830,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1.03-61	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Perda RTRWP/K	6	8	6,946,040,000	10	7,580,000,000	14	7,680,000,000	14	7,700,000,000	14	7,800,000,000	14	37,706,040,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	2.04-16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Inventarisasi Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5 paket	1 paket	2,500,000	1 paket	198,408,000	1 paket	278,661,000	1 paket	390,112,000	1 paket	805,179,000	1 paket	1,674,860,000	Biro Pemerintahan
6	2.04-17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik yang terselesaikan	20%	20%	142,300,000	20%	230,000,000	20%	261,000,000	30%	273,000,000	30%	314,000,000	30%	1,220,300,000	Biro Pemerintahan
7	3.08-18	Program Percepatan Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah kawasan transmigrasi terbangun	100%	0	0	100%	1,301,987,000	100%	1,486,800,000	100%	1,581,331,000	100%	2,988,116,000	100%	7,358,234,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PAGU MSI 1						22,548,840,000		33,935,525,000		35,535,673,000		36,727,091,000		40,632,922,000		169,380,051,000	

Tabel 81
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Untuk Mencapai Visi dan Msi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Msi 2																	
Pengelolaan Infrastruktur																	
1	1.03-16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun (m)	2,100	1,100	4,000,000,000	750	8,978,900,000	1,000	9,067,220,000	1,000	9,100,000,000	1,500	10,532,000,000	1,500	41,678,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
2	1.03-27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	panjang pipa air minum dan air limbah yang dibangun/dikembangkan (km)	16 km	5 km	2,500,000,000	7 km	3,500,000,000	7 km	3,980,000,000	7 km	4,333,711,789	9 km	4,500,000,000	9 km	18,813,711,789	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
3	1.03-34	Program penggantian dan pemeliharaan jembatan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah	Parjang jembatan yang dipelihara/diganti (m)	360 m	450 m	45,188,400,000	450 m	48,916,426,000	450 m	49,111,411,000	450 m	50,000,000,000	450 m	51,362,856,000	450 m	244,579,093,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
4	1.03-43	Program peningkatan/pembangunan jalan Provinsi Kalimantan Tengah	Parjang jalan yang ditingkatkan/dibangun (km)	114 km	114 km	229,472,600,000	114 km	248,914,112,000	114 km	249,000,000,000	114 km	249,500,000,000	114 km	252,091,390,542	570 km	1,228,978,102,542	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
5	1.03-47	Program rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	panjang jalan yang direhab/pemeliharaan rutin (km); panjang jembatan yang direhab/pelihara (m)	20 km	95 km	28,824,000,000	95 km	24,946,000,000	95 km	25,000,000,000	95 km	25,500,000,000	95 km	27,062,600,000	475 km	131,332,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
6	1.03-49	Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial	1. Tersedianya rumah ibadah yang memadai; 2. tersedia fasilitas sosial yang memadai"	3 Kawasan, 6 unit	1 Kawasan, 4 unit	111,384,000,000	2 Kawasan, 7 unit	118,953,175,000	2 Kawasan, 5 unit	119,000,000,000	1 Kawasan, 5 unit	119,800,000,000	1 Kawasan, 13 unit	121,000,000,000	1 Kawasan, 13 unit	590,137,175,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
7	1.04-15	Program Pengembangan Perumahan	Parjang drainase yang dibangun	42.000 m	72.000 m	25,773,430,000	83.000 m	28,675,000,000	85.000 m	29,033,500,000	98.000 m	29,228,800,000	98.000 m	31,970,000,000	98.000 m	144,680,730,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	1.04-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Tersedianya sarana prasarana jalan, jembatan, untuk masyarakat desa ; Tersedianya saluran/gorong-gorong untuk masyarakat desa"	33.000 m	46.000 m	29,464,260,000	79.000 m	28,601,300,000	85.000 m	29,000,750,000	85.000 m	29,432,076,000	85.000 m	30,609,014,000	85.000 m	147,107,400,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	1.04-56	Program Sharing Investasi PemProv KalTeng dalam rangka Memorandum Program Sanitasi (MPS)	Tersedianya dana pendamping program sanitasi	0	0	0	6 unit	24,993,720,000	19 Unit, 12.640 m	25,000,737,000	10 unit, 26.700 m	26,010,000,000	9 unit, 25.380 m	27,683,866,000	9 unit, 25.380 m	103,688,323,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	1.04-57	Program Peningkatan dan Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan	Tersedianya jalan lingkungan, drainase, perancangan persampahan dan instalasi pengelolaan limbah komunal pada kawasan kumuh kota; Tersedianya sistem air bersih bagi warga kota"	0	0	0	24 kegiatan	38,169,157,000	24 kegiatan	39,513,465,322	23 kegiatan	41,000,000,000	21 kegiatan	42,000,000,000	21 kegiatan	160,682,622,322	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	2.09-15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	11 dokumen	11.00 dokumen	1,000,000,000	10 dokumen	6,571,932,000	10 dokumen	8,229,059,000	10 dokumen	8,730,366,000	10 dokumen	16,020,802,000	11 dokumen	40,552,159,000	Dinas Perhubungan
12	2.09-17	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	20 kegiatan	23 kegiatan	4,065,000,000	23 kegiatan	7,389,869,000	23 kegiatan	8,879,240,000	23 kegiatan	9,086,900,000	23 kegiatan	17,019,547,000	23 kegiatan	46,440,556,000	Dinas Perhubungan
13	2.09-18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sungai dalam kondisi baik	17 kegiatan	29 Kegiatan	1,400,000,000	27 kegiatan	5,799,406,934	17 kegiatan	7,103,580,000	15 kegiatan	7,544,117,000	11 kegiatan	15,614,398,000	11 kegiatan	37,461,501,934	Dinas Perhubungan
14	2.09-19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase berkurangnya angka kecelakaan angkutan umum	1 Paket	80 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	50,000,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	956,050,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	1,153,565,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	1,352,050,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	3,145,450,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	6,657,115,000	Dinas Perhubungan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
15	2.13-21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	60%	60%	3,650,000,000	60%	8,801,000,000	60%	9,910,000,000	75%	10,024,000,000	75%	11,142,000,000	75%	43,527,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
16	3.05-17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah SDM bidang ketenagalistrikan mendapat pembinaan (%)	80%	100.00 %	60,000,000	90%	258,411,000	95%	497,270,000	98%	516,173,000	100%	1,354,985,000	100%	2,686,839,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
17	3.05-22	Program Pengusahaan Listrik Dan Energi	Persentase terwujudnya pengusahaan listrik dan energi (%)	80%	100.00 %	100,000,000	90%	106,000,000	95%	109,000,000	98%	111,000,000	100%	141,000,000	100%	567,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
18	3.05-23	Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	Rasio elektrifikasi (%)	72,5%	100.00 %	47,311,000,000	79,5%	12,780,864,000	83,5%	13,101,110,000	87,5%	15,816,933,000	92,5%	32,283,632,000	92,5%	121,293,539,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
PAGU MSI 2								534,242,690,000		617,311,322,934		626,689,907,322		637,086,126,789		695,533,540,542		3,110,863,587,587

Tabel 81
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Untuk Mencapai Visi dan Msi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Msi 3																	
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai																	
1	1.03-24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	luas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dikembangkan (ha)	9.122	52,225	38,116,190,000	53,500	39,960,706,000	56,300	41,000,000,000	57,750	41,500,000,000	62,500	43,032,778,000	63	203,609,674,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03-25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Luasan yang dikelola (ha)	6	3/1	350,000,000	4/1	1,589,000,000	5/1	1,660,000,000	3/2	1,700,000,000	5/2	1,864,000,000	5/2	7,163,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.03-26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	luasan yang dikembangkan/dikelola/konversi (ha)	1	1	370,000,000	1	728,500,000	1	895,505,000	1	900,345,000	2	905,459,000	2	3,799,809,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1.03-28	Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Luasan bangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun (ha)	1080 ha	5700 ha	7,850,000,000	6174 ha	9,455,015,000	6500 ha	9,720,978,000	7150 ha	9,810,000,000	8690 ha	10,143,028,000	8690 ha	46,979,021,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1.04-59	Program Pengembangan Wilayah Pesisir	Tersedianya air minum untuk masyarakat pesisir	0	0	0	5 kegiatan	2,611,200,000	7 kegiatan	3,792,070,000	11 kegiatan	4,000,000,000	7 kegiatan	5,313,763,000	7 kegiatan	15,717,033,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	2.05-23	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Persentase ekosistem pasir dan laut direhabilitasi	100%	0	100%	100%	147,900,000	100%	172,000,000	100%	186,500,000	100%	202,500,000	100%	708,900,000	Dinas Lingkungan Hidup
7	3.01-21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Jumlah hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (Ton/Tahun)	131	131	13,644,530,000	131	14,300,937,000	131	15,212,008,000	131	15,968,186,000	131	24,542,416,000	131	83,668,077,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	3.01-25	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	300	48	368,000,000	48	896,058,000	49	913,244,000	49	1,256,166,000	50	3,311,785,000	50	6,745,253,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	3.01-26	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha/tahun); Jumlah luas dan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha/tahun); dan Dokumen kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (dokumen)	172	171.67 9,2,5; dan 1	790,000,000	171.67 9,2,5; dan 1	927,446,000	171.67 9,2,5; dan 1	1,116,531,000	171.67 9,2,5; dan 1	1,460,761,000	171.67 9,2,5; dan 1	3,999,314,000	171.67 9,2,5; dan 1	8,294,052,000	Diras Kelautan dan Perikanan
10	3.01-27	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas yang aktif (kelompok/tahun); dan Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan UU (%)	75	22;70	280,000,000	25;75	653,446,000	30;80	758,656,000	40;85	965,634,000	40;85	1,917,715,000	40;85	4,575,451,000	Diras Kelautan dan Perikanan
11	3.01-29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi ikan konsumsi (ton/tahun); dan produksi benih (ekor)	31	85.173. 26;59,5 00	5,245,195,000	97.276. 39; 61.343 ribu	3,267,111,000	110.84 2.40; 64.410 ribu	4,163,506,000	116.38 4.52; 67630 ribu	5,000,708,000	119.87 6.05; 70.335 ribu	1,371,791,000	119.87 6.05; 70.335 ribu	19,048,311,000	Diras Kelautan dan Perikanan
PAGU MSI 3						67,013,915,000		74,537,319,000		79,404,498,000		82,748,300,000		96,604,549,000		400,308,581,000	

Tabel 81
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Untuk Mencapai Visi dan Msi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Msi 4																	
Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan																	
1	1.02-24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan	70%	75%	567,765,000	80%	996,886,000	85%	1,218,122,000	90%	1,515,895,000	95%	4,288,355,000	95%	8,587,023,000	Dinas Kesehatan
2	1.06-15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	100%	100%	200,000,000	100%	2,178,500,000	100%	2,256,683,000	100%	2,456,416,000	100%	4,303,864,000	100%	11,395,463,000	Dinas Sosial
3	1.06-16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Terlaksananya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	2,645,725,000	100%	5,560,313,000	100%	5,986,492,000	100%	6,373,476,000	100%	9,999,517,000	100%	30,565,523,000	Dinas Sosial
4	1.06-17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase terlaksananya Program pembinaan anak terlantar	100%	100%	50,000,000	100%	107,900,000	100%	112,100,000	100%	116,500,000	100%	121,000,000	100%	507,500,000	Dinas Sosial
5	1.06-19	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Persentase terlaksananya Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	100%	100%	1,200,000,000	100%	3,165,636,000	100%	3,319,682,000	100%	3,753,393,000	100%	6,292,728,000	100%	17,731,439,000	Dinas Sosial
6	1.06-20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase terlaksananya Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100%	100%	494,666,000	100%	821,878,000	100%	917,171,000	100%	1,005,392,000	100%	3,200,392,000	100%	6,439,499,000	Dinas Sosial
7	1.06-37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	699,837,000	100%	2,443,728,000	100%	2,536,304,000	100%	2,751,537,000	100%	5,116,520,000	100%	13,547,926,000	Dinas Sosial
8	2.01-15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	100%	100%	854,502,000	100%	3,062,568,000	100%	3,565,389,000	100%	3,996,194,000	100%	7,250,883,000	100%	18,729,536,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	2.01-16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja	100%	100%	1,130,000,000	100%	3,545,474,000	100%	3,929,329,000	100%	4,273,650,000	100%	7,064,980,000	100%	19,943,433,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	2.03-15	Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	80%	80%	265,000,000	85%	670,000,000	87%	748,600,000	89%	966,100,000	90%	2,225,300,000	90%	4,875,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
11	2.03-18	Program pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	229		95,000,000	273	195,000,000	294	210,000,000	316	226,900,000	338	500,700,000	338	1,227,600,000	Dinas Ketahanan Pangan
12	2.03-20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kalteng Berkah	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	37,72%	37,72%	275,000,000	37,72%	289,000,000	37,72%	301,000,000	37,72%	356,000,000	37,72%	450,000,000	37,72%	1,671,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
13	2.07-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	jumlah LPM berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100%	100%	2,690,705,000	100%	3,054,000,000	100%	3,255,000,000	100%	3,363,800,000	100%	3,466,000,000	100%	15,829,505,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	2.07-16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah kelompok usaha Ekonomi Produktif masyarakat kampung yang aktif	100%	100%	425,000,000	100%	988,400,000	100%	2,173,700,000	100%	2,201,000,000	100%	7,371,300,000	100%	13,159,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	2.07-17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Lembaga Kampung berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa	100%	100%	1,009,880,000	100%	1,616,441,000	100%	2,884,512,000	100%	3,640,287,000	100%	9,069,247,000	100%	18,220,367,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	2.07-19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase perempuan yang partisipasi dalam pembangunan pedesaan/kampung	0	0	0	100%	218,100,000	100%	238,300,000	100%	299,300,000	100%	381,100,000	100%	1,136,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	2.11-19	Program penguatan Kelembagaan koperasi	Jumlah lembaga koperasi	3.178 unit	3.100 unit	715,218,000	3.278 unit	1,395,000,000	3.343 unit	1,468,000,000	3.410 unit	1,502,000,000	3.478 unit	1,616,000,000	3.478 unit	6,696,218,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	2.11-20	Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	Jumlah lembaga keuangan mikro	267 unit		403,527,000	302 unit	978,786,000	315 unit	1,983,938,000	327 unit	2,000,000,000	355 unit	4,311,344,000	355 unit	9,677,595,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	2.11-21	Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif	Persentase peningkatan produktivitas usaha kecil menengah	60%	70%	585,000,000	75%	604,544,000	80%	704,333,000	85%	967,785,000	90%	1,747,925,000	90%	4,609,587,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	2.11-22	Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM	Nilai Transaksi UMKM yang dipromosikan Produknya	25%	15%	190,000,000	40%	806,395,000	50%	929,150,000	75%	1,294,454,000	85%	2,520,167,000	85%	5,740,166,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	2.11-23	Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM	Persentase Jumlah UMKM	90%	60%	2,337,500,000	60%	2,243,410,000	70%	3,370,176,000	80%	4,234,825,000	90%	11,068,298,000	90%	23,254,209,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	2.11-24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM	Persentase jumlah wirausaha	70%	65%	551,396,000	80%	1,250,744,000	100%	1,839,665,000	100%	2,002,851,000	100%	5,768,265,000	100%	11,412,921,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23	2.12-16	Program Capaian Realisasi Investasi	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	35	38	190,000,000	40	414,369,000	43	622,389,000	45	661,733,000	48	1,209,924,000	48	3,098,415,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	2.12-17	Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Persentase capaian target pengawasan	0	90%	530,000,000	90%	674,900,000	95%	993,500,000	100%	1,212,700,000	100%	2,482,700,000	100%	5,893,800,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	2.12-19	Program Pengembangan Iklim Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	505	0	0	550	610,142,000	573	837,466,000	595	998,196,000	618	1,961,641,000	618	4,407,445,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	2.13-17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda berwirausaha	0	52%	200,000,000	53%	378,700,000	54%	416,600,000	55%	425,200,000	56%	514,500,000	56%	1,935,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
27	3.03-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	102		100,000,000	1,035	1,715,320,000	1,035	2,241,436,000	106	3,558,902,000	1,075	7,445,295,000	1,075	15,060,953,000	Dinas Ketahanan Pangan
28	3.03-16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Koefisien varian harga/fluktuasi harga beras (%)	5%	5%	460,000,000	5%	480,000,000	5%	490,000,000	5%	513,300,000	5%	620,400,000	5%	2,563,700,000	Dinas Ketahanan Pangan
29	3.03-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani	102	10,275	1,703,980,900	1,035	15,996,530,000	1,035	16,939,435,000	106	17,372,025,000	1,075	26,731,032,000	1,075	78,743,002,900	Dinas Perkebunan
30	3.03-16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Penyuluhan peningkatan produktivitas komoditi perkebunan (orang/tahun)	50 orang/th		0	50 orang/th	43,800,000	75 orang/th	56,400,000	75 orang/th	69,600,000	100 orang/th	83,200,000	100 orang/th	253,000,000	Dinas Perkebunan
31	3.03-17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase hasil produksi perkebunan yang dipasarkan (%)	94%	96%	2,100,984,000	98%	3,920,900,000	100%	4,811,400,000	100%	5,505,500,000	100%	11,603,200,000	100%	27,941,984,000	Dinas Perkebunan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	3.03-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas hasil pertanian/perkebunan 6 komoditas (kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam lada dan kopi) (Kg/Ha)	3	3	9,407,633,100	3	15,904,559,000	3	16,590,485,000	3	16,793,803,000	3	22,630,126,000	3	81,326,606,100	Dinas Perkebunan
33	3.03-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	102	10,275	5,404,065,000	1,035	22,468,017,000	1,035	23,133,029,000	106	24,000,950,000	1,075	25,772,540,000	1,075	100,778,601,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
34	3.03-17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah hasil produksi pertanian yang dipasarkan (%)	50%	60%	1,175,000,000	70%	1,679,000,000	80%	1,788,000,000	90%	1,900,000,000	100%	2,117,000,000	100%	8,659,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
35	3.03-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas tanaman pangan (Ku/Ha)	3,626	3,734	8,605,000,000	3,828	17,271,493,000	3,904	18,552,254,000	396	19,000,000,000	4,002	23,662,423,000	4,002	87,091,170,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
36	3.03-22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Produksi Ternak (ton/tahun)	4	4	5,423,855,000	4	7,854,749,000	5	8,116,976,000	5	8,200,498,000	5	11,949,751,000	5	41,545,829,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
37	3.06-15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	1,1%	1,15%	2,202,280,000	1,20%	6,606,810,000	1,25%	7,352,973,000	1,30%	8,992,113,000	1,35%	16,087,640,000	1,35%	41,241,816,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38	3.06-17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	1	1	1,650,000,000	1	3,538,900,000	1	4,910,600,000	1	5,985,200,000	1	8,062,600,000	1	24,147,300,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
39	3.06-18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pembinaan kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP (%)	90%	90%	550,000,000	95%	2,968,300,000	100%	3,278,273,000	100%	3,573,908,000	100%	9,175,635,000	100%	19,546,116,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
40	3.06-21	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Tingkat inflasi yang terkendali (%)	0	0	0	4,0%	400,000,000	3,8%	580,000,000	3,6%	600,000,000	3,4%	1,200,000,000	3,4%	2,780,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
41	3.07-16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	657 orang	690 orang	2,042,520,000	725 orang	3,796,288,000	760 orang	4,132,862,000	798 orang	4,350,276,000	830 orang	9,564,516,000	830 orang	23,886,462,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	3.07-20	Program penumbuhan Industri agro	Persentase pertumbuhan Industri agro (%)	70%	75%	460,000,000	80%	1,478,094,000	85%	2,239,420,000	90%	2,556,755,000	100%	7,021,861,000	100%	13,756,130,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
43	3.08-21	Pengembangan Masyarakat dan kawasan transmigrasi	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	100%	12.00 Bulan	1,014,177,000	100%	1,295,904,000	100%	1,324,324,000	100%	1,383,073,000	100%	1,432,162,000	100%	6,449,640,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
44	3.08-22	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	0	100%	798,600,000	100%	1,200,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,500,000,000	100%	6,098,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45	4.01-40	Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kebijakan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang disusun, persentase peningkatan kinerja TKPKD	0	1 dokumen 10%	547,290,000	1 dokumen 10%	961,400,000	1 dokumen 10%	970,900,000	1 dokumen 10%	1,130,500,000	1 dokumen 10%	1,370,640,000	5 dokumen 20%	4,980,730,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
PAGU MSI 4						61,951,106,000		147,850,878,000		165,576,368,000		179,431,987,000		292,332,671,000		847,143,010,000	

Tabel 81
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Untuk Mencapai Visi dan Msi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Msi 5																	
Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah																	
1	1.02-39	Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan	30 orang	30 orang	3,309,877,550	35 orang	4,987,967,000	45 orang	5,208,470,000	60 orang	6,051,850,000	70 orang	14,124,170,000	70 orang	33,682,334,550	Dinas Kesehatan
2	1.05-15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat kejadian konflik	100%	100%	367,819,300	100%	520,000,000	100%	585,300,000	100%	603,000,000	100%	700,000,000	100%	2,776,119,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	1.05-16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kantrantibmas	100%	100%	414,832,550	100%	432,000,000	100%	466,800,000	100%	480,900,000	100%	565,900,000	100%	2,360,432,550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	1.05-17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat peningkatan hari besar negara dan kebudayaan	100%	100%	715,000,000	100%	668,000,000	100%	781,000,000	100%	810,010,000	100%	930,000,000	100%	3,904,010,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	1.05-21	Program pendidikan politik masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Kalteng	100%	100%	1,657,656,400	100%	2,557,751,000	100%	2,964,594,000	100%	3,310,012,000	100%	5,737,948,000	100%	16,227,961,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	1.05-23	Program peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Jumlah kejadian konflik kerusuhan	100%	100%	750,000,000	100%	1,190,000,000	100%	1,232,800,000	100%	1,377,000,000	100%	1,422,900,000	100%	5,972,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1.05-15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat kejadian konflik	50%	40%	132,309,250	40%	210,800,000	30%	217,500,000	30%	225,800,000	30%	230,700,000	30%	1,017,109,250	Satuan Polisi Pamong Praja
8	1.05-16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kantrantibmas	100%	75%	539,369,800	100%	655,300,000	100%	661,100,000	100%	668,900,000	100%	676,000,000	100%	3,200,669,800	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	2.02-16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah PD Provinsi terdampingi dalam penyusunan anggaran responsif gender	30	30	75,000,000	30	180,300,000	30	199,100,000	30	318,500,000	30	538,800,000	30	1,311,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	2.02-17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah orang dalam satgas PKDRT	100 orang	100 orang	1,100,000,000	150 orang	1,138,800,000	125 orang	1,214,400,000	150 orang	1,202,900,000	250 orang	1,374,600,000	250 orang	6,030,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	2.02-18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Dokumen hasil Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	4 dokumen	4 dokumen	300,000,000	8 dokumen	579,500,000	10 dokumen	621,600,000	12 dokumen	765,300,000	14 dokumen	810,800,000	14 dokumen	3,077,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	2.02-20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Dokumen Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	0	0	0	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	87,000,000	1 dokumen	98,000,000	1 dokumen	100,200,000	1 dokumen	360,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	2.05-25	Program Penuaan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH	Jumlah Perda	1	1	250,000,000	1	425,700,000	1	434,700,000	1	454,400,000	1	474,800,000	1	2,039,600,000	Dinas Lingkungan Hidup

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	2.06-15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dan sejalan kebijakan kependudukan dan catatan sipil	0	100%	1,060,000,000	100%	1,080,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,200,000,000	100%	134,000,000	100%	4,574,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15	2.06-16	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	100%	552,104,000	100%	589,000,000	100%	690,000,000	100%	743,000,000	100%	890,000,000	100%	3,464,104,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16	2.07-18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah kampung yang telah menyampaikan laporan pemerintahan kampung yang baik	100%	100%	562,550,000	100%	1,094,900,000	100%	1,111,700,000	100%	1,233,000,000	100%	1,659,000,000	100%	5,661,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	2.09-25	Program Peningkatan Kelembagaan dan kualitas aparatur	Jumlah aparatur memenuhi standar kompetensi	3 laporan	3 laporan	60,000,000	3 laporan	177,800,000	3 laporan	192,500,000	3 laporan	207,800,000	3 laporan	323,700,000	3 laporan	961,800,000	Dinas Perhubungan
18	2.10-17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1 workshop/sosialisasi	1 workshop/sosialisasi	60,000,000	2workshop/sosialisasi	238,550,000	3workshop/sosialisasi	423,810,000	3workshop/sosialisasi	612,600,000	3workshop/sosialisasi	1,388,300,000	3workshop/sosialisasi	2,723,260,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
19	2.10-21	Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)	Cakupan layanan SIMDA	1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	2 kegiatan	271,291,000	3 kegiatan	371,540,000	4 kegiatan	429,841,000	5 kegiatan	939,656,000	5 kegiatan	2,112,328,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20	2.12-18	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan investasi	7	7	395,000,000	7	1,492,420,000	7	2,832,048,000	7	3,058,303,000	7	7,672,505,000	7	15,450,276,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	2.13-16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	67 buah	68 buah	1,125,000,000	69 buah	3,694,000,000	70 buah	3,772,100,000	71 buah	3,864,900,000	72 buah	4,873,000,000	72 buah	17,329,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	2.17-20	Program peningkatan SDM pengelola perpustakaan	Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang berkinerja baik	5 orang	6 orang	120,000,000	7 orang	135,600,000	8 orang	151,000,000	9 orang	187,000,000	10 orang	223,700,000	10 orang	817,300,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
23	3.03-28	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM	Persentase jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan /workshop dengan jumlah penyuluh yang ada (%)	20,70%	0	0	32%	358,000,000	34%	394,100,000	34%	400,000,000	35%	480,597,000	355%	1,632,697,000	Dinas Ketahanan Pangan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	3.05-20	Program Pembinaan Dan Pelayanan Perijinan Pertambangan	Meningkatnya pelayanan perijinan pertambangan (%)	97%	100.00 %	185,000,000	98%	469,485,000	98%	619,101,000	99%	705,963,000	100%	1,972,351,000	100%	3,951,900,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25	4.01-21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	19 dokumen	19 dokumen	2,935,000,000	19 dokumen	4,230,000,000	19 dokumen	4,684,000,000	19 dokumen	4,987,600,000	19 dokumen	9,000,000,000	19 dokumen	25,836,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26	4.01-37	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	12 dokumen	1,225,000,000	12 dokumen	1,500,000,000	12 dokumen	1,900,000,000	12 dokumen	2,300,000,000	12 dokumen	3,500,000,000	12 dokumen	10,425,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
27	4.02-17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	9,594,500,000	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	7,670,000,000	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	7,740,000,000	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	7,802,000,000	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	8,100,000,000	200 buku, 1 peraturan, 46 SKPD	40,906,500,000	Badan Keuangan Daerah
28	4.02-18	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah PNS bagian keuangan mendapat pembinaan	0	42 raperda/Raperbub/300 orang	1,200,000,000	42 raperda/Raperbub/300 orang	1,380,000,000	42 raperda/Raperbub/300 orang	1,414,000,000	42 raperda/Raperbub/300 orang	1,450,500,000	42 raperda/Raperbub/300 orang	1,763,080,000	42 raperda/Raperbub/300 orang	7,207,580,000	Badan Keuangan Daerah
29	4.02-19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Jumlah kampung yang telah menyampaikan laporan keuangan pemerintahan kampung yang baik	14 laporan, 14 keputusan	0	0	14 laporan, 14 keputusan	350,000,000	14 laporan, 14 keputusan	360,000,000	14 laporan, 14 keputusan	391,300,000	14 laporan, 14 keputusan	432,700,000	14 laporan, 14 keputusan	1,534,000,000	Badan Keuangan Daerah
30	4.02-52	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase selisih perhitungan nilai aset oleh Bid Asset Badan Keuangan Daerah dengan audit BPK	1 Dokumen	1 Dokumen	2,550,000,000	1 Dokumen	3,330,000,000	1 Dokumen	3,450,000,000	1 Dokumen	3,505,000,000	1 Dokumen	4,050,000,000	5 dokumen	16,885,000,000	Badan Keuangan Daerah
31	4.02-59	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah temuan pelanggaran keuda yang itindaklanjuti	0	0	0	1 buah	210,000,000	1 buah	217,700,000	1 buah	240,600,000	1 buah	334,400,000	1 buah	1,002,700,000	Badan Keuangan Daerah
32	4.03-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	128,943,857	100%	97,000,000	100%	98,800,000	100%	99,900,000	100%	100,900,000	100%	525,543,857	Badan Kepegawaian Daerah

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	4.03-28	Program Pendidikan Kedinasaan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasaan	20 laporan	20 laporan	611,779,950	20 laporan	245,756,000	20 laporan	364,480,000	20 laporan	536,460,000	20 laporan	818,309,000	20 laporan	2,576,784,950	Badan Kepegawaian Daerah
34	4.03-63	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang mendapat pembinaan	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn)	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn)	3,294,481,880	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn)	3,400,000,000	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn)	3,513,300,000	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn)	3,612,600,000	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn)	4,519,800,000	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancara (10,20,30 thn)	18,340,181,880	Badan Kepegawaian Daerah
35	4.04-15	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	1,197 orang	1,197 orang	5,351,360,000	1,197 orang	4,745,000,000	1,197 orang	4,812,700,000	1,197 orang	5,426,600,000	1,197 orang	6,156,700,000	1,197 orang	26,492,360,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	4.04-16	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang berkinerja baik	1 kali	1 kali	250,000,000	1 kali	1,815,004,000	1 kali	1,923,007,000	1 kali	2,457,714,000	1 kali	6,976,080,000	1 kali	13,421,805,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	4.04-19	Program Pendidikan Kedinasaan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasaan	400 orang	400 orang	9,792,833,376	400 orang	11,769,648,000	400 orang	12,850,889,000	400 orang	13,247,133,000	400 orang	21,926,457,000	400 orang	69,586,960,376	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38	4.06-33	Program Pembinaan Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan kesra dan kemasyarakatan, jumlah dokumen hasil pembinaan kesra dan kemasyarakatan	0	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,034,821,170	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,520,000,000	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,560,000,000	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,600,000,000	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,700,000,000	650 orang, 355 buku, 1 dok	7,414,821,170	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
39	4.06-18	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan yang diperdakan	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1.00 Paket (1060 peraturan daerah dan surat keputusan)	1,270,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,286,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,303,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,444,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,527,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	6,830,000,000	Biro Hukum

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	4.06-24	Program Pena taa n Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Jumlah PD yang memenuhi ta ta laksana pelayanan publik	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1.00 Paket (Biro Organisasi)	1,099,424,681	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1,371,000,000	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1,387,000,000	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1,390,000,000	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1,510,000,000	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	6,757,424,681	Biro Organisasi
41	4.06-25	Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	Jumlah PNS yan Wajib Lapo r Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	980 org, 65 dok	1.00 Paket (SKPD)	587,764,650	980 org, 65 dok	973,037,000	980 org, 65 dok	995,656,000	980 org, 65 dok	1,100,111,000	980 org, 65 dok	2,810,321,000	980 org, 65 dok	6,466,889,650	Biro Organisasi
42	4.06-26	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	365 orang, 2x rapat	1.00 Paket (Biro Organisasi)	358,076,663	365 orang, 2x rapat	784,925,000	365 orang, 2x rapat	883,298,000	365 orang, 2x rapat	993,108,000	365 orang, 2x rapat	2,317,128,000	365 orang, 2x rapat	5,336,535,663	Biro Organisasi
43	4.06-60	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	1,207,873,300	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	2,291,000,000	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	2,350,000,000	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	2,415,000,000	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	3,057,000,000	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	11,320,873,300	Biro Pengadaan Barang/Jasa
44	4.08-15	Program peningka tan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Temuan LHP	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil re vi u RKA SKPD	0	0	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil re vi u RKA SKPD	3,992,633,000	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil re vi u RKA SKPD	5,156,259,000	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil re vi u RKA SKPD	5,883,586,000	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil re vi u RKA SKPD	7,806,400,000	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil re vi u RKA SKPD	22,838,878,000	Inspektorat

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	4.08-16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan yang berkinerja baik	1 paket	1 paket	203,950,000	1 paket	208,000,000	1 paket	213,000,000	1 paket	218,000,000	1 paket	225,000,000	1 paket	1,067,950,000	Inspektorat
46	4.08-17	Program Peningkatan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	ASN Inspektorat Provinsi Kalteng	1 paket	1 paket	200,240,000	1 paket	236,000,000	1 paket	256,200,000	1 paket	267,900,000	1 paket	291,100,000	1 paket	1,251,440,000	Inspektorat
47	4.08-19	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil revid keuangan (LHR)	0	122 LHP; 36 LHE; 38 LHR	2,051,657,500	122 LHP; 36 LHE; 38 LHR	2,150,000,000	122 LHP; 36 LHE; 38 LHR	2,170,000,000	122 LHP; 36 LHE; 38 LHR	2,190,000,000	122 LHP; 36 LHE; 38 LHR	2,210,000,000	122 LHP; 36 LHE; 38 LHR	10,771,657,500	Inspektorat
48	4.08-20	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintah Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap LKPPD, laporan hasil monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	0	48 LHE	1,053,232,500	48 LHE	1,090,000,000	48 LHE	1,118,000,000	48 LHE	1,131,000,000	48 LHE	1,150,000,000	48 LHE	5,542,232,500	Inspektorat
49	4.08-21	Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi	Jumlah laporan kasus dan laporan kerugian negara	0	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	671,375,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	850,000,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	880,000,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	920,000,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	990,000,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	4,311,375,000	Inspektorat
PAGU MSI 5						60,503,833,377		80,717,167,000		87,933,552,000		94,619,091,000		141,516,002,000		465,289,645,377	

Tabel 81
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Untuk Mencapai Visi dan Msi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Msi 6																	
Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata																	
1	1.01-15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APM PAUD	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	2,044,200,000	1 Dokumen	4,262,900,000	1 Dokumen	4,386,300,000	1 Dokumen	5,514,000,000	1 Dokumen	16,207,400,000	Dinas Pendidikan
2	1.01-17	Program Pendidikan SMA	APM SMA	0	100.00%	112,462,798,100	77,52%	22,966,500,000	77,52%	23,902,685,000	77,52%	24,005,116,000	77,52%	25,322,377,000	77,52%	208,659,476,100	Dinas Pendidikan
3	1.01-18	Program Pendidikan SMK	APM SMK	77,52%	77.60%	81,698,000,000	78.40%	92,987,000,000	82.50%	93,900,000,000	84.74%	94,000,000,000	85.58%	95,000,000,000	77,62%	457,585,000,000	Dinas Pendidikan
4	1.01-19	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta pendidikan non formal	100 orang	0	0	100 orang	3,280,100,000	100 orang	3,393,900,000	100 orang	3,415,900,000	100 orang	3,646,700,000	100 orang	13,736,600,000	Dinas Pendidikan
5	1.01-20	Program Pendidikan Luar Biasa	Jumlah siswa sekolah luar biasa	100%	100%	3,234,000,000	100%	5,571,492,000	100%	5,965,677,000	100%	6,083,791,000	100%	7,883,000,000	100%	28,737,960,000	Dinas Pendidikan
6	1.01-21	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70.00%	100.00%	850,000,000	90.00%	6,082,995,000	95.00%	6,126,882,000	100%	7,096,418,000	100%	10,848,197,000	100%	31,004,492,000	Dinas Pendidikan
7	1.01-22	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	30.00%	40.00%	350,000,000	50.00%	771,291,000	60.00%	802,148,000	70.00%	962,629,000	90.00%	1,215,809,000	90.00%	4,101,877,000	Dinas Pendidikan
8	1.01-23	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	75.00%	80.00%	4,913,904,000	90.00%	8,213,849,000	100.00%	8,580,777,000	100.00%	8,716,903,000	100.00%	9,030,569,000	100.00%	39,456,002,000	Dinas Pendidikan
9	1.01-34	Program Pengembangan Pendidikan Karakter	Persentase jumlah anak didik yang berkarakter baik (berprestasi)	60%	70%	550,000,000	75%	7,204,401,000	80%	7,549,277,000	80%	7,693,235,000	80%	16,135,404,000	85%	39,132,317,000	Dinas Pendidikan
10	1.01-35	Program Pembinaan dan Fasilitas Pendidikan	Jumlah dan kualitas pemberian beasiswa S1 dan S2 (orang)	0	800 orang (S1), 40 orang (S2)	4,447,250,000	800 orang (S1), 40 orang (S2)	7,752,912,000	800 orang (S1), 40 orang (S2)	7,992,600,000	800 orang (S1), 40 orang (S2)	8,027,392,000	800 orang (S1), 40 orang (S2)	11,515,948,000	4.000 orang (S1), 200 orang (S2)	39,736,102,000	Dinas Pendidikan
11	1.02-22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah penderita penyakit menular ditanggulangi	200 orang	240 orang	464,760,150	280 orang	1,245,000,000	320 orang	1,353,000,000	360 orang	1,390,000,000	400 orang	1,429,000,000	400 orang	5,881,760,150	Dinas Kesehatan

No.	KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	1.02-23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laboratorium dan personel kesehatan yang memenuhi standar	10 lab; 56 personel kesehatan	11 lab; 60 personel kesehatan	193,573,400	14 lab; 64 personel kesehatan	508,757,000	16 lab; 68 personel kesehatan	620,042,000	18 lab; 72 personel kesehatan	895,185,000	20 lab; 76 personel kesehatan	1,813,019,000	20 lab; 76 personel kesehatan	4,030,576,400	Dinas Kesehatan
13	1.02-29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah anak dan balita mendapat pelayanan kesehatan dengan baik	29	20	156,459,950	50	608,757,000	60	705,444,000	70	809,779,000	80	1,491,045,000	80	3,771,484,950	Dinas Kesehatan
14	1.02-30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (SPM)	50	0	0	50	53,000,000	53	56,000,000	55	58,000,000	58	60,000,000	58	227,000,000	Dinas Kesehatan
15	1.02-32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	menurunnya angka kematian ibu (AKI), menurunnya angka kematian bayi (AKB)	AKI: 300; AKB: 25	AKI: 250; AKB: 10	77,200,000	AKI: 250; AKB: 17	120,000,000	AKI: 225; AKB: 13	140,000,000	AKI: 200; AKB: 9	180,000,000	AKI: 175; AKB: 5	220,000,000	AKI: 175; AKB: 5	737,200,000	Dinas Kesehatan
16	1.02-36	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah rumah sakit dan puskesmas dengan layanan terakreditasi	7 RS; 39 puskesmas	8 RS; 60 puskesmas	1,399,246,024	9 RS; 60 puskesmas	2,905,600,000	10 RS; 70 puskesmas	3,613,230,000	11 RS; 80 puskesmas	4,000,000,000	12 RS; 90 puskesmas	9,033,700,000	12 RS; 90 puskesmas	20,951,776,024	Dinas Kesehatan
17	1.02-40	Program Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah masalah kesehatan tertanggulangi	10 kasus	8 Kasus	170,040,000	15 kasus	396,000,000	20 kasus	405,000,000	25 kasus	445,000,000	30 kasus	495,000,000	30 kasus	1,911,040,000	Dinas Kesehatan
18	1.02-64	Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Serta Peralatan Kesehatan	Pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di 14 Kabupaten/Kota	45 Puskesmas	0	0	46 Puskesmas	468,300,000	48 Puskesmas	479,000,000	50 Puskesmas	491,000,000	55 Puskesmas	598,000,000	55 Puskesmas	2,036,300,000	Dinas Kesehatan
19	1.02-65	Program Jaminan Kesehatan	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring	45 OT	25 OT	2,500,000,000	55 OT	4,590,165,000	65 OT	5,726,496,000	68 OT	6,008,363,000	70 OT	14,829,104,000	70 OT	33,654,128,000	Dinas Kesehatan
20	1.02-24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan	40 orang	250.00 pasien	125,000,000	35 orang	129,919,000	45 orang	134,546,000	55 orang	139,056,000	75 orang	146,117,000	75 orang	674,638,000	RSJ Kalawa Atei
21	1.02-26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	65%	1.00 tahun	11,992,000,000	75%	5,394,709,000	80%	5,413,870,000	85%	5,448,030,000	90%	6,556,345,000	90%	34,804,954,000	RSJ Kalawa Atei
22	1.02-27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah unit pengolahan limbah dan gedung RS terpelihara	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	1.00 Paket (25%)	80,000,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	54,827,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	60,608,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	69,819,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	73,926,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	339,180,000	RSJ Kalawa Atei

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	1.02-36	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah orang dalam tim akreditasi yang mendapat bimbingan	28 orang	100.00 %	78,000,000	30 orang	80,304,000	50 orang	135,995,000	70 orang	165,912,000	80 orang	157,272,000	80 orang	617,483,000	RSJ Kalawa Atei
24	1.02-59	Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Persentase realisasi akreditasi RS	50%	60%	529,600,000	70%	436,500,000	80%	439,000,000	90%	450,000,000	100%	470,000,000	100%	2,325,100,000	RSJ Kalawa Atei
25	1.02-19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah layanan informasi RS bagi masyarakat	5	7	750,000,000	9	1,195,020,000	13	1,233,407,000	15	1,369,467,000	18	2,506,237,000	18	7,054,131,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
26	1.02-26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana & prasarana RS yang sesuai standar	65%	75%	47,132,292,000	75%	21,425,132,000	80%	22,933,761,000	85%	23,323,168,000	90%	29,638,461,000	90%	144,452,814,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
27	1.02-35	Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Jumlah masyarakat mendapat jaminan kesehatan	1.500 klaim	1.750 klaim	10,000,000,000	1.750 klaim	8,851,349,000	1.800 klaim	9,000,000,000	1.850 klaim	9,207,819,000	1.900 klaim	11,958,951,000	1.900 klaim	49,018,119,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
28	1.02-59	Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Persentase realisasi target peningkatan mutu RS	persiapan akreditasi KARS 98%	terakreditasi paripurna 98%	2,275,000,000	terakreditasi paripurna 100%	2,505,270,000	persiapan akreditasi JCI 100%	2,759,721,000	persiapan akreditasi JCI 100%	2,905,499,000	terakreditasi JCI 100%	4,563,716,000	terakreditasi JCI 100%	15,009,206,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
29	1.03-72	Program Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat	0	1 paket	500,000,000	1 paket	661,120,000	1 paket	786,826,000	1 paket	829,320,000	1 paket	900,300,000	1 paket	3,677,566,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
30	2.13-18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah peserta (pemuda) yang mengikuti sosialisasi pencegahan narkoba	0	50 orang	185,000,000	60 orang	270,000,000	70 orang	320,000,000	80 orang	370,000,000	90 orang	410,000,000	450 orang	1,555,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
31	2.13-20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah cabang olah raga yang dibina; persentase peningkatan pembinaan olah raga	0	15	1,700,000,000	15	3,750,000,000	20	3,810,000,000	21	3,987,000,000	21	4,687,000,000	21	17,934,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
32	2.13-24	Program Pembinaan dan pengembangan Prestasi Olah Raga	Jumlah pemuda yang berprestasi	0	15 orang	150,000,000	30 orang	347,700,000	40 Orang	412,900,000	70 Orang	569,200,000	90 orang	722,400,000	90 orang	2,202,200,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
33	2.13-25	Program Peningkatan Budaya dan Prestasi Olah Raga	Jumlah festival olahraga dan budaya yang terselenggara	0	0	0	1 kegiatan	121,900,000	2 kegiatan	138,200,000	2 kegiatan	144,800,000	3 kegiatan	181,600,000	3 kegiatan	586,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
34	2.16-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	50 buah	100.00 %	1,305,000,000	50 buah	4,973,000,000	50 buah	5,116,000,000	50 buah	5,765,000,000	50 buah	10,820,000,000	50 buah	27,979,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
35	2.16-26	Program Peningkatan Seni Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490 buah	100.00 %	600,000,000	500 buah	809,000,000	500 buah	851,000,000	500 buah	865,300,000	500 buah	910,800,000	500 buah	4,036,100,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	2.17-15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	110400 orang	860,400	650,326,000	1,610,400	802,000,000	2,360,400	812,000,000	3,110,400	832,000,000	3,860,400	860,000,000	140.400 orang	3,956,326,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
37	3.02-15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	80%	100.00%	430,000,000	100%	1,546,347,000	100%	1,745,817,000	100%	2,019,097,000	100%	5,804,340,000	100%	11,545,601,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
38	3.02-16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	2	100.00%	1,685,000,000	3	1,086,820,000	3	1,787,514,000	3	2,898,422,000	3	6,047,130,000	3	13,504,886,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
39	3.02-17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah	80%	100.00%	105,000,000	100%	415,980,000	100%	500,265,000	100%	784,975,000	100%	1,411,810,000	100%	3,218,030,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PAGU MSI 6						293,739,449,624		222,627,216,000		233,966,488,000		240,808,895,000		304,907,277,000		1,296,049,325,624	

Tabel 81
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Untuk Mencapai Visi dan Msi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Msi 7																	
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam																	
1	1.05-30	Program Peningkatan Pemadam Kebakaran	Persentase peningkatan pemadam kebakaran	0	0	0	100 %	250,000,000	100 %	260,000,000	100 %	275,000,000	100 %	310,000,000	100 %	1,095,000,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
2	1.05-32	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase terlaksananya Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	100%	0	0	100%	385,000,000	100%	395,080,000	100%	406,600,000	100%	505,000,000	100%	1,691,680,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
3	1.05-33	Program Tanggap Darurat	Jumlah program tanggap darurat terlaksana	1 Paket	0	0	1 Paket	525,000,000	1 Paket	550,800,000	1 Paket	582,600,000	1 Paket	630,000,000	1 paket	2,288,400,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
4	1.05-37	Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya Peta Resiko Bencana	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	766,000,000	1 Dokumen	1,057,000,000	1 Dokumen	1,459,000,000	1 Dokumen	2,900,000,000	1 dokumen	6,182,000,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
5	1.05-39	Program Pencegahan Bencana	persentase penurunan indeks resiko bencana	0	100 %	380,000,000	100 %	1,518,780,000	100 %	1,842,330,000	100 %	1,850,400,000	100 %	2,929,900,000	100 %	8,521,410,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
6	2.05-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah dikelola	0	60%	500,000,000	70%	639,800,000	80%	690,400,000	90%	691,300,000	90%	802,700,000	90%	3,324,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
7	2.05-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan tingkat pencemaran lingkungan (%)	52%	55%	1,025,000,000	60%	1,141,900,000	65%	1,248,900,000	70%	1,460,000,000	80%	2,075,400,000	80%	6,951,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
8	2.05-17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan ekosistem	1	2	500,000,000	3	507,900,000	3	552,100,000	3	616,500,000	3	721,000,000	3	2,897,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	2.05-18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase wilayah rusak direhabilitasi	0	20%	250,000,000	70%	1,785,900,000	75%	1,824,300,000	80%	1,833,000,000	85%	1,842,100,000	85%	7,535,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
10	2.05-22	Program Pengendalian kebakaran hutan	Persentase penurunan kawasan kebakaran hutan	90%	40%	125,000,000	100%	993,036,000	100%	2,126,961,000	100%	2,399,809,000	100%	5,524,225,000	100%	11,169,031,000	Dinas Lingkungan Hidup
11	2.05-29	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen perubahan iklim	1 Dokumen		0	1 Dokumen	155,000,000	1 Dokumen	204,700,000	1 Dokumen	224,800,000	1 Dokumen	270,000,000	1 Dokumen	854,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
12	3.03-26	Program Perangaran Kawasan Lahan Gambut (PLG)	Luas kawasan lahan gambut yang ditangani (Ha)	200 ha	110 ha	500,000,000	277 ha	749,173,000	650 ha	1,071,447,000	800 ha	1,178,749,000	1000 ha	3,383,537,000	1.000 ha	6,882,906,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
13	3.04-15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pencapaian target produksi hasil hutan (%)	80%	85%	890,000,000	90%	1,572,980,000	95%	2,990,958,000	100%	3,000,000,000	100%	6,000,000,000	100%	14,453,938,000	Dinas Kehutanan
14	3.04-16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi di dalam dan diluar kawasan hutan (Ha)	45.555 ha	45.555 ha	597,125,000	45.555 ha	1,230,000,000	45.555 ha	1,498,000,000	45.555 ha	1,500,000,000	45.555 ha	3,374,000,000	45.555 ha	8,199,125,000	Dinas Kehutanan
15	3.04-17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan (%)	80 %	85 %	1,130,000,000	90 %	1,129,500,000	95 %	1,268,700,000	100 %	1,300,000,000	100 %	1,476,000,000	100 %	6,304,200,000	Dinas Kehutanan
PAGU MSI 7						5,897,125,000		13,349,969,000		17,581,676,000		18,777,758,000		32,743,862,000		88,350,390,000	

Tabel 81
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Untuk Mencapai Visi dan Msi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Msi 8																	
Pengelolaan Pendapatan Daerah																	
1	4.02-38	Program Intensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	100%	0	0	100%	5,818,908,000	100%	6,353,405,000	100%	8,322,222,000	100%	9,945,042,000	100%	30,439,577,000	Badan Keuangan Daerah
2	4.02-60	Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SDM pengelola keuangan yang berkinerja baik	0	0	0	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	210,000,000	1 dokumen	240,000,000	1 dokumen	270,000,000	1 dokumen	920,000,000	Badan Keuangan Daerah
3	4.02-61	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah		53%	6,003,288,200	53%	7,424,380,000	58%	8,590,480,000	64%	8,879,800,000	70%	9,094,458,000	45%	39,992,406,200	Badan Keuangan Daerah
PAGU MSI 8						6,003,288,200		13,443,288,000		15,153,885,000		17,442,022,000		19,309,500,000		71,351,983,200	



8.2. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi, Misi dan Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini disajikan semua program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Prioritas I) maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (Prioritas II).

Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing Perangkat Daerah. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai. Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 untuk Pencapaian Visi, Misi dan Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021
Untuk Mencapai Visi, Misi dan Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah

No.	KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		SEMUA URUSAN			1,577,609,669,520		1,563,191,036,000		1,730,344,150,934		1,805,063,068,322		1,865,884,064,789		2,245,476,456,542		9,209,958,776,587	
1		URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)			1,089,495,420,891		1,085,584,304,700		1,153,029,108,000		1,175,945,744,322		1,194,758,534,789		1,307,311,456,542		5,916,629,148,353	
	1.01	Pendidikan			75,800,000,000		218,851,600,000		171,509,782,000		177,352,863,000		179,418,115,000		202,260,785,000		949,393,145,000	
1	1.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	5,418,212,800	100%	5,136,147,900	100%	5,484,000,000	100%	5,545,000,000	100%	5,615,900,000	100%	5,997,300,000	100%	27,778,347,900	Dinas Pendidikan
2	1.01-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	250,000,000	100%	909,564,120	100%	709,800,000	100%	720,400,000	100%	721,300,000	100%	802,700,000	100%	3,863,764,120	Dinas Pendidikan
3	1.01-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	370,000,000	100%	492,000,000	100%	409,400,000	100%	415,000,000	100%	421,100,000	100%	448,000,000	100%	2,185,500,000	Dinas Pendidikan
4	1.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	30,000,000	100%	25,000,000	100%	50,000,000	100%	51,000,000	100%	59,000,000	100%	75,000,000	100%	260,000,000	Dinas Pendidikan
5	1.01-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	1,610,287,200	100%	1,882,935,880	100%	2,721,000,000	100%	2,798,000,000	100%	2,801,000,000	100%	2,895,000,000	8 Laporan	13,097,935,880	Dinas Pendidikan
6	1.01-15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APM PAUD	1 Dokumen	1,670,000,000	0	0	1 Dokumen	2,044,200,000	1 Dokumen	4,262,900,000	1 Dokumen	4,386,300,000	1 Dokumen	5,514,000,000	1 Dokumen	16,207,400,000	Dinas Pendidikan
7	1.01-16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun I	Jumlah sekolah unggulan/sasaran (SD/SMP) terhadap total unit sekolah - APK/APM/SD/SMP	3.000 siswa, 15.000 buku	1,600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
8	1.01-17	Program Pendidikan SMA	APM SMA	0	0	100.00 %	112,462,798,100	77.52%	22,966,500,000	77.52%	23,902,685,000	77.52%	24,005,116,000	77.52%	25,322,377,000	77.52%	208,659,476,100	Dinas Pendidikan
9	1.01-18	Program Pendidikan SMK	APM SMK	77.52%	0	77.60%	81,698,000,000	78.40%	92,987,000,000	82.50%	93,900,000,000	84.74%	94,000,000,000	85.58%	95,000,000,000	77.62%	457,585,000,000	Dinas Pendidikan
10	1.01-19	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta pendidikan non formal	100 orang	3,232,500,000	0	0	100 orang	3,280,100,000	100 orang	3,393,900,000	100 orang	3,415,900,000	100 orang	3,646,700,000	100 orang	13,736,600,000	Dinas Pendidikan
11	1.01-20	Program Pendidikan Luar Biasa	Jumlah siswa sekolah luar biasa	100%	2,444,000,000	100%	3,234,000,000	100%	5,571,492,000	100%	5,965,677,000	100%	6,083,791,000	100%	7,883,000,000	100%	28,737,960,000	Dinas Pendidikan
12	1.01-21	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70.00%	8,937,000,000	100.00 %	850,000,000	90.00%	6,082,995,000	95.00%	6,126,882,000	100%	7,096,418,000	100%	10,848,197,000	100%	31,004,492,000	Dinas Pendidikan
13	1.01-22	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	30.00%	350,000,000	40.00%	350,000,000	50.00%	771,291,000	60.00%	802,148,000	70.00%	962,629,000	90.00%	1,215,809,000	90.00%	4,101,877,000	Dinas Pendidikan
14	1.01-23	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	75.00%	5,245,740,000	80.00%	4,913,904,000	90.00%	8,213,849,000	100.00 %	8,580,777,000	100.00 %	8,716,903,000	100.00 %	9,030,569,000	100.00%	39,456,002,000	Dinas Pendidikan
15	1.01-24	Program Pendidikan Tinggi	Jumlah sekolah tinggi yang difasilitasi/dibantu (buah)	10 (buah)	475,000,000	0	0	10 (buah)	404,800,000	10 (buah)	420,600,000	10 (buah)	437,000,000	10 (buah)	454,000,000	10 (buah)	1,716,400,000	Dinas Pendidikan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	1.01-25	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik secara Proporsional	Jumlah tenaga pendidik mendapat tunjangan kesejahteraan (orang)	100	150,000,000		0	0	151,928,000	0	168,243,000	0	174,804,000	0	181,622,000	200	676,597,000	Dinas Pendidikan
17	1.01-26	Program Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Pendidikan	Persentase teknologi pendidikan terbaru	30%	2,100,000,000	40%	1,900,000,000	50%	4,704,114,000	60%	4,757,774,000	70%	4,800,327,000	80%	5,295,159,000	80%	21,457,374,000	Dinas Pendidikan
18	1.01-31	Program Pendidikan Menengah II	APM SMA	77,52%	7,526,820,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,62%	0	Dinas Pendidikan
19	1.01-32	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun II	APM SD/SDLB/Paket A; APM SMP/SMP/PLB/Paket B	95,60%; 85,70%	16,856,049,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,60%; 85,70%	0	Dinas Pendidikan
20	1.01-33	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan II	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50%	2,957,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70%	0	Dinas Pendidikan
21	1.01-34	Program Pengembangan Pendidikan Karakter	Persentase jumlah anak didik yang berkarakter baik (berprestasi)	60%	0	70%	550,000,000	75%	7,204,401,000	80%	7,549,277,000	80%	7,693,235,000	80%	16,135,404,000	85%	39,132,317,000	Dinas Pendidikan
22	1.01-35	Program Pembinaan dan Fasilitas Pendidikan	Jumlah dan kualitas pemberian beasiswa S1 dan S2 (orang)	0	0	800 orang (S1), 40 orang (S2)	4,447,250,000	800 orang (S1), 40 orang (S2)	7,752,912,000	800 orang (S1), 40 orang (S2)	7,992,600,000	800 orang (S1), 40 orang (S2)	8,027,392,000	800 orang (S1), 40 orang (S2)	11,515,948,000	4.000 orang (S1), 200 orang (S2)	39,736,102,000	Dinas Pendidikan
23	1.01-36	Program Pendidikan Menengah I	APM SMA	77,62%	14,577,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,62%	0	Dinas Pendidikan
	1.02	Kesehatan			198,998,595,450		247,860,430,700		232,311,723,000		238,046,862,000		242,265,624,000		285,593,129,000		1,246,077,768,700	
24	1.02-33	Program Pembinaan Kesehatan	Jumlah masyarakat mendapat sosialisasi pembinaan masalah kesehatan	35 OT	803,172,800	35 OT	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 OT	950,000,000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
25	1.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	4,246,615,867	100%	4,723,407,075	100%	4,798,000,000	100%	4,808,000,000	100%	4,896,000,000	100%	5,102,147,000	100%	24,327,554,075	Dinas Kesehatan
26	1.02-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	3,036,624,883	100%	2,119,934,411	100%	3,115,000,000	100%	3,368,000,000	100%	3,426,000,000	100%	3,691,000,000	100%	15,719,934,411	Dinas Kesehatan
27	1.02-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	150,030,000	0	100%	154,000,000	100%	160,000,000	100%	179,000,000	100%	191,000,000	100%	684,000,000	Dinas Kesehatan	
28	1.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	269,800,000	100%	279,000,000	100%	290,000,000	100%	302,700,000	100%	1,391,500,000	Dinas Kesehatan
29	1.02-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	52,500,000	100%	45,152,650	100%	56,000,000	100%	58,000,000	100%	61,000,000	100%	65,000,000	1 laporan	285,152,650	Dinas Kesehatan
30	1.02-7	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	413,500,000	1 dokumen	100,900,000	1 dokumen	110,000,000	1 dokumen	115,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	190,000,000	1 dokumen	635,900,000	Dinas Kesehatan
31	1.02-15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kefarmasian sesuai standar (Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dibagi jumlah dikali 100%)	70%	675,000,000	80%	555,000,000	80%	560,000,000	85%	580,000,000	90%	600,000,000	95%	630,000,000	95%	2,925,000,000	Dinas Kesehatan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	1.02-19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat melalui Posyandu Purnama dan mandiri	70%	405,100,000	80%	340,925,000	80%	752,784,000	85%	859,296,000	90%	983,624,000	95%	1,900,442,000	95%	4,837,071,000	Dinas Kesehatan
33	1.02-20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Masyarakat dengan gizi baik	70%	397,830,000	80%	501,237,000	80%	710,000,000	85%	735,000,000	90%	750,000,000	95%	781,000,000	95%	3,477,237,000	Dinas Kesehatan
34	1.02-21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kampung/kelurahan yang stop Buang Air Besar Sembarangan	70%	35,000,000	80%	40,000,000	80%	124,000,000	85%	134,000,000	90%	140,000,000	95%	152,000,000	95%	590,000,000	Dinas Kesehatan
35	1.02-22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah penderita penyakit menular ditanggulangi	200 orang	1,159,060,000	240 orang	464,760,150	280 orang	1,245,000,000	320 orang	1,353,000,000	360 orang	1,390,000,000	400 orang	1,429,000,000	400 orang	5,881,760,150	Dinas Kesehatan
36	1.02-23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laboratorium dan personel kesehatan yang memenuhi standar	10 lab; 56 personel kesehatan	181,111,400	11 lab; 60 personel kesehatan	193,573,400	14 lab; 64 personel kesehatan	508,757,000	16 lab; 68 personel kesehatan	620,042,000	18 lab; 72 personel kesehatan	895,185,000	20 lab; 76 personel kesehatan	1,813,019,000	20 lab; 76 personel kesehatan	4,030,576,400	Dinas Kesehatan
37	1.02-24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan	70%	583,440,000	75%	567,765,000	80%	996,886,000	85%	1,218,122,000	90%	1,515,895,000	95%	4,288,355,000	95%	8,587,023,000	Dinas Kesehatan
38	1.02-29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah anak dan balita mendapat pelayanan kesehatan dengan baik	29	491,420,350	20	156,459,950	50	608,757,000	60	705,444,000	70	809,779,000	80	1,491,045,000	80	3,771,484,950	Dinas Kesehatan
39	1.02-30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (SPM)	50	50,200,000	0	0	50	53,000,000	53	56,000,000	55	58,000,000	58	60,000,000	58	227,000,000	Dinas Kesehatan
40	1.02-32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	menurunnya angka kematian ibu (AKI) , menurunnya angka kematian bayi (AKB)	AKI: 300; AKB: 25	303,615,200	AKI: 250; AKB: 10	77,200,000	AKI: 250; AKB: 17	120,000,000	AKI: 225; AKB: 13	140,000,000	AKI: 200; AKB: 9	180,000,000	AKI: 175; AKB: 5	220,000,000	AKI: 175; AKB: 5	737,200,000	Dinas Kesehatan
41	1.02-36	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah rumah sakit dan puskesmas dengan layanan terakreditasi	7 RS; 39 puskesmas	868,540,850	8 RS; 60 puskesmas	1,399,246,024	9 RS; 60 puskesmas	2,905,600,000	10 RS; 70 puskesmas	3,613,230,000	11 RS; 80 puskesmas	4,000,000,000	12 RS; 90 puskesmas	9,033,700,000	12 RS; 90 puskesmas	20,951,776,024	Dinas Kesehatan
42	1.02-39	Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan	30 orang	3,650,996,950	30 orang	3,309,877,550	35 orang	4,987,967,000	45 orang	5,208,470,000	60 orang	6,051,850,000	70 orang	14,124,170,000	70 orang	33,682,334,550	Dinas Kesehatan
43	1.02-40	Program Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah masalah kesehatan tertanggulangi	10 kasus	529,320,000	8 Kasus	170,040,000	15 kasus	396,000,000	20 kasus	405,000,000	25 kasus	445,000,000	30 kasus	495,000,000	30 kasus	1,911,040,000	Dinas Kesehatan
44	1.02-41	Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan dengan optimal	1	450,282,000	1	274,111,000	1	278,000,000	1	301,000,000	1	353,000,000	1	436,000,000	1	1,642,111,000	Dinas Kesehatan
45	1.02-42	Program Penyuluhan Masyarakat PHBS	Jumlah Pengadaan KIT Upaya Kesehatan Sekolah	25 paket	55,200,000	0	0	35 paket	100,000,000	40 paket	124,000,000	45 paket	152,000,000	50 paket	184,000,000	50 paket	560,000,000	Dinas Kesehatan
46	1.02-44	Program Kesehatan Haji	Jumlah haji mendapat pelayanan kesehatan	1.600 orang	207,182,150	1.600 orang	255,090,000	1.600 orang	272,000,000	1.600 orang	281,000,000	1.600 orang	289,000,000	1.600 orang	307,000,000	1.600 orang	1,404,090,000	Dinas Kesehatan
47	1.02-46	Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah penderita penyakit tidak menular ditanggulangi	20	50,000,000	20	46,460,000	60	145,000,000	70	161,000,000	80	174,000,000	100	196,000,000	100	722,460,000	Dinas Kesehatan
48	1.02-52	Program kesehatan lingkungan	Jumlah desa dengan kualitas kesehatan lingkungan yang baik	40	507,045,000	20	121,015,000	45	612,368,000	55	783,312,000	60	821,401,000	65	1,851,041,000	65	4,189,137,000	Dinas Kesehatan
49	1.02-55	Program Peningkatan Peralatan Kesehatan dan Bahan Penunjang Laboratorium	Jumlah peralatan kesehatan dalam kondisi baik	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	1,465,000,000	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	1,072,000,000	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	1,479,000,000	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	1,482,000,000	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	1,518,000,000	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	1,786,000,000	1 paket (80 jenis reagen dan 25 jenis penunjang lab)	7,337,000,000	Dinas Kesehatan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	1.02-56	Program Pengujian dan Kalibrasi Peralatan Kesehatan (Sister Lab)	Jumlah alat uji dan kalibrasi kesehatan tersedia	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	360,003,000	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	447,602,990	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	463,000,000	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	483,000,000	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	495,200,000	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	587,000,000	1 paket (7 set spare part dental unit, 200 buah spare part)	2,475,802,990	Dinas Kesehatan
51	1.02-57	Program Informasi Publik dan Dokumentasi	Jumlah buku profil kesehatan	100 eksemplar	72,450,000	200 eksemplar	132,000,000	225 eksemplar	158,000,000	250 eksemplar	167,500,000	275 eksemplar	172,000,000	300 eksemplar	187,000,000	300 eksemplar	816,500,000	Dinas Kesehatan
52	1.02-58	Program Pengawasan, Pembinaan pengendalian Kesehatan Makanan	Jumlah data TPM terbina	7 data inspeksi TPM	57,200,000	7 data inspeksi TPM	50,020,000	12 data inspeksi TPM	113,000,000	14 data inspeksi TPM	120,000,000	17 data inspeksi TPM	134,000,000	20 data inspeksi TPM	150,000,000	20 data inspeksi TPM	567,020,000	Dinas Kesehatan
53	1.02-61	Program Pembiayaan Kesehatan	Jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi dan monitoring	40 OT	54,760,000	0	0	100 OT	171,000,000	120 OT	184,000,000	140 OT	196,000,000	160 OT	243,100,000	160 OT	794,100,000	Dinas Kesehatan
54	1.02-62	Program Peningkatan Ketersediaan, Mutu Obat dan Alat Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100%	187,950,000	100%	183,033,500	100%	301,000,000	100%	342,000,000	100%	357,800,000	100%	371,000,000	100%	1,554,833,500	Dinas Kesehatan
55	1.02-63	Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang siap diproduksi didalam negeri, jumlah fasilitas/supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan atau makanan	1 paket	2,934,775,000	1 paket	2,187,480,000	1 paket	2,173,000,000	1 paket	2,198,000,000	1 paket	2,334,700,000	1 paket	2,564,000,000	1 paket	11,457,180,000	Dinas Kesehatan
56	1.02-64	Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Serta Peralatan Kesehatan	Pemenuhan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di 14 Kabupaten/Kota	45 Puskesmas	458,357,000	0	0	46 Puskesmas	468,300,000	48 Puskesmas	479,000,000	50 Puskesmas	491,000,000	55 Puskesmas	598,000,000	55 Puskesmas	2,036,300,000	Dinas Kesehatan
57	1.02-65	Program Jaminan Kesehatan	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring	45 OT	4,622,656,000	25 OT	2,500,000,000	55 OT	4,590,165,000	65 OT	5,726,496,000	68 OT	6,008,363,000	70 OT	14,829,104,000	70 OT	33,654,128,000	Dinas Kesehatan
58	1.02-66	Program Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan monev di kabupaten/kota	15 OT	49,600,000	0	0	20 OT	71,000,000	25 OT	92,000,000	30 OT	126,000,000	35 OT	199,000,000	35 OT	488,000,000	Dinas Kesehatan
59	1.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang tertayani dengan baik	100%	2,760,633,200	100%	2,708,788,000	100%	2,582,100,000	100%	2,602,400,000	100%	2,612,500,000	100%	2,621,600,000	100%	13,127,388,000	RSJ Kalawa Atei
60	1.02-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	230,285,000	100%	1,149,400,000	100%	298,000,000	100%	302,400,000	100%	309,900,000	100%	311,200,000	100%	2,370,900,000	RSJ Kalawa Atei
61	1.02-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	75,000,000	100%	85,000,000	100%	92,000,000	100%	95,000,000	100%	101,000,000	100%	448,000,000	RSJ Kalawa Atei
62	1.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	573,825,000	100%	100,000,000	100%	88,900,000	100%	94,200,000	100%	102,900,000	100%	111,800,000	100%	497,800,000	RSJ Kalawa Atei
63	1.02-24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan	40 orang	125,000,000	250.00 pasien	125,000,000	35 orang	129,919,000	45 orang	134,546,000	55 orang	139,056,000	75 orang	146,117,000	75 orang	674,638,000	RSJ Kalawa Atei
64	1.02-26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang sesuai standar	65%	6,503,956,500	1.00 tahun	11,992,000,000	75%	5,394,709,000	80%	5,413,870,000	85%	5,448,030,000	90%	6,556,345,000	90%	34,804,954,000	RSJ Kalawa Atei

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	1.02-27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Jumlah unit pengolahan limbah dan gedung RS terpelihara	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	20,000,000	1.00 Paket (25%)	80,000,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	54,827,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	60,608,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	69,819,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	73,926,000	1 unit pengolahan limbah dan 6 gedung	339,180,000	RSJ Kalawa Atei
66	1.02-36	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah orang dalam tim akreditasi yang mendapat bimbingan	28 orang	77,923,800	100.00 %	78,000,000	30 orang	80,304,000	50 orang	135,995,000	70 orang	165,912,000	80 orang	157,272,000	80 orang	617,483,000	RSJ Kalawa Atei
67	1.02-59	Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Persentase realisasi akreditasi RS	50%	333,376,500	60%	529,600,000	70%	436,500,000	80%	439,000,000	90%	450,000,000	100%	470,000,000	100%	2,325,100,000	RSJ Kalawa Atei
68	1.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang tertayani dengan baik	100%	23,144,222,000	100%	26,282,410,000	100%	27,381,800,000	100%	27,399,000,000	100%	27,409,900,000	100%	27,419,700,000	100%	135,892,810,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
69	1.02-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	21,055,000,000	100%	9,795,650,000	100%	14,974,400,000	100%	14,995,700,000	100%	15,070,400,000	100%	15,112,000,000	100%	69,948,150,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
70	1.02-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	1,500,000,000	100%	0	100%	1,487,500,000	100%	1,553,300,000	100%	1,590,500,000	100%	1,629,100,000	100%	6,260,400,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
71	1.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	2,200,000,000	100%	1,120,000,000	100%	1,131,300,000	100%	1,150,200,000	100%	1,159,500,000	100%	1,195,100,000	100%	5,756,100,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
72	1.02-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	205,000,000	100%	208,000,000	100%	227,300,000	100%	233,800,000	100%	240,600,000	100%	267,600,000	14	1,177,300,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
73	1.02-19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah layanan informasi RS bagi masyarakat	5	600,000,000	7	750,000,000	9	1,195,020,000	13	1,233,407,000	15	1,369,467,000	18	2,506,237,000	18	7,054,131,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
74	1.02-26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana & prasarana RS yang sesuai standar	65%	14,338,815,000	75%	47,132,292,000	75%	21,425,132,000	80%	22,933,761,000	85%	23,323,168,000	90%	29,638,461,000	90%	144,452,814,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
75	1.02-35	Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Jumlah masyarakat mendapat jaminan kesehatan	1.500 klaim	7,250,000,000	1.750 klaim	10,000,000,000	1.750 klaim	8,851,349,000	1.800 klaim	9,000,000,000	1.850 klaim	9,207,819,000	1.900 klaim	11,958,951,000	1.900 klaim	49,018,119,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
76	1.02-50	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD dr. Doris Sylvanus	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan	65%	85,000,000,000	70%	110,000,000,000	70%	110,000,000,000	70%	110,000,000,000	70%	110,000,000,000	70%	110,000,000,000	70%	550,000,000,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
77	1.02-59	Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit	Persentase realisasi target peningkatan mutu RS	persiapan akreditasi KARS 98%	3,065,020,000	terakreditasi paripurna 98%	2,275,000,000	terakreditasi paripurna 100%	2,505,270,000	persiapan akreditasi JCI 100%	2,759,721,000	persiapan akreditasi JCI 100%	2,905,499,000	terakreditasi JCI 100%	4,563,716,000	terakreditasi JCI 100%	15,009,206,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
78	1.02-60	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	225,000,000	1 dokumen	116,009,000	1 dokumen	173,042,000	1 dokumen	181,857,000	1 dokumen	305,181,000	1 dokumen	1,001,089,000	RSUD dr. Doris Sylvanus
	1.03	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang			711,260,891,365		534,017,244,000		565,363,084,000		569,928,152,000		575,061,524,789		591,008,379,542		2,835,378,384,331	
79	1.03-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang tertayani dengan baik	100%	9,263,368,260	100%	5,454,414,000	100%	5,900,000,000	100%	6,080,000,000	100%	6,100,000,000	100%	6,250,000,000	100%	29,784,414,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
80	1.03-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	786,000,000	100%	12,631,486,000	100%	2,680,000,000	100%	2,770,000,000	100%	2,800,000,000	100%	2,925,000,000	100%	23,806,486,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	1.03-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	0	100%	140,000,000	100%	180,000,000	100%	190,000,000	100%	213,000,000	100%	723,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
82	1.03-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	300,000,000	100%	50,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	163,000,000	100%	200,500,000	100%	723,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
83	1.03-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	93,747,000	100%	23,000,000	100%	110,000,000	100%	117,000,000	100%	118,000,000	100%	120,000,000	1 paket, 4 laporan	488,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
84	1.03-16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun (m)	2,100	7,347,496,210	1,100	4,000,000,000	750	8,978,900,000	1,000	9,067,220,000	1,000	9,100,000,000	1,500	10,532,000,000	1,500	41,678,120,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
85	1.03-24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	luas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dikembangkan (ha)	9.122	23,772,504,532	52,225	38,116,190,000	53,500	39,960,706,000	56,300	41,000,000,000	57,750	41,500,000,000	62,500	43,032,778,000	63	203,609,674,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
86	1.03-25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Luasan yang dikelola (ha)	6	167,640,250	3/1	350,000,000	4/1	1,589,000,000	5/1	1,660,000,000	3/2	1,700,000,000	5/2	1,864,000,000	5/2	7,163,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
87	1.03-26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	luas yang dikembangkan/dikelola/konversi (ha)	1	150,000,000	1	370,000,000	1	728,500,000	1	895,505,000	1	900,345,000	2	905,459,000	2	3,799,809,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
88	1.03-27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	panjang pipa air minum dan air limbah yang dibangun/dikembangkan (km)	16 km	9,150,407,340	5 km	2,500,000,000	7 km	3,500,000,000	7 km	3,980,000,000	7 km	4,333,711,789	9 km	4,500,000,000	9 km	18,813,711,789	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
89	1.03-28	Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Luasan bangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun (ha)	1080 ha	2,663,405,000	5700 ha	7,850,000,000	6174 ha	9,455,015,000	6500 ha	9,720,978,000	7150 ha	9,810,000,000	8690 ha	10,143,028,000	8690 ha	46,979,021,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
90	1.03-29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	7 kawasan, 4 unit, 2 kegiatan	4,947,297,012	6 kawasan, 2 unit, 1 kegiatan	9,500,000,000	5 kawasan, 2 unit, 5 kegiatan	11,959,300,000	5 kawasan, 1 Unit, 7 kegiatan	12,090,490,000	5 kawasan, 11 kegiatan	12,800,000,000	5 kawasan, 8 kegiatan	14,032,000,000	5 kawasan, 8 kegiatan	60,381,790,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
91	1.03-34	Program penggantian dan pemeliharaan jembatan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah	Panjang jembatan yang dipelihara/diganti (m)	360 m	16,762,700,000	450 m	45,188,400,000	450 m	48,916,426,000	450 m	49,111,411,000	450 m	50,000,000,000	450 m	51,362,856,000	450 m	244,579,093,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
92	1.03-35	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik bidang infrastruktur	0	0	100%	6,911,099,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	6,911,099,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
93	1.03-36	Program perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah	jumlah paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan	100.00 %	18,082,841,700	100.00 %	12,246,015,000	100.00 %	14,582,000,000	100.00 %	14,785,000,000	100.00 %	15,000,000,000	100.00 %	18,082,841,000	100.00 %	74,695,856,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
94	1.03-43	Program peningkatan/pembangunan jalan Provinsi Kalimantan Tengah	Panjang jalan yang ditingkatkan/dibangun (km)	114 km	593,152,056,361	114 km	229,472,600,000	114 km	248,914,112,000	114 km	249,000,000,000	114 km	249,500,000,000	114 km	252,091,390,542	570 km	1,228,978,102,542	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
95	1.03-47	Program rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	panjang jalan yang direhab/ pemeliharaan rutin (km); panjang jembatan yang direhab/pelihar (m)	20 km	4,072,900,000	95 km	28,824,000,000	95 km	24,946,000,000	95 km	25,000,000,000	95 km	25,500,000,000	95 km	27,062,600,000	475 km	131,332,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
96	1.03-49	Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial	1. Tersedianya rumah ibadah yang memadai; 2. tersedia fasilitas sosial yang memadai"	3 Kawasan, 6 unit	14,874,227,700	1 Kawasan, 4 unit	111,384,000,000	2 Kawasan, 7 unit	118,953,175,000	2 Kawasan, 5 unit	119,000,000,000	1 Kawasan, 5 unit	119,800,000,000	1 Kawasan, 13 unit	121,000,000,000	1 Kawasan, 13 unit	590,137,175,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
97	1.03-50	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	527,000,000	100.00 %	250,000,000	1 Dokumen	392,000,000	1 Dokumen	453,400,000	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	511,000,000	14 laporan, 16 dokumen	2,106,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
98	1.03-55	Program Perencanaan Teknis	Tersedianya dokumen perencanaan	0	0	116 Dokumen, 1 kegiatan	5,492,000,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	2,601,000,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	2,651,600,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	2,734,500,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	2,786,000,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	16,265,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
99	1.03-59	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang	22%	2,950,000,000	25 %	5,788,000,000	32 %	12,068,030,000	40 %	13,081,322,000	42 %	13,285,448,000	45 %	13,985,727,000	45 %	58,208,527,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
100	1.03-60	Program Pemanfaatan Ruang	"Konsistensi Pemanfaatan Ruang dengan meningkatnya SDM dalam Perataan Ruang	100 Orang	397,300,000	100 Orang	170,000,000	100 Orang	597,800,000	100 Orang	657,400,000	100 Orang	697,200,000	100 Orang	707,900,000	500 Orang	2,830,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
101	1.03-61	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Perda RTRWP/K	6	1,800,000,000	8	6,946,040,000	10	7,580,000,000	14	7,680,000,000	14	7,700,000,000	14	7,800,000,000	14	37,706,040,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
102	1.03-72	Program Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat	0	0	1 paket	500,000,000	1 paket	661,120,000	1 paket	786,826,000	1 paket	829,320,000	1 paket	900,300,000	1 paket	3,677,566,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
	1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			63,270,077,076		58,237,690,000		137,833,377,000		141,439,122,322		145,066,176,000		154,364,643,000		636,941,008,322	
103	1.04-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	0	100%	2,809,584,000	100%	3,800,000,000	100%	3,928,000,000	100%	4,000,000,000	100%	4,498,000,000	100%	19,035,584,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104	1.04-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	0	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	145,000,000	100%	600,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
105	1.04-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	0	100%	211,000,000	100%	225,000,000	100%	228,000,000	100%	255,000,000	100%	919,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
106	1.04-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	0	0	100%	20,000,000	100%	389,000,000	100%	391,000,000	100%	400,000,000	100%	420,000,000	100%	1,620,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
107	1.04-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	0	100%	20,416,000	100%	42,000,000	100%	43,000,000	100%	45,000,000	100%	46,000,000	4 laporan	196,416,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
108	1.04-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	340,000,000	1 Dokumen	345,100,000	1 Dokumen	378,000,000	5 dokumen	1,443,100,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
109	1.04-15	Program Pengembangan Perumahan	Panjang drainase yang dibangun	42.000 m	33,826,808,076	72.000 m	25,773,430,000	83.000 m	28,675,000,000	85.000 m	29,033,500,000	98.000 m	29,228,800,000	98.000 m	31,970,000,000	98.000 m	144,680,730,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
110	1.04-24	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di bidang infrastruktur	Tersedianya dan terbukanya informasi publik untuk masyarakat	250 orang, 20 Alat Uji, 2 Paket Koordinasi, 1 Dokumen	2,850,000,000	0	0	960 orang, 20 Alat Uji, 2 Paket Koordinasi, 1 Dokumen	7,300,000,000	960 orang, 20 Alat Uji, 2 Paket Koordinasi, 1 Dokumen	7,400,000,000	960 orang, 20 Alat Uji, 2 Paket Koordinasi, 1 Dokumen	7,550,900,000	960 orang, 20 Alat Uji, 2 Paket Koordinasi, 1 Dokumen	8,260,000,000	960 orang, 20 Alat Uji, 2 Paket Koordinasi, 1 Dokumen	30,510,900,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
111	1.04-26	Program Perencanaan Teknis	Tersedianya dokumen perencanaan	0	0	0	0	60 Dokumen, 1 kegiatan	2,601,000,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	2,651,600,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	2,701,300,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	2,786,000,000	60 Dokumen, 1 kegiatan	10,739,900,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
112	1.04-30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Tersedianya sarana prasarana jalan, jembatan, untuk masyarakat desa ; Tersedianya saluran/gorong-gorong untuk masyarakat desa"	33.000 m	26,593,269,000	46.000 m	29,464,260,000	79.000 m	28,601,300,000	85.000 m	29,000,750,000	85.000 m	29,432,076,000	85.000 m	30,609,014,000	85.000 m	147,107,400,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)			
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
113	1.04-56	Program Sharing Investasi PemProv Kalteng dalam rangka Memorandum Program Sanitasi (MPS)	Tersedianya dana pendamping program sanitasi	0	0	0	0	6 unit	24,993,720,000	19 Unit 12.640 m	25,000,737,000	10 unit 26.700 m	26,010,000,000	9 unit 25.380 m	27,683,866,000	9 unit 25.380 m	103,688,323,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
114	1.04-57	Program Petaaan dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Tersedianya jalan lingkungan, drainase, penanganan persampahan dan instalasi pengelolaan limbah komunal pada kawasan kumuh kota; Tersedianya sistem air bersih bagi warga kota"	0	0	0	0	24 kegiatan	38,169,157,000	24 kegiatan	39,513,465,322	23 kegiatan	41,000,000,000	21 kegiatan	42,000,000,000	21 kegiatan	160,682,622,322	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
115	1.04-59	Program Pengembangan Wilayah Pesisir	Tersedianya air minum untuk masyarakat pesisir	0	0	0	0	5 kegiatan	2,611,200,000	7 kegiatan	3,792,070,000	11 kegiatan	4,000,000,000	7 kegiatan	5,313,763,000	7 kegiatan	15,717,033,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							25,315,857,000		17,166,850,000		26,797,951,000		30,724,481,000		38,904,499,000		142,434,094,000
116	1.05-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang tertayani dengan baik	100%	1,936,374,675	100%	1,830,119,225	100%	1,990,000,000	100%	1,995,889,000	100%	2,073,729,000	100%	2,154,604,000	100%	10,044,341,225	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
117	1.05-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	49,115,000	100%	293,845,000	100%	261,000,000	100%	270,000,000	100%	289,000,000	100%	350,000,000	100%	1,463,845,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
118	1.05-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	37,700,000	100%	0	100%	38,000,000	100%	39,500,000	100%	40,600,000	100%	50,000,000	100%	168,100,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
119	1.05-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	23,485,000	100%	30,170,000	100%	51,000,000	100%	52,700,000	100%	53,200,000	100%	56,800,000	100%	243,870,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
120	1.05-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	226,325,600	100%	245,444,500	100%	252,000,000	100%	288,400,000	100%	301,400,000	100%	401,300,000	100%	1,488,544,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
121	1.05-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	13,394,100	100%	14,963,300	1 Dokumen	15,767,000	1 Dokumen	20,966,000	1 Dokumen	23,251,000	1 Dokumen	25,179,000	5 dokumen	100,126,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
122	1.05-15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat kejadian konflik	100%	512,054,050	100%	367,819,300	100%	520,000,000	100%	585,300,000	100%	603,000,000	100%	700,000,000	100%	2,776,119,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
123	1.05-16	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kamtibmas	100%	445,793,200	100%	414,832,550	100%	432,000,000	100%	466,800,000	100%	480,900,000	100%	565,900,000	100%	2,360,432,550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
124	1.05-17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat peningkatan hari besar negara dan kebudayaan	100%	893,108,900	100%	715,000,000	100%	668,000,000	100%	781,000,000	100%	810,010,000	100%	930,000,000	100%	3,904,010,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125	1.05-18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan	100%	356,074,700	100%	235,000,000	100%	357,000,000	100%	367,800,000	100%	381,400,000	100%	455,500,000	100%	1,796,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
126	1.05-19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	100%	289,612,925	100%	266,606,350	100%	274,000,000	100%	282,300,000	100%	298,700,000	100%	345,800,000	100%	1,467,406,350	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
127	1.05-21	Program pendidikan politik masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (DI) Prov. Kalteng	100%	880,867,100	100%	1,657,656,400	100%	2,557,751,000	100%	2,964,594,000	100%	3,310,012,000	100%	5,737,948,000	100%	16,227,961,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
128	1.05-23	Program peningkatan Ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Jumlah kejadian konflik kerusuhan	100%	801,029,275	100%	750,000,000	100%	1,190,000,000	100%	1,232,800,000	100%	1,377,000,000	100%	1,422,900,000	100%	5,972,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
129	1.05-27	Program Data dan Informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	100%	251,922,475	100%	361,673,375	100%	332,000,000	100%	350,800,000	100%	379,700,000	100%	417,900,000	100%	1,842,073,375	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
130	1.05-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,673,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,720,000,000	100%	2,752,000,000	100%	2,778,000,000	100%	3,000,000,000	100%	13,750,000,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
131	1.05-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	613,600,000	100%	844,000,000	100%	780,000,000	100%	790,500,000	100%	799,700,000	100%	820,000,000	100%	4,034,200,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
132	1.05-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	40,000,000	100%	148,000,000	100%	149,000,000	100%	150,800,000	100%	156,600,000	100%	160,400,000	100%	764,800,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
133	1.05-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	520,000,000	100%	380,000,000	100%	95,000,000	100%	100,000,000	100%	141,000,000	100%	200,000,000	100%	916,000,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
134	1.05-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	98,000,000	100%	302,000,000	100%	416,000,000	100%	421,100,000	100%	435,800,000	100%	460,700,000	100%	2,035,600,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
135	1.05-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	16,000,000	1.00 Tahun	16,000,000	1 Dokumen	16,253,000	1 Dokumen	16,354,000	1 Dokumen	16,579,000	1 Dokumen	16,668,000	5 dokumen	81,854,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
136	1.05-9	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	950,000,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
137	1.05-29	Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Persentase Terlalu Anggotanya Anggota Satlaktar (Satuan Relawan Kebakaran)	0	0	100 %	200,000,000	100 %	220,000,000	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	700,000,000	100 %	1,770,000,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
138	1.05-30	Program Peningkatan Pemadam Kebakaran	Persentase peningkatan pemadam kebakaran	0	0	0	0	100 %	250,000,000	100 %	260,000,000	100 %	275,000,000	100 %	310,000,000	100 %	1,095,000,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
139	1.05-31	Dukungan Manajemen dan Teknis	Jumlah program Dukungan Manajemen dan Teknis terlaksana	1 Paket	380,000,000	0	0	1 Paket	300,000,000	1 Paket	340,800,000	1 Paket	420,600,000	1 Paket	700,400,000	1 paket	1,761,800,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
140	1.05-32	Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase terlaksananya Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Bencana Alam	100%	370,000,000	0	0	100%	385,000,000	100%	395,080,000	100%	406,600,000	100%	505,000,000	100%	1,691,680,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
141	1.05-33	Program Tanggap Darurat	Jumlah program tanggap darurat terlaksana	1 Paket	500,000,000	0	0	1 Paket	525,000,000	1 Paket	550,800,000	1 Paket	582,600,000	1 Paket	630,000,000	1 paket	2,288,400,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
142	1.05-34	Program Tanggap Paska Bencana	tersedianya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	1 Dokumen	5,610,214,000	1.00 Tahun	255,000,000	1 Dokumen	2,120,000,000	1 Dokumen	2,201,600,000	1 Dokumen	2,465,300,000	1 Dokumen	2,900,000,000	1 dokumen	9,941,900,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
143	1.05-35	Program logistik dan peralatan	Jumlah logistik dan peralatan bencana tersedia	1 Paket	500,000,000	0	0	1 Paket	539,000,000	1 Paket	560,800,000	1 Paket	582,600,000	1 Paket	625,400,000	1 paket	2,307,800,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
144	1.05-37	Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya Peta Resiko Bencana	1 Dokumen	1,378,186,000	0	0	1 Dokumen	766,000,000	1 Dokumen	1,057,000,000	1 Dokumen	1,459,000,000	1 Dokumen	2,900,000,000	1 dokumen	6,182,000,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
145	1.05-39	Program Pencegahan Bencana	persentase penurunan indeks resiko bencana	0	0	100 %	380,000,000	100 %	1,518,780,000	100 %	1,842,330,000	100 %	1,850,400,000	100 %	2,929,900,000	100 %	8,521,410,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
146	1.05-40	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat	persentase penurunan indeks resiko bencana	0	0	0	0	100 %	210,000,000	100 %	230,000,000	100 %	260,000,000	100 %	300,000,000	100 %	1,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
147	1.05-41	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	0	0	0	0	5 Orang	156,000,000	5 Orang	160,000,000	5 Orang	175,000,000	5 Orang	200,000,000	5 Orang	691,000,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
148	1.05-42	Program Penanganan Keadaan Darurat	jumlah SDM bersertifikat Penanggulangan Bencana; jumlah sarana prasarana vital kondisi darurat terbangun	0	0	50 org; 3 buah	251,000,000	50 org; 3 buah	585,000,000	50 org; 3 buah	592,000,000	50 org; 3 buah	407,000,000	50 org; 3 buah	500,000,000	250 org; 3 buah	2,335,000,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
149	1.05-43	Program Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	0	0	1 Paket	125,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	400,000,000	5 Paket	1,125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150	1.05-45	Program Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Data informasi dan pelaporan kebencanaan	0	0	1 Dokumen	89,640,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	92,000,000	1 Dokumen	93,000,000	1 Dokumen	95,000,000	1 Dokumen	459,640,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
151	1.05-46	Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau ke seluruh lapisan publik	0	0	0	0	1 Paket	300,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	400,000,000	1 Paket	450,000,000	1 Paket	1,500,000,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
152	1.05-47	Program Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Telaahan Hukum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Perangulungan Bencana	Tersediarnya peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum kerjasama dalam dan luar negeri di bidang perangulungan bencana	0	0	0	0	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	800,000,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
153	1.05-48	Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kehumasan	Jumlah dokumen pelaporan pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan		0		0	1 Paket	150,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	950,000,000	Badan Perangulungan Bencana dan Pemadam Kebakaran
154	1.05-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	3,857,932,452	100%	3,179,179,950	100%	3,493,000,000	100%	3,516,000,000	100%	3,546,000,000	100%	3,631,000,000	100%	17,365,179,950	Satuan Polisi Pamong Praja
155	1.05-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	121,000,000	100%	144,750,000	100%	142,800,000	100%	144,500,000	100%	148,800,000	100%	150,700,000	100%	731,550,000	Satuan Polisi Pamong Praja
156	1.05-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	82,775,000	100%	170,540,000	100%	239,000,000	100%	259,300,000	100%	265,300,000	100%	281,900,000	100%	1,216,040,000	Satuan Polisi Pamong Praja
157	1.05-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	460,000,000	100%	278,181,000	100%	389,500,000	100%	390,900,000	100%	401,000,000	100%	420,900,000	100%	1,880,481,000	Satuan Polisi Pamong Praja
158	1.05-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	29,777,500	100%	48,750,000	100%	38,000,000	100%	39,000,000	100%	42,000,000	100%	46,000,000	100%	213,750,000	Satuan Polisi Pamong Praja
159	1.05-15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat kejadian konflik	50%	350,000,000	40%	132,309,250	40%	210,800,000	30%	217,500,000	30%	225,800,000	30%	230,700,000	30%	1,017,109,250	Satuan Polisi Pamong Praja
160	1.05-16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kantrantibmas	100%	998,515,048	75%	539,369,800	100%	655,300,000	100%	661,100,000	100%	668,900,000	100%	676,000,000	100%	3,200,669,800	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.06	Sosial			14,850,000,000		9,450,490,000		19,213,191,000		20,338,432,000		22,222,614,000		35,180,021,000		106,404,748,000	
161	1.06-16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) PMKS Skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	50,000,000	100%	0	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	285,000,000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
162	1.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,659,700,300	100%	1,902,687,000	100%	2,043,000,000	100%	2,123,600,000	100%	2,326,400,000	100%	2,422,500,000	100%	10,818,187,000	Dinas Sosial
163	1.06-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	3,009,844,000	100%	1,226,075,000	100%	1,001,000,000	100%	1,027,000,000	100%	1,168,000,000	100%	1,205,000,000	100%	5,627,075,000	Dinas Sosial
164	1.06-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	108,650,000	100%	0	100%	198,136,000	100%	205,000,000	100%	222,200,000	100%	253,700,000	100%	879,036,000	Dinas Sosial

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
165	1.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	596,633,250	100%	311,100,000	100%	399,500,000	100%	415,700,000	100%	463,300,000	100%	507,100,000	100%	2,096,700,000	Dinas Sosial
166	1.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	28,500,000	100%	34,400,000	100%	39,300,000	100%	47,200,000	100%	169,400,000	Dinas Sosial
167	1.06-7	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan PD	1 dokumen	105,630,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	225,000,000	1 dokumen	264,000,000	1 dokumen	296,000,000	1 dokumen	326,000,000	1 dokumen	1,211,000,000	Dinas Sosial
168	1.06-15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpendil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpendil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	100%	1,041,926,750	100%	200,000,000	100%	2,178,500,000	100%	2,256,683,000	100%	2,456,416,000	100%	4,303,864,000	100%	11,395,463,000	Dinas Sosial
169	1.06-16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Terlaksananya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	2,048,099,000	100%	2,645,725,000	100%	5,560,313,000	100%	5,986,492,000	100%	6,373,476,000	100%	9,999,517,000	100%	30,565,523,000	Dinas Sosial
170	1.06-17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase terlaksananya Program pembinaan anak terlantar	100%	100,000,000	100%	50,000,000	100%	107,900,000	100%	112,100,000	100%	116,500,000	100%	121,000,000	100%	507,500,000	Dinas Sosial
171	1.06-18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase terlaksananya Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100%	199,423,200	100%	87,500,000	100%	190,400,000	100%	210,800,000	100%	243,700,000	100%	297,100,000	100%	1,029,500,000	Dinas Sosial
172	1.06-19	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Persentase terlaksananya Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	100%	1,954,155,500	100%	1,200,000,000	100%	3,165,636,000	100%	3,319,682,000	100%	3,753,393,000	100%	6,292,728,000	100%	17,731,439,000	Dinas Sosial
173	1.06-20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase terlaksananya Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100%	297,654,000	100%	494,666,000	100%	821,878,000	100%	917,171,000	100%	1,005,392,000	100%	3,200,392,000	100%	6,439,499,000	Dinas Sosial
174	1.06-21	Program Pemberdayaan Kelenbagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan Kelenbagaan Kesejahteraan Sosial	100%	2,333,050,500	100%	512,900,000	100%	789,700,000	100%	859,500,000	100%	932,000,000	100%	1,007,400,000	100%	4,101,500,000	Dinas Sosial
175	1.06-37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	1,325,233,500	100%	699,837,000	100%	2,443,728,000	100%	2,536,304,000	100%	2,751,537,000	100%	5,116,520,000	100%	13,547,926,000	Dinas Sosial
	2	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)			131,548,060,751		81,908,446,300		142,346,360,934		165,463,671,000		179,224,076,000		280,973,238,000		849,915,792,234	
	2.01	Tenaga Kerja			8,373,411,300		5,594,993,000		10,566,842,000		11,601,718,000		12,519,644,000		18,918,763,000		59,201,960,000	
176	2.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Urut Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,018,810,100	100%	1,815,621,000	100%	2,098,600,000	100%	2,180,400,000	100%	2,225,400,000	100%	2,453,800,000	100%	10,773,821,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
177	2.01-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Urut Kerja internal	100%	865,350,000	100%	655,500,000	100%	328,600,000	100%	339,800,000	100%	348,600,000	100%	372,100,000	100%	2,044,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
178	2.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	0	100%	63,500,000	100%	100,000,000	100%	102,200,000	100%	119,500,000	100%	140,900,000	100%	526,100,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
179	2.01-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	484,000,000	100%	281,500,000	100%	391,900,000	100%	409,600,000	100%	429,400,000	100%	460,400,000	100%	1,972,800,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
180	2.01-15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	100%	2,879,394,500	100%	854,502,000	100%	3,062,568,000	100%	3,565,389,000	100%	3,996,194,000	100%	7,250,883,000	100%	18,729,536,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
181	2.01-16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja	100%	896,000,000	100%	1,130,000,000	100%	3,545,474,000	100%	3,929,329,000	100%	4,273,650,000	100%	7,064,980,000	100%	19,943,433,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
182	2.01-17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan mendapat penanganan	100%	641,212,500	100%	435,000,000	100%	567,900,000	100%	583,100,000	100%	613,700,000	100%	650,000,000	100%	2,849,700,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
183	2.01-18	Program Peningkatan Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah aparaturnya pengawas	100%	588,644,200	100%	359,370,000	100%	471,800,000	100%	491,900,000	100%	513,200,000	100%	525,700,000	100%	2,361,970,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6,315,200,000		4,809,510,000		5,521,285,000		5,906,887,000		6,288,931,000		7,419,545,000		29,946,158,000	
184	2.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,505,350,000	100%	1,456,860,000	100%	1,524,883,000	100%	1,552,934,000	100%	1,583,638,000	100%	1,657,100,000	100%	7,775,415,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
185	2.02-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	21,297,185	100%	25,000,000	100%	35,952,000	100%	46,162,000	100%	60,536,000	100%	121,081,000	100%	288,731,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
186	2.02-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	0	100%	78,928,000	100%	88,243,000	100%	134,804,000	100%	181,622,000	100%	483,597,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
187	2.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	12,000,000	100%	0	100%	12,090,000	100%	125,621,000	100%	130,520,000	100%	135,611,000	100%	403,842,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
188	2.02-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	86,361,000	100%	89,729,000	100%	93,229,000	100%	96,865,000	100%	446,184,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
189	2.02-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 dokumen	22,650,000	1 dokumen	22,650,000	1 dokumen	13,271,000	1 dokumen	16,198,000	1 dokumen	22,104,000	1 dokumen	35,766,000	1 dokumen	109,989,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
190	2.02-15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah peserta sosialisasi keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	50 orang	2,046,146,100	50 orang	1,505,000,000	75 orang	1,532,000,000	90 orang	1,595,200,000	100 orang	1,601,500,000	120 orang	1,991,300,000	120 orang	8,225,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
191	2.02-16	Program Penguatan Kemitraan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah PD Provinsi terdampingi dalam penyusunan anggaran responsif gender	30	530,000,000	30	75,000,000	30	180,300,000	30	199,100,000	30	318,500,000	30	538,800,000	30	1,311,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
192	2.02-17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah orang dalam satgas PKDRT	100 orang	1,355,096,650	100 orang	1,100,000,000	150 orang	1,138,800,000	125 orang	1,214,400,000	150 orang	1,202,900,000	250 orang	1,374,600,000	250 orang	6,030,700,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
193	2.02-18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Dokumen hasil Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	4 dokumen	567,660,065	4 dokumen	300,000,000	8 dokumen	579,500,000	10 dokumen	621,600,000	12 dokumen	765,300,000	14 dokumen	810,800,000	14 dokumen	3,077,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
194	2.02-20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Dokumen Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	87,000,000	1 dokumen	98,000,000	1 dokumen	100,200,000	1 dokumen	360,200,000	Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
195	2.02-21	Program Penyusunan Profil Lembaga	Jumlah profil lembaga tersusun	5 dokumen	175,000,000	5 dokumen	245,000,000		264,200,000		270,700,000		277,900,000		375,800,000	17 dokumen	1,433,600,000	Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.03	Pangan			3,352,875,480		3,983,080,000		5,094,200,000		5,500,616,000		6,063,538,000		8,557,209,000		29,198,643,000	
196	2.03-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,151,600,000	100%	1,319,700,000	100%	1,320,000,000	100%	1,414,300,000	100%	1,469,500,000	100%	1,526,800,000	100%	7,050,300,000	Dinas Ketahanan Pangan
197	2.03-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	779,000,000	100%	803,980,000	100%	890,000,000	100%	908,500,000	100%	943,900,000	100%	980,700,000	100%	4,527,080,000	Dinas Ketahanan Pangan
198	2.03-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	81,000,000	100%	89,400,000	100%	90,200,000	100%	90,800,000	100%	94,300,000	100%	98,000,000	100%	462,700,000	Dinas Ketahanan Pangan
199	2.03-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	15,000,000	100%	10,000,000	100%	12,000,000	100%	12,800,000	100%	13,100,000	100%	15,400,000	100%	63,300,000	Dinas Ketahanan Pangan
200	2.03-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	50,000,000	100%	65,000,000	100%	53,000,000	100%	56,000,000	100%	58,200,000	100%	60,500,000	100%	292,700,000	Dinas Ketahanan Pangan
201	2.03-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	44,400,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	44,000,000	1 Dokumen	47,200,000	1 Dokumen	49,900,000	1 Dokumen	52,600,000	5 dokumen	233,700,000	Dinas Ketahanan Pangan
202	2.03-15	Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	80%	214,005,200	80%	265,000,000	85%	670,000,000	87%	748,600,000	89%	966,100,000	90%	2,225,300,000	90%	4,875,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
203	2.03-16	Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	Perangaran daerah rawan pangan (%)	36,96%	231,360,280	32,84%	200,000,000	44,84%	610,000,000	48,77%	726,216,000	52,71%	842,838,000	56,65%	960,109,000	56,65%	3,339,163,000	Dinas Ketahanan Pangan
204	2.03-17	Program Good Governance	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	1	480,000,000	1	680,000,000	1	780,000,000	1	835,200,000	2	875,600,000	2	1,517,000,000	2	4,687,800,000	Dinas Ketahanan Pangan
205	2.03-18	Program pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	229	146,707,000		95,000,000	273	195,000,000	294	210,000,000	316	226,900,000	338	500,700,000	338	1,227,600,000	Dinas Ketahanan Pangan
206	2.03-19	Program ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah kelompok pengankaragaman konsumsi/diversifikasi pangan	40%	81,403,000	52%	140,000,000	52%	141,000,000	55%	150,000,000	55%	167,200,000	56%	170,100,000	56%	768,300,000	Dinas Ketahanan Pangan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
207	2.03-20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kalteng Berkah	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	37,72%	78,400,000	37,72%	275,000,000	37,72%	289,000,000	37,72%	301,000,000	37,72%	356,000,000	37,72%	450,000,000	37,72%	1,671,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	2.04	Pertanahan			205,498,000		144,800,000		428,408,000		539,661,000		663,112,000		1,119,179,000		2,895,160,000	
208	2.04-16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Inventarisasi Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5 paket	35,923,150	1 paket	2,500,000	1 paket	198,408,000	1 paket	278,661,000	1 paket	390,112,000	1 paket	805,179,000	1 paket	1,674,860,000	Biro Pemerintahan
209	2.04-17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik yang terselesaikan	20%	169,574,850	20%	142,300,000	20%	230,000,000	20%	261,000,000	30%	273,000,000	30%	314,000,000	30%	1,220,300,000	Biro Pemerintahan
	2.05	Lingkungan Hidup			8,435,318,000		5,434,320,000		8,990,036,000		10,588,261,000		11,323,109,000		15,760,325,000		52,096,051,000	
210	2.05-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,749,398,700	100%	1,522,320,000	100%	1,570,000,000	100%	1,584,000,000	100%	1,602,000,000	100%	1,650,000,000	100%	7,928,320,000	Dinas Lingkungan Hidup
211	2.05-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	100%	550,350,500	100%	292,000,000	100%	320,000,000	100%	370,000,000	100%	390,000,000	100%	420,000,000	100%	1,792,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
212	2.05-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	115,000,000	100%	0	100%	120,000,000	100%	124,000,000	100%	131,000,000	100%	145,000,000	100%	520,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
213	2.05-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	279,100,000	100%	50,000,000	100%	72,000,000	100%	94,000,000	100%	109,000,000	100%	150,000,000	100%	475,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
214	2.05-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	193,000,000	100%	35,000,000	100%	65,000,000	100%	79,000,000	100%	106,000,000	100%	189,000,000	6 laporan	474,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
215	2.05-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	0	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	63,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	68,000,000	1 Dokumen	71,000,000	1 Dokumen	317,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
216	2.05-15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah dikelola	0	0	60%	500,000,000	70%	639,800,000	80%	690,400,000	90%	691,300,000	90%	802,700,000	90%	3,324,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
217	2.05-16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan tingkat pencemaran lingkungan (%)	52%	2,204,673,800	55%	1,025,000,000	60%	1,141,900,000	65%	1,248,900,000	70%	1,460,000,000	80%	2,075,400,000	80%	6,951,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
218	2.05-17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem	1	100,000,000	2	500,000,000	3	507,900,000	3	552,100,000	3	616,500,000	3	721,000,000	3	2,897,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
219	2.05-18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase wilayah rusak direhabilitasi	0	0	20%	250,000,000	70%	1,785,900,000	75%	1,824,300,000	80%	1,833,000,000	85%	1,842,100,000	85%	7,535,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
220	2.05-19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data Informasi Lingkungan Hidup yang terUpdate	60%	1,438,795,000	65%	835,000,000	70%	871,000,000	90%	890,000,000	95%	916,000,000	100%	1,041,000,000	100%	4,553,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
221	2.05-21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Persentase pengelolaan lingkungan ekowisata laut dan hutan (%)	50%	100,000,000	0	0	60%	111,900,000	65%	128,200,000	70%	134,800,000	80%	181,600,000	80%	556,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
222	2.05-22	Program Pengendalian kebakaran hutan	Persentase penurunan kawasan kebakaran hutan	90%	665,000,000	40%	125,000,000	100%	993,036,000	100%	2,126,961,000	100%	2,399,809,000	100%	5,524,225,000	100%	11,169,031,000	Dinas Lingkungan Hidup
223	2.05-23	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Persentase ekosistem pasir dan laut direhabilitasi	100%	150,000,000	0	0	100%	147,900,000	100%	172,000,000	100%	186,500,000	100%	202,500,000	100%	708,900,000	Dinas Lingkungan Hidup

No.	KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224	2.05-25	Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH	Jumlah Perda	1	420,000,000	1	250,000,000	1	425,700,000	1	434,700,000	1	454,400,000	1	474,800,000	1	2,039,600,000	Dinas Lingkungan Hidup
225	2.05-29	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen perubahan iklim	1 Dokumen	470,000,000		0	1 Dokumen	155,000,000	1 Dokumen	204,700,000	1 Dokumen	224,800,000	1 Dokumen	270,000,000	1 Dokumen	854,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			0		2,412,104,000		2,481,000,000		2,615,000,000		2,775,000,000		1,971,000,000		12,254,104,000	
226	2.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	0	0	100%	780,000,000	100%	789,000,000	100%	798,000,000	100%	801,000,000	100%	911,000,000	100%	4,079,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
227	2.06-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	0	0	100%	10,000,000	100%	11,000,000	100%	12,000,000	100%	14,000,000	100%	16,000,000	100%	63,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
228	2.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	0	0	100%	10,000,000	100%	12,000,000	100%	15,000,000	100%	17,000,000	100%	20,000,000	100%	74,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
229	2.06-15	Program Penaatan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dan sejalan kebijakan kependudukan dan catatan sipil	0	0	100%	1,060,000,000	100%	1,080,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,200,000,000	100%	134,000,000	100%	4,574,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
230	2.06-16	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	100%	552,104,000	100%	589,000,000	100%	690,000,000	100%	743,000,000	100%	890,000,000	100%	3,464,104,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa			11,498,448,000		7,986,160,000		10,947,141,000		13,818,812,000		15,209,887,000		26,984,647,000		74,946,647,000	
231	2.07-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,974,090,400	100%	1,992,358,400	100%	2,246,500,000	100%	2,330,000,000	100%	2,456,000,000	100%	2,587,600,000	100%	11,612,458,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
232	2.07-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	465,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	555,000,000	100%	675,000,000	100%	898,700,000	100%	3,028,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
233	2.07-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	67,500,000	100%	65,000,000	100%	75,000,000	100%	83,000,000	100%	91,000,000	100%	381,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
234	2.07-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	0	0	100%	21,800,000	100%	21,800,000	100%	22,400,000	100%	23,300,000	100%	24,200,000	100%	91,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
235	2.07-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	48,000,000	100%	233,166,600	100%	231,800,000	100%	233,800,000	100%	255,900,000	100%	298,100,000	100%	1,252,766,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
236	2.07-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	195,448,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	167,900,000	1 Dokumen	172,000,000	1 Dokumen	186,000,000	1 Dokumen	193,000,000	5 dokumen	868,900,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
237	2.07-15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	jumlah LPM berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100%	4,297,455,600	100%	2,690,705,000	100%	3,054,000,000	100%	3,255,000,000	100%	3,363,800,000	100%	3,466,000,000	100%	15,829,505,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
238	2.07-16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah kelompok usaha Ekonomi Produktif masyarakat kampung yang aktif	100%	860,987,000	100%	425,000,000	100%	988,400,000	100%	2,173,700,000	100%	2,201,000,000	100%	7,371,300,000	100%	13,159,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
239	2.07-17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Lembaga Kampung berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa	100%	1,209,880,000	100%	1,009,880,000	100%	1,616,441,000	100%	2,884,512,000	100%	3,640,287,000	100%	9,069,247,000	100%	18,220,367,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
240	2.07-18	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah kampung yang telah menyampaikan laporan pemerintahan kampung yang baik	100%	775,087,000	100%	562,550,000	100%	1,094,900,000	100%	1,111,700,000	100%	1,233,000,000	100%	1,659,000,000	100%	5,661,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
241	2.07-19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase perempuan yang partisipasi dalam pembangunan pedesaan/kampung	0	0	0	0	100%	218,100,000	100%	238,300,000	100%	299,300,000	100%	381,100,000	100%	1,136,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
242	2.07-20	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Cakupan pemanfaatan SDA dan penggunaan teknologi tepat guna	100%	672,500,000	100%	455,000,000	100%	742,300,000	100%	767,400,000	100%	793,300,000	100%	945,400,000	100%	3,703,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			439,814,350		521,389,300		795,600,000		946,700,000		1,136,000,000		1,418,300,000		4,817,989,300	
243	2.08-15	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif terhadap PUS	100%	150,000,000	0	0	100%	155,000,000	100%	164,000,000	100%	175,000,000	100%	189,000,000	100%	683,000,000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
244	2.08-16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja per kab/kota mengikuti Program Kesehatan Reproduksi Remaja	5 orang	76,664,350	15 orang	202,249,300	15 orang	202,000,000	20 orang	253,000,000	25 orang	306,000,000	30 orang	422,000,000	30 orang	1,385,249,300	Dinas Kesehatan
245	2.08-22	Program Pengembangan Informasi tentang Pergaulan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak	Jumlah Pemegang program terlatih	40 orang	140,850,000	35 orang	119,140,000	50 orang	158,000,000	70 orang	182,000,000	90 orang	194,000,000	110 orang	232,000,000	110 orang	885,140,000	Dinas Kesehatan
246	2.08-15	Program Keluarga Berencana	Jumlah pasangan usia subur ber-KB	100	72,300,000	225	200,000,000	300	280,600,000	350	347,700,000	400	461,000,000	700	575,300,000	700	1,864,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.09	Perhubungan			17,331,699,150		11,979,240,000		27,522,357,934		32,705,944,000		34,610,633,000		61,842,617,000		168,660,791,934	
247	2.09-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	4,783,532,750	100%	2,864,240,000	100%	2,974,500,000	100%	3,180,200,000	100%	3,293,900,000	100%	4,116,000,000	100%	16,428,840,000	Dinas Perhubungan
248	2.09-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	933,800,000	100%	430,000,000	100%	590,000,000	100%	600,300,000	100%	692,600,000	100%	846,900,000	100%	3,159,800,000	Dinas Perhubungan
249	2.09-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparat yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	481,000,000	100%	170,000,000	100%	187,300,000	100%	207,100,000	100%	247,700,000	100%	369,000,000	100%	1,181,100,000	Dinas Perhubungan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
250	2.09-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	594,575,000	100%	275,000,000	100%	340,000,000	100%	396,200,000	100%	454,500,000	100%	561,520,000	100%	2,027,220,000	Dinas Perhubungan
251	2.09-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	160,000,000	100%	110,000,000	100%	172,800,000	100%	182,300,000	100%	192,200,000	100%	272,400,000	100%	929,700,000	Dinas Perhubungan
252	2.09-11	Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi dan workshop	Jumlah sosialisasi terselenggara	0	0	0	0	4 kegiatan	134,900,000	4 kegiatan	140,200,000	4 kegiatan	145,600,000	4 kegiatan	151,300,000	4 kegiatan	572,000,000	Dinas Perhubungan
253	2.09-15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	11 dokumen	1,225,000,000	11.00 dokumen	1,000,000,000	10 dokumen	6,571,932,000	10 dokumen	8,229,059,000	10 dokumen	8,730,366,000	10 dokumen	16,020,802,000	11 dokumen	40,552,159,000	Dinas Perhubungan
254	2.09-17	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	20 kegiatan	5,188,910,100	23 kegiatan	4,065,000,000	23 kegiatan	7,389,869,000	23 kegiatan	8,879,240,000	23 kegiatan	9,086,900,000	23 kegiatan	17,019,547,000	23 kegiatan	46,440,556,000	Dinas Perhubungan
255	2.09-18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sungai dalam kondisi baik	17 kegiatan	1,873,324,400	29 Kegiatan	1,400,000,000	27 kegiatan	5,799,406,934	17 kegiatan	7,103,580,000	15 kegiatan	7,544,117,000	11 kegiatan	15,614,398,000	11 kegiatan	37,461,501,934	Dinas Perhubungan
256	2.09-19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase berkurangnya angka kecelakaan angkutan umum	1 Paket	250,000,000	80 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	50,000,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	956,050,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	1,153,565,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	1,352,050,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	3,145,450,000	100 daun rambu, 100 meter guardrail, 1 buah rppj, 10 delinator, 2 traffic light, 5 warning, 6 LPJU tenaga surya	6,657,115,000	Dinas Perhubungan
257	2.09-24	Program Pengadaan Fasilitas Operasional Kendaraan Bermotor	Tersedianya fasilitas Operasional Kendaraan bermotor	0	0	1 unit	500,000,000	1 unit	510,000,000	1 unit	540,000,000	1 unit	570,000,000	1 unit	610,000,000	1 unit	2,730,000,000	Dinas Perhubungan
258	2.09-25	Program Peningkatan Kelembagaan dan kualitas aparaturnya	Jumlah aparaturnya memenuhi standar kompetensi	3 laporan	150,000,000	3 laporan	60,000,000	3 laporan	177,800,000	3 laporan	192,500,000	3 laporan	207,800,000	3 laporan	323,700,000	3 laporan	961,800,000	Dinas Perhubungan
259	2.09-27	Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah fasilitas keselamatan jalan terpasang	38 lokasi dan 1 kegiatan pemeliharaan	1,511,556,900	47 lokasi dan 1 kegiatan pemeliharaan	955,000,000	75 lokasi dan 1 pemeliharaan	1,523,500,000	76 lokasi dan 1 pemeliharaan	1,699,900,000	77 lokasi dan 1 pemeliharaan	1,883,200,000	78 lokasi dan 1 pemeliharaan	2,573,700,000	78 lokasi dan 1 pemeliharaan	8,635,300,000	Dinas Perhubungan
260	2.09-34	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	194,300,000	1 Dokumen	201,800,000	1 Dokumen	209,700,000	1 Dokumen	217,900,000	5 dokumen	923,700,000	Dinas Perhubungan
	2.10	Komunikasi dan Informatika			4,571,748,471		5,100,000,000		9,437,804,000		10,928,201,000		13,117,110,000		23,539,581,000		62,122,696,000	
261	2.10-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	1,764,321,860	100%	2,806,000,000	100%	3,810,000,000	100%	3,924,000,000	100%	4,189,000,000	100%	7,283,000,000	100%	22,012,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
262	2.10-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	100%	50,000,000	100%	75,000,000	100%	451,000,000	100%	617,000,000	100%	652,000,000	100%	732,000,000	100%	2,527,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
263	2.10-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	63,000,000	100%	95,000,000	100%	116,000,000	100%	145,000,000	100%	184,000,000	100%	201,000,000	100%	741,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
264	2.10-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	87,235,000	100%	0	100%	80,000,000	100%	164,000,000	100%	187,000,000	100%	204,000,000	100%	635,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
265	2.10-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	35,000,000	100%	130,000,000	100%	282,000,000	100%	287,000,000	100%	299,000,000	100%	342,000,000	1 tahun	1,340,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
266	2.10-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	0	0	0	0	1 Dokumen	53,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	58,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	226,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
267	2.10-15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan komunikasi, informasi dan media massa	24 kegiatan, 100 berita, dan 20 orang terlatih	935,301,036	32 kegiatan, 200 berita dan 30 orang terlatih	834,000,000	32 kegiatan, 200 berita dan 30 orang terlatih	1,968,463,000	32 kegiatan, 250 berita dan 35 orang terlatih	2,692,451,000	32 kegiatan, 300 berita dan 40 orang terlatih	4,021,069,000	32 kegiatan, 350 berita dan 45 orang terlatih	9,402,225,000	32 kegiatan, 350 berita dan 45 orang terlatih	18,918,208,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
268	2.10-17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1 workshop/sosialisasi	50,000,000	1 workshop/sosialisasi	60,000,000	2workshop/sosialisasi	238,550,000	3workshop/sosialisasi	423,810,000	3workshop/sosialisasi	612,600,000	3workshop/sosialisasi	1,388,300,000	3workshop/sosialisasi	2,723,260,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
269	2.10-18	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah informasi dapat diakses	4 kegiatan	250,000,000	3 kegiatan	150,000,000	4 kegiatan	261,800,000	5 kegiatan	278,600,000	5 kegiatan	286,100,000	5 kegiatan	384,300,000	5 kegiatan	1,360,800,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
270	2.10-19	Program pengembangan pos telekomunikasi dan informatika	jumlah pos telekomunikasi dan informatika yang dikembangkan	3 dokumen	332,152,200	0	0	3 dokumen, 5 buah BTS	334,700,000	3 dokumen, 5 buah BTS	335,800,000	3 dokumen, 5 buah BTS	338,500,000	3 dokumen, 5 buah BTS	475,100,000	3 dokumen, 5 buah BTS	1,484,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
271	2.10-20	Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	0	0	0	0	1 paket	403,000,000	1 paket	411,000,000	2 paket	556,000,000	3 paket	682,000,000	3 paket	2,052,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
272	2.10-21	Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)	Cakupan layanan SIMDA	1 kegiatan	127,847,125	1 kegiatan	100,000,000	2 kegiatan	271,291,000	3 kegiatan	371,540,000	4 kegiatan	429,841,000	5 kegiatan	939,656,000	5 kegiatan	2,112,328,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
273	2.10-22	Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dimanfaatkan dengan optimal	1 kegiatan	80,000,000	0	0	1 kegiatan	81,000,000	2 kegiatan	82,000,000	3 kegiatan	87,000,000	3 kegiatan	91,000,000	3 kegiatan	341,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
274	2.10-23	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dimanfaatkan dengan optimal	7 kegiatan	796,891,250	8 kegiatan	850,000,000	10 kegiatan	1,087,000,000	10 kegiatan	1,141,000,000	10 kegiatan	1,217,000,000	10 kegiatan	1,355,000,000	10 kegiatan	5,650,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			6,381,014,000		7,192,060,000		9,642,579,000		12,753,062,000		14,512,715,000		29,781,499,000		73,881,915,000	
275	2.11-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang tertayani dengan baik	100%	1,627,745,020	100%	1,906,054,000	100%	1,734,000,000	100%	1,787,000,000	100%	1,801,000,000	100%	1,975,000,000	100%	9,203,054,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
276	2.11-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	183,620,000	100%	193,445,000	100%	204,700,000	100%	214,600,000	100%	224,900,000	100%	235,600,000	100%	1,073,245,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
277	2.11-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	59,290,000	100%	72,190,000	100%	139,000,000	100%	148,000,000	100%	155,000,000	100%	196,000,000	100%	710,190,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
278	2.11-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	49,768,500	100%	20,011,000	100%	34,000,000	100%	47,200,000	100%	59,900,000	100%	62,600,000	100%	223,711,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
279	2.11-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	252,493,600	100%	217,719,000	100%	252,000,000	100%	261,000,000	100%	270,000,000	100%	280,300,000	6 laporan	1,281,019,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
280	2.11-19	Program penguatan Kelemagaan koperasi	Jumlah lembaga koperasi	3.178 unit	991,889,880	3.100 unit	715,218,000	3.278 unit	1,395,000,000	3.343 unit	1,468,000,000	3.410 unit	1,502,000,000	3.478 unit	1,616,000,000	3.478 unit	6,696,218,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
281	2.11-20	Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM	Jumlah lembaga keuangan mikro	267 unit	136,295,000		403,527,000	302 unit	978,786,000	315 unit	1,983,938,000	327 unit	2,000,000,000	355 unit	4,311,344,000	355 unit	9,677,595,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
282	2.11-21	Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif	Persentase peningkatan produktivitas usaha kecil menengah	60%	81,520,000	70%	585,000,000	75%	604,544,000	80%	704,333,000	85%	967,785,000	90%	1,747,925,000	90%	4,609,587,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
283	2.11-22	Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM	Nilai Transaksi UMKM yang dipromosikan Produknya	25%	306,312,000	15%	190,000,000	40%	806,395,000	50%	929,150,000	75%	1,294,454,000	85%	2,520,167,000	85%	5,740,166,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
284	2.11-23	Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM	Persentase Jumlah UMKM	90%	2,062,500,000	60%	2,337,500,000	60%	2,243,410,000	70%	3,370,176,000	80%	4,234,825,000	90%	11,068,298,000	90%	23,254,209,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
285	2.11-24	Program Peningkatan Daya Saing UMKM	Persentase jumlah wirausaha	70%	629,580,000	65%	551,396,000	80%	1,250,744,000	100%	1,839,665,000	100%	2,002,851,000	100%	5,768,265,000	100%	11,412,921,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.12	Penanaman Modal			6,448,183,000		4,892,570,000		8,563,558,000		11,992,749,000		13,300,047,000		25,155,329,000		63,904,253,000	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
286	2.12-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,892,076,000	100%	2,458,570,000	100%	3,175,500,000	100%	3,226,700,000	100%	3,383,700,000	100%	3,546,900,000	100%	15,791,370,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
287	2.12-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	1,096,049,000	100%	594,720,000	100%	648,000,000	100%	704,500,000	100%	963,200,000	100%	1,225,400,000	100%	4,135,820,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
288	2.12-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	96,650,000	100%	32,280,000	100%	74,900,000	100%	80,200,000	100%	95,600,000	100%	106,300,000	100%	389,280,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
289	2.12-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	190,000,000	100%	170,000,000	100%	250,800,000	100%	264,500,000	100%	278,700,000	100%	393,500,000	100%	1,357,500,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
290	2.12-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	34,500,000	100%	42,000,000	100%	41,500,000	100%	43,100,000	100%	44,800,000	100%	46,600,000	6 laporan	218,000,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
291	2.12-15	Program Pameran Promosi Investasi	Jumlah promosi dan kerjasama investasi	5 buah	668,380,000	5 buah	480,000,000	5 buah	831,027,000	5 buah	1,943,346,000	5 buah	2,101,115,000	5 buah	5,820,859,000	5 buah	11,176,347,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
292	2.12-16	Program Capaian Realisasi Investasi	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PVDN (milyar rupiah)	35	300,000,000	38	190,000,000	40	414,369,000	43	622,389,000	45	661,733,000	48	1,209,924,000	48	3,098,415,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
293	2.12-17	Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Persentase capaian target pengawasan	0	0	90%	530,000,000	90%	674,900,000	95%	993,500,000	100%	1,212,700,000	100%	2,482,700,000	100%	5,893,800,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
294	2.12-18	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan investasi	7	1,443,678,200	7	395,000,000	7	1,492,420,000	7	2,832,048,000	7	3,058,303,000	7	7,672,505,000	7	15,450,276,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
295	2.12-19	Program Pengembangan Iklim Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PVDN/PVA) (Unit)	505	390,000,000	0	0	550	610,142,000	573	837,466,000	595	998,196,000	618	1,961,641,000	618	4,407,445,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
296	2.12-20	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	jumlah sarana dan prasarana yang disiapkan	2 unit	336,849,800		0	2 unit	350,000,000	2 unit	445,000,000	2 unit	502,000,000	2 unit	689,000,000	2 unit	1,986,000,000	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	213	Keperguruan dan Olahraga			42,691,613,000		10,058,340,000		22,309,150,000		24,058,860,000		24,975,050,000		29,524,830,000		110,926,230,000	
297	2.13-15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	50 orang	153,947,000	0	0	50 orang	155,980,000	50 orang	164,760,000	50 orang	178,150,000	50 orang	197,430,000	50 orang	696,320,000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat
298	2.13-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,501,900,900	100%	2,216,340,000	100%	2,670,000,000	100%	2,755,000,000	100%	2,794,700,000	100%	3,258,200,000	100%	13,694,240,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
299	2.13-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	226,725,500	100%	75,000,000	100%	319,200,000	100%	382,400,000	100%	398,000,000	100%	416,200,000	100%	1,590,800,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
300	2.13-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	99,750,000	100%	110,000,000	100%	107,900,000	100%	112,100,000	100%	116,500,000	100%	121,000,000	100%	567,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
301	2.13-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	0	100%	25,000,000	100%	65,900,000	100%	72,100,000	100%	86,500,000	100%	91,000,000	100%	340,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
302	2.13-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	257,000,000	100%	112,803,000	100%	277,400,000	100%	288,200,000	100%	299,400,000	100%	311,100,000	8 Laporan	1,288,903,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
303	2.13-15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	67 kegiatan	80,000,000	68 kegiatan	25,000,000	69 kegiatan	354,100,000	70 kegiatan	369,300,000	71 kegiatan	426,600,000	72 kegiatan	686,100,000	72 kegiatan	1,861,100,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
304	2.13-16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	67 buah	6,150,926,800	68 buah	1,125,000,000	69 buah	3,694,000,000	70 buah	3,772,100,000	71 buah	3,864,900,000	72 buah	4,873,000,000	72 buah	17,329,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
305	2.13-17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda berwirausaha	0	0	52%	200,000,000	53%	378,700,000	54%	416,600,000	55%	425,200,000	56%	514,500,000	56%	1,935,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
306	2.13-18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	jumlah peserta (pemuda) yang mengikuti sosialisasi pencegahan narkoba	0	0	50 orang	185,000,000	60 orang	270,000,000	70 orang	320,000,000	80 orang	370,000,000	90 orang	410,000,000	450 orang	1,555,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
307	2.13-19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen	Jumlah organisasi olahraga	42 buah	2,225,875,400	42 buah	25,000,000	42 buah	501,570,000	43 buah	604,700,000	43 buah	724,400,000	43 buah	1,314,800,000	43 buah	3,170,470,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
308	2.13-20	Program Pembinaan dan Pemasyarakan Olahraga	Jumlah cabang olah raga yang dibina; persentase peningkatan pembinaan olah raga	0	0	15	1,700,000,000	15	3,750,000,000	20	3,810,000,000	21	3,987,000,000	21	4,687,000,000	21	17,934,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
309	2.13-21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	60%	30,502,057,600	60%	3,650,000,000	60%	8,801,000,000	60%	9,910,000,000	75%	10,024,000,000	75%	11,142,000,000	75%	43,527,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
310	2.13-22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda	Gelandang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	38	250,000,000	37	135,000,000	38	250,800,000	38	264,500,000	39	278,700,000	39	293,500,000	39	1,222,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
311	2.13-24	Program Pembinaan dan pengembangan Prestasi Olah Raga	Jumlah pemuda yang berprestasi	0	0	15 orang	150,000,000	30 orang	347,700,000	40 Orang	412,900,000	70 Orang	569,200,000	90 orang	722,400,000	90 orang	2,202,200,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
312	2.13-25	Program Peningkatan Budaya dan Prestasi Olah Raga	Jumlah festival olahraga dan budaya yang terselenggara	0	0	0	0	1 kegiatan	121,900,000	2 kegiatan	138,200,000	2 kegiatan	144,800,000	3 kegiatan	181,600,000	3 kegiatan	586,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
313	2.13-28	Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	peringkatan penyediaan data dan informasi	1	243,429,800	1	324,197,000	2	243,000,000	3	266,000,000	4	287,000,000	4	305,000,000	4	1,425,197,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	214	Statistik			0		340,130,000		1,190,000,000		1,610,000,000		1,670,000,000		1,700,000,000		6,510,130,000	
314	2.14-15	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah dokumen pengembangan data/informasi/statistik daerah	0	0	8 dokumen	340,130,000	13 dokumen	790,000,000	14 dokumen	810,000,000	15 dokumen	870,000,000	30 dokumen	900,000,000	30 dokumen	3,710,130,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
315	2.14-16	Program Statistik Sektoral	jumlah dokumen hasil kompilasi statistik sektoral	0	0	0	0	3 dokumen	250,000,000	6 dokumen	500,000,000	6 dokumen	500,000,000	6 dokumen	500,000,000	6 dokumen	1,750,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
316	2.14-17	Program Statistik Dasar	Jumlah dokumen hasil kompilasi statistik dasar	0	0	0	0	2 dokumen	150,000,000	4 dokumen	300,000,000	4 dokumen	300,000,000	4 dokumen	300,000,000	4 dokumen	1,050,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	215	Persandian			0		150,000,000		1,300,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		6,650,000,000	
317	2.15-15	Program Pengembangan Persandian Daerah	Tersedianya layanan dan pengembangan persandian daerah	0	0	1 paket	150,000,000	1 paket	500,000,000	3 paket	600,000,000	3 paket	600,000,000	3 paket	600,000,000	3 paket	2,450,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
318	2.15-16	Program Analisis Sinyal	jumlah hasil analisis sinyal	0	0	0	0	1 kegiatan	300,000,000	2 kegiatan	400,000,000	2 kegiatan	400,000,000	2 kegiatan	500,000,000	2 kegiatan	1,600,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
319	2.15-17	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terlaksananya pengamanan informasi	0	0	0	0	1 kegiatan	300,000,000	2 kegiatan	400,000,000	2 kegiatan	400,000,000	2 kegiatan	400,000,000	2 kegiatan	1,500,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
320	2.15-18	Program Akreditasi dan Sertifikasi	Jumlah peserta yang mengikuti akreditasi dan sertifikasi persandian	0	0	0	0	50 orang	200,000,000	150 orang	300,000,000	150 orang	300,000,000	150 orang	300,000,000	150 orang	1,100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	216	Kebudayaan			10,129,742,000		6,466,670,000		11,348,400,000		11,695,000,000		12,528,900,000		18,326,014,000		60,364,984,000	
321	2.16-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang tertayani dengan baik	100%	3,089,500,000	100%	2,536,670,000	100%	2,900,000,000	100%	2,955,000,000	100%	3,012,000,000	100%	3,495,514,000	100%	14,899,184,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
322	2.16-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	100%	2,551,500,000	100%	810,000,000	100%	1,067,000,000	100%	1,087,000,000	100%	1,105,000,000	100%	1,155,000,000	100%	5,224,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
323	2.16-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	0	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	68,000,000	100%	74,000,000	100%	267,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
324	2.16-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	80,000,000	100%	50,000,000	100%	53,000,000	100%	56,000,000	100%	59,600,000	100%	60,200,000	100%	278,800,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
325	2.16-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	102,742,000	100%	105,000,000	100%	157,000,000	100%	162,000,000	100%	166,000,000	100%	181,000,000	6 laporan	771,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
326	2.16-15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pegelaran seni dan budaya	5 buah	525,000,000	100,00 %	370,000,000	5 kali	511,400,000	5 kali	570,300,000	5 kali	601,000,000	5 kali	695,200,000	5 kali	2,747,900,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
327	2.16-16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	50 buah	2,226,000,000	100,00 %	1,305,000,000	50 buah	4,973,000,000	50 buah	5,116,000,000	50 buah	5,765,000,000	50 buah	10,820,000,000	50 buah	27,979,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
328	2.16-17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pagelaran seni dan budaya	2 buah	755,000,000	100,00 %	630,000,000	2 buah	754,000,000	2 buah	762,700,000	2 buah	792,000,000	2 buah	823,300,000	2 buah	3,762,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
329	2.16-25	Program Pengembangan Karakter dan Pekerti Bangsa	Jumlah organisasi pemuda	0	0	100,00 %	60,000,000	66 buah	64,000,000	66 buah	70,000,000	67 buah	95,000,000	67 buah	111,000,000	67 buah	400,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
330	2.16-26	Program Peningkatan Seni Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490 buah	800,000,000	100,00 %	600,000,000	500 buah	809,000,000	500 buah	851,000,000	500 buah	865,300,000	500 buah	910,800,000	500 buah	4,036,100,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.17	Perpustakaan			5,127,011,750		4,596,880,000		5,955,800,000		6,230,000,000		6,532,500,000		6,830,100,000		30,145,280,000	
331	2.17-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,349,796,300	100%	2,292,854,100	100%	2,620,500,000	100%	2,651,200,000	100%	2,685,100,000	100%	2,702,000,000	100%	12,951,654,100	Dinas Perpustakaan dan Arsip
332	2.17-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	946,935,600	100%	131,000,000	100%	618,500,000	100%	634,100,000	100%	660,800,000	100%	698,500,000	100%	2,742,900,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
333	2.17-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	33,000,000	100%	64,900,000	100%	69,300,000	100%	82,600,000	100%	94,000,000	100%	102,000,000	100%	412,800,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
334	2.17-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	31,333,200	100%	370,000,000	100%	38,800,000	100%	44,800,000	100%	52,900,000	100%	58,100,000	100%	564,600,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
335	2.17-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	396,316,675	100%	73,437,800	100%	445,000,000	100%	467,000,000	100%	488,000,000	100%	496,000,000	8 Laporan	1,969,437,800	Dinas Perpustakaan dan Arsip
336	2.17-15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	110400 orang	785,876,400	860,400	650,326,000	1,610,400	802,000,000	2,360,400	812,000,000	3,110,400	832,000,000	3,860,400	860,000,000	140.400 orang	3,956,326,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
337	2.17-16	Program Pengembangan Dokumentasi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan perpustakaan	14 dokumen	80,673,300	14 dokumen	80,500,000	14 dokumen	91,000,000	14 dokumen	110,000,000	14 dokumen	121,100,000	14 dokumen	136,200,000	14 dokumen	538,800,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
338	2.17-17	Program Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi kepubstakaan	65%	236,647,600	70%	238,862,100	75%	257,800,000	80%	292,500,000	85%	317,800,000	90%	333,700,000	95%	1,440,662,100	Dinas Perpustakaan dan Arsip
339	2.17-18	Program peningkatan kapasitas sarana dan fasilitas perpustakaan	Jumlah sarpras perpustakaan dalam kondisi baik	0	0	0	0	28 unit	239,700,000	28 unit	280,800,000	29 unit	322,600,000	30 unit	375,400,000	30 unit	1,218,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
340	2.17-19	Program peningkatan koleksi perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)	0	0	106	500,000,000	106	511,000,000	106	570,000,000	106	631,000,000	107	695,000,000	107	2,907,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
341	2.17-20	Program peningkatan SDM pengelola perpustakaan	Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang berkinerja baik	5 orang	156,897,675	6 orang	120,000,000	7 orang	135,600,000	8 orang	151,000,000	9 orang	187,000,000	10 orang	223,700,000	10 orang	817,300,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
342	2.17-23	Program monitoring dan evaluasi pengembangan perpustakaan	Persentase pencapaian target	80%	30,000,000	80%	30,000,000	80%	43,900,000	80%	46,000,000	80%	48,200,000	80%	50,500,000	100%	218,600,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
343	2.17-24	Program pengembangan data/informasi	Jumlah Data dan Informasi	14 jenis	79,535,000	14 jenis	45,000,000	14 jenis	82,700,000	14 jenis	88,000,000	14 jenis	92,000,000	14 jenis	99,000,000	14 jenis	406,700,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.18	Arsip			246,474,250		246,200,000		252,200,000		272,200,000		297,900,000		324,300,000		1,392,800,000	
344	2.18-15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase dokumen administrasi yang telah diarsipkan dengan baik	65%	85,120,550	70%	83,700,000	75%	88,600,000	80%	98,200,000	85%	113,000,000	90%	128,000,000	90%	511,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
345	2.18-16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Arsip Statis Hasil Akuisi yang dikelola dengan Baik	80%	157,373,700	80%	155,500,000	80%	155,400,000	80%	165,300,000	80%	175,700,000	80%	186,400,000	80%	838,300,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
346	2.18-17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	60%	3,980,000	70%	7,000,000	70%	8,200,000	75%	8,700,000	80%	9,200,000	85%	9,900,000	85%	43,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	3	URUSAN PILIHAN			132,881,092,020		148,190,807,000		191,531,988,000		208,655,445,000		225,559,984,000		343,898,663,000		1,117,836,887,000	
	3.01	Kelautan dan Perikanan			9,931,653,000		22,079,870,000		22,731,998,000		24,965,945,000		27,580,785,000		38,651,421,000		136,010,019,000	
347	3.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,107,011,500	100%	1,011,145,000	100%	1,179,000,000	100%	1,189,000,000	100%	1,225,000,000	100%	1,500,000,000	100%	6,104,145,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
348	3.01-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	354,150,000	100%	132,500,000	100%	272,000,000	100%	283,000,000	100%	294,000,000	100%	305,000,000	100%	1,286,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
349	3.01-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	50,000,000	100%	93,500,000	100%	115,000,000	100%	119,000,000	100%	134,000,000	100%	160,000,000	100%	621,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
350	3.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	50,000,000	100%	40,000,000	100%	70,000,000	100%	84,000,000	100%	87,000,000	100%	99,000,000	100%	380,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
351	3.01-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	68,500,000	100%	332,000,000	100%	478,000,000	100%	494,000,000	100%	530,000,000	100%	623,000,000	6 laporan	2,457,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
352	3.01-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	85,000,000	1.00 dokumen	45,000,000	1 Dokumen	77,000,000	1 Dokumen	79,000,000	1 Dokumen	81,000,000	1 Dokumen	90,000,000	5 dokumen	372,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
353	3.01-21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Jumlah hasil tangkapan dalam setiap upaya perangkapan (Ton/Tahun)	131	1,673,224,070	131	13,644,530,000	131	14,300,937,000	131	15,212,008,000	131	15,968,186,000	131	24,542,416,000	131	83,668,077,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
354	3.01-25	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	300	685,595,000	48	368,000,000	48	896,058,000	49	913,244,000	49	1,256,166,000	50	3,311,785,000	50	6,745,253,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
355	3.01-26	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha/tahun); Jumlah luas dan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha/tahun); dan Dokumen kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (dokumen)	172	814,200,000	171.679 ;2,5; dan 1	790,000,000	171.679 ;2,5; dan 1	927,446,000	171.679 ;2,5; dan 1	1,116,531,000	171.679 ;2,5; dan 1	1,460,761,000	171.679 ;2,5; dan 1	3,999,314,000	171.679 ;2,5; dan 1	8,294,052,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
356	3.01-27	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas yang aktif (kelompok/tahun); dan Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan UU (%)	75	515,800,000	22;70	280,000,000	25;75	653,446,000	30;80	758,656,000	40;85	965,634,000	40;85	1,917,715,000	40;85	4,575,451,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
357	3.01-28	Program Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	70%	303,000,000	75%	98,000,000	78%	134,000,000	80%	167,000,000	85%	169,000,000	87%	211,000,000	87%	779,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
358	3.01-29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi ikan konsumsi (ton/tahun); dan produksi benih (ekor)	31	3,865,223,930	85.173.26:59.500	5,245,195,000	97.276.39:61.343 ribu	3,267,111,000	110.84240:64.410 ribu	4,163,506,000	116.384.52:67630 ribu	5,000,708,000	119.876.05:70.335 ribu	1,371,791,000	119.876.05:70.335 ribu	19,048,311,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
359	3.01-31	Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Persentase capaian program perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan	100%	359,948,500	0	0	100%	362,000,000	100%	387,000,000	100%	409,330,000	100%	520,400,000	100%	1,678,730,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.02	Pariwisata			1,322,500,000		2,710,000,000		3,102,147,000		4,089,596,000		5,762,094,000		13,323,480,000		28,987,317,000	
360	3.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	0	100%	490,000,000	100%	53,000,000	100%	56,000,000	100%	59,600,000	100%	60,200,000	100%	718,800,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
361	3.02-15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	80%	922,500,000	100.00%	430,000,000	100%	1,546,347,000	100%	1,745,817,000	100%	2,019,097,000	100%	5,804,340,000	100%	11,545,601,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
362	3.02-16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	2	275,000,000	100.00%	1,685,000,000	3	1,086,820,000	3	1,787,514,000	3	2,898,422,000	3	6,047,130,000	3	13,504,886,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
363	3.02-17	Program Pengembangan Kermitraan Pariwisata	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah	80%	125,000,000	100.00%	105,000,000	100%	415,980,000	100%	500,265,000	100%	784,975,000	100%	1,411,810,000	100%	3,218,030,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.03	Pertanian			69,022,252,320		47,464,070,000		104,176,140,000		110,629,861,000		115,602,340,000		160,316,609,000		538,189,020,000	
364	3.03-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	102	821,993,000		100,000,000	1,035	1,715,320,000	1,035	2,241,436,000	106	3,558,902,000	1,075	7,445,295,000	1,075	15,060,953,000	Dinas Ketahanan Pangan
365	3.03-16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Koefisien varian harga/fluktuasi harga beras (%)	5%	472,425,000	5%	460,000,000	5%	480,000,000	5%	490,000,000	5%	513,300,000	5%	620,400,000	5%	2,563,700,000	Dinas Ketahanan Pangan
366	3.03-28	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM	Persentase jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan /workshop dengan jumlah penyuluh yang ada (%)	20,70%	379,021,520	0	0	32%	358,000,000	34%	394,100,000	34%	400,000,000	35%	480,597,000	355%	1,632,697,000	Dinas Ketahanan Pangan
367	3.03-31	Program Penyelenggaraan Penyuluhan dan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah pembuatan unit percontohan/demplot penyuluhan pertanian, perikanan dan pertanian (unit)	40 unit	246,418,000		0	43 unit	247,000,000	46 unit	266,000,000	48 unit	288,500,000	50 unit	300,400,000	50 unit	1,101,900,000	Dinas Ketahanan Pangan
368	3.03-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,361,301,700	100%	2,844,934,000	100%	2,999,260,000	100%	3,013,627,000	100%	3,107,258,000	100%	4,145,321,000	100%	16,110,400,000	Dinas Perkebunan
369	3.03-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	707,440,000	100%	506,352,000	100%	274,686,000	100%	284,319,000	100%	357,837,000	100%	565,393,000	100%	1,988,587,000	Dinas Perkebunan
370	3.03-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	103,079,600	100%	0	100%	77,725,000	100%	80,756,000	100%	83,906,000	100%	87,178,000	100%	329,565,000	Dinas Perkebunan
371	3.03-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	199,148,000	100%	149,110,000	100%	355,136,000	100%	363,446,000	100%	414,031,000	100%	576,978,000	100%	1,858,701,000	Dinas Perkebunan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
372	3.03-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	659,898,000	100%	419,109,000	100%	621,705,000	100%	657,652,000	100%	695,000,000	100%	733,805,000	6 laporan	3,127,271,000	Dinas Perkebunan
373	3.03-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	18,565,000	1 Dokumen	52,000,000	1 Dokumen	54,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	57,000,000	5 dokumen	236,565,000	Dinas Perkebunan
374	3.03-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani	102	1,781,970,359	10,275	1,703,980,900	1,035	15,996,530,000	1,035	16,939,435,000	106	17,372,025,000	1,075	26,731,032,000	1,075	78,743,002,900	Dinas Perkebunan
375	3.03-16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Penyuluhan peningkatan produktivitas komoditi perkebunan (orang/tahun)	50 orang/th	34,575,000	0	50 orang/th	43,800,000	75 orang/th	56,400,000	75 orang/th	69,600,000	100 orang/th	83,200,000	100 orang/th	253,000,000	Dinas Perkebunan	
376	3.03-17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase hasil produksi perkebunan yang dipasarkan (%)	94%	1,204,729,619	96%	2,100,984,000	98%	3,920,900,000	100%	4,811,400,000	100%	5,505,500,000	100%	11,603,200,000	100%	27,941,984,000	Dinas Perkebunan
377	3.03-18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase penerapan teknologi pertanian/perkebunan (%)	80%	1,134,017,500	80%	860,982,000	85%	2,245,400,000	90%	2,390,900,000	95%	2,423,900,000	100%	4,518,400,000	100%	12,439,582,000	Dinas Perkebunan
378	3.03-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas hasil pertanian/perkebunan 6 komoditas (kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam lada dan kopi) (Kg/Ha)	3	16,173,005,222	3	9,407,633,100	3	15,904,559,000	3	16,590,485,000	3	16,793,803,000	3	22,630,126,000	3	81,326,606,100	Dinas Perkebunan
379	3.03-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,210,180,000	100%	1,990,000,000	100%	2,146,030,000	100%	2,171,285,000	100%	2,199,865,000	100%	2,211,900,000	100%	10,719,080,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
380	3.03-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	1,680,320,800	100%	1,319,500,000	100%	1,145,257,000	100%	1,198,514,000	100%	1,216,316,000	100%	1,556,763,000	100%	6,436,350,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
381	3.03-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	200,000,000	100%	215,900,000	100%	224,300,000	100%	233,000,000	100%	242,100,000	100%	1,115,300,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
382	3.03-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	0	100%	550,000,000	100%	363,700,000	100%	395,800,000	100%	412,600,000	100%	455,400,000	100%	2,177,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
383	3.03-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	632,354,600	100%	900,000,000	100%	1,159,500,000	100%	1,221,600,000	100%	1,295,300,000	100%	1,370,800,000	6 laporan	5,947,200,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
384	3.03-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	57,900,000	1 Dokumen	85,100,000	1 Dokumen	86,500,000	1 Dokumen	87,000,000	5 dokumen	366,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
385	3.03-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	102	13,388,725,000	10,275	5,404,065,000	1,035	22,468,017,000	1,035	23,133,029,000	106	24,000,950,000	1,075	25,772,540,000	1,075	100,778,601,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386	3.03-17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah hasil produksi pertanian yang dipasarkan (%)	50%	1,616,450,000	60%	1,175,000,000	70%	1,679,000,000	80%	1,788,000,000	90%	1,900,000,000	100%	2,117,000,000	100%	8,659,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
387	3.03-18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase petani menggunakan teknologi pertanian modern (%)	30%	1,211,609,400	30%	600,000,000	35%	1,170,000,000	40%	1,213,000,000	45%	1,362,000,000	50%	1,716,000,000	50%	6,061,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
388	3.03-19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas tanaman pangan (Ku/Ha)	3,626	13,757,212,000	3,734	8,605,000,000	3,828	17,271,493,000	3,904	18,552,254,000	396	19,000,000,000	4,002	23,662,423,000	4,002	87,091,170,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
389	3.03-21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit temak	Persentase temak yang terkena penyakit (%)	10%	652,950,000	9%	1,425,000,000	8%	1,727,100,000	7%	1,875,000,000	6%	1,900,000,000	5%	4,140,000,000	5%	11,067,100,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
390	3.03-22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Produksi Temak (ton/tahun)	4	5,615,990,000	4	5,423,855,000	4	7,854,749,000	5	8,116,976,000	5	8,200,498,000	5	11,949,751,000	5	41,545,829,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
391	3.03-23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase produksi temak yang dipasarkan (%)	50%	256,150,000	60%	150,000,000	70%	204,800,000	80%	220,600,000	90%	230,000,000	100%	284,000,000	100%	1,089,400,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
392	3.03-24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peternak menggunakan teknologi peternakan modern (%)	25%	586,538,000	30%	600,000,000	35%	671,500,000	40%	729,000,000	45%	748,000,000	50%	789,070,000	50%	3,537,570,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
393	3.03-26	Program Perangaran Kawasan Lahan Gambut (PLG)	Luas kawasan lahan gambut yang ditangani (Ha)	200 ha	999,750,000	110 ha	500,000,000	277 ha	749,173,000	650 ha	1,071,447,000	800 ha	1,178,749,000	1000 ha	3,383,537,000	1.000 ha	6,882,906,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	3.04	Kehutanan			9,299,566,000		7,749,110,000		9,514,480,000		11,573,658,000		12,031,500,000		17,704,000,000		53,572,748,000	
394	3.04-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,344,852,000	100%	2,296,875,000	100%	2,349,000,000	100%	2,350,000,000	100%	2,435,000,000	100%	2,534,000,000	100%	11,964,875,000	Dinas Kehutanan
395	3.04-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	643,080,000	100%	1,235,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,267,000,000	100%	1,276,500,000	100%	1,369,000,000	100%	6,397,500,000	Dinas Kehutanan
396	3.04-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	189,000,000	100%	0	100%	198,000,000	100%	202,000,000	100%	315,000,000	100%	421,000,000	100%	1,136,000,000	Dinas Kehutanan
397	3.04-4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah/purna tugas	3 Orang	10,000,000	4 Orang	10,000,000	2 Orang	11,000,000	4 Orang	12,000,000	3 Orang	13,000,000	2 Orang	14,000,000		60,000,000	Dinas Kehutanan
398	3.04-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	260,375,000	100%	69,110,000	100%	102,000,000	100%	145,000,000	100%	157,000,000	100%	245,000,000	100%	718,110,000	Dinas Kehutanan
399	3.04-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	101,000,000	100%	105,000,000	100%	108,000,000	100%	150,000,000	6 laporan	564,000,000	Dinas Kehutanan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400	3.04-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	86,000,000	1 Dokumen	98,000,000	1 Dokumen	394,000,000	Dinas Kehutanan
401	3.04-15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pencapaian target produksi hasil hutan (%)	80%	1,405,680,000	85%	890,000,000	90%	1,572,980,000	95%	2,990,958,000	100%	3,000,000,000	100%	6,000,000,000	100%	14,453,938,000	Dinas Kehutanan
402	3.04-16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi di dalam dan diluar kawasan hutan (Ha)	45.555 ha	700,680,000	45.555 ha	597,125,000	45.555 ha	1,230,000,000	45.555 ha	1,498,000,000	45.555 ha	1,500,000,000	45.555 ha	3,374,000,000	45.555 ha	8,199,125,000	Dinas Kehutanan
403	3.04-17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan (%)	80%	1,765,000,000	85%	1,130,000,000	90%	1,129,500,000	95%	1,268,700,000	100%	1,300,000,000	100%	1,476,000,000	100%	6,304,200,000	Dinas Kehutanan
404	3.04-20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Luas pemeliharaan hutan industri dan hutan wisata	4 dokumen	785,000,000	4 dokumen	480,000,000	4 dokumen	600,000,000	4 dokumen	710,000,000	4 dokumen	861,000,000	4 dokumen	923,000,000	4 dokumen	3,574,000,000	Dinas Kehutanan
405	3.04-23	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Jumlah unit KPH dan Tahura di Kalimantan Tengah	4	1,025,899,000	4	881,000,000	4	901,000,000	4	945,000,000	4	980,000,000	4	1,100,000,000	4	4,807,000,000	Dinas Kehutanan
	3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral			26,693,981,000		55,630,750,000		22,567,740,000		23,727,333,000		26,871,609,000		47,202,623,000		176,000,055,000	
406	3.05-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	3,468,372,250	100%	3,605,130,000	100%	3,702,000,000	100%	3,853,000,000	100%	3,953,000,000	100%	4,604,000,000	100%	19,717,130,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
407	3.05-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	953,300,000	100%	1,726,920,000	100%	1,744,000,000	100%	1,770,000,000	100%	1,839,000,000	100%	1,911,000,000	100%	8,990,920,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
408	3.05-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	237,161,750	100%	250,000,000	100%	259,000,000	100%	262,000,000	100%	276,000,000	100%	319,000,000	100%	1,366,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
409	3.05-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	226,000,000	100%	235,000,000	100%	244,000,000	100%	254,000,000	100%	1,109,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
410	3.05-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	258,700,000	100%	166,200,000	100%	196,000,000	100%	207,000,000	100%	219,000,000	100%	322,000,000	6 laporan	1,110,200,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
411	3.05-17	Program pembinaan dan pengembangan bidang keteragalistrikan	Jumlah SDM bidang keteragalistrikan mendapat pembinaan (%)	80%	20,000,000	100.00 %	60,000,000	90%	258,411,000	95%	497,270,000	98%	516,173,000	100%	1,354,985,000	100%	2,686,839,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
412	3.05-18	Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas	Jumlah pengusaha minyak dan gas yang mendapat pembinaan (kabupaten)	2	335,000,000	100.00 %	210,000,000	3	337,000,000	4	345,000,000	4	350,000,000	4	400,000,000	4	1,642,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
413	3.05-19	Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi (%)	Persentase tingkat kualitas dan akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi (%)	93%	340,000,000	100.00 %	225,000,000	96%	397,000,000	97%	401,000,000	98%	426,000,000	100%	431,000,000	100%	1,880,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
414	3.05-20	Program Pembinaan Dan Pelayanan Perijinan Pertambangan	Meningkatnya pelayanan perijinan pertambangan (%)	97%	178,000,000	100.00 %	185,000,000	98%	469,485,000	98%	619,101,000	99%	705,963,000	100%	1,972,351,000	100%	3,951,900,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
415	3.05-21	Program Bimbingan Teknis Dan Penyiapan Wilayah Pertambangan	Persentase Terlaksananya bimbingan teknis dan wilayah pertambangan (%)	100%	144,000,000	100.00 %	165,000,000	100%	171,000,000	100%	183,000,000	100%	190,000,000	100%	204,000,000	100%	913,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
416	3.05-22	Program Pengusahaan Listrik Dan Energi	Persentase terwujudnya pengusahaan listrik dan energi (%)	80%	225,000,000	100.00 %	100,000,000	90%	106,000,000	95%	109,000,000	98%	111,000,000	100%	141,000,000	100%	567,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
417	3.05-23	Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	Rasio elektrifikasi (%)	72,5%	18,903,087,000	100.00 %	47,311,000,000	79,5%	12,780,864,000	83,5%	13,101,110,000	87,5%	15,816,933,000	92,5%	32,283,632,000	92,5%	121,293,539,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
418	3.05-25	Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi	Persentase meningkatnya informasi di bidang geologi (%)	80%	410,000,000	100,00 %	312,000,000	85%	358,000,000	85%	373,000,000	85%	389,000,000	100%	435,000,000	100%	1,867,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
419	3.05-26	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium	Persentase terwujudnya Peningkatan Kapasitas Laboratorium (%)	96%	426,000,000	100,00 %	10,000,000	97%	19,000,000	98%	23,000,000	99%	28,000,000	100%	45,000,000	100%	125,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
420	3.05-27	Program Monitoring Dan Evaluasi	Jumlah program yang dimonitoring dan dievaluasi	17	156,000,000	100,00 %	190,000,000	17	330,000,000	17	343,000,000	17	356,000,000	17	370,000,000	17	1,589,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
421	3.05-28	Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	Jumlah GMP yang diterapkan oleh pemegang izin usaha pertambangan	79	351,000,000	100,00 %	805,500,000	219	798,000,000	289	807,000,000	370	812,000,000	554	845,000,000	554	4,067,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
422	3.05-31	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase promosi dan kerjasama investasi (%)	80%	138,360,000		159,000,000	85%	415,980,000	90%	598,852,000	95%	639,540,000	100%	1,310,655,000	100%	3,124,027,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.06	Perdagangan			10,574,665,000		8,081,710,000		17,919,210,000		20,709,646,000		23,870,221,000		41,483,875,000		112,064,662,000	
423	3.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,180,277,000	100%	2,409,102,000	100%	2,600,500,000	100%	2,657,800,000	100%	2,738,000,000	100%	3,921,400,000	100%	14,326,802,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
424	3.06-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	3,807,688,000	100%	990,000,000	100%	1,478,000,000	100%	1,532,700,000	100%	1,553,500,000	100%	2,575,100,000	100%	8,129,300,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
425	3.06-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	150,000,000	100%	100,200,000	100%	156,800,000	100%	162,200,000	100%	177,700,000	100%	183,500,000	100%	780,400,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
426	3.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	25,000,000	100%	20,000,000	100%	24,900,000	100%	30,200,000	100%	35,600,000	100%	51,300,000	100%	162,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
427	3.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	125,000,000	100%	115,128,000	100%	80,300,000	100%	117,700,000	100%	122,300,000	100%	127,100,000	6 laporan	562,528,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
428	3.06-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	64,700,000	1 Dokumen	87,200,000	1 Dokumen	91,900,000	1 Dokumen	99,600,000	5 dokumen	388,400,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
429	3.06-15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanaan perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	1,1%	2,146,700,000	1,15%	2,202,280,000	1,20%	6,606,810,000	1,25%	7,352,973,000	1,30%	8,992,113,000	1,35%	16,087,640,000	1,35%	41,241,816,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
430	3.06-17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	1	980,000,000	1	1,650,000,000	1	3,538,900,000	1	4,910,600,000	1	5,985,200,000	1	8,062,600,000	1	24,147,300,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
431	3.06-18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pembinaan kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP (%)	90%	1,085,000,000	90%	550,000,000	95%	2,968,300,000	100%	3,278,273,000	100%	3,573,908,000	100%	9,175,635,000	100%	19,546,116,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
432	3.06-21	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Tingkat inflasi yang terkendali (%)	0	0	0	0	4,0%	400,000,000	3,8%	580,000,000	3,6%	600,000,000	3,4%	1,200,000,000	3,4%	2,780,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3.07	Perindustrian			3,162,304,000		2,502,520,000		5,274,382,000		6,372,282,000		6,907,031,000		16,586,377,000		37,642,592,000	
433	3.07-16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	657 orang	2,539,804,000	690 orang	2,042,520,000	725 orang	3,796,288,000	760 orang	4,132,862,000	798 orang	4,350,276,000	830 orang	9,564,516,000	830 orang	23,886,462,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
434	3.07-20	Program penumbuhan Industri agro	Persentase pertumbuhan Industri agro (%)	70%	622,500,000	75%	460,000,000	80%	1,478,094,000	85%	2,239,420,000	90%	2,556,755,000	100%	7,021,861,000	100%	13,756,130,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.08	Transmigrasi			2,874,170,700		1,972,777,000		6,245,891,000		6,587,124,000		6,934,404,000		8,630,278,000		30,370,474,000	
435	3.08-15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Transmigran swakarsa (KK)	100%	1,840,970,700	0	0	100%	1,948,000,000	100%	1,996,000,000	100%	2,070,000,000	100%	2,110,000,000	100%	8,124,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
436	3.08-18	Program Percepatan Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah kawasan transmigrasi terbangun	100%	686,250,000	0	0	100%	1,301,987,000	100%	1,486,800,000	100%	1,581,331,000	100%	2,988,116,000	100%	7,358,234,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
437	3.08-20	Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	100%	251,700,000	0	0	100%	250,000,000	100%	265,000,000	100%	275,000,000	100%	300,000,000	100%	1,090,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
438	3.08-21	Pengembangan Masyarakat dan kawasan transmigrasi	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	100%	95,250,000	12.00 Bulan	1,014,177,000	100%	1,295,904,000	100%	1,324,324,000	100%	1,383,073,000	100%	1,432,162,000	100%	6,449,640,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
439	3.08-22	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	0	0	100%	798,600,000	100%	1,200,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,500,000,000	100%	6,098,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
440	3.08-23	Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	0	0	100%	160,000,000	100%	250,000,000	100%	265,000,000	100%	275,000,000	100%	300,000,000	100%	1,250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			223,685,105,858		247,507,478,000		243,436,694,000		254,998,208,000		266,341,470,000		313,293,099,000		1,325,576,949,000	
	4.01	Perencanaan			18,198,607,400		14,649,790,000		19,769,027,000		23,260,253,000		25,301,294,000		35,020,641,000		118,001,005,000	
441	4.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	4,844,467,414	100%	4,137,500,000	100%	4,790,000,000	100%	5,604,700,000	100%	5,823,300,000	100%	6,050,400,000	100%	26,405,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
442	4.01-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	1,875,000,000	100%	1,525,000,000	100%	2,320,000,000	100%	2,559,100,000	100%	2,593,300,000	100%	2,946,800,000	100%	11,944,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
443	4.01-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	364,550,000	100%	150,000,000	100%	582,000,000	100%	605,600,000	100%	629,200,000	100%	653,800,000	100%	2,620,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
444	4.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	2,050,000	100%	50,000,000	100%	113,000,000	100%	114,100,000	100%	116,500,000	100%	121,000,000	100%	514,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
445	4.01-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	169,706,000	100%	75,000,000	100%	124,000,000	100%	145,000,000	100%	168,100,000	100%	193,100,000	25 laporan, 1 dokumen	705,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
446	4.01-8	Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	0	0	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	41,980,000	1 Dokumen	45,206,000	1 Dokumen	56,271,000	1 Dokumen	120,084,000	1 dokumen	318,541,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
447	4.01-15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	10%	2,402,851,491	5%	1,607,000,000	5%	1,300,000,000	5%	1,700,000,000	5%	1,800,000,000	100%	2,300,000,000	30%	8,707,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
448	4.01-16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama	1 dokumen	72,280,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	175,000,000	1 dokumen	284,300,000	1 dokumen	323,000,000	2 dokumen	572,100,000	2 dokumen	1,479,400,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
449	4.01-18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	43,421,450	0	0	1 dokumen	230,247,000	1 dokumen	323,347,000	1 dokumen	458,823,000	1 dokumen	902,817,000	1 dokumen	1,915,234,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
450	4.01-20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur perencana yang dilatih/diklat teknis/bimtek	200 orang	232,081,039	200 orang	150,000,000	200 orang	500,000,000	200 orang	550,000,000	200 orang	600,000,000	200 orang	800,000,000	200 orang	2,600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
451	4.01-21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	19 dokumen	4,703,433,829	19 dokumen	2,935,000,000	19 dokumen	4,230,000,000	19 dokumen	4,684,000,000	19 dokumen	4,987,600,000	19 dokumen	9,000,000,000	19 dokumen	25,836,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
452	4.01-22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, SDA dan Kerjasama	3 dokumen	319,186,775	3 dokumen	778,000,000	3 dokumen	1,000,000,000	3 dokumen	1,500,000,000	3 dokumen	1,600,000,000	3 dokumen	3,000,000,000	3 dokumen	7,878,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
453	4.01-23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	2 dokumen	322,104,425		0		0		0		0		0	2 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
454	4.01-24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah	7 dokumen	571,424,202	7 dokumen	620,000,000	7 dokumen	1,000,000,000	7 dokumen	1,057,000,000	7 dokumen	1,500,000,000	7 dokumen	2,001,600,000	7 dokumen	6,178,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
455	4.01-29	Program Penataan Ruang Wilayah	Efektivitas/peningkatan kinerja BKPRD Prov. Kalteng	2 dokumen	293,023,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
456	4.01-32	Program Perencanaan Pembangunan Kependudukan dan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen perencanaan bidang kependudukan dan tenaga kerja	1 dokumen	126,813,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
457	4.01-33	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah dokumen perencanaan daerah tertinggal	2 dokumen	105,756,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
458	4.01-34	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan	2 dokumen	293,548,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
459	4.01-35	Program Pengembangan Cluster Ekonomi	Persentase duster yang dikembangkan	1 dokumen	105,495,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
460	4.01-37	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	1,351,413,250	12 dokumen	1,225,000,000	12 dokumen	1,500,000,000	12 dokumen	1,900,000,000	12 dokumen	2,300,000,000	12 dokumen	3,500,000,000	12 dokumen	10,425,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
461	4.01-39	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	0	0	23 dokumen	670,000,000	23 dokumen	901,400,000	23 dokumen	1,217,000,000	23 dokumen	1,214,700,000	23 dokumen	1,488,300,000	35 dokumen	5,491,400,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
462	4.01-40	Program Perencanaan Penganggulangan Kemiskinan	Jumlah kebijakan perencanaan penganggulangan kemiskinan yang disusun: persentase peningkatan kinerja TKPKD	0	0	1 dokumen ; 10%	547,290,000	1 dokumen ; 10%	961,400,000	1 dokumen ; 10%	970,900,000	1 dokumen ; 10%	1,130,500,000	1 dokumen ; 10%	1,370,640,000	5 dokumen ; 20%	4,980,730,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	4.02	Keuangan			41,579,096,658		35,871,840,000		48,346,288,000		50,584,885,000		53,420,802,000		58,475,880,000		246,699,695,000	
463	4.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang tertayani dengan baik	100%	10,729,520,082	100%	11,786,051,800	100%	13,980,000,000	100%	14,100,000,000	100%	14,289,900,000	100%	14,769,200,000	100%	68,925,151,800	Badan Keuangan Daerah
464	4.02-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	16,020,920,000	100%	3,138,000,000	100%	5,423,000,000	100%	5,550,000,000	100%	5,632,900,000	100%	6,679,100,000	100%	26,423,000,000	Badan Keuangan Daerah
465	4.02-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	208,700,000	100%	300,000,000	100%	209,000,000	100%	220,000,000	100%	234,700,000	100%	254,200,000	100%	1,217,900,000	Badan Keuangan Daerah
466	4.02-4	Program fasilitas pindah/puma tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah/puma tugas	0	0	30 orang	50,000,000	40 orang	51,000,000	40 orang	52,200,000	20 orang	59,900,000	30 orang	62,600,000	7 org	275,700,000	Badan Keuangan Daerah
467	4.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	322,319,991	100%	300,000,000	100%	950,000,000	100%	963,100,000	100%	987,480,000	100%	1,121,600,000	100%	4,322,180,000	Badan Keuangan Daerah
468	4.02-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	390,187,250	100%	950,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,364,000,000	100%	1,384,500,000	100%	1,599,500,000	100%, 7 laporan, 46 SKPD	6,648,000,000	Badan Keuangan Daerah
469	4.02-17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar	200 buku 1 peraturan, 46 SKPD	2,850,568,800	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	9,594,500,000	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	7,670,000,000	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	7,740,000,000	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	7,802,000,000	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	8,100,000,000	200 buku 1 peraturan, 46 SKPD	40,906,500,000	Badan Keuangan Daerah
470	4.02-18	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah PNS bagian keuangan mendapat pembinaan	0	0	42 raperda /Raperbub/300 orang	1,200,000,000	42 raperda /Raperbub/300 orang	1,380,000,000	42 raperda /Raperbub/300 orang	1,414,000,000	42 raperda /Raperbub/300 orang	1,450,500,000	42 raperda /Raperbub/300 orang	1,763,080,000	42 raperda/Raperbub/300 orang	7,207,580,000	Badan Keuangan Daerah
471	4.02-19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Jumlah kampung yang telah menyampaikan laporan keuangan pemerintahan kampung yang baik	14 laporan, 14 keputusan	325,000,000	0	0	14 laporan, 14 keputusan	350,000,000	14 laporan, 14 keputusan	360,000,000	14 laporan, 14 keputusan	391,300,000	14 laporan, 14 keputusan	432,700,000	14 laporan, 14 keputusan	1,534,000,000	Badan Keuangan Daerah

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
472	4.02-38	Program Intensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	100%	4,749,507,359	0	0	100%	5,818,908,000	100%	6,353,405,000	100%	8,322,222,000	100%	9,945,042,000	100%	30,439,577,000	Badan Keuangan Daerah
473	4.02-52	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase selisih perhitungan nilai aset oleh Bid Asset Badan Keuangan Daerah dengan audit BPK	1 Dokumen	5,982,373,176	1 Dokumen	2,550,000,000	1 Dokumen	3,330,000,000	1 Dokumen	3,450,000,000	1 Dokumen	3,505,000,000	1 Dokumen	4,050,000,000	5 dokumen	16,885,000,000	Badan Keuangan Daerah
474	4.02-59	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah temuan pelanggaran keuda yang itndaklanjuti	0	0	0	0	1 buah	210,000,000	1 buah	217,700,000	1 buah	240,600,000	1 buah	334,400,000	1 buah	1,002,700,000	Badan Keuangan Daerah
475	4.02-60	Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SDM pengelola keuangan yang berkinerja baik	0	0	0	0	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	210,000,000	1 dokumen	240,000,000	1 dokumen	270,000,000	1 dokumen	920,000,000	Badan Keuangan Daerah
476	4.02-61	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	0	53%	6,003,288,200	53%	7,424,380,000	58%	8,590,480,000	64%	8,879,800,000	70%	9,094,458,000	45%	39,992,406,200	Badan Keuangan Daerah	
	4.03	Kepegawaian			10,880,622,000		9,400,000,000		9,571,756,000		10,016,380,000		10,583,960,000		12,301,709,000		51,873,805,000	
477	4.03-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	2,745,585,000	100%	2,234,071,313	100%	2,620,000,000	100%	2,625,000,000	100%	2,670,000,000	100%	2,700,000,000	100%	12,849,071,313	Badan Kepegawaian Daerah
478	4.03-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	470,650,000	100%	893,650,000	100%	620,000,000	100%	621,000,000	100%	625,000,000	100%	631,000,000	100%	3,390,650,000	Badan Kepegawaian Daerah
479	4.03-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	72,800,000	100%	61,397,500	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	131,000,000	100%	135,000,000	100%	572,397,500	Badan Kepegawaian Daerah
480	4.03-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100,000,000	100%	128,943,857	100%	97,000,000	100%	98,800,000	100%	99,900,000	100%	100,900,000	100%	525,543,857	Badan Kepegawaian Daerah
481	4.03-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	284,953,600	100%	315,000,000	100%	325,000,000	100%	330,000,000	100%	335,000,000	100%	400,000,000	15 laporan, 50 eksemplar	1,705,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
482	4.03-23	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dimanfaatkan dengan optimal	9,000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	795,120,000	9,000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	725,676,500	9,000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	835,000,000	9,000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	891,800,000	9,000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	900,600,000	9,000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	987,700,000	9,000 update data PNS, 1 modul, 1 laporan	4,340,776,500	Badan Kepegawaian Daerah
483	4.03-28	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasan	20 laporan	50,000,000	20 laporan	611,779,950	20 laporan	245,756,000	20 laporan	364,480,000	20 laporan	536,460,000	20 laporan	818,309,000	20 laporan	2,576,784,950	Badan Kepegawaian Daerah
484	4.03-52	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	53,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	58,000,000	1 Dokumen	65,000,000	5 dokumen	276,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
485	4.03-63	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang mendapat pembinaan	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancana (10,20,30 thn)	4,255,033,400	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancana (10,20,30 thn)	3,294,481,880	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancana (10,20,30 thn)	3,400,000,000	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancana (10,20,30 thn)	3,513,300,000	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancana (10,20,30 thn)	3,612,600,000	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancana (10,20,30 thn)	4,519,800,000	670 orang, 2.100 SK, 1 paket (250 satyalancana (10,20,30 thn)	18,340,181,880	Badan Kepegawaian Daerah

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
486	4.03-64	Program Penguatan Kelembagaan KORPRI	Tingkat Capaian Kinerja	47 kali, 5 dokumen	1,987,160,000	47 kali, 5 dokumen	1,089,999,000	47 kali, 5 dokumen	1,191,000,000	47 kali, 5 dokumen	1,301,000,000	47 kali, 5 dokumen	1,517,000,000	47 kali, 5 dokumen	1,824,000,000	47 kali, 5 dokumen	6,922,999,000	Badan Kepegawaian Daerah
487	4.03-65	Program Pemeliharaan Rutin Atau Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	Jumlah sarparas arsip yang terpelihara	12 laporan	69,320,000	0	0	12 laporan	65,000,000	12 laporan	91,000,000	12 laporan	98,400,000	12 laporan	120,000,000	12 laporan	374,400,000	Badan Kepegawaian Daerah
	4.04	Pendidikan dan Pelatihan			31,055,700,000		26,506,260,000		26,364,652,000		27,917,996,000		29,750,047,000		44,642,137,000		155,181,092,000	
488	4.04-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	4,682,625,870	100%	3,557,319,926	100%	5,802,000,000	100%	5,955,500,000	100%	6,004,800,000	100%	6,541,600,000	100%	27,861,219,926	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
489	4.04-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	4,457,708,000	100%	6,691,089,448	100%	1,074,000,000	100%	1,090,100,000	100%	1,208,000,000	100%	1,378,500,000	100%	11,441,689,448	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
490	4.04-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	153,000,000	100%	52,000,000	100%	54,100,000	100%	55,500,000	100%	70,000,000	100%	384,600,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
491	4.04-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	506,050,100	100%	210,457,350	100%	506,000,000	100%	516,400,000	100%	524,600,000	100%	563,200,000	100%	2,320,657,350	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
492	4.04-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	990,441,480	100%	250,199,900	100%	306,000,000	100%	397,100,000	100%	488,200,000	100%	591,700,000	25 laporan	2,033,199,900	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
493	4.04-15	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	1,197 orang	11,035,500,000	1,197 orang	5,351,360,000	1,197 orang	4,745,000,000	1,197 orang	4,812,700,000	1,197 orang	5,426,600,000	1,197 orang	6,156,700,000	1,197 orang	26,492,360,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
494	4.04-16	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang berkinerja baik	1 kali	396,705,550	1 kali	250,000,000	1 kali	1,815,004,000	1 kali	1,923,007,000	1 kali	2,457,714,000	1 kali	6,976,080,000	1 kali	13,421,805,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
495	4.04-17	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang memanfaatkan dengan optimal	1 tahun	149,000,000	1 tahun	150,000,000	1 tahun	154,000,000	1 tahun	160,200,000	1 tahun	175,000,000	1 tahun	210,000,000	1 tahun	849,200,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
496	4.04-18	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan	Cakupan informasi dan perpustakaan yang terlayani	1 tahun	134,922,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	141,000,000	1 tahun	158,000,000	1 tahun	162,500,000	1 tahun	227,900,000	1 tahun	789,400,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
497	4.04-19	Program Pendidikan Kedinasan	Kumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasan	400 orang	8,702,747,000	400 orang	9,792,833,376	400 orang	11,769,648,000	400 orang	12,850,889,000	400 orang	13,247,133,000	400 orang	21,926,457,000	400 orang	69,586,960,376	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4.05	Penelitian dan Pengembangan			739,942,600		1,700,000,000		2,369,000,000		2,585,800,000		2,977,200,000		3,659,100,000		13,291,100,000	
498	4.05-26	Program Penelitian dan Pengembangan IPIEK	Jumlah dokumen perencanaan penelitian dan pengembangan	4 dokumen	292,948,000	4 dokumen	500,000,000	4 dokumen	790,000,000	4 dokumen	852,900,000	4 dokumen	979,200,000	4 dokumen	1,226,400,000	4 dokumen	4,348,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
499	4.05-27	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	Jumlah IPTEK dimandataakan	4 dokumen, 1 rapat	200,000,000	4 dokumen, 1 rapat	950,000,000	4 dokumen, 1 rapat	1,169,000,000	4 dokumen, 1 rapat	1,280,400,000	4 dokumen, 1 rapat	1,451,300,000	4 dokumen, 1 rapat	1,712,700,000	4 dokumen, 1 rapat	6,563,400,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
500	4.05-28	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK	Terlaksananya penguatan dan fasilitasi Devan Riset Daerah (DRD) Prov. Kalteng	1 dokumen	246,994,600	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	410,000,000	1 dokumen	452,500,000	1 dokumen	546,700,000	1 dokumen	720,000,000	1 dokumen	2,379,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	4.06	Sekretariat Daerah			85,222,587,200		103,310,568,000		100,636,092,000		102,431,054,000		104,847,359,000		116,746,349,000		527,971,422,000	
501	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	970,949,500	100%	893,349,500	100%	901,000,000	100%	940,000,000	100%	990,000,000	100%	1,150,000,000	100%	4,874,349,500	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
502	4.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	200,000,000	100%	474,887,550	100%	482,000,000	100%	506,900,000	100%	522,000,000	100%	617,700,000	100%	2,603,487,550	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
503	4.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	28,000,000	100%	28,000,000	100%	30,000,000	100%	32,400,000	100%	42,600,000	100%	63,900,000	100%	196,900,000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
504	4.06-27	Program Pembinaan Pendidikan	Jumlah peserta didik mendapat pembinaan	40 OT	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 OT	0	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
505	4.06-32	Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Persentase kepuasan pembinaan pelayanan kem	350 orang	1,967,781,030	350 orang	4,568,941,780	350 orang	4,100,000,000	350 orang	4,150,000,000	350 orang	4,170,000,000	350 orang	4,500,000,000	350 orang	21,488,941,780	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
506	4.06-33	Program Pembinaan Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah peserta/organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan kesra dan kemasyarakatan, jumlah dokumen hasil pembinaan kesra dan kemasyarakatan	0	0	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,034,821,170	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,520,000,000	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,560,000,000	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,600,000,000	650 orang, 355 buku, 1 dok	1,700,000,000	650 orang, 355 buku, 1 dok	7,414,821,170	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
507	4.06-54	Program Pembinaan Mental	Jumlah masyarakat yang terbina	2.100 orang	472,315,900	0	0	2.100 orang	482,430,000	2.100 orang	493,000,000	2.100 orang	501,290,000	2.100 orang	559,000,000	2.100 orang	2,035,720,000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
508	4.06-56	Program Pembinaan Kemasayarakatan	Jumlah masyarakat mendapat pembinaan	100 damang	751,664,720	0	0	100 damang	775,000,000	100 damang	787,000,000	100 damang	792,000,000	100 damang	841,000,000	100 damang	3,195,000,000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasayarakatan
509	4.06-57	Program Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Jumlah perempuan dan anak mendapat pembinaan kesejahteraan	250 orang	134,553,050	0	0	250 orang	143,000,000	250 orang	156,000,000	250 orang	161,000,000	250 orang	178,000,000	250 orang	638,000,000	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasayarakatan
510	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	266,270,000	100%	760,000,000	100%	770,000,000	100%	780,000,000	100%	800,000,000	100%	830,000,000	100%	3,940,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
511	4.06-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	0	100%	0	100%	21,000,000	100%	25,000,000	100%	28,000,000	100%	40,000,000	100%	114,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
512	4.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	0	100%	0	100%	330,000,000	100%	334,000,000	100%	358,000,000	100%	489,000,000	100%	1,511,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
513	4.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	0	100%	0	100%	87,000,000	100%	88,000,000	100%	92,000,000	100%	109,000,000	6 laporan	376,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
514	4.06-15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	90 %	28,097,400	0	90 %	29,000,000	90 %	30,000,000	100%	31,000,000	100%	35,000,000	100%	125,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	
515	4.06-21	Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan SIMDA	44 orang,1 kegiatan	127,847,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 orang,1 kegiatan	0	Biro Administrasi Pembangunan
516	4.06-31	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pembangunan daerah	5 dokumen	363,730,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 dokumen	0	Biro Administrasi Pembangunan
517	4.06-61	Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	2 Dokumen	1,711,696,925	2 Dokumen	415,000,000	2 Dokumen	427,000,000	2 Dokumen	456,000,000	2 Dokumen	476,000,000	2 Dokumen	516,000,000	2 Dokumen	2,290,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
518	4.06-65	Program Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Banyaknya dokumen monitoring dan evaluasi Kebijakan Pembangunan	0	0	1 dokumen	720,000,000	1 dokumen	740,000,000	1 dokumen	750,000,000	1 dokumen	760,000,000	1 dokumen	800,000,000	1 dokumen	3,770,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
519	4.06-66	Program Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan	-	0	0	1 dokumen	380,000,000	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	420,000,000	1 dokumen	440,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	2,140,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
520	4.06-67	Program Pelaksanaan dan Pengendalian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Persentase pelaksanaan secara elektronik	0	0	100%	800,000,000	100%	820,000,000	100%	840,000,000	100%	860,000,000	100%	950,000,000	100%	4,270,000,000	Biro Administrasi Pembangunan
521	4.06-79	Program Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan, anaisis, pengkajian	4 dokumen	577,236,920		0		0		0		0		0	4 dokumen	0	Biro Administrasi Pembangunan
522	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	364,552,000	100%	542,355,358	100%	565,000,000	100%	576,000,000	100%	590,000,000	100%	650,000,000	100%	2,923,355,358	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
523	4.06-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	0	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	25,000,000	100%	28,000,000	100%	35,000,000	100%	129,000,000	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
524	4.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	320,758,000	100%	400,000,000	100%	420,000,000	100%	450,000,000	100%	480,000,000	100%	560,000,000	100%	2,310,000,000	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
525	4.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	74,140,000	100%	104,310,000	100%	106,000,000	100%	110,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	6 laporan	620,310,000	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
526	4.06-16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,25 %	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,25 %	0	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
527	4.06-29	Program Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pengembangan/pembinaan administrasi perekonomian dan SDA	13 set dokumen laporan	3,089,250,000	13 set dokumen laporan	2,633,334,642	13 set dokumen laporan	2,505,600,000	13 set dokumen laporan	2,783,600,000	13 set dokumen laporan	3,342,000,000	13 set dokumen laporan	7,100,000,000	13 set dokumen laporan	18,364,534,642	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
528	4.06-68	Program Pengendalian Perekonomian Daerah	Hasil laporan evaluasi pemberdayaan perekonomian dan SDA	0	0	1 dokumen	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	300,000,000	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
529	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	474,067,274	100%	611,520,000	100%	779,000,000	100%	782,000,000	100%	794,000,000	100%	804,000,000	100%	3,770,520,000	Biro Hukum
530	4.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	245,509,500	100%	265,000,000	100%	215,000,000	100%	247,000,000	100%	295,000,000	100%	356,000,000	100%	1,378,000,000	Biro Hukum
531	4.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	180,540,000	100%	150,000,000	100%	207,000,000	100%	216,000,000	100%	226,000,000	100%	276,000,000	100%	1,075,000,000	Biro Hukum
532	4.06-18	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan yang diperdakan	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,519,339,950	1.00 Paket (1060 peraturan daerah dan surat keputusan)	1,270,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,286,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,303,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,444,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	1,527,000,000	10 perda, 50 pergub, 1.000 kep gub, 12 dok, 175 produk hukum kab/kota, 1 keg	6,830,000,000	Biro Hukum
533	4.06-19	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Jumlah pelanggaran hukum dan HAM yang diatasi	4 lap hasil	328,411,125	1.00 Dokumen	209,000,000	4 lap hasil	298,000,000	4 lap hasil	313,000,000	4 lap hasil	340,000,000	4 lap hasil	510,000,000	4 lap hasil	1,670,000,000	Biro Hukum
534	4.06-20	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum	10 perkara litigasi, 20 non litigasi	528,872,000	30.00 Bantuan Hukum	390,000,000	10 perkara litigasi, 20 non litigasi	555,000,000	10 perkara litigasi, 20 non litigasi	585,000,000	10 perkara litigasi, 20 non litigasi	615,000,000	10 perkara litigasi, 20 non litigasi	747,000,000	10 perkara litigasi, 20 non litigasi	2,892,000,000	Biro Hukum

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
535	4.06-21	Program Perencanaan Hukum	Jumlah produk hukum setiap tahun	1 dok program legislasi daerah	102,950,000	1.00 Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	100,000,000	1 dok program legislasi daerah	171,000,000	1 dok program legislasi daerah	188,000,000	1 dok program legislasi daerah	200,000,000	1 dok program legislasi daerah	215,000,000	1 dok program legislasi daerah	874,000,000	Biro Hukum
536	4.06-22	Program pembinaan sarana dan prasarana hukum	Jumlah sarpras hukum yang terpelihara	300 katalog, 1.500 data produk, 12 keg, 100 cetak publikasi, 500 buku	362,905,151	1.00 Laporan Hasil	280,000,000	300 katalog, 1.500 data produk, 12 keg, 100 cetak publikasi, 500 buku	360,000,000	300 katalog, 1.500 data produk, 12 keg, 100 cetak publikasi, 500 buku	378,000,000	300 katalog, 1.500 data produk, 12 keg, 100 cetak publikasi, 500 buku	407,000,000	300 katalog, 1.500 data produk, 12 keg, 100 cetak publikasi, 500 buku	477,000,000	300 katalog, 1.500 data produk, 12 keg, 100 cetak publikasi, 500 buku	1,902,000,000	Biro Hukum
537	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	660,835,784	100%	585,335,784	100%	681,000,000	100%	697,000,000	100%	732,000,000	100%	765,000,000	100%	3,460,335,784	Biro Organisasi
538	4.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	1,300,000	100%	10,000,000	100%	34,000,000	100%	36,000,000	100%	37,000,000	100%	40,000,000	100%	157,000,000	Biro Organisasi
539	4.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	178,931,700	100%	154,918,222	100%	163,000,000	100%	180,000,000	100%	208,000,000	100%	316,000,000	100%	1,021,918,222	Biro Organisasi
540	4.06-24	Program Peta taan Kelenbagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Jumlah PD yang memenuhi tata laksana pelayanan publik	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	905,127,562	1.00 Paket (Biro Organisasi)	1,099,424,681	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1,371,000,000	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1,387,000,000	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1,390,000,000	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	1,510,000,000	75 orang, 36 OPD, 36 SKPD, 2.718 jabatan struktural dan fungsional, 420 OPD kab/kota, 5.046, 1 dok, 90 UPTD, 1 pergub	6,757,424,681	Biro Organisasi
541	4.06-25	Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	Jumlah PNS yang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	980 org, 65 dok	773,203,100	1.00 Paket (SKPD)	587,764,650	980 org, 65 dok	973,037,000	980 org, 65 dok	995,656,000	980 org, 65 dok	1,100,111,000	980 org, 65 dok	2,810,321,000	980 org, 65 dok	6,466,889,650	Biro Organisasi
542	4.06-26	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	365 orang, 2x rapat	528,448,854	1.00 Paket (Biro Organisasi)	358,076,663	365 orang, 2x rapat	784,925,000	365 orang, 2x rapat	883,298,000	365 orang, 2x rapat	993,108,000	365 orang, 2x rapat	2,317,128,000	365 orang, 2x rapat	5,336,535,663	Biro Organisasi

No.	KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)			
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
543	4.06-34	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan	Cakupan informasi dan perpustakaan yang terlayani	0	0	1.00 Paket (Biro Organisasi)	0	85 buku	3,100,000	85 buku	3,200,000	85 buku	3,250,000	85 buku	3,300,000	85 buku	12,850,000	Biro Organisasi	
544	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,071,800,000	100%	1,303,600,000	100%	1,377,000,000	100%	1,392,000,000	100%	1,450,000,000	100%	1,550,000,000	100%	7,072,600,000	Biro Pemerintahan	
545	4.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	24,409,500	100%	41,150,000	100%	81,000,000	100%	84,000,000	100%	89,000,000	100%	135,000,000	100%	430,150,000	Biro Pemerintahan	
546	4.06-15	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah pemda yang bekerjasama	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	699,614,900	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	480,700,000	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	715,000,000	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	725,000,000	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	775,000,000	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	807,000,000	3 paket (2 MOU, 1 perjanjian kerjasama), 2 MOU, 4 lap	3,502,700,000	Biro Pemerintahan	
547	4.06-16	Program Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	1,694,083,597	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	1,612,190,000	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	1,774,000,000	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	1,784,000,000	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	1,806,000,000	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	1,978,000,000	1 laporan, 5 segmen batas 1 dok, 2 lap	8,954,190,000	Biro Pemerintahan	
548	4.06-17	Program Otonomi Daerah	Tersedianya data/informasi	0	0	100%	1,061,900,000	100%	1,090,000,000	100%	1,150,000,000	100%	1,180,000,000	100%	1,250,000,000	100%	5,731,900,000	Biro Pemerintahan	
549	4.06-27	Program Peta taa n Daerah Otonomi Baru	Jumlah jenis koordinasi dan pembinaan kabupaten/kota ke provinsi	4 dok, 2 laporan, 3 keg	2,264,762,400	0	0	4 dok, 2 laporan, 3 keg	1,312,000,000	4 dok, 2 laporan, 3 keg	1,449,000,000	4 dok, 2 laporan, 3 keg	1,512,000,000	4 dok, 2 laporan, 3 keg	1,723,000,000	4 dok, 2 laporan, 3 keg	5,996,000,000	Biro Pemerintahan	
550	4.06-55	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkannya tertib adm Pemerintahan umum dalam pelaksanaan tugas dekonstrasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	3 Dokumen	253,729,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Dokumen	0	Biro Pemerintahan
551	4.06-67	Program Peta taa n Administrasi Kependudukan	Jumlah orang yang menggunakan pelayanan dalam bidang kependudukan	200 Orang	586,102,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 Orang	0	Biro Pemerintahan
552	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,259,798,800	100%	1,718,536,900	100%	1,730,000,000	100%	1,756,000,000	100%	1,793,000,000	100%	1,821,000,000	100%	8,818,536,900	Biro Pengadaan Barang/Jasa	
553	4.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	142,703,600	100%	341,416,800	100%	347,000,000	100%	389,000,000	100%	398,000,000	100%	450,000,000	100%	1,925,416,800	Biro Pengadaan Barang/Jasa	
554	4.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	26,665,500	100%	136,173,000	100%	152,000,000	100%	159,000,000	100%	167,000,000	100%	198,000,000	100%	3 lap, 20 dok	812,173,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa
555	4.06-58	Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	0	0	100%	0	100%	810,000,000	100%	830,000,000	100%	890,000,000	100%	970,000,000	100%	3,500,000,000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
556	4.06-60	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	3,277,157,100	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	1,207,873,300	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	2,291,000,000	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	2,350,000,000	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	2,415,000,000	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	3,057,000,000	7 literatur, 700 paket, 704 dok,	11,320,873,300	Biro Pengadaan Barang/ Jasa
557	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	800,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	300,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	1,500,000,000	Biro Protokol dan Komunikasi Publik
558	4.06-28	Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolan	Cakupan penyebaran formasi, Kehumasan dan Keprotokolan	1 paket, 14.315 eks	9,114,725,000	1 paket, 14.315 eks	7,396,300,000	1 paket, 14.315 eks	7,790,000,000	1 paket, 14.315 eks	7,819,000,000	1 paket, 14.315 eks	7,895,000,000	1 paket, 14.315 eks	8,189,000,000	1 paket, 14.315 eks	39,089,300,000	Biro Protokol dan Komunikasi Publik
559	4.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	17,531,172,725	100%	15,303,700,000	100%	17,820,000,000	100%	17,903,000,000	100%	17,954,000,000	100%	18,010,000,000	100%	86,990,700,000	Biro Umum
560	4.06-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	19,936,549,200	100%	46,526,818,000	100%	32,926,000,000	100%	33,017,000,000	100%	33,128,000,000	100%	33,612,000,000	100%	179,209,818,000	Biro Umum
561	4.06-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	931,600,000	100%	710,420,000	100%	924,000,000	100%	935,000,000	100%	952,000,000	100%	1,065,000,000	100%	4,586,420,000	Biro Umum
562	4.06-4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah/purna tugas	2 Orang	75,000,000	0	0	3 Orang	75,000,000	4 Orang	76,000,000	4 Orang	77,000,000	3 Orang	88,000,000	1 tahun	316,000,000	Biro Umum
563	4.06-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	110,000,000	100%	175,000,000	100%	180,000,000	100%	187,000,000	100%	198,000,000	100%	240,000,000	100%	980,000,000	Biro Umum
564	4.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	573,512,125	100%	144,550,000	100%	150,000,000	100%	167,000,000	100%	178,000,000	100%	250,000,000	7 dokumen	889,550,000	Biro Umum
565	4.06-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 dokumen	802,858,350	1 dokumen	284,400,000	1 dokumen	412,000,000	1 dokumen	423,000,000	1 dokumen	436,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	2,005,400,000	Biro Umum
566	4.06-23	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Termanfaatkan dengan Optimal	1 tahun	130,000,000	0	0	1 tahun	135,000,000	1 tahun	147,000,000	1 tahun	156,000,000	1 tahun	170,000,000	1 tahun	608,000,000	Biro Umum
567	4.06-24	Program Peningkatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase peningkatan Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan	5 dok	35,001,000	0	0	5 dok	31,000,000	5 dok	32,000,000	5 dok	34,000,000	5 dok	40,000,000	5 dok	137,000,000	Biro Umum
568	4.06-27	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase kepuasan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 tahun	5,389,056,600	1 tahun	4,619,800,000	1 tahun	4,758,000,000	1 tahun	4,870,000,000	1 tahun	4,976,000,000	1 tahun	5,136,000,000	1 tahun	24,359,800,000	Biro Umum
	4.07	Sekretariat DPRD			23,053,289,000		44,333,500,000		19,495,724,000		19,837,713,000		20,086,118,000		20,616,343,000		124,369,398,000	
569	4.07-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	7,457,424,040	100%	7,083,488,628	100%	6,236,000,000	100%	6,261,000,000	100%	6,286,000,000	100%	6,304,000,000	100%	32,170,488,628	Sekretariat DPRD
570	4.07-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	1,037,280,460	100%	17,258,900,000	100%	275,000,000	100%	289,000,000	100%	298,000,000	100%	409,000,000	100%	18,529,900,000	Sekretariat DPRD
571	4.07-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	534,750,000	100%	296,800,000	100%	293,800,000	100%	316,444,000	100%	330,600,000	100%	352,000,000	100%	1,589,644,000	Sekretariat DPRD
572	4.07-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	20,100,000	100%	55,500,000	100%	75,900,000	100%	76,200,000	100%	77,831,000	100%	79,438,000	100%	364,869,000	Sekretariat DPRD

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
						Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
573	4.07-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	70,000,000	100%	145,000,000	100%	110,700,000	100%	125,720,000	100%	145,100,000	100%	170,000,000	100%	696,520,000	Sekretariat DPRD
574	4.07-15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Perda yang Ditetapkan	1 tahun	11,266,234,500	100,00 %	16,550,781,372	1 tahun	9,700,000,000	1 tahun	9,720,000,000	1 tahun	9,750,000,000	1 tahun	9,850,000,000	1 tahun	55,570,781,372	Sekretariat DPRD
575	4.07-32	Program Peningkatan Pelayanan Rapat-Rapat bagi anggota DPRD	Jumlah rapat Anggota DPRD yang terlayani	0	0	100,00 %	20,000,000	1 tahun	36,800,000	1 tahun	37,200,000	1 tahun	37,600,000	1 tahun	38,100,000	1 tahun	169,700,000	Sekretariat DPRD
576	4.07-34	Program Kehumasan dan Dokumentasi	Cakupan informasi dan perpustakaan yang terlayani	1 tahun	2,647,500,000	1 tahun	2,908,030,000	1 tahun	2,746,000,000	1 tahun	2,990,000,000	1 tahun	3,137,000,000	1 tahun	3,385,000,000	1 tahun	15,166,030,000	Sekretariat DPRD
577	4.07-52	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	20,000,000	100,00 %	15,000,000	1 Dokumen	21,524,000	1 Dokumen	22,149,000	1 Dokumen	23,987,000	1 Dokumen	28,805,000	1 Dokumen	111,465,000	Sekretariat DPRD
	4.08	Inspektorat			8,787,500,000		8,940,000,000		13,219,355,000		14,575,427,000		15,441,290,000		17,704,240,000		69,880,312,000	
578	4.08-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,428,950,000	100%	1,893,260,000	100%	1,883,800,000	100%	1,896,800,000	100%	1,902,200,000	100%	1,990,100,000	100%	9,566,160,000	Inspektorat
579	4.08-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	663,350,000	100%	2,097,000,000	100%	2,110,100,000	100%	2,125,800,000	100%	2,133,800,000	100%	2,147,400,000	100%	10,614,100,000	Inspektorat
580	4.08-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	100,000,000	100%	110,700,000	100%	118,400,000	100%	127,300,000	100%	143,400,000	100%	599,800,000	Inspektorat
581	4.08-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	612,860,000	100%	330,000,000	100%	299,700,000	100%	302,800,000	100%	311,800,000	100%	325,600,000	100%	1,569,900,000	Inspektorat
582	4.08-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	174,675,700	100%	281,685,000	100%	202,300,000	100%	209,800,000	100%	214,700,000	100%	224,900,000	100%	1,133,385,000	Inspektorat
583	4.08-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	49,350,000	1 Dokumen	57,600,000	1 Dokumen	86,122,000	1 Dokumen	128,368,000	1 Dokumen	141,004,000	1 Dokumen	200,340,000	100%	613,434,000	Inspektorat
584	4.08-15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Temuan LHP	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil reviu RKA SKPD	5,418,114,300	0	0	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil reviu RKA SKPD	3,992,633,000	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil reviu RKA SKPD	5,156,259,000	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil reviu RKA SKPD	5,883,586,000	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil reviu RKA SKPD	7,806,400,000	17 LHP Khusus, 10 LHP, 34 LHE, 34 hasil reviu RKA SKPD	22,838,878,000	Inspektorat
585	4.08-16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang berkinerja baik	1 paket	204,000,000	1 paket	203,950,000	1 paket	208,000,000	1 paket	213,000,000	1 paket	218,000,000	1 paket	225,000,000	1 paket	1,067,950,000	Inspektorat
586	4.08-17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	ASN Inspektorat Provinsi Kalteng	1 paket	236,200,000	1 paket	200,240,000	1 paket	236,000,000	1 paket	256,200,000	1 paket	267,900,000	1 paket	291,100,000	1 paket	1,251,440,000	Inspektorat
587	4.08-19	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil reviu keuangan (LHR)	0	0	122 LHP, 36 LHE, 38 LHR	2,051,657,500	122 LHP, 36 LHE, 38 LHR	2,150,000,000	122 LHP, 36 LHE, 38 LHR	2,170,000,000	122 LHP, 36 LHE, 38 LHR	2,190,000,000	122 LHP, 36 LHE, 38 LHR	2,210,000,000	122 LHP, 36 LHE, 38 LHR	10,771,657,500	Inspektorat
588	4.08-20	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintah Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap LKPPD, laporan hasil monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	0	0	48 LHE	1,053,232,500	48 LHE	1,090,000,000	48 LHE	1,118,000,000	48 LHE	1,131,000,000	48 LHE	1,150,000,000	48 LHE	5,542,232,500	Inspektorat

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2021)		
				Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
589	4.08-21	Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi	Jumlah laporan kasus dan laporan kerugian negara	0	0	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	671,375,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	850,000,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	880,000,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	920,000,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	990,000,000	20 lap kasus 75 lap kerugian negara	4,311,375,000	Inspektorat
	4.09	Penghubung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Jakarta			4,167,761,000		2,795,520,000		3,664,800,000		3,788,700,000		3,933,400,000		4,126,700,000		18,309,120,000	
590	4.09-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1,877,158,600	100%	1,695,520,000	100%	2,052,000,000	100%	2,094,000,000	100%	2,139,000,000	100%	2,238,000,000	100%	10,218,520,000	Badan Penghubung
591	4.09-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	1,344,901,400	100%	670,000,000	100%	1,095,000,000	100%	1,145,900,000	100%	1,190,400,000	100%	1,212,900,000	100%	5,314,200,000	Badan Penghubung
592	4.09-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	0	100%	0	100%	37,800,000	100%	51,000,000	100%	64,200,000	100%	70,500,000	100%	223,500,000	Badan Penghubung
593	4.09-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	24,455,900	100%	30,000,000	100%	51,000,000	100%	51,200,000	100%	52,300,000	100%	57,800,000	100%	242,300,000	Badan Penghubung
594	4.09-27	Program peningkatan pelayanan kedirasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase kepuasan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	350,150,000	1.00 Paket (Terlaksananya Pelayanan Prima Bagi Pejabat Daerah)	325,000,000	100%	348,000,000	100%	355,100,000	100%	365,700,000	100%	417,500,000	100%	1,811,300,000	Badan Penghubung
595	4.09-28	Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase penyebaran formasi, Kehumasan dan Keprotokolan (%)	100%	571,095,100	1.00 Paket (Tersedianya anggaran Promosi)	75,000,000	100%	81,000,000	100%	91,500,000	100%	121,800,000	100%	130,000,000	100%	499,300,000	Badan Penghubung
		Prioritas I			1,051,492,138,749		1,059,640,346,201		1,205,320,311,934		1,263,981,246,322		1,309,954,333,789		1,627,282,095,542		6,466,178,333,788	
		Prioritas II			526,117,530,771		503,550,689,799		525,023,839,000		541,081,822,000		555,929,731,000		618,194,361,000		2,743,780,442,799	
		Belanja Langsung			1,577,609,669,520		1,563,191,036,000		1,730,344,150,934		1,805,063,068,322		1,865,884,064,789		2,245,476,456,542		9,209,958,776,587	



CATATAN :

- 1) Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam perkembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggarantahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD Tahun 2017-2021).
- 2) **Prioritas I (P1)**
Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Selain itu prioritas I juga mengamankan kebijakan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk juga diperuntukan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) **Prioritas II (P2)**
Program **Prioritas II** merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan Pemerintahan Daerah. Suatu Prioritas II berhubungan dengan **program prioritas unggulan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan urusan Pemerintahan Daerah.**
- 4) **Belanja Langsung (BL)**
Merupakan belanja untuk membiayai program dan kegiatan Perangkat Daerah, penjumlahan dari Prioritas I (P1) dan Prioritas II (P2).



BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Indikator kinerja daerah merupakan indikasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dihitung selama masa lima tahun mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah sebagai instrumen untuk merencanakan sekaligus menilai keberhasilan seluruh bidang urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, indikator kinerja daerah merupakan *impact* dan *outcome* penyelenggaraan seluruh bidang urusan baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah yang diklasifikasikan ke dalam 3 aspek, yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Masing-masing indikator atau gabungan indikator akan dikawal oleh Perangkat Daerah atau gabungan indikator yang dikoordinasi oleh Asisten Sekda terkait dan / atau staf ahli Gubernur, mulai dari penyusunan rencana aksi, monitoring dan evaluasi periode monitoring evaluasi dan implementasi pengawalan pencapaian target indikator/gabungan indikator kinerja. Asisten sekda dan/atau staf ahli gubernur terkait bertanggungjawab menyusun rencana aksi dimaksud dalam bidang koordinasinya dalam bentuk Peraturan Gubernur dan harus sudah selesai paling lambat 3 bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan.

Hasil evaluasi pencapaian target indikator/gabungan indikator kinerja ini dijadikan dasar dalam penilaian pejabat perangkat daerah. Seluruh anggaran dibebankan pada APBD provinsi tahun berkenaan.

Mengingat capaian indikator kinerja provinsi merupakan agregat kinerja untuk 14 kabupaten/kota, maka pengawalan dan pencapaian indikator dimaksud juga dilaksanakan bagi daerah dan Perangkat Daerah se-Kalimantan Tengah.

Secara rinci, penetapan indikator pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dalam tabel 9.1 sebagai berikut.



Tabel 9.1.
Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Indikator Makro Pembangunan							
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	7,01	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5	7,5
1.2	Laju inflasi provinsi (%)	4,74	4,4 – 4,5	4,3 – 4,4	4,2 – 4,3	4,1 – 4,2	3,4	3,4
1.3	PDRB perkapita (Juta Rp.)	40,14	43,54	45,41	47,61	49,95	52,67	52,67
1.4	Angka Kemiskinan (%)	5,91	5,3	5,02	4,8	4,5	4,3	4,3
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	4,5	4,0	4,0	4,0	3,50	3,50
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,53	70,00	70,70	71,00	71,60	72,50	72,50
1.7	Indeks Gini	0,317	0,305	0,299	0,293	0,287	0,282	0,282
II.	Kesejahteraan Sosial							
2	Pendidikan							
2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,22	12,75	13,00	13,50	14,00	14,50	14,50
2.2	Rata-rata Lama Sekolah	8,03	8,50	8,75	9,00	9,50	10,00	10,00
2.3	Angka Melek Huruf	98,90	97,80	98,60	98,90	99,20	99,80	99,80
3	Kesehatan							
3.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	tad	929	946.75	964.5	982.25	1000	1000
3.2	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	69,54	70,50	70,90	71,40	72,00	72,75	72,75
3.3	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	19,6	16,8	16,2	15,8	15,5	15,2	15,2
4	Ketenagakerjaan							
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	95.46	96	96.25	96.5	96.75	97	97
III	Seni Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan							
1.1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah)	336	340	345	350	355	360	360
1.2	Jumlah gedung (unit)	2	3	4	5	5	6	6
2	Pemuda dan Olahraga							
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	46	66	86	106	126	146	146
2.2	Jumlah gedung olahraga (unit)	16	16	18	20	21	23	23



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B. ASPEK PELAYANAN UMUM								
I. Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar								
1 Pendidikan								
1.1. Pendidikan dasar:								
SD/MI								
1.1.1	Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	75,16*)	83,66	86,50	89,33	92,17	95,00	95,00
1.1.2	Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Paket A	99,26	99,42	99,51	99,59	99,67	99,75	99,75
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	117,60	112,53	111,27	111,10	111,00	110,83	110,83
1.1.4	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B	34,30	50,00	60,00	75,00	76,00	77,00	77,00
1.1.5	Angka putus sekolah SD	1,50	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,75
SMP/MTs								
1.1.1	Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	82,15	93,09	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dan paket B	96,15	98,14	99,04	99,95	100,85	101,75	101,75
1.1.3	Angka partisipasi murni SMP/MTs	85,61	78,80	80,40	82,00	83,70	88,67	88,67
1.1.4	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B	43,30	50,00	60,00	65,00	75,00	77,00	77,00
1.1.5	Angka Putus Sekolah SMP	1,53	1,08	1,03	1,01	0,95	0,90	0,90
1.2. Pendidikan menengah								
1.2.1	Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	92,53	96,00	96,74	97,92	99,11	100,00	100,00
1.2.2	Persentase SMA berakreditasi minimal B (%)	61	66	70	75	80	85	85
1.2.3	Persentase Paket Keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang- kurangnya 75%	36	45	55	65	70	75	75
1.2.4	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	52,36	55,6	57,2	58,9	60,7	62,5	62,5
1.2.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	70,70	75,0	77,2	79,6	82,0	84,4	84,5



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.6	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,60
2	Kesehatan							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita (%)	tad	1,33	1,50	1,67	1,83	1,98	1,98
2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk (%)	2,34	2,48	2,50	3,10	3,80	4,30	4,30
2.3	Rasio Pustu per satuan penduduk (%)	0,38	0,92	1,189	1,46	1,73	2,00	2,00
2.4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk (per 1.000 penduduk) – (%)	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
2.5	Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk	0,76	0,81	0,83	0,89	0,94	0,96	0,96
2.6	Persentase Distribusi Tempat Tidur Rumah Sakit Menurut Kab/Kota (%)	86,3	87,0	87,0	87,0	87,5	88,0	88,0
2.7	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000 penduduk) (%)	18,67	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2.8	Rasio Bidan Per Satuan Penduduk (per 100.000 penduduk) (%)	93,22	100	100	120	120	120	120
2.8	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	42,06	54,1	61,05	68,85	76,5	84,5	84,5
2.9	Umur Harapan Hidup (UHH) – (Tahun)	69,54	70,50	70,90	71,40	72,00	72,75	72,75
2.10	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	49	41	35,5	30	17,75	10	10
2.11	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)	359	285	275	250	228	210	210
2..12	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)	14,44**)	12,15	11,43	10,72	10	9,30	9,30
2..13	AKABA per 1.000 Balita	56	45	40	35	32	29	29
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1635,51	1.800	1.950	2.100	2.300	2.500	2.500
3.2	Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha)	34,8	35,95	36,30	36,65	37,00	37,35	37,35
3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,27	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	35,38	47,88	52,38	56,13	58,88	61,63	61,63
3.5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,79	0,85	0,88	0,91	0,94	1,00	1,00
3.6	Rasio rumah layak huni	1:04	1:4,3	1:4,4	1:4,6	1:4,8	1:5	1:5



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.7	Rasio permukiman layak huni (%)	77,10	78,36	78,74	79,12	79,50	80,00	80,00
3.8	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	1.100	1.250	1.500	1.500	1.750	2.000	2.000
3.9	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ~ (Km)	11.869,48	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
3.10	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (Km)	4.230	4.505,67	4.611,17	4.666,67	4.772,17	4.827,67	4.827,67
3.11	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Km)	33	48	53	58	63	68	68
3.12	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)	4,60	5,80	6,20	6,60	7,00	7,50	7,50
3.13	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (Km)	2,75	7,85	9,35	11,35	13,35	16,35	16,35
3.14	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	91.500	93.000	93.500	94.000	94.500	95.000	95.000
3.15	Lingkungan Pemukiman (Ha)	1.581.258	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.100.000	2.250.000	2.250.000
3.16	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	5	15,71	19,29	22,86	26,43	30,00	30,00
3.17	Persentase Kesesuaian rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Kebutuhan Ruang (%)	18	22	25	32	40	42	45
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman							
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	609.695	701.319	705.486	710.486	716.552	721.852	721.852
4.2	Rumah tangga pengguna listrik (Unit)	629.218	651.429	667.715	687.746	711.817	736.731	736.731
4.3	Rumah tangga bersanitasi (%)	88,1	87,23	87,92	88,61	89,31	90,00	90,00
4.4	Lingkungan permukiman kumuh (%)	10	7,6	7,2	6,8	6,4	6	6
4.5	Rumah layak huni (Unit)	570.154	600.000	610.000	620.000	635.000	650.000	650.000
5	Ketentraman, Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat							
5.1	Pembinaan terhadap Ormas/LSM/ OKP aktif	138	150	158	165	170	180	180



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.2	Pembinaan organisasi asing	5	5	5	5	5	5	5
5.3	Pembinaan partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah	12	12	12	16	16	16	16
5.4	Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah	15	14	13	12	12	11	11
5.5	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kalteng (nilai/predikat)	2,65 (cukup tangguh)	2,75 (cukup tangguh)	2,80 (cukup tangguh)	2,88 (cukup tangguh)	3,4 (tangguh)	3,6 (tangguh)	3,6 (tangguh)
5.6	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang)	-	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	10.500
5.7	Aparatur kesbangpol yang mampu mendeteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum (orang)	-	50	50	50	50	50	300
5.8	Kegiatan intelijen daerah dalam rangka deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum	-	3	3	3	3	3	3
5.9	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk ****	133	140	145	147	150	155	155
5.10	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	65	70	70	75	75	75	75
5.11	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	12	12	12	12	13	13	13
5.12	Penegakan Perda (buah)	3	5	7	9	10	12	12
5.13	Cakupan patroli petugas Satpol pp****	48	48	48	48	48	48	48
5.14	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang)	15.410	15.410	22.065	19.027	22.065	22.065	22.065
5.15	Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana (IRB) (%)	-	4	4	4	4	4	20
5.16	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalteng	-	-	1	-	-	-	1
6	Sosial							
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	4	4	5	5	5	6	6



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (Orang)	1.078	1.350	1.500	1.650	1.800	2.000	2.000
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)	174	184	194	204	214	224	224
6.4	Potensi dan Sumber Kesos (PSKS) yang mendapat Pembinaan	134	147	150	150	150	160	160
6.5	Jumlah Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KK)	120	200	250	250	250	250	1320
6.6	Jumlah PMKS yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inklusivitas (Orang)	1.560	1.580	1.625	1.630	1.680	1.780	9.855
II.	Pelayanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	172	128	106	84	62	50	50
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71.11	71.57	71.81	72.04	72.27	72.50	72.50
1.3	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	1.570	1.823	2.007	2.192	2.350	2.500	11.511
1.4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,54	4,50	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,49	10,41	10,88	11,36	11,83	12,30	12,30
2.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	16,78	21,58	23,59	25,60	27,61	29,62	29,62
2.3	Rasio KDRT	0,0306	0,0244	0,0213	0,0182	0,0151	0,012	0,012
2.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,53	0,30	0,23	0,15	0,08	0,00	0,00
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,55	53,06	54,09	55,12	56,15	57,18	57,18
2.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	123	100	100	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,90*	79,20	79,86	80,53	81,20	81,88	81,88
2.8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,33*	89,99	90,33	90,66	91,0	91,34	91,34
3	Pangan							
3.1	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	1	1	1	1	2	2	2
3.2	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	213.614	250.976	272.648	294.320	315.992	337.665	337.665
3.3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	34,65	39,68	41,63	43,58	45,54	47,50	47,50
3.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	33,33	40,90	44,84	48,77	52,71	56,65	56,65
4	Pertanahan							
4.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Ha)	37,60	60	70	80	90	100	450
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara (Jumlah kasus)	-	50	60	70	80	90	90
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,37	71,5	72	72,5	73	73,5	73,5
5.2	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Kabupaten/Kota)	14	14	14	14	14	14	14
5.3	Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH	14	14	14	14	14	14	14
5.4	Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)	6	7	7	8	8	9	9
5.5	Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup (%)	25	45	60	75	90	100	100
5.6	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kabupaten/kota)	14	14	14	14	14	14	14
5.7	IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)	12	25	30	37	42	50	50



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	80	81,71	86,29	90,86	95,43	100,00	100,00
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	54	71,43	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	57	70,29	77,71	85,14	92,57	100,00	100,00
6.4	Kepemilikan KTP (orang)	1.349.663	1.535.360	1.594.073	1.652.785	1.711.498	1.770.211	1.770.211
6.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	57	80	88	96	104	112	112
6.6	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Usia <17 Tahun (orang)	0	221.136	331.704	442.272	552.840	663.408	663.408
6.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Aparatur Desa Terlatih (Orang)	120	320	320	320	320	320	1.920
7.2	Anggota BPD Terlatih (Orang)	80	100	120	140	160	180	780
7.3	Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Terlatih (Orang)	788	566	586	596	626	626	626
7.4	PKK aktif (Unit)	1.428	1.716	1.718	1.720	1.722	1.724	1.724
7.5	Posyandu aktif (Unit)	2.210	2.231	2.235	2.240	2.245	2.250	2.250
7.6	LPMD Terlatih (Orang)	0	60	70	80	80	90	430
7.7	BUMDes Aktif (Unit)	30	130	130	130	130	130	741
7.8	Posyantek Aktif (Unit)	116	220	381	385	481	481	2.180
7.9	Lembaga Pengembangan Kawasan Pesisir Berbasis TTG (Unit)	0	20	20	20	20	20	120
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,80	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50
8.2	Rasio akseptor KB	77,91	79,70	80,60	81,49	82,39	83,29	83,29
8.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	376.606	382.023	394.756	403.585	412.413	425.000	425.000
8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	183.937	170.497	164.891	159.285	153.678	148.072	148.072
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	120.351.749	248.325	260.000	273.000	286.650	300.000	121.956.224
9.2	Load Factor Angkutan Jalan (%)	70	72	73	73	74	74	74
9.3	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	23.017	288	302	317	332	348	24.879



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.4	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (Unit)	203	3	3	4	4	4	224
9.5	Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada)	20	2	2	3	3	3	35
9.6	Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)	250	12	12	13	13	13	324
9.7	Jumlah Angkutan Sungai (Unit)	5.031	54	56	58	58	61	5.370
9.8	Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah)	15	1	1	2	2	2	24
9.9	Jumlah Bandara (Buah)	9	10	10	10	10	10	10
9.10	Jumlah Dermaga Sungai (Buah)	148	6	7	7	8	8	190
9.11	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	20	1	1	1	1	1	26
9.12	Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit)	22.867	23.317	23.559	23.813	24.080	24.360	24.360
9.13	Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari)	1	1	1	1	1	1	1
9.14	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	100.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9.15	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	2.173	346	363	382	400	420	4.414
9.16	Pemasangan Rambu Sungai (Unit)	2.542	400	400	400	400	400	4.942
9.17	Pemasangan Rambu SBNP (Unit)	120	2	2	3	3	3	135
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Desa dering/Telepon Pedesaan (Unit)	1.131	1.279	1.353	1.426	1.500	1.574	1.574
10.2	Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)	132	136	136	136	136	136	136
10.3	Warung masyarakat Informasi	0	-	1	1	1	1	1
10.4	Pusat Komunitas Kreatif (buah)	1	1	1	1	1	1	1
10.5	M-CAP (Mobile Capacity Acces Point)	1	1	1	1	1	1	1
10.6	M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit)	98	98	98	98	98	98	98
10.7	Data Center (buah)	1	1	1	1	1	1	1
10.8	Media Center (buah)	1	1	1	1	1	1	1
10.9	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,0001011	0,0001011	0,0001011	0,0001011	0,0001011	0,0001011	0,0001011



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.10	Jumlah surat kabar nasional/lokal	13	15	15	15	15	15	15
10.11	Jumlah penyiaran radio/TV local	66	66	66	66	66	66	66
10.12	Web site milik pemerintah daerah (buah)	15	22	24	26	28	30	30
10.13	Pameran/expo terkait Kominfo	-	1	1	1	1	1	1
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif (%)	73,03	78.78	79.89	81.00	82.11	83.21	83.21
11.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	299.979	300.440	301.185	301.935	302.682	303.442	304.116
11.3	Jumlah BPR/LKM (Unit)	243	278	302	315	327	355	369
11.4	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	298.979	318.332	323.170	328.008	332.846	337.685	337.685
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	473	528	550	573	595	618	618
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta Rupiah)	33.138.153,41	37.500.000	40.000.000	42.500.000	45.000.000	47.500.000	47.500.000
	PMDN dalam Milyar Rupiah	1.088.548,80	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000
	PMA dalam US \$ Ribu	27.992.647,91	32.500.000	35.000.000	37.500.000	40.000.000	42.500.000	42.500.000
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	32	39,82	41,90	43,99	46,08	48,16	48,16
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	28,52	47,69	57,55	67,42	77,28	87,15	87,15
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.1	Jumlah organisasi pemuda	62	65	66	66	67	67	67
13.2	Jumlah organisasi olahraga	42	38	44	41	45	41	272
13.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	35	26	35	34	35	34	216
13.4	Jumlah kegiatan olahraga	60	40	41	44	43	45	299
13.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	37	46	47	48	49	50	50
13.6	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	289	1.043	1.046	1.047	1.050	1.050	51.050



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Statistik							
14.1	Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka"	1	1	1	1	1	1	6
14.2	Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	2	2	2	2	2	2	12
15	Persandian							
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	2	2	3	3	3
16.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	3	3	3
16.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490	490	500	500	500	500	500
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan (eks)	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	145.000
17.2	Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600	6.900	6.900
17.3	Jumlah perpustakaan (Unit)	5	10	15	20	25	30	30
17.4	Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	100,00%	100,00%
17.5	Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	10.000	25.000	45.000	70.000	100.000	125.000	125.000
18	Kearsipan							
18.1	Jumlah SOPD Menerapkan Arsip secara Baku Sesuai Atandar Kearsipan	33	40	42	43	45	46	46
III.	Urusan Pilihan							
1	Kelautan dan Perikanan							
1.1.	Jumlah Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	68.693,7	85.173,3	97.276,4	110.842,4	119.709,8	125.322,0	125.322,0
1.2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	130.526,1	130.787,3	130.918,1	131.049,0	131.180,0	131.311,2	131.311,2
1.3.	Konsumsi ikan-(Kg/Kap/Tahun)	51,23	52,31	52,78	53,30	53,73	54,00	54,00
1.4.	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (Ton/Tahun)	28.510,15	31.378,4	31.849,1	32.390,4	33.038,3	34.450,0	34.450,0
1.5.	Peningkatan produksi benih ikan	55.620.000	58.820.000	60.420.000	62.020.000	63.620.000	65.220.000	65.220.000
1.6.	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	103,84	104,90	105,45	105,90	106,26	107,00	107,00
1.7	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	2,59	2,69	2,76	2,84	2,96	3,10	3,10



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.8	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (kasus)	7	4	4	4	5	5	5
1.9	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (%)	70	75	78	80	85	87	87
1.10	Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha/Tahun)	171.679	171.701	171.716	171.741	171.781	171.781	171.781
1.11	Luasan Kawasan Pesisir yang Direhabilitasi (Ha/Tahun)	2,5	5	7,5	10	10	15	15
2	Pertanian dan Peternakan							
2.1.	Luas tanam tanaman pangan							
2.1.1	Padi (Ha) :	276.431	309.839	314.373	318.997	325.167	328.518	328.518
	Padi sawah (Ha)	198.324	220.529	223.756	227.047	230.401	233.823	233.823
	Padi ladang (Ha)	78.107	89.310	90.618	91.950	94.766	94.695	94.695
2.1.2	Jagung (Ha)	6.072	3.408	3.458	3.508	3.560	3.613	3.613
2.1.3	Kedelai (Ha)	1.136	1.468	1.489	1.511	1.534	1.556	1.556
2.1.4	Kacang Tanah (Ha)	431	564	572	580	588	588	588
2.1.5	Kacang Hijau (Ha)	51	67	67	68	69	69	69
2.1.6	Ubi Kayu (Ha)	2.593	3.724	3.778	3.834	3.891	3.948	3.948
2.1.7	Ubi Jalar (Ha)	977	1.282	1.301	1.320	1.340	1.360	1.360
2.2.	Luas Panen tanaman pangan							
2.2.1	Padi (Ha) :	254.670	269.924	273.874	277.902	283.174	286.197	286.197
	Padi sawah (Ha)	183.416	198.476	201.380	204.342	207.361	210.441	210.441
	Padi ladang (Ha)	71.254	71.448	72.494	73.560	75.813	75.756	75.756
2.2.2	Jagung (Ha)	2.507	2.897	2.939	2.982	3.026	3.071	3.071
2.2.3	Kedelai(Ha)	1.052	1.174	1.191	1.209	1.227	1.245	1.245
2.2.4	Kacang Tanah (Ha)	465	479	486	493	500	500	500
2.2.5	Kacang Hijau (Ha)	52	57	57	58	59	59	59
2.2.6	Ubi Kayu (Ha)	3.031	3.165	3.211	3.259	3.307	3.356	3.356
2.2.7	Ubi Jalar (Ha)	1.049	1.090	1.106	1.122	1.139	1.156	1.156
2.3.	Produktivitas tanaman pangan							
2.3.1	Padi (ku/Ha)	35,07	37,34	38,28	39,04	39,60	40,02	40,02
	Padi sawah (Kwintal/Ha)	39,57	41,58	42,62	43,47	44,12	44,56	44,56



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Padi ladang (Kwintal/Ha)	23,50	25,59	26,23	26,75	27,25	27,42	27,42
2.3.2.	Jagung (Kwintal/Ha)	32,66	34,74	35,61	36,33	36,87	37,24	37,24
2.3.3.	Kedelai (Kwintal/Ha)	12,00	12,79	13,12	13,37	13,57	13,71	13,71
2.3.4.	Kacang Tanah (Kwintal/Ha)	11,26	12,03	12,33	12,58	12,78	13,10	13,10
2.3.5.	Kacang Hijau (Kwintal/Ha)	8,46	8,77	9,12	9,31	9,49	9,49	9,49
2.3.6.	Ubi Kayu (Kwintal/Ha)	150,81	160,82	164,85	168,11	170,64	172,35	172,35
2.3.7.	Ubi Jalar (Kwintal/Ha)	91,90	97,94	100,39	102,42	103,92	104,96	104,96
2.4	Produksi tanaman pangan							
2.4.1	Padi (Ton)	893.202	1.007.997	1.048.318	1.085.008	1.121.494	1.145.498	1.145.498
	Padi sawah (Ton)	725.755	825.181	858.189	888.225	914.872	937.744	937.744
	Padi ladang (Ton)	167.447	182.816	190.129	196.783	206.622	207.754	207.754
2.4.2.	Jagung (Ton)	8.189	10.064	10.467	10.833	11.158	11.437	11.437
2.4.3.	Kedelai (Ton)	1.262	1.617	1.700	2.000	2.400	2.800	2.800
2.4.4.	Kacang Tanah (Ton)	523	576	599	620	639	655	655
2.4.5.	Kacang Hijau (Ton)	44	50	52	54	56	56	56
2.4.6.	Ubi Kayu (Ton)	45.712	50.898	52.934	54.787	56.430	57.841	57.841
2.4.7.	Ubi Jalar (Ton)	9.640	10.676	11.103	11.492	11.837	12.133	12.133
2.5.	Luas Panen Tanaman Hortikultura							
2.5.1	Buah-Buahan (Pohon)	3.437.896	4.159.854	4.575.840	4.933.424	5.326.766	5.859.443	5.859.443
2.5.2	Sayuran (Ha)	11.014	13.327	14.660	15.790	16.869	17.954	17.954
2.5.3	Tanaman Hias (m2)	17.718	20.539	21.093	22.703	23.372	24.895	24.895
2.5.4.	Tanaman Obat (m2)	709.986	859.083	944.991	1.039.491	1.143.440	1.257.784	1.257.784
2.6.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura							
2.6.1	Buah-Buahan (Ku)	1.152.202	1.394.164	1.483.590	1.548.950	1.607.846	1.675.632	1.675.632
2.6.2	Sayuran (Ku)	314.831	380.946	419.040	460.944	507.038	557.742	557.742
2.6.3.	Tanaman Hias (Tangkai)	50.255	57.708	61.480	65.628	68.191	73.010	73.010
2.6.4	Tanaman Obat (Kg)	1.467.206	1.660.119	1.746.131	1.838.745	1.911.619	2.027.782	2.027.782
2.7.	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura							
2.7.1	Buah-Buahan (Ku/Pohon)	0,34	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29
2.7.2	Sayuran (Ku/Ha)	28,58	28,58	28,58	29,19	30,06	31,06	31,06
2.7.3	Tanaman Hias (Tangkai/m2)	2,84	2,81	2,91	2,89	2,92	2,93	2,93
2.7.4	Tanaman Obat (Kg/m2)	2,07	1,93	1,85	1,77	1,67	1,61	1,61
2.8	Populasi Ternak							
2.8.1	Sapi Potong (Ekor)	71.445	77.976	83.117	88.536	94.496	100.638	100.638



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.8.2	Kerbau (Ekor)	11.463	12.799	13.333	13.881	14.450	15.173	15.173
2.8.3	Kambing (Ekor)	43.368	47.807	49.371	51.010	52.730	54.049	54.049
2.8.4	Domba (Ekor)	1.502	1.829	1.922	2.020	2.123	2.145	2.145
2.8.5	Babi (Ekor)	190.016	218.355	228.627	239.296	250.500	263.025	263.025
2.8.6	Ayam Buras (Ekor)	2.512.553	3.768.393	3.882.319	3.999.224	4.074.886	4.156.384	4.156.384
2.8.7.	Ayam Ras Petelur (Ekor)	111.776	187.089	214.621	266.169	392.394	412.014	412.014
2.8.8.	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	7.902.412	7.978.509	8.403.039	8.778.250	9.173.067	9.631.700	9.631.700
2.8.9	Itik (Ekor)	255.056	321.519	331.802	342.468	353.512	362.350	362.350
2.9	Jumlah Produksi Daging Ternak							
2.9.1	Sapi Potong (Ton)	4.061,07	4.211	4.369	4.578	4.818	4.933	4.933
2.9.2	Kerbau (Ton)	67,15	59,57	58,00	62,92	64,68	66,21	66,21
2.9.3	Kambing (Ton)	343,99	242,50	251,71	261,45	271,71	278,00	278,00
2.9.4	Domba (Ton)	8,83	6,88	7,22	7,58	7,96	8,15	8,15
2.9.5	Babi (Ton)	2.074,23	1.615,85	1.662,21	1.738,29	1.819,15	1.862,00	1.862,00
2.9.6	Ayam Buras (Ton)	1.903,26	2.149,63	2.267,87	2.394,62	2.531,95	2.592,00	2.592,00
2.9.7	Ayam Ras Petelur (Ton)	34,58	16,60	17,38	18,23	18,85	19,30	19,30
2.9.8	Ayam Ras Pedaging (Ton)	11.487,45	11.081,10	11.658,82	12.277,07	12.924,10	13.570,00	13.570,00
2.9.9	Itik (Ton)	139,69	151,03	158,40	166,13	174,76	178,90	178,90
2.10	Telur							
2.10.1	Ayam Buras (Kg)	2.135.670	3.163.540	3.279.745	3.406.030	3.535.992	3.619.795	3.619.795,01
2.10.2	Ayam Ras Petelur (Kg)	1.402.789	2.173.195	2.575.819	3.074.312	3.692.455	3.877.078	3.877.077,83
2.10.3	Itik (Kg)	1.499.602	1.864.438	1.918.621	1.974.565	2.032.333	2.080.500	2.080.500
2.11	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	2,33	2,42	2,46	2,53	2,60	2,71	2,71
2.12.	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,59	1,72	1,78	1,83	1,87	1,92	1,92
2.13	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%)	4,43	5,75	5,98	6,47	6,78	7,00	7,00
2.14	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	- 2,6	3	3	3	3	3	3
2.15	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	13,41	13,50	13,55	13,60	13,75	13,80	13,80
2.16	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	-	13	13	13	13	13	13



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Pariwisata							
3.1	Jumlah wisatawan (orang)	373.000 (2016)	433.000	493.000	533.000	613.000	673.000	673.000
3.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (%)	1,50	1,93	2,07	2,21	2,36	2,50	2,50
3.3	Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah	54,84	56,22	57,68	58,15	59,62	60,00	60,00
4	Perdagangan							
4.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	11,64	11,88	12,05	12,22	12,39	12,50	12,50
4.2	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	990.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000	1.200.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
4.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP	6.296	6.750	7.000	7.250	7.500	7.750	7.750
5	Kehutanan							
5.1.	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen)	123,81	85	90	95	100	100	100
5.2.	Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat Baik (Persen)	39,65	46,55	50,00	53,45	56,90	60,34	60,34
5.3.	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan (Persen)	0,69	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	5,34
5.4.	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % per tahun (Jumlah)	4.142	2.592	2.074	1.660	1.328	1.063	1.063
5.5.	Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20 % per tahun (Jumlah)	54	32	26	21	17	14	14
5.6.	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah (Persen)	18,18	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	72,78



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.7.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)	1	1	1	1	2	2	2
5.8.	Pencegahan, pengendalian dan penindakan <i>illegal logging</i> (frekuensi pengamanan hutan)	2	2	3	3	3	4	4
5.9.	Penghijauan dan reboisasi (jumlah batang pohon bibit)	36.000	51.500	57.500	62.500	68.500	73.500	73.500
5.10	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)	40	50	60	60	70	75	75
6	Perkebunan							
6.1.	Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)	19	17,00	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6.2.	Penerimaan devisa ekspor per tahun dari komoditas perkebunan (US\$ Juta)	112	100	105	105	110	110	110
6.3.	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)	7	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00
6.4.	peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US\$/KK/Tahun)	600	600	650	650	700	700	700
6.5.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	31.400	20.600	20.700	20.700	20.800	20.800	20.800
6.6.	Peningkatan pertumbuhan sub sektor sektor perkebunan (%)	7,00	5,80	6,00	6,15	6,30	6,50	6,50
6.7.	Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)	3	4	5	5	6	6	6
6.8.	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun)	150	150	150	150	175	175	175
7	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,15	16,50	16,80	17,10	17,50	18,00	18,00
7.2	Pertumbuhan Industri, (unit)	5.164	5.539	5.754	5.969	6.184	6.398	6.398



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.3	Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	16.65	17.912	18.375	18.839	19.303	20.000	20.000
8	Ketransmigrasian							
8.1	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	0	400	500	750	800	1.000	3.600
IV. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	6
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	6
1.3	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	6
2	SETDA (Administrasi Pemerintahan)							
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	77,23	80	82	84	86	88	88
2.2	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	B	B	BB	BB	BB	A	A
2.3	Nilai Inovasi Pelayanan Publik	A	A	A	A	A	A	A
2.4	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	47,52	65	70	75	80	85	85
2.5	Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (orang)	506	530	530	530	530	530	530
2.6	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah	9	9	10	10	10	10	10
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.	Kemampuan Ekonomi							
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan							
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	920.786	1.075.272	1.145.386	1.215.500	1.285.614	1.355.728	1.355.728
2	Pertanian							
2.1	Nilai Tukar Petani/ NTP (%)	97,74	102,75	103,5	103,5	106	107,5	107,5



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Target Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	13,70	15,1	15,86	16,65	17,48	18,35	18,35
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang)	157.653.570/ 12.125.442	158.500.000 /12.750.000	159.000.000 /13.000.000	159.500.000 /13.250.000	160.000.000 /13.500.000	161.000.000 /13.750.000	161.000.000 /13.750.000
2	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	72	80	85	90	95	100	100
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan							
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	155	190	220	250	280	300	300
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	35	42	45	48	50	55	55
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Buah)	243	255	261	268	275	282	282
3.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (Buah)	317	393	401	409	417	425	425
4	Komunikasi dan Informatika							
4.1	Ketersediaan daya listrik (MW)	175	400	500	600	700	1000	1000
4.2	Rasio ketersediaan tenaga listrik (%)	40,2	90	100	105	110	130	130
4.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	69,8	75,5	79,5	83,5	87,5	92,5	92,5
4.4	Rasio desa berlistrik (%)	74,8	81,8	85,3	89,3	94,3	100	100
4.5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	76.07	84.00	86.00	89.00	92.00	95.00	95.00
III.	Iklim Berinvestasi							
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat							
1.1	Angka kriminalitas	15.71	12,38	12,30	12,00	11,85	10,50	10,50
IV.	Sumber Daya Manusia							
1	Ketenagakerjaan							
1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	11.99	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	20.00
1.2	Rasio ketergantungan (%)	46.21	45.06	44.36	43.67	42.97	42.28	42.28



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang, yang harus dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Periodisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah ini disesuaikan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur terpilih, yakni 2016-2021.

Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun penyusunan rencana lima tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021.

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.



Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, penyusunan RKPDP Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Selanjutnya RKPDP Tahun 2022 merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD diindikasikan oleh sejauhmana berbagai program (*outcome*) dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (*impact*) RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ini harus dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- 1) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPDP setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2021. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- 2) Gubernur Kalimantan Tengah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2016-2021 kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
- 4) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD dengan periode yang sama, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;



- 5) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini dengan sebaik-baiknya.
- 6) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.
- 7) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.
- 8) Pengendalian dan evaluasi RPJMD antara lain dilaksanakan dengan menyusun rencana aksi guna mencapai indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Bab IX. Dokumen rencana aksi tersebut disusun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, yang disusun oleh Perangkat Daerah pengampu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Tata cara penyusunan rencana aksi pencapaian target indikator kinerja akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Daerah.
- 9) Berkaitan dengan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah dan nasional, beberapa hal yang perlu dipedomani sebagai berikut:
 - i. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan nasional, melalui **penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019**. Hal ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dukungan tersebut mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan, sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antarwilayah.
 - ii. Penyesuaian tersebut dilaksanakan berdasarkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada hasil, dengan **pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial** dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antarbagian urusan pemerintahan daerah, yakni dengan prinsip **money follow program** yang mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan prioritas nasional dan daerah.

- iii. Terkait penyalarsan RPJMD dengan RPJMN, beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- a) penyalarsan isu strategis pembangunan daerah dengan nasional;
 - b) penyalarsan misi/sub misi, tujuan, sasaran, indikator pembangunan daerah dengan nasional
 - c) penyalarsan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional
 - d) penyalarsan program daerah dengan prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas berdasarkan indikator dan pembagian urusan pemerintahan
 - e) penyalarsan kerangka pendanaan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional
 - f) penyalarsan indikasi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis nasional
- 10) Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan kabupaten/kota.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN